



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi | Telp. (0283) 491764 - 491765

Kode Pos 52417 | website : [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);



19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana I-5 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110 ).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

### Pasal 2

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

### Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Tegal 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN  
2018

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  
TAHUN 2018

BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal

2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR .....

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-4
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya .....	I-5
1.4. Kaidah Pelaksanaan .....	I-6
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD .....	I-6
1.6. Maksud dan Tujuan .....	I-7
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....	II-1
3.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II-1
3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Tegal Tahun Tahun 2016 Dan Realisasi Rpjmd Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 .....	II-85
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan ...	III-6
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016....	IV-1
4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-52
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	V-1
5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	V-11
5.3. Urusan Pilihan .....	V-21
5.4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.....	V-25
BAB VI PENUTUP	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tegal .....	II-1
Tabel 2.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kab. Tegal .....	II-4
Tabel 2.3.	Penduduk Berdasarkan Usia .....	II-5
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-5
Tabel 2.5.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal .....	II-8
Tabel 2.6.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal .....	II-10
Tabel 2.7.	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	II-12
Tabel 2.8.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	II-14
Tabel 2.9.	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha .....	II-15
Tabel 2.10.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal.....	II-17
Tabel 2.11.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru Tahun 2012-2016 .....	II-18
Tabel 2.12.	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2011-2015 .....	II-21
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	II-22
Tabel 2.14.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	II-22
Tabel 2.15.	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2011-2015 .....	II-23
Tabel 2.16.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2016 .....	II-24
Tabel 2.17.	Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-25
Tabel 2.18.	Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-26
Tabel 2.19.	Rasio Guru per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-26
Tabel 2.20.	Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-27
Tabel 2.21.	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini .....	II-27

Tabel 2.22.	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-28
Tabel 2.23.	Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-29
Tabel 2.24.	Presentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Tegal .....	II-30
Tabel 2.25.	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal .....	II-31
Tabel 2.26.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tegal .....	II-31
Tabel 2.27.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk .....	II-32
Tabel 2.28.	Jumlah Dokter di Kabupaten Tegal.....	II-33
Tabel 2.29.	Presentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan .....	II-32
Tabel 2.30.	Presentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-34
Tabel 2.31.	Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-35
Tabel 2.32.	Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Tegal.....	II-35
Tabel 2.33.	Jumlah Rumah Berjamban di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-37
Tabel 2.34.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-37
Tabel 2.35.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kab. Tegal Tahun 2011-2016.....	II-38
Tabel 2.36.	Presentase Luas Permukiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-39
Tabel 2.37.	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-40
Tabel 2.38.	Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-41
Tabel 2.39.	Rasio Jumlah Satpol PP di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-41
Tabel 2.40.	Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-42
Tabel 2.41.	Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-42
Tabel 2.42.	Jumlah Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial dan Kebencanaan yang ditangani di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-43
Tabel 2.43.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Baru di Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2015.....	II-44
Tabel 2.44.	Penduduk Usia Produktif di Kab. Tegal Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2015 .....	II-45
Tabel 2.45.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015.....	II-46
Tabel 2.46.	Jumlah Pekerja Perempuan Kabupaten Tegal yang Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-47



Tabel 2.47.	Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-47
Tabel 2.48.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-48
Tabel 2.49.	Ketersediaan Pangan Utama di Kab. Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-49
Tabel 2.50.	Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2012-2015.....	II-51
Tabel 2.51.	Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat Kabupaten Tegal Tahun 2012-2015.....	II-51
Tabel 2.52.	Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tegal Tahun 2015 .....	II-54
Tabel 2.53.	Jumlah Plasma Nutfah dan Terumbu Karang di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016.....	II-54
Tabel 2.54.	Persentase Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-55
Tabel 2.55.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-55
Tabel 2.56.	Jumlah Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016. ....	II-56
Tabel 2.56.	Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 . ....	II-57
Tabel 2.57.	Kelompok Binaan PKK Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-58
Tabel 2.58.	Jumlah LSM Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-58
Tabel 2.60.	Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-59
Tabel 2.61.	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-59
Tabel 2.62.	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-60
Tabel 2.63.	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2014.....	II-60
Tabel 2.64.	Jumlah Uji KIR Angkuatn Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.	II-61
Tabel 2.65.	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-61
Tabel 2.66.	Presentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016.....	II-62
Tabel 2.67.	Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kab. Tegal Tahun 2012-2016. ....	II-62
Tabel 2.68.	Jumlah BPR/LKM Non Koperasi di Kab. Tegal Tahun 2012-2016.....	II-63
Tabel 2.69.	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kab. Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-63
Tabel 2.70.	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kab. Tegal Tahun 2011-2015.....	II-63

Tabel 2.71.	Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-64
Tabel 2.72.	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kab. Tegal Tahun 2012-2016.....	II-65
Tabel 2.73.	Urusan Kebudayaan di Kab. Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-65
Tabel 2.74.	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-66
Tabel 2.75.	Pengelolaan Arsip secara Baku di Kab. Tegal Tahun 2011-2015.....	II-66
Tabel 2.76.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2015.....	II-67
Tabel 2.77.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014.....	II-67
Tabel 2.78.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-68
Tabel 2.79.	Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014.....	II-69
Tabel 2.80.	Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-69
Tabel 2.81.	Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-70
Tabel 2.82.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-72
Tabel 2.83.	Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 .....	II-73
Tabel 2.84.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dalam Hutan Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-73
Tabel 2.85.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014.....	II-74
Tabel 2.86.	Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2015.....	II-75
Tabel 2.87.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014 .....	II-75
Tabel 2.88.	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2015.....	II-76
Tabel 2.89.	Kontribusi Sektor Perdagangan(Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014 .....	II-77
Tabel 2.90.	Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2016.....	II-78
Tabel 2.91.	Total Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-78
Tabel 2.92.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2016 .....	II-79
Tabel 2.93.	Jumlah Transmigran Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	II-79

Tabel 2.94.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2016.....	II-80
Tabel 2.95.	Jumlah Peserta Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2016.....	II-81
Tabel 2.96.	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-81
Tabel 2.97.	Persentase Rumah Tangga Kabupaten Tegal Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Tahun 2011-2014.....	II-82
Tabel 2.98.	Persentase Jenis Pengeluaran Per Kapita per Bulan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2011-2014 .....	II-83
Tabel 2.99.	Nilai Indeks Variabel NTP Gabungan Tahun 2012-2015 Kab. Tegal .....	II-84
Tabel 2.100.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-84
Tabel 2.101.	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015.....	II-85
Tabel 2.102.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pendidikan.....	II-85
Tabel 2.103.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kesehatan .....	II-91
Tabel 2.104.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum..	II-98
Tabel 2.105.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perumahan Rakyat	II-101
Tabel 2.106.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Penataan Ruang ....	II-103
Tabel 2.107.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-104
Tabel 2.108.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perhubungan.....	II-106
Tabel 2.110.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Lingkungan Hidup	II-108
Tabel 2.111.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pertanahan .....	II-113
Tabel 2.112.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-114
Tabel 2.113.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-115
Tabel 2.114.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II-122
Tabel 2.116.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Sosial .....	II-125
Tabel 2.117.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Tenaga Kerja .....	II-128
Tabel 2.118.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	II-130
Tabel 2.119.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Penanaman Modal	II-131
Tabel 2.120.	Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kebudayaan .....	II-133

Tabel 2.121. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pemuda dan Olahraga .....	II-134
Tabel 2.122. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	II-136
Tabel 2.123. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II-139
Tabel 2.124. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Ketahanan Pangan	II-151
Tabel 2.125. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	II-152
Tabel 2.126. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Statistik .....	II-156
Tabel 2.127. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kearsipan .....	II-157
Tabel 2.128. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Komunikasi dan Informasi .....	II-158
Tabel 2.129. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perpustakaan .....	II-159
Tabel 2.130. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pertanian .....	II-161
Tabel 2.131. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kehutanan .....	II-165
Tabel 2.132. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral .....	II-167
Tabel 2.133. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pariwisata .....	II-168
Tabel 2.134. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kelautan dan Perikanan .....	II-169
Tabel 2.135. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perdagangan .....	II-171
Tabel 2.136. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perindustrian .....	II-174
Tabel 2.137. Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Transmigrasi .....	III-175
Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Tegal atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) .....	III-2
Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Tegal atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) .....	III-3
Tabel 3.3. Struktur PDRB Kabupaten Tegal Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2012-2016 .....	III-4
Tabel 3.4. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 .....	III-5
Tabel 3.5. Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 .....	III-8
Tabel 3.6. Perhitungan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tegal Tahun 2018 .....	III-5

Tabel 3.7.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	III-12
Tabel 3.8.	Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	III-12
Tabel 3.9.	Alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	III-13
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	IV-16
Tabel 4.2.	Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional.....	IV-61
Tabel 4.3.	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Tahun 2018.....	IV-66
Tabel 4.4.	Keterkaitan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 .....	IV-82
Tabel 4.5.	Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 .....	IV-97
Tabel 4.6.	Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2018.....	IV-103
Tabel 4.7.	Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2018.....	IV-116
Tabel 4.8.	Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-125
Tabel 4.9.	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan .....	IV-135
Tabel 4.10.	Keterkaitan antara Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan Prioritas Program Daerah.....	IV-137
Tabel 4.11.	Inovasi Kebijakan Pembangunan .....	IV-139
Tabel 5. 1.	Rencana Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju 2019 .....	V-29
Tabel 5. 2.	Rencana Kegiatan Belanja Langsung Tidak Langsung Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju 2019 .....	V-620

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	I-3
Gambar 2.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016.....	II-16
Gambar 2.2. Indeks Gini Kabupaten Tegal .....	II-18
Gambar 2.3. Angka Partisipasi Murni .....	II-20
Gambar 2.4. Angka Partisipasi Kasar .....	II-20
Gambar 2.5. Presentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011-2014.....	II-21
Gambar 2.6. Pengiriman Peserta Diklatpim .....	II-145
Gambar 2.7. Jumlah Jabatan Fungsional Baru .....	II-150
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal 2012-2016 .....	II-18
Gambar 3.2. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	II-18
Gambar 4.1. Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018.....	IV-63
Gambar 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018.....	IV-64
Gambar 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2018 .....	IV-65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dari tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD diseluruh jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD tahun 2018.

RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD, serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 tema pokok yang diusung dalam RPJMD 2014-2019 sesuai dengan tahapan dalam RPJPD Kabupaten Tegal tahun 2005-2025 yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah ***Dinamisasi Sistem Inovasi***.

Untuk itu tema yang dibangun dalam RKPD Kabupaten Tegal 2018 harus selaras dengan Tema Pokok dalam RPJMD. Penguatan ekonomi kewilayahan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2018, sebagai kelanjutan atas prioritas-prioritas pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten Tegal yaitu:

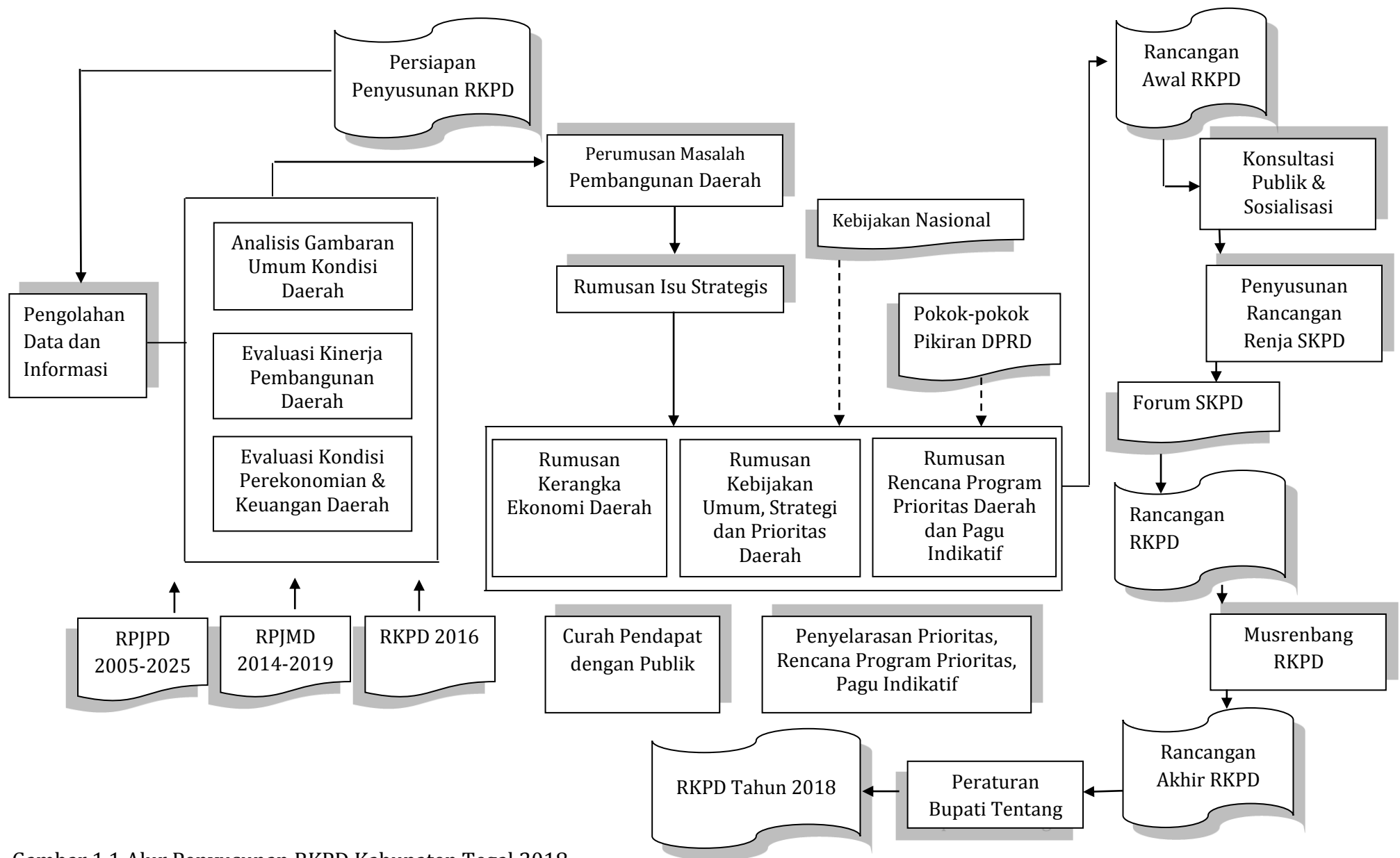
**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera**

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” yang memberikan penekanan pada capaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal maka dalam RKPD Kabupaten Tegal 2018 diarahkan **Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar dan akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan didukung fasilitas infrastruktur publik yang mantap.**

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi maka yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tegal adalah :

1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah yang didukung penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Aktualisasi pengetahuan tradisional dalam kehidupan masyarakat.
3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan;
5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan;
6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah;
7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan;
8. Aktualisasi pengetahuan tradisional dalam kehidupan masyarakat;
9. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama;
10. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya;
11. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa;
12. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018 disusun sesuai dengan tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2018

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018;
  22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana I – 5 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD. Di sisi lain dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen RPJMD sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD.

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 dengan penekanan pada pencapaian visi, misi Bupati Tegal yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2018 di Kabupaten Tegal. Untuk itu RKPD Kabupaten Tegal

tahun 2018 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD tahun 2018 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2018 terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2018 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun 2018.

#### **1.4 Kaidah Pelaksanaan**

1. RKPD Tahun 2018 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan.
2. Mendasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

#### **1.5 Sistematika Penyusunan RKPD**

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat uraian penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan,



realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggungjawab. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.**

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk tahun 2018.

### **BAB IV PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2009 – 2014 yang tertuang dalam program dan kegiatan dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta rumusan program dan kegiatan tahun 2018.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2018 baik yang dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

## **1.6 Maksud dan Tujuan**

Secara umum maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal bagi para pemangku kepentingan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2018;
2. Landasan arah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah melalui program dan kegiatan antar SKPD di semua tingkatan pemerintahan;
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Tegal.
6. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal tahun 2018.
7. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Pembagian kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2016**

Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
01. Margasari	8.684	13
02. Bumijawa	8.855	18
03. Bojong	5.852	17
04. Balapulang	7.491	20
05. Pagerbarang	4.300	13
06. Lebaksiu	4.096	15
07. Jatinegara	7.962	17
08. Kedungbanteng	8.762	10
09. Pangkah	3.551	23
10. Slawi	1.363	10 (5 desa, 5 kelurahan)
11. Dukuhwaru	2.658	10
12. Adiwerna	2.386	21
13. Dukuhturi	1.747	18
14. Talang	1.837	19
15. Tarub	2.682	20
16. Kramat	3.849	20 (19 desa, 1 kelurahan)
17. Suradadi	5.573	11
18. Warureja	6.231	12
<b>Jumlah</b>	<b>87.879</b>	<b>281 desa / 6 kelurahan</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2017

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal diantaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

### **2.1.2 ASPEK DEMOGRAFIS**

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 diproyeksikan adalah 1.429.386 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 ha, dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2016 adalah  $\pm 1.626$  jiwa/km<sup>2</sup>. sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah danKepadatan Penduduk Per Kecamatan**  
**DiKabupaten Tegal Pada Tahun2016**

Kecamatan	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
01. Margasari	86,84	95.838	1.104
02. Bumijawa	88,55	84.549	955
03. Bojong	58,52	62.072	1.061
04. Balapulang	74,91	82.040	1.095
05. Pagerbarang	43,00	52.684	1.225
06. Lebaksiu	40,95	83.952	2.050
07. Jatinegara	79,62	54.133	680
08. Kedungbanteng	87,62	40.440	461
09. Pangkah	35,51	101.064	2.846
10. Slawi	13,63	71.795	5.267
11. Dukuhwaru	26,58	59.677	2.245
12. Adiwerna	23,86	119.751	5.019
13. Dukuhhuri	17,48	89.029	5.093
14. Talang	18,37	101.558	5.528
15. Tarub	26,82	78.266	2.918
16. Kramat	38,49	110.591	2.873
17. Suradadi	55,73	81.623	1.465
18. Warureja	62,31	60.324	968
<b>2 0 1 6</b>	<b>878,79</b>	<b>1.429.386</b>	<b>1.626</b>
<b>2 0 1 5</b>	<b>878,79</b>	<b>1.424.890</b>	<b>1.621</b>
<b>2 0 1 4</b>	<b>878,79</b>	<b>1.420.132</b>	<b>1.616</b>
<b>2 0 1 3</b>	<b>878,79</b>	<b>1.415.009</b>	<b>1.610</b>
<b>2 0 1 2</b>	<b>878,79</b>	<b>1.421.001</b>	<b>1.617</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 945.509 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 483.877. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependencyratio) mencapai 51,18 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 51 penduduk tidak produktif, sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
**Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2012-2016**

Usia	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 4	131.422	124.326	131.184	124.234	127.359
5 - 9	129.357	121.823	130.506	125.050	130.038
10 - 14	140.840	120.519	129.575	129.197	132.020
15 - 19	126.507	116.217	128.175	102.001	122.982
20 - 24	105.095	94.062	113.861	86.494	112.441
25 - 29	111.576	125.951	103.983	117.547	107.145
30 - 34	116.328	126.979	109.998	118.285	106.826
35 - 39	107.048	117.498	106.628	107.324	105.616
40 - 44	95.390	109.572	93.223	105.301	93.835
45 - 49	86.599	98.700	87.375	92.621	87.240
50 - 54	77.174	90.017	80.301	82.794	82.826
55 - 59	61.682	61.715	66.021	70.648	70.870
60 - 64	45.883	38.257	48.733	46.182	55.728
65 +	86.100	73.775	90.569	117.202	94.460
<b>Jumlah</b>	<b>1.421.001</b>	<b>1.415.009</b>	<b>1.420.132</b>	<b>1.424.890</b>	<b>1.429.386</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2017

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 adalah 1.429.386 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 710.513 jiwa dan perempuan 718.873 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,84. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2012-2016 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
1. Margasari	47.501	48.337	95.838	98,27
2. Bumijawa	42.160	42.389	84.549	99,46
3. Bojong	30.168	31.904	62.072	94,56
4. Balapulang	40.547	41.493	82.040	97,72
5. Pagerbarang	26.136	26.458	52.684	98,45
6. Lebaksiu	40.936	43.016	83.952	95,16
7. Jatinegara	26.770	27.363	54.133	97,83
8. Kedungbanteng	20.307	20.133	40.440	100,86
9. Pangkah	50.602	50.462	101.064	100,28
10. Slawi	35.207	36.588	71.795	96,23
11. Dukuhwaru	29.424	30.253	59.677	97,26
12. Adiwerna	60.130	59.621	119.751	100,85
13. Dukuhturi	44.763	44.266	89.029	101,12
14. Talang	50.949	50.609	101.558	100,67
15. Tarub	39.358	38.908	78.266	101,16
16. Kramat	54.738	55.853	110.591	98,00
17. Suradadi	40.648	40.975	81.623	99,20
18. Warureja	30.169	30.155	60.324	100,05
<b>2016</b>	<b>710.513</b>	<b>718.873</b>	<b>1.429.386</b>	<b>98,84</b>
<b>2015</b>	<b>708.316</b>	<b>716.574</b>	<b>1.424.890</b>	<b>99,00</b>
<b>2014</b>	<b>706.001</b>	<b>714.131</b>	<b>1.420.132</b>	<b>98,86</b>
<b>2013</b>	<b>703.494</b>	<b>711.515</b>	<b>1.415.009</b>	<b>98,87</b>
<b>2012</b>	<b>706.171</b>	<b>714.830</b>	<b>1.421.001</b>	<b>98,87</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017



### 2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### 1. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 27.727.792,98 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2016 mencapai Rp 21.265.717,23 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthur, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah— serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstarktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

**Tabel 2.5**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)**

No	Sektor	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	3.186.423,80	16,99	3.468.079,63	16,7	3.411.486,14	14,89	3.869.869,62	15,13	4.114.690,91	14,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	732.660,42	3,91	794.613,80	3,83	1.025.944,03	4,48	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5.703.933,79	30,41	6.554.374,66	31,56	7.453.897,72	32,53	8.496.555,92	33,22	9.269.703,44	33,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13.634,29	0,07	14.272,17	0,07	14.773,50	0,06	15.516,37	0,06	16.334,93	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	9.212,93	0,05	9.004,16	0,04	9.484,63	0,04	9.922,55	0,04	10.137,01	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.464.548,79	7,81	1.557.777,79	7,5	1.774.421,40	7,74	1.935.916,03	7,57	2.101.862,50	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.160.619,53	16,85	3.423.526,04	16,49	3.682.696,94	16,07	3.999.444,07	15,64	4.276.012,12	15,42
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	464.335,17	2,48	512.243,17	2,47	598.708,65	2,61	673.981,93	2,63	743.551,72	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	786.095,88	4,19	844.799,13	4,07	949.107,57	4,14	1.069.660,33	4,18	1.179.647,19	4,25
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	521.047,92	2,78	553.765,22	2,67	600.478,85	2,62	645.062,14	2,52	708.874,41	2,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	459.825,89	2,45	489.698,89	2,36	534.264,72	2,33	593.103,79	2,32	646.373,64	2,33

No	Sektor	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	315.344,41	1,68	331.638,13	1,6	370.106,44	1,62	409.786,78	1,60	452.379,95	1,63
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	68.609,68	0,37	80.845,19	0,39	89.163,90	0,39	103.454,47	0,39	114.790,86	0,41
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	467.582,15	2,49	497.798,49	2,4	534.057,68	2,33	583.200,27	2,28	618.446,11	2,23
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	867.566,41	4,63	1.032.184,00	4,97	1.171.260,42	5,11	1.288.282,96	5,04	1.420.096,19	5,12
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	149.174,81	0,8	162.101,67	0,78	186.174,35	0,81	198.743,34	0,78	215.363,43	0,78
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	386.144,28	2,06	438.870,06	2,11	510.444,00	2,23	546.165,87	2,13	586.514,11	2,12
	<b>Total</b>	<b>18.756.760,13</b>	<b>100</b>	<b>20.765.592,21</b>	<b>100</b>	<b>22.916.470,94</b>	<b>100</b>	<b>25.577.284,21</b>	<b>100</b>	<b>27.727.792</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Tahun 2017

**Tabel 2.6.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012- 2016 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)**

No	Sektor	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai	%	Nilai	Nilai	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2.835.913,46	16,77	2.878.663,32	15,95	2.647.364,02	13,97	2.831.399,07	14,93	2.953.344,86	13,80
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	691.859,63	4,09	733.207,60	4,06	782.937,77	4,13	794.797,71	4,19	848.474,09	3,99
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.863.890,30	28,76	5.478.580,85	30,35	5.994.165,58	31,62	6.314.825,65	33,31	6.802.682,83	31,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13.293,41	0,08	14.264,96	0,08	14.664,27	0,08	14.623,63	0,08	14.677,59	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8.978,50	0,05	8.918,24	0,05	9.066,72	0,05	9.294,84	0,05	9.413,22	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.359.733,28	8,04	1.418.500,50	7,86	1.483.094,95	7,82	1.564.698,24	8,25	1.648.467,47	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.032.317,47	17,93	3.167.242,71	17,54	3.333.113,77	17,58	3.468.214,13	18,29	3.648.221,49	17,16
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	462.832,73	2,74	505.815,32	2,8	552.825,09	2,92	600.269,73	3,17	645.314,42	3,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	774.271,92	4,58	791.786,17	4,39	846.713,92	4,47	907.506,46	4,79	983.764,89	4,63

No	Sektor	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai	%	Nilai	Nilai	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	534.810,64	3,16	583.970,08	3,23	665.456,39	3,51	692.670,72	166,55	745.335,96	3,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	389.531,55	2,3	397.941,26	2,2	407.637,25	2,15	442.095,37	2,33	473.875,08	2,23
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	308.104,99	1,82	320.938,30	1,78	340.514,94	1,8	340.514,94	1,80	393.993,84	1,85
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	63.758,08	0,38	71.113,47	0,39	76.073,96	0,4	76.873,96	0,41	91.048,23	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	404.498,75	2,39	412.744,48	2,29	413.494,01	2,18	415.894,01	2,19	450.068,43	2,12
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	666.065,98	3,94	725.443,05	4,02	795.930,56	4,2	795.930,56	4,20	931.281,14	4,38
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	129.523,47	0,77	136.904,74	0,76	149.536,60	0,79	148.536,60	0,78	166.751,02	0,78
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	372.865,60	2,2	407.570,03	2,26	443.165,91	2,34	443.165,91	2,34	477.002,67	2,24
	<b>Total</b>	<b>16.912.249,74</b>	<b>100</b>	<b>18.053.605,08</b>	<b>100</b>	<b>18.955.755,71</b>	<b>100</b>	<b>18.958.363,83</b>	<b>100</b>	<b>21.265.717,23</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Tahun 2017

## 2. Struktur Ekonomi PDRB Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, dan kategori Jasa Pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

**Tabel 2.7**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	16,99	16,70	14,89	15,13	14,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,91	3,83	4,48	4,45	4,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	30,41	31,56	32,53	33,22	33,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,81	7,50	7,74	7,57	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,85	16,49	16,07	15,64	15,42
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2,48	2,47	2,61	2,64	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,19	4,07	4,14	4,18	4,25
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,78	2,67	2,62	2,52	2,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,45	2,36	2,33	2,32	2,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,68	1,60	1,62	1,60	1,63
,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,37	0,39	0,39	0,40	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,49	2,40	2,33	2,28	2,23
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,63	4,97	5,11	5,04	5,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,80	0,78	0,81	0,78	0,78
S,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,06	2,11	2,23	2,14	2,12
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,37 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategorilainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategoriJasa Perusahaan mencatat sebesar 8,43 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,93 persen, kategoriJasa Lainnya sebesar 4,37 persen, kategori Informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,75 persen, kategoriReal Estat sebesar 7,83 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,19 persen, kategori Konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori Pengadaan listrik dan Gas sebesar 0,37 persen, kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,40 persen, kategoriJasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen, kategoriPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,27 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,96 persen.



**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,90	1,51	4,30	2,78	3,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,92	5,98	6,17	2,10	6,75
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,57	12,57	8,13	6,66	7,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	9,53	7,31	4,24	1,65	0,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	3,43	0,67	3,91	0,30	1,27
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,70	4,32	4,51	5,54	5,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1,55	4,45	5,17	4,12	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,20	9,29	9,11	8,76	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,14	2,26	6,94	7,18	8,40
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,25	9,19	8,82	9,00	7,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,13	2,16	3,54	7,29	7,19
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,49	4,17	6,10	7,30	7,83
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,26	11,54	8,10	9,23	8,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,10	2,04	0,76	5,10	2,96
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	17,47	8,91	9,72	6,92	9,43
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,30	5,70	8,50	4,98	6,93
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,99	9,31	8,73	3,13	4,37
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>6,73</b>	<b>5,03</b>	<b>6,37</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

### 3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp10.830.000,- dan meningkat hingga mencapai Rp19.400.000,- pada tahun 2016. Tingkat pendapatan per kapita menurut lapangan usaha yang dominan pada tahun 2016 adalah pada industri pengolahan mencapai Rp6.490.000,- kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp2.880.000,- dan sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp1.990.000,-. Hal tersebut sesuai dengan potensi perekonomian Kabupaten Tegal yang ditopang oleh tiga sektor utama tersebut. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel 2.9 di bawah ini.

**Tabel 2.9**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) 2012 -2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,26	2,45	2,40	2,72	2,88
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,52	0,56	0,72	0,80	0,88
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,05	4,63	5,25	5,96	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1,04	1,10	1,25	1,36	1,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,24	2,42	2,59	2,81	2,99
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation</i>	0,33	0,36	0,42	0,47	0,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service</i>	0,56	0,60	0,67	0,75	0,83
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and</i>	0,37	0,39	0,42	0,45	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,33	0,35	0,38	0,42	0,45
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,22	0,23	0,26	0,29	0,32
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,33	0,35	0,38	0,41	0,43
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,62	0,73	0,82	0,90	0,99
P	JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15
Q	Jasalainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,27	0,31	0,36	0,38	0,41
<b>ProdukDomestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>12,28</b>	<b>13,31</b>	<b>14,68</b>	<b>16,14</b>	<b>19,40</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

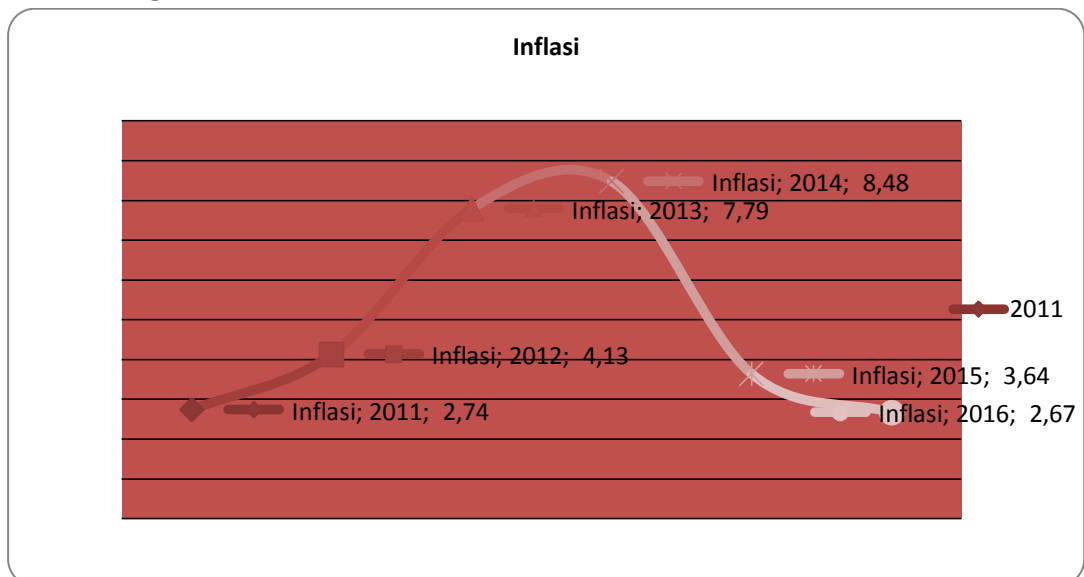
#### 4. Tingkat Inflasi

Selama tahun 2016 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,67 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,64 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang selama tahun kalender 2016 mencapai inflasi 4,37 persen; disusul kelompok kesehatan 3,48 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 2,77 persen; kelompok sandang 2,71 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 2,42 persen; kelompok bahan makanan sebesar 1,78 persen; dan terakhir kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,30 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok minuman tidak beralkohol yang mengalami inflasi sebesar 6,95 persen; dan dan sub

kelompok makanan jadi yang mengalami inflasi sebesar 3,97 persen. Sub kelompok lain yang mengalami kenaikan indeks cukup tinggi antara lain sub kelompok bumbu-bumbuan yang mencapai 18,51 persen; sub kelompok lemak dan minyak yang mengalami kenaikan indeks sebesar 12,05 persen; sub kelompok ikan segar yang mencapai 9,17 persen; dan juga sub kelompok daging dan hasil-hasilnya yang mencapai 8,00 persen. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya yang turun sebesar 4,77 persen; sub kelompok transportasi turun sebesar 1,14 persen dan sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya yang turun sebesar 3,54 persen.

Kenaikan indeks (inflasi) paling tajam terjadi pada bulan Juli 2016 sebesar 1,48 persen; sedangkan penurunan indeks (deflasi) paling tajam terjadi pada bulan April sebesar 0,49 persen. Pada bulan-bulan musim panen padi pada setiap subround yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember fluktuasi harga cukup terkendali dan masih dalam rentang harga yang wajar. Inflasi tahun 2014 merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu 2011-2016 sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016  
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 144.200 jiwa atau 10,1% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2013), di mana pada tahun 2010 mencapai 182.542 jiwa atau 13,11%, tahun 2011 mencapai 161.116 jiwa atau 11,54%. Tahun 2012 mencapai 152.758 jiwa atau 10,75%. Tahun 2013 mencapai 149.800 jiwa atau 10,58%.

Berikut adalah Gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

**Tabel 2.10.**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2012- 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Miskin	152.758	149.800	140.308	143.540	144.200
2.	Jumlah Penduduk	1.409.406	1.415.009	1.420.132	1.420.890	1.429.386
3.	Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	10,75	10,58	9,87	10,09	10,1

Sumber : Bappeda Tegal Tahun, 2017

#### 6. Angka Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan.

Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Alasan pertama adalah beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Alasan kedua adalah, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Indikator yang

berubah adalah Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi juga berubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11**

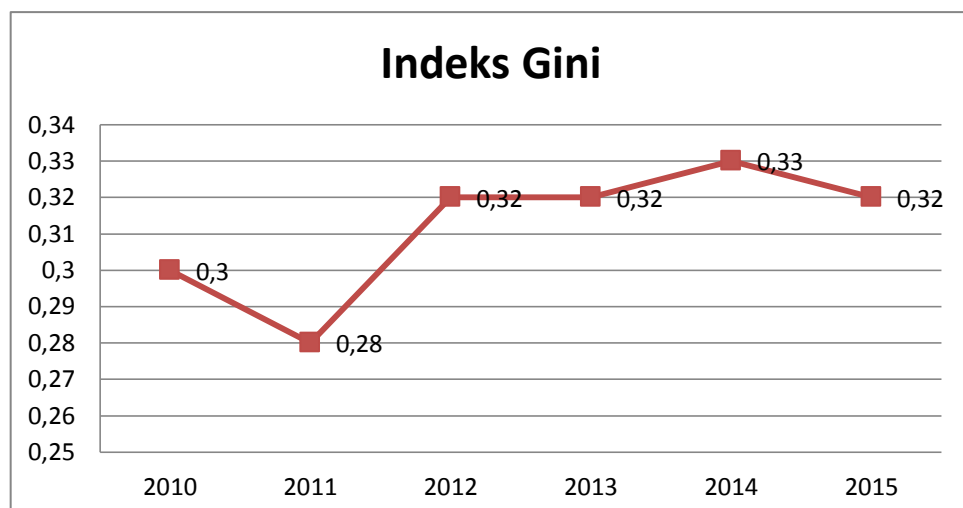
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru Tahun 2012– 2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	IPM	62,67	63,50	64,10	65,04	65,84
1	- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,59	70,73	70,80	70,90	71,02
2	- Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,16	11,63	11,99	12	12,01
3	- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	5,78	5,85	5,93	6,30	6,54
4	- Pengeluaran (RibuDupiah/orang/tahun)	7.894	8.001	8.050	8.367	8.709

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 7. Indeks Gini

Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal 2010-2015 meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2010 - 2015 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2. Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

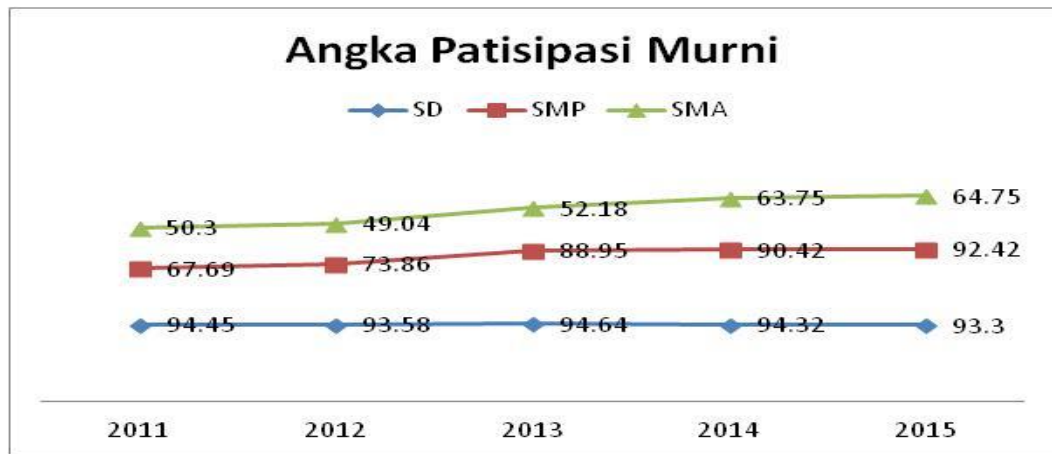
## 8. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana pada Tahun 2008 pada angka 0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, pada Tahun 2012 naik pada angka 0,258 dan pada tahun 2013 kembali naik pada angka 0,26. Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam kategori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

## 9. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

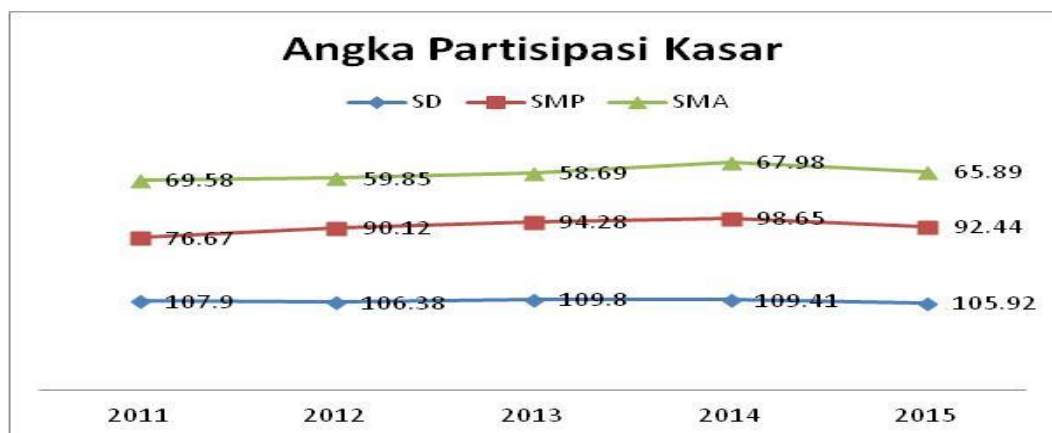
APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2015 APM SD/MI mencapai 93,30%. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 93,30%, selebihnya 6,70% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 92,42% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan persentase sebesar 7,58% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. APM SMA tahun 2015 sebesar 64,75% yang artinya siswa jenjang sekolah SMA dengan kelompok usia 16-18 tahun sebesar 64,75% selebihnya 36,25 % berada di kelompok usia di bawah atau di atas 16-18 Tahun. Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



r  
Gambar 2.3 : Angka Partisipasi Murni Tahun 2011-2015  
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal yaitu 107,9 (2011), 106,38 (2012), 109,8 (2013), 109,41 (2014), 105,92 (2015). APK SMP/MTS 76,67 (2011), 90,12 (2012), 94,28 (2013), 98,65 (2014), 92,44 (2015). APK SMA/MA 69,58 (2011), 59,85 (2012), 58,69 (2013), 67,98 (2014), 65,89 (2015). Secara umum dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan, namun tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal. APK Kabupaten Tegal tahun 2011-2015 adalah sebagaimana dalam Gambar 2.4 dibawah ini.

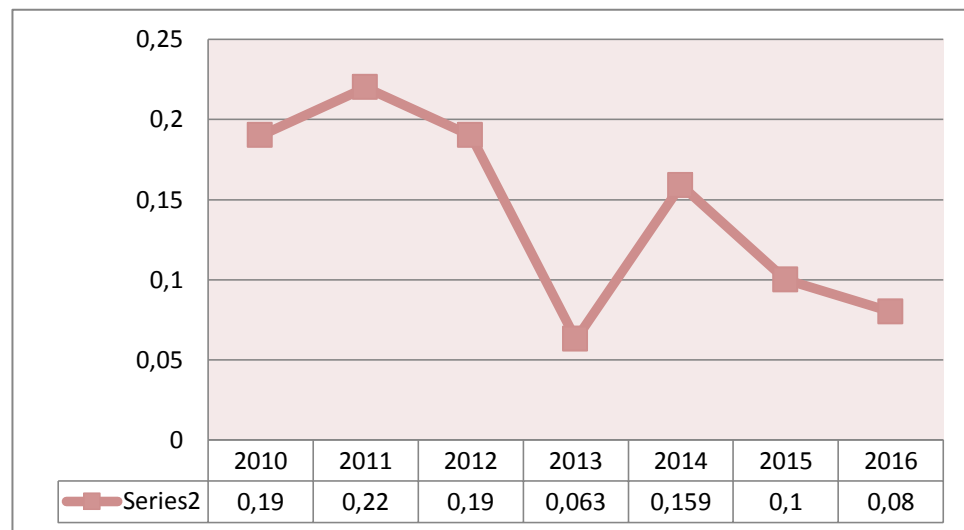


Gambar 2.4 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2011-2015  
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 10. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2014 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2016. Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari 77 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, 70%nya karena faktor

kemiskinan, sedangkan sisanya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena orang tua malas atau tidak *tlaten* dalam memberikan makanan pada anak balitanya. Bisa juga karena anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu yang tidak tahu mengenai masalah gizi atau tidak peduli pada kesehatan anak, sehingga anak akhirnya kekurangan gizi. Persentase Balita Gizi Buruk adalah sebagaimana berikut 0,22 (2011), 0,19 (2012), 0,063 (2013), 0,159 (2014), 0,1 (2015), dan 0,08 (2016) sebagaimana dalam Gambar 2.5 dibawah ini.



Gambar 2.5: Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2016

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 11. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai berusia satu tahun. Jumlah kasus kematian ibu dan kematian bayi 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.12 di bawah ini.

**Tabel 2.12.**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	39	42	47	33	27
2.	Jumlah Kematian Bayi	228	256	266	263	262

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM,



namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Selama tahun 2012 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 60,72 naik 0,54 poin dibanding IPG tahun 2011. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.

**Tabel 2.13**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tegal dan**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013**

Daerah	2010	2011	2012	2013
Prov. Jateng	65,79	66,45	66,80	67,97
Kab. Tegal	59,32	60,18	60,72	61,53

Sumber : BPS, 2017

### 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui IDG memperlihatkan penurunan 0,14 poin dari 51,70 ditahun 2011 menjadi 51,16 ditahun 2012. Persentase variabel pembentuk IDG tahun 2012 sebagai berikut: keterlibatan perempuan diparlemen 6%, perempuan sebagai tenaga profesional 42,54% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 26,71%. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.14.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tegal**  
**dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013**

Daerah	2010	2011	2012	2013
Prov. Jateng	67,96	68,99	70,66	71,22
Kab. Tegal	49,07	51,70	51,16	51,91

Sumber : BPS, 2017

## 12. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tegal sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tegal seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar.

Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan *aubade*, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga SD, penyelenggaraan pekan olahraga SMP, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (Popda), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA. Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal didukung oleh grup kesenian yang berjumlah 311 grup, 1 gedung kesenian, 1 museum dan pusat kebudayaan, 158 cagar budaya bergerak, 27 cagar budaya tidak bergerak, 16 organisasi pemuda dan 56 klub olahraga. Sebagaimana Tabel 2.15 di bawah ini.

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011 – 2015**

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	311	311	311	311	311
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	8	9	9	9	10
4	Jumlah Benda Cagar Budaya :					
	a. Bergerak	158	158	158	158	158
	b. Tidak Bergerak	27	27	27	27	27
5	Jumlah Organisasi Pemuda	16	16	16	16	16
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	56	56	56	56	56

Sumber : -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2017  
-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

### 2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Capaian APS di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2011-2015. Sebagaimana Tabel 2.16 berikut ini.

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	170.173	184.944	155.090	151.882	162.024
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	186.445	168.432	155.557	154.827	157.653
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	91,27	109,80	99,70	105,90	102,77
2	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	72.570	73.490	66.171	53.734	69.422
2.2.	Jumlah penduduk Kelompok usia 13-15 tahun	83.078	77.948	73.199	71.614	59.193
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	87,35	94,28	90,42	99,28	117,28
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	15.991	19.099	39.674	31.454	69.422
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	34.916	34.916	62.284	59.509	59.193
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	45,80	54,70	63,75	70,77	117,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk semua jenjang dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang sebelumnya. Capaian kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2011-2015 sebagaimana pada Tabel 2.17 di bawah ini.

**Tabel 2.17.**  
**Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	917	903	986	889	885
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	186.445	161.653	155.557	154.827	157.653
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	1 : 203,32	1 : 179,02	1 : 157,76	1 : 174	1:178,13
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah sekolah	163	186	174	174	177
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	65.290	65.208	73.199	71.614	59.193
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13	1 : 400,55	1:350,58	1 : 420,68	1 : 411	1 : 334,42
3.	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah sekolah	39	39	103	103	102
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	34.916	34.916	62.284	59.509	59,761
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	1 : 895,28	1 : 895,28	1 : 604,69	1 : 577,75	1 : 585,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebagaimana Tabel 2.18 berikut ini.

**Tabel 2.18.**  
**Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten**  
**Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	7.448	7.609	8.848	9.679	8.782
1.2.	Jumlah Murid	142.640	184.942	170.914	164.381	162.024
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 19,15	1 : 24,31	1 : 19,73	1 : 17	1 : 18,44
<b>2</b>	<b>SMP/MTs.</b>					
2.1.	Jumlah Guru	2.637	3.269	4.103	3.922	2.367
2.2.	Jumlah Murid	45.100	80.136	72.210	69.641	69.422
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 17,1	1 : 24,53	1 : 17,59	1 : 17,75	1 : 29,32
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Guru	2.493	1.510	2.444	2.658	1.764
3.2	Jumlah Murid	35.109	45.968	42.265	44.669	49.012
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 14,08	1 : 30,44	1 : 17,29	1 : 16,81	1 : 27,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

d. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2012-2016. Sebagaimana Tabel 2.19 di bawah ini.

**Tabel 2.19.**  
**Rasio Guru per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2012 -2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	7.448	7.609	8.848	9.679	8.782
1.2.	Jumlah Kelas	4.112	5.821	5.817	4.777	4.777
1.3.	Rasioguru/Kelas	1 : 1,81	1 : 1,31	1 : 1,52	1 : 2,02	1 : 33,91
1.4.	Jumlah Murid	142.640	184.942	170.194	164.381	162.024
1.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 34,69	1 : 24,31	1 : 26,94	1 : 34,41	1 : 33,91

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,81:34,69	1:1,31:24,31	1:1,52:29,31	1 : 2,02 : 16,98	1:8,38:33,51
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Guru	2.637	3.269	4.103	3.922	2.367
2.2	Jumlah Kelas	1.180	2.753	2.753	2.752	1.422
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 2,23	1 : 1,19	1 : 1,49	1 : 1,42	1 : 1,66
2.4	Jumlah Murid	45.100	80.136	72.210	69.641	69.422
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 38,22	1 : 29,11	1 : 26,22	1 : 25,29	1 : 48
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:2,23:38,22	1:1,19:29,11	1:1,49:26,22	1 : 1,42 : 25,29	1:1,66:48
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Guru	2.493	1.510	2.444	2.658	1,764
3.2	Jumlah Kelas	281	214	319	1130	1.125
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 8,87	1 : 7,06	1 : 7,66	1 : 2,35	1:5,56
3.4	Jumlah Murid	35.109	45.968	42.265	44.699	49.012
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 124,94	1 : 214,8	1 : 129,7	1 : 39,55	1 : 43,56
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:8,87:124,94	1:7,06:214,8	1:7,66:132,49	1 : 2,35 : 39,55	1:5,56:43,56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### e. Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2012-2016. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.20.

**Tabel 2.20.**  
**Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	4.875	5.108	5.235	4.299	4.349
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	5.521	5.722	5.817	4.777	4.777

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.3.	Persentase	86,63	89,27	89,99	89,99	91,04
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	937	2.252	2.257	1.131	1.181
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	1.180	2.753	2.753	1.372	1.372
2.3.	Persentase	79,41	81,80	81,98	82,42	86,08
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	927	947	950	952	1.006
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	1.109	1.120	1.122	1.130	1.125
3.3	Persentase	83,59	84,55	84,67	84,25	89,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal Tahun 2017

#### f. Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak. Gambaran kondisi capaian PAUD di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.21 di bawah ini.

**Tabel 2.21.**

#### **Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.	Jumlah Siswa PAUD	22.403	47.765	19.400	24.567	40.446
1.2.	Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun	183.769	185.111	187.887	191.175	172.381
1.3.	Persentase	12,19	25,80	10,33	12,85	23,46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal Tahun 2017

#### g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Tegal cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 ke 2012, yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 0,91% dan tingkat SMP/MTs sebesar

1,09%, namun, angka putus sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2012, yaitu sebesar 1,22%. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan padatingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswadi Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.22 di bawah ini.

**Tabel 2.22.**  
**Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**di Kabupaten Tegal Tahun2012–2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	299	370	218	197	197
1.2.	Jumlah seluruh Siswa	142.640	184.942	156.729	164.381	162.024
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,21	0,20	0,13	0,12	0,12
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	329	489	413	41	48
2.2.	Jumlah seluruh Siswa	45.100	80.136	68.978	69.641	69.442
2.3.	AngkaPutus Sekolah (Persentase)	0,73	1,61	0,60	0,06	0,07
<b>3.</b>	<b>SMA / MA</b>					
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah	248	230	129	109	109
3.2	Jumlah seluruh Siswa	35.109	45.968	41.386	44.699	49.012
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,70	0,50	0,03	0,20	0,22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal Tahun 2017

#### h. Angka Kelulusan Siswa

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orangtua. Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan padat ahun2013, baikSD/MI, SMP/MTs. Maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruangkelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/guru terhadap jumlah murid/siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.23.



**Tabel 2.23.**  
**Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	24.586	23.716	26.793	26.605	26.425
1.2.	Jumlah seluruh Siswa KelasVI	24.589	23.718	26.798	26.605	26.429
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,99 %	99,99 %	99,98%	100%	99,98%
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	20.619	20.650	21.342	23.780	23.054
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	20.777	20.696	21.347	23.790	23.058
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,24 %	99,78 %	99,97%	99,95%	99,88%
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	11.529	9.353	12.615	13.360	14.875
3.2	Jumlah seluruh Siswa KelasIII	11.531	9.534	12.620	13.361	14.878
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,69 %	99,95 %	99,96%	99,99%	99,98%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal Tahun 2017

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2012-2016 persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.24 di bawah ini.

**Tabel 2.24.**  
**Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
1 SMA/MA/SMK	88,02	89,82	91,20	91,71	90,00
2 SMP/MTS	87,54	89,33	90,10	88,93	89,43
3 SD	67,81	69,20	70,13	93,40	71,22
4 PAUD	32,89	33,56	35,20	38,25	36,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal Tahun 2017

## 2. Kesehatan

### a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (dayapikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 1.518 buah dan jumlah Balita sebanyak 110.223 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:72. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 72 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2011-2016 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.25.

**Tabel 2.25.**

### **Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal Tahun 2011 -2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Posyandu	1.495	1.517	1.517	1.518	1.518	1.518
2.	Jumlah Balita	126.258	112.154	120.121	110.223	114.695	119.084
3.	Rasio	1 : 84,45	1 : 73,93	1 : 79,18	1 : 72,61	1 : 75,5	1 : 78,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

### b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2016 mencapai 1 : 416. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 416 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2:1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.26 berikut ini.

**Tabel 2.26.**  
**Rasio Puskesmas, Poli klinik dan Pustu di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29
2	Jumlah Puskesmas Keliling	30	30	30	30	30
3	Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes	231	231	210	210	209
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	64	64	64	62	62
	Jumlah 1s/d 4	354	354	333	331	330
5.	Jumlah Penduduk	1.421.001	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 49.000	1 : 48.793	1:48.750	1:49.134	1:49.289
7	Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	1 : 6.152	1 : 6.125	1:6.148	1:6.188	1:6.839
8	Rasio Puskesmas Pembantu persatuan penduduk	1 : 22.203	1 : 22.109	1:22.190	1:22.264	1:23.055
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 401	1 : 399	1:401	1:382	1:416
9	JumlahKecamatan	18	18	18	18	18
10	JumlahDesa/Kelurahan	287	287	287	287	287
11	RasioPuskesmasper Kecamatan	2:1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas KesehatanKabupatenTegal Tahun 2017

### c. Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 7unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan rumah sakit ada sebanyak 1unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 1 : 204.198. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Tegal melayani 204.198 penduduk. Pada Tahun 2015, rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1.415.009 jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Tegalselama kurun waktu tahun2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut ini.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2012 -2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	7	7	7	7
5.	Jumlah Penduduk	1.409.406	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386
6.	Rasio	1 : 201.343	1 : 202.144	1 : 202.786	1 : 203.555	1 : 204.198

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 141 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 1.429.386 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,10. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,10.

Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2016 adalah 1:10,12. Ini artinya 1 dokter melayani 10.120 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun tahun 2014 rasio sebesar 1:9,28. Sedangkan pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk yang bertambah dan jumlah dokter tetap rasionya sebesar 1:9,31 artinya 1 dokter melayani 9.310 jiwa penduduk. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini.

**Tabel 2.28.**  
**Jumlah Dokter di Kabupaten Tegal Tahun 2012 -2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Dokter	115	115	153	153	141
2.	Jumlah Penduduk	1.409.406	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1 : 12,25	1 : 12,30	1 : 9,28	1 : 9,31	1 : 10,12
4.	Rasio dokter Terhadap penduduk	1:12.356,53	1:15.684,57	1 : 9.281,91	1 : 9.281,91	1 : 9.564

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal sertabayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2016 mencapai 28.572 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 26.508 orang atau sekitar 92,78%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015, namun lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Tegal yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.29 berikut ini.

**Tabel 2.29.**  
**Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	27.399	28.430	26.797	27.669	26.508
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	29.555	31.266	28.591	28.534	28.572
3.	Persentase	92,71	90,96	93,73	96,97	92,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

f. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan. Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Tegal. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan dari 1,44% pada tahun 2012 menjadi 0,08% pada tahun 2016. Jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2012 sebanyak 1.622 balita menjadi 90 balita pada tahun 2016. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.30 di bawah ini.

**Tabel 2.30.**  
**Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	110.532	155.991	108.900	113.548	116.327
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	1.622	1.441	175	110	90
3.	Jumlah Balita seluruhnya	112.154	157.432	110.223	114.695	119.084
4.	Persentase:					
	- Gizi Baik	98,56	99,08	98,80	99	98
	- Gizi Buruk	1,44	0,92	0,16	0,10	0,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modalsosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai.

Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tataguna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik(buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 adalah 49,60%, pada tahun 2016 turun menjadi 44,15%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat pada tahun 2016 yaitu menjadi 24,18%. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Tegal berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2012-2016. Sebagaimana Tabel 2.31 di bawah ini.

**Tabel 2.31.**  
**Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kondisi Tahun 2012- 2016**

No	Uraian	PanjangJalan(km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	342,88	329,04	367,84	302,68	374,11
2.	Kondisi Sedang	225,87	222,68	104,06	120,56	117,37
3.	Kondisi Rusak Sedang	109,95	157,19	163,20	177,37	150,93
4.	Kondisi Rusak Berat	94,94	54,55	212,17	246,66	204,86
5.	Jalan secara keseluruhan	691,28	764,45	847,27	847,27	847,27
	Poporsi Kondisi Baik (%)	49,60	43,04	43,41	35,72	44,15
	Poporsi Kondisi Sedang (%)	32,67	29,12	12,28	14,23	13,85
	Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	15,91	20,56	19,26	20,93	17,81
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	13,73	7,14	25,04	29,11	24,18

Sumber : Dinas Pekerjaan UmumTegal Tahun 2017

Panjang jalan nasional di Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km dan jalan Provinsi di Kabupaten Tegal sepanjang 54,63 km serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Kriteria kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten:

- 1). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan alternatif untuk menuju pusat kegiatan lokal dengan ibukota kabupaten.
- 2). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan penghubung antar ibukota kecamatan.
- 3). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan untuk menuju pusat kegiatan lokal.
- 4). Lebar jalan desa yang diusulkan tidak kurang dari 7,5 m.
- 5). Kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam.

#### b. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang jaringan irigasi nonteknis Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sepanjang 835,822 km, dan panjang jaringan irigasi teknis 1.114,298km yang terdiri dari panjang saluran primer 36.613m, panjang saluran sekunder 285.150m dan panjang saluran tersier 822.535m. Bangunan terdiri dari bangunan utama (bangunan bendung) sebanyak 443 buah dan bangunan air(bangunan sadap, bagi sadap dan pelengkap) sebanyak 1.015 buah. Berikut adalah secara lengkap mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.32 di bawah ini.

**Tabel 2.32.**

**Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Tegal**

No.	Uraian	Panjang saluran irigasi (m)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Irigasi Non Teknis	835.822	835.822	835.822	835.822	835.822
2.	Irigasi Teknis Primer	36.613	36.613	36.613	36.613	36.613
3.	Irigasi Teknis Sekunder	285.150	285.150	285.150	285.150	285.150
4.	Irigasi Teknis Tersier	822.535	822.535	822.535	822.535	822.535

Sumber: DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun2017

#### c. Penanganan Permasalahan Banjir

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan kerawanan bencana banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794,86 ha (21,19%) terinci atasa Kecamatan Adiwerna (1.405,93 ha), Balapulung (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhturi (1.674, 93 ha),

Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara desa Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

d. Sanitasi

Data panjang saluran air limbah perumahan sebagai tolok ukur penilaian sanitasi tidak tersedia di Kabupaten Tegal. Karena itu, pendekatan yang diambil adalah jumlah rumah yang memiliki jamban. Jamban merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kesehatan masyarakat dan karena itu dianggap dapat mewakili kinerja sanitasi dikarenakan *masterplan* sanitasi Kabupaten Tegal yang antara lain memuat data drainase sedang dalam proses penyusunan. Data jumlah rumah berjamban di Kabupaten Tegal seperti tergambar pada Tabel 2.33 berikut ini.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Rumah Berjamban di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah	370.508	389.708	O/S	O/S	O/S
2.	Jumlah tidak berjamban (unit)	50.949	51.124	O/S	O/S	O/S
3.	Jumlah jamban bersama (unit)	19.843	19.973	O/S	O/S	O/S
4.	Jumlah jamban sendiri (unit)	299.716	318.611	O/S	O/S	O/S
3.	Persentase rumah tidak berjamban	13.75	13,12	O/S	O/S	O/S

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2017

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*openspaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen). Luas RTH di Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 3.750 ha atau 4,2% dari total luas wilayah, masih jauh dari target 20% sebagaimana Tabel 2.34 di bawah ini.



**Tabel 2.34.**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah diKabupaten Tegal**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	2.770	3.637	3.750	O/S	O/S
2.	Luas wilayah (ha)	87.879	87.879	87.879	O/S	O/S
	Persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah (%).	2,98	3,15	4,13	O/S	O/S

Sumber: Dinas Kimtaru Kabupaten Tegal tahun 2017

f. Persentase Bangunan ber-IMB

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Tegal yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013 jumlah bangunan di Kabupaten Tegal yang telah ber-IMB sebanyak 9.519 unit dari 314.299 unit bangunan. Jumlah bangunan ber-IMB ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2011-2013). Persentase bangunanber-IMB tahun 2013 mencapai 3,02%. Ini artinya jumlah bangunan diKabupaten Tegal yang telah memiliki IMB masih sangat terendah.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut.

**Tabel 2.35.**  
**Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**  
**DiKabupaten Tegal Tahun 2011 -2016**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber IMB	5.793	8.118	9.519	1026	1823	1342
2.	Jumlah Bangunan	300.717	341.740	314.299	O/S	O/S	O/S
3.	Persentase bangunan ber IMB(%)	1,92	2,37	3,02	O/S	O/S	O/S

Sumber : Dinas Kimtaru Kabupaten Tegal Tahun2017

4. Perumahan Rakyat

a. Luasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Lokasi kawasan permukiman terdiri dari dua yaitu :

1). Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan mencakup permukiman yang berada pada kawasan perkotaan. Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan untukmengembangkan sarana prasarana

penunjang perkotaan serta menata ruang kota melalui penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota. Kawasan permukiman perkotaan tersebut seluas 8.819 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas) hektar yang tersebar di setiap ibukota kecamatan. Berdasarkan data terakhir tahun 2013 luasan permukiman perkotaan yang ada tersebut, terdapat permukiman kumuh perkotaan di Kecamatan Adiwerna yaitu di Harjosari Kidul seluas 14,52 ha, Harjosari Lor seluas 9,02 ha dan kecamatan Suradadi di Jatimulya dukuh Sigerung seluas 5,89 ha sehingga luas total permukiman kumuh adalah 29,43 ha.

## 2). Permukiman Pedesaan

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang permukiman pedesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat pada PPL. Sedangkan, permukiman pedesaan diluar PPL mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya. Luas permukiman perdesaan kurang lebih 19.047 (sembilan belas ribu empat puluh tujuh) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sebagaimana Tabel 2.36 di bawah ini.

**Tabel 2.36.**  
**Persentase Luas Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Tegal Tahun 2015**

No.	Uraian	Luasan
1.	Luas area permukiman (ha) :	27.866,00 ha
	a. Permukiman Perkotaan	8.819,00 ha
	Permukiman kumuh perkotaan	29,43 ha
	b. Permukiman Perdesaan	19.047,00 ha
2.	Luasarea permukiman tertata (ha)	11.890,00 ha
3.	Persentase LuasPermukiman yangTertata	42,67 %

Sumber:Dinas Kimtaru Kabupaten Tegal Tahun 2017.

### b. Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Data terakhir tahun 2012, jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9,20% dibanding jumlah rumah layak huni 90,80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37 berikut ini. Untuk data sampai dengan tahun 2015 masih dalam proses perhitungan.

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Rumah Layak Huni Di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah	370.508	389.708	410.041	0/S	0/S
2.	Jumlah rumah layak huniunit	310.187	353.863	353,863	0/S	0/S
3.	Persentase rumah layak huni	83,71	90,80	90,80	0/S	0/S
4.	Persentase rumah tidak layak huni	16,29	9,20	9,20	0/S	0/S

Sumber: Dispermasdes Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Tegal dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan DPU melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Tegal. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan nonperpipaan di Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 72,35% (272.292 Rumah Tangga) terhadap total jumlah rumah tangga Kabupaten Tegal (356.932 Rumah Tangga) dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 287 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal. Cakupan penyediaan air bersih di Kabupaten Tegal kategori perpipaan sampai dengan 2013 sementara cakupan penyediaan air bersih kategori non perpipaan sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan penyediaan air bersih dalam kurun waktu 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.38 di bawah ini

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Penyediaan Air Bersih**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2011 – 2015**

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015 (PDAM)
Jumlah Rumah Tangga	350.634	356.435	376.932	376.332	
- Terlayani	266.741	269.402	274.275	272.292	182.784
- Blm Terlayani	83.893	87.033	102.657	104.040	
Persentase terlayani :					
- Dari Perpipaan	23,91%	23,61%	28,85%	28,48%	
- Dari Non Perpipaan	76,09%	76,39%	71,15%	71,52%	
Total Persentase Terlayani	76,07%	75,58%	72,77%	72,35%	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun, 2017

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

##### a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi pamong praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2016 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal sebanyak 109 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2016 sebesar 1,09. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Tegal baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 100 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.39 di bawah ini.

**Tabel 2.39.**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pol PP	93	92	92	98	109
2.	Jumlah Penduduk	1.421.001	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.387.481
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1 : 0,65	1 : 0,65	1 : 0,65	1:0,63	1:1,09

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2017

b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas dapat menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 59,12. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2016 tersedia jumlah Linmas sebanyak 8.450 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 di bawah ini.

**Tabel 2.40**  
**Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	8.409	8.409	8.403	8.450	8.450
2.	Jumlah Penduduk	1.421.001	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.371
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	1 : 59,18	1 : 59,42	1 : 59,17	1:59,30	1:59,12

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 580 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 287 desa/keluarga. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebesar 1:2. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 2 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.41 di bawah ini.

**Tabel 2.41.**  
**Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pos Siskamling	580	580	580	580	580
2.	Jumlah Desa dan kelurahan	287	287	287	287	287
3.	Rasio Pos Siskamling perdesa/kelurahan	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1:2	1:2

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 6. Sosial

### a. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang sosial senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat. Penanganan PMKS di Kabupaten Tegal berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PMKS. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal relatif masih sangat besar. Adapun jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal semakin turun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, tetapi jumlah yang tertangani masih relatif rendah hanya kisaran 25% dari jumlah PMKS yang ada.

### b. Kebencanaan

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2011-2015 antara lain banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Pada Tahun 2013 jumlah korban bencana terbanyak di bandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 54 Kepala Keluarga. Penanganan atas korban bencana setiap tahun sebanyak 100%. Adapun data tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kebencanaan sebagaimana Tabel 2.42 berikut ini.

**Tabel 2.42.**

**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang Ditangani di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016**

No	Tahun	Jumlah PMKS	Yang ditangani	%	Jumlah Korban Bencana (KK)	Yang ditangani (KK)	%
1	2011	103.526	19.670	19	18	18	100
2	2012	102.501	25.625	25	26	26	100
3	2013	101.486	23.342	23	54	54	100
4	2014	792.785	20.060	2.53	470	470	100
5	2015	769.769	41.172	5.34	2.939	2.939	100
6	2016	739.930	739.930	100	243	243	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2017

### 2.1.4.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

##### a. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja baru di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2014

jumlah tenaga kerja baru yang terserap pada PMA/PMDN berjumlah sebanyak 1.731 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2012.

Namun rasio penyerapan tenaga kerja baru terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2014 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2013), di mana rasio penyerapan tenaga kerja baru pada tahun 2009 adalah 94:1, tahun 2010 adalah 220:1, tahun 2011 mencapai 262:1, dan pada tahun 2012 mencapai 278:1 dan 2013 mencapai 209:1. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja baru terserap sebanyak 1.320 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2010 terserap sebanyak 1.320 orang per PMA/PMDN, tahun 2011 terserap 1.570 orang per PMA/PMDN, tahun 2012 terserap 1.670 orang per PMA/PMDN dan tahun 2013 terserap 1.670 orang per PMA/PMDN. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut ini.

**Tabel 2.43.**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Baru di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011 -2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMA/PMDN	1.570	1.670	1.670	1.731	750
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang menyerap Tenaga Kerja Baru	6	6	8	9	2
3	Rasio daya serap Tenaga kerja	262 : 1	278 : 1	209 : 1	192 : 1	375 : 1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2017

#### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Tahun 2013 TPAK di Kabupaten Tegal mencapai 62,89%, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 80,30% dan lebih kecil dibanding tahun 2011 yaitu 90,12%. Pengangguran terbuka dari kurun waktu 2009-2014 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 7,30% pada tahun 2009 menjadi 4,36% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 6,37% tahun 2014. Kondisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebagaimana Tabel 2.44 di bawah ini.

**Tabel 2.44**  
**Penduduk Usia Produktif (15-64Tahun) di Kabupaten Tegal Dirinci Menurut**  
**Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2012 -2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk usia 15+	933.282	978.968	1.105.008	1.119.139	1.424.891
2	Angkatan Kerja	749.387	615.630	900.214	891.014	900.214
3	Bukan Angkatan Kerja	183.895	363.338	207.704	228.125	524.677
4	Bekerja	704.049	572.937	846.200	837.206	718.686
5	Pengangguran	45.338	42.693	53.943	53.808	181.528
6	TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja)	80,30%	62,89%	81,46%	79,61%	63,17%
7	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	93,95%	93,07%	92,22%	93,96%	
8	TPT ( tingkat pengangguran terbuka)	4,86%	4,36%	6,37%	6,03%	
9	Penempatan AKL	4.273	5.301	1.531	4.910	129
10	Penempatan AKAD	12.045	11.068	3262	2800	91
11	Penempatan AKAN	5.872	6.850	3325	371	500
12	Jumlah Pencaker/Pembuat AKI	12.434	13.107	10.226		11.788

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2017

### c. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 menurut lapangan usaha mencapai 597.079 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun 2013 meskipun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011- 2012. Kesempatan kerja terbesar beradapada lapangan usaha perdagangan, restoran dan hotel, disusul dengan lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2011-2015 menurut lapangan usaha. Sebagaimana Tabel 2.45 di bawah ini.



**Tabel 2.45.**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015**

No.	LapanganUsaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	185.058	172.420	137.420	137.069	O/S
2	Industri pengolahan	144.395	134.307	103.224	105.390	O/S
3	Bangunan	75.213	74.153	60.124	64.935	O/S
4	Perdagangan, Restoran dan Hotel	186.444	171.441	157.441	178.866	O/S
5	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	41.937	49.641	36.641	36.135	O/S
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	27.738	15.013	4.013	5.579	O/S
7	Jasa Kemasyarakatan	95.116	84.532	71.532	66.342	O/S
8	Pertambangan dan Penggalian	5.845	2.084	2.084	1.580	O/S
9	Listrik, Gas dan Air	982	458	458	1.183	O/S
	Jumlah	762.728	704.049	572.937	597.079	O/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2017

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri pada tahun 2013 sebanyak 5.896. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebanyak 4.277, tahun 2011 sebanyak 5.860, tahun 2010 sebanyak 5.830 dan tahun 2009 sebanyak 5.826. Adapun pekerja perempuan yang bekerja diluar negeri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berturut-turut dari tahun 2009-2014 yaitu 247, 393, 405, 452 pada tahun 2013 menjadi 742. Persentase pekerja perempuan didalam negeri dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan, yaitu dari 95,9% tahun 2009 menjadi 88,82% tahun 2013, sebaliknya persentase pekerja perempuan diluar negeri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berturut-turut dari tahun 2011-2015 yaitu 4,07%, 6,32%, 6,46%, 9,56% dan 11,18%. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri dan diluar negeri selama kurun waktu 2011--2015. Sebagaimana Tabel 2.46 di bawah ini.

**Tabel 2.46**  
**Jumlah Pekerja Perempuan Kabupaten Tegal yang Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri	4.277	5.896	5.386	5.481	5.804
2.	Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri	452	742	758	783	879
3.	Jumlah total pekerja perempuan	4.729	6.638	6.144	6.264	6.683
4.	Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri	90,44	88,82	87,66	87,5	86,85
5.	Persentase pekerja perempuan di Luar negeri	9,56	11,18	12,34	12,5	13,15
6.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS	6.705	5.739	5.697	5.721	5.388
7.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai Anggota DPRD	4	5	10	10	10
8.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	8	10	20	20	20

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

**b. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebanyak 13 rumah tangga dari 390.749 rumah tangga. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 25 KDRT dari 389.708 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,006 pada tahun 2012 dan 0,003 pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.47 di bawah ini.

**Tabel 2.47.**  
**Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah KDRT	25	13	10	51	12
2.	Jumlah Rumah Tangga	389.708	390.749	400.269	431.974	430.290
3.	Rasio KDRT	0,006	0,003	0,002	0,012	0,0027

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

**c. Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, standar pelayanan minimal mencakup jenis pelayanan Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta cakupan pelayanan lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini.

**Tabel 2.48.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2012-2016**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)				
			2012	2013	2014	2015	2016
I	Penanganan pengaduan/ Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	210	280
II	Pelayanan kesehatan Bagi perempuan dan anak Korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	100	100	99	210	280
III	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	50	50	55	100	100
		2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	50,4	50,4	75	200	280
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100	100	100	80	40
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	55	55	70	110	100
V	Pemulangan dan	1. Cakupan layanan	50	50	50	0	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)				
			2012	2013	2014	2015	2016
	Reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan	pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.					
		2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100	100	100	0	100

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

### 3. Pangan

#### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 133.695 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 1.415.009 jiwa penduduk sebanyak 176.765 ton (132,21%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2013 menurun tetapi konsumsi meningkat bila dibandingkan tahun 2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.49 di bawah ini.

**Tabel 2.49.**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	215.815	214.088	133.695	183.158	214.863
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.400.256	1.421.001	1.415.009	1.420.132	1.424.132
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama	137.225	139.258	176.765	133.574	133.156
4.	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan	63,58	65,05	132,21	137,12	161,36

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

#### b. Distribusi dan Akses Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada Tahun 2012 sebesar 20% dan Tahun 2013 menjadi sebesar 31%. Adapun stabilitas harga dan pasokan pangan baru tercapai 50% pada Tahun 2012 dan meningkat menjadi 60% di Tahun 2013.

#### c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2012 skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tegal sebesar 87,2% dan Tahun 2013 menjadi 88,3%, sedangkan target pada Tahun 2015 sebesar 90%. Adapun indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Tahun 2013 sebesar 80%.

#### d. Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan ditargetkan pada Tahun 2015 sebanyak 18 Desa, sedangkan realisasi pada Tahun 2013 baru sebanyak 14 Desa. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

#### e. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tahun 2015 adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.50 di bawah ini.

**Tabel 2.50.**  
**Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012-2015**

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan				
	- Ketersediaan Energi dan protein per kapita	2.032	2.227	2.248	2.274
	- Penguatan Cadangan Pangan	213,95	222,44	204,39	209,13
2.	Distribusi dan Akses Pangan				
	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	24,58	24,58	48,28	49,95
	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	73,73	73,73	87,07	85,14
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan				
	- Skor pola pangan harapan	87,2	88,3	83,8	83,6
	- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	73,58
4	Penanganan kerawanan pangan				
	- Penanganan daerah rawan pangan	23	7	16	9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

#### 4. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan antara lain dilihat dari jumlah permohonan sertifikat dan jumlah penyelesaian sertifikat di Kabupaten Tegal. Permohonan dan penyelesaian sertifikat secara umum memiliki tren yang meningkat, baik permohonan dan penyelesaian sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan, maupun hak pakai. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Berikut adalah data jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikasi di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2015, sebagaimana Tabel 2.51 di bawah ini.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat Di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011- 2015**

No	Jenis Sertifikat	2011		2012		2013		2014		2015	
		Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)
1.	Permohonan										
	a. Hak Milik	12.976	3.756,8	19.173	9.319,3	20.613	224.363	10.443	4.500.270	16.811	4.350.248
	b. Hak Guna Bangunan	300	809,3	1.134	1.255,9	1.176	582,9	704	269.601	610	400.151
	c. Hak Pakai	12	146,4	48	104,6	80	190,9	51	131.892	100	134.913
	d. Hak Tanggungan	4.707	N/A	4.711	N/A	4.706	N/A	4.714	N/A	4.096	N/A
	e. Roya	2.397	N/A	2.824	N/A	2.433	N/A	2.616	N/A	2.855	N/A
2.	Penyelesaian										
	a. Hak Milik	16.356	6.551,9	19.462	16.353,8	17.801	7.733,4	10.535	457	8.765	3.619.604
	b. Hak Guna Bangunan	337	236,7	834	737,4	1.368	428,8	819	29,85	590	184.164
	c. Hak Pakai	25	182,8	30	98,4	76	171,1	51	13,85	68	65.080
	d. Hak Tanggungan	4.728	N/A	4.823	N/A	7.145	N/A	4.557	N/A	4.324	N/A
	e. Roya	2.268	N/A	2.429	N/A	2.588	N/A	2.489	N/A	2.981	N/A

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2017

## 5. Lingkungan Hidup

### a. Persentase Penataan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolah air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang, dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasangnya alat ukur debit air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah. Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan, sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3, sementara ketentuan administrasi antara lain dimilikinya izin TPS limbah B3 dan dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3.

### b. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan dengan fungsi utama adalah melindungi pelestarian fungsi daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia, dilindungi yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Secara umum tujuan dan penentuan arahan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan lindung adalah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan. Pengelolaan kawasan lindung meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatan perencanaan mencakup penetapan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung dengan menggunakan kriteria tertentu. Kawasan lindung yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari :

1) Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang daerah aliran sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41ha.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Lokasi di Kabupaten Tegal :

- a) Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektar;
- b) Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
- c) Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektar;
- d) Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar;
- e) Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal kawasan ini luasnya kurang lebih 33.593 (tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar tersebar.

4) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Sebagaimana Tabel 2.52 di bawah ini.



**Tabel 2.52.**  
**Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tegal Tahun 2015**

No	Kawasan Suaka Alam	Luas	Lokasi
1	Cagar Alam	2 ha	a. Cagar alam Guci, Bumijawa
		6,6 ha	b. Cagar alam sub vak 18c, 19b, Jatinegara
2	Kawan Suaka alam laut	10,6 ha	Kawasan konservasi perairan Karang Jeruk kecamatan Kramat
3	Pantai berhutan bakau		Pantai berhutan bakau berlokasi di kecamatan Warureja
4	Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan		a. Situs purbakala di desa Semedo kecamatan Kedungbanteng b. Makam Sunan Amangkurat di desa Pesarean kecamatan Adiwerna; c. Makam Ki Gede Sebayu di desa Danawarih kecamatan Balapulang; d. Randu Alas di desa Slawi Kulon kecamatan Slawi; e. Makam Purbaya di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru.

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Pencemaran

Pencemaran di Kabupaten Tegal meliputi pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air pada tahun 2011 yaitu seluas 4 ha. Pencemaran udara pada tahun 2012 dan 2013 seluas 2 ha.

d. Plasma Nutfah dan Terumbu Karang

Plasma nutfah dilindungi dan terancam punah di Kabupaten Tegal adalah plasma nutfah sebanyak 12 jenis hewan, sedangkan plasma nutfah endemik pada 2013 adalah sebanyak 6 jenis. Luas terumbu karang sampai dengan 2013 adalah 10,635 ha, dengan kondisi terumbu karang baik 11,20% dan kondisi terumbu karang buruk 88,80% sebagaimana Tabel 2.53 berikut ini.

**Tabel 2.53.**  
**Jumlah Plasma Nutfah dan Terumbu Karang di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	a. Plasma nutfah dilindungi						
	1). Hewan	12	12	12	12	12	13
	2). Tumbuhan	0	0	0	0	0	0
	b. Plasma nutfah Terancam Punah						
	1). Hewan	12	12	12	12	12	13
	2). Tumbuhan	0	0	0	0	0	0
	c. Plasma nutfah endemik						
	1). Hewan	6	6	6	6	6	7
	2). Tumbuhan	0	0	0	0	0	1
2	Terumbu Karang						
	a. Luas Terumbu Karang (ha)	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,636
	b. Kondisi Terumbu Karang (%)						
	1). Baik	11,20	11,20	11,20	9,69	9,69	9,69
	2). Sedang	0	0	0	0	0	0,009
	3). Rusak	88,80	88,80	88,80	90,31	90,31	90,25

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal , 2017.

e. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi di Kabupaten Tegal adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pada tahun 2016 Kabupaten Tegal hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Penujah, yang terletak di Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 458m<sup>3</sup> perhari. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 960,09m<sup>3</sup> per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 289,89m<sup>3</sup>. Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 168,11m<sup>3</sup> (36,70%) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Tegal secara lengkap dalam kurun waktu 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.54 di bawah ini.

**Tabel 2.54.**  
**Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 (m<sup>3</sup>)**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	436,86	709,70	194,38	251,42	289,89
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	669,52	965,58	989,80	960,09	458
3.	Persentase sampah terangkut	65,25	73,50	19,64	26,19	63,29

Sumber: Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2017

f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 39 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 19.94 ton. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel 2.55 di bawah ini.

**Tabel 2.55**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TPSS (unit)	39	39	50	45	72
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.409.406	1.415.009	1.420.106	1.424.891	1.429.386
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,01414	0,01409	0/S	0/S	0/S

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Indikator Standar Pelayanan Minimal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Cakupan penerbitan e-KTP ditargetkan 100% pada tahun 2015. Namun di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2013 dari 1.299.859 jiwa penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 703.668 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Indikator SPM lainnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada tahun 2015.

Sementara itu, jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal sejumlah 333.130 pada tahun 2015. Untuk Indikator cakupan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebanyak 359.269 orang. Namun demikian, jika disandingkan dengan penduduk di Kabupaten Tegal yang jumlahnya sebanyak 1.424.890 jiwa, maka cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran masihlah sangat kecil. Cakupan penerbitan kutipan akta nikah, oleh Pemerintah telah ditetapkan target capaiannya sebesar 70% pada tahun 2020. Sementara itu, cakupan penerbitan kutipan nikah di Kabupaten Tegal sampai dengan 2013 cukup besar yaitu 902.055. Dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2015), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.56 di bawah ini.

**Tabel 2.56.**  
**Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Tegal Tahun 2012 -2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kepemilikan KTP	1.021.213	1.299.859	675.417	703.668	901.778
2.	Kartu Keluarga (KK)	87.467	87.467	269.818	333.130	336.250
3.	Akte Kelahiran	316.869	331.449	312.930	359.575	419.485
4.	Akte Nikah	901.819	902.055	301.069	297.002	312.182

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Kelompok Binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tegal tahun 2015 sebanyak 508 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 508 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 1 kelompok per LPM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.57 di bawah ini.

**Tabel 2.57.**

#### **Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LPM	563	508	508	508	508
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	563	508	508	508	508
3.	Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : DISPERMADES Kabupaten Tegal Tahun 2017

### b. Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Jumlah PKK di Kabupaten Tegal tahun 2013 sebanyak 6.886 anggota, dengan Jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 33 kelompok. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,005 kelompok per anggota PKK. Ini artinya bahwa setiap 100 PKK aktif di Kabupaten Tegal mempunyai 5 kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

**Tabel 2.58.**  
**Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Tegal Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	a. Jumlah PKK	6.886	6.886	6.886	6.886	6.886
	b. Jumlah PKK Aktif	6.853	6.853	6.853	6.853	6.853
	c. Persentase PKK Aktif	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Sumber : DISPERMADES Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 75 LSM. Jumlah LSM ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2011-2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.59 di bawah ini.

**Tabel 2.59.**  
**Jumlah LSM di Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LSM terdaftar	66	72	73	75	75

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2017

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis layanan dari standar pelayanan minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), Penyediaan Obat dan Alat Kontrasepsi, dan Penyediaan Informasi Data Mikro. Capaian indikator SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini.

**Tabel 2.60.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	1,67%	1,54	1,55%	1,54%	1,38%
2.	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	73,7%	73,3%	72,30%	71,4%	71,85%
3.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	14,36%	14,27%	14,50%	14,54%	13,37%
4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	79%	78,9%	80,30%	81,91%	83,03%
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	83,1%	84,2%	82,80%	81,66%	80,79%
6.	Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB)	0,33	0,33	3,02	0,35	0,32
7.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana	1	1	1	1	1
8.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

**b. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anak dalam keluarga di Kabupaten Tegal adalah 1,45 pada tahun 2015 atau setiap keluarga rata-rata memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Angka ini tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), yaitu setiap keluarga memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.61 di bawah ini.

**Tabel 2.61**  
**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah anak	528.126	551.217	575.490	512.567	520.372
2.	Jumlah keluarga	376.932	381.006	431.974	431.974	430.290
3.	Rata-rata jumlah anak perKeluarga	1,40	1,45	1,33	1,33	1,21

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

**c. Rasio Akseptor KB**

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah

memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 225.499 pesertadari 296.415 pasangan usia subur. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2011-2015 masing-masing adalah 73,37;76,27; 42,15; 44,22 dan 76,08. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.62 di bawah ini.

**Tabel 2.62**  
**Rasio Akseptor KB di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah PUS	252.156	296.415	298.741	300.194	293.088
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	111.505	225.499	216.029	210.239	210.584
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	140.651	70.916	82.712	89.255	82.504
4.	Rasio Akseptor KB	44,22	76,08	72,31	70,27	71,85

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2017

## 9. Perhubungan

### a. Jumlah Izin Trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Jumlah angkutan umum terus meningkat, dimana pada tahun 2013 jumlah angkutan umum sebanyak 2.901 unit. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 126 izin dan 135 izin. Data tentang jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini.

**Tabel 2.63.**  
**Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tegal Tahun 2011 -2014**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Angkutan Umum	1.960	2.012	2.901	2.901
2.	Jumlah Izin Trayek	132	124	126	135

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2017

### b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan ujikir pada tahun 2013 sebanyak 1.465 unit kendaraan dari 2.901 unit kendaraan (50,49%). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan ujikir di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.64 di bawah ini.

**Tabel 2.64.**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Angkutan Umum	2.012	2.901	2.901	940	977
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	832	1.465	1.590	788	774
3	Jumlah Angkutan yang tidak memiliki KIR	123	189	155	152	203

Sumber: Dishub Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. pada tahun 2012 sejumlah 64SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan bahkan relatif tetap. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2011-2015. Sebagaimana Tabel 2.65 dibawah ini.

**Tabel 2.65.**  
**Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No	Surat Kabar	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	44	54	54	54	54
2	Jumlah sistem informasi yang ada	15	15	15	16	26
3.	Jumlah titik <i>hotspot</i> yang difasilitasi pemda	9	9	9	9	1
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	5	3	3	3	3
5.	Jumlah radio komunikasi yang aktif	6	26	26	26	26

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2017

#### 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

##### a. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 sebanyak 285 koperasi meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2011-2013). Sementara itu persentase koperasi sehat terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.66 di bawah.



**Tabel 2.66**  
**Persentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	228	244	277	285	298	312
2.	Jumlah koperasi sehat	179	199	214	141	216	145
3.	Jumlah koperasi tidak aktif	318	317	295	330	331	331
Jumlah		527	546	561	572	629	643
Persentase koperasi Aktif		39,66	41,76	43,50	48,43	47,38	49,60
Persentase koperasi sehat		31,69	32,78	35,47	37,41	34,34	22,55

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2017

**b. Jumlah UKM NonBPR/LKM UKM**

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Pada tahun 2013, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mencapai 30.004 meningkat dibanding tahun 2012 yang berjumlah 29.214 UKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.67 di bawah ini.

**Tabel 2.67**  
**Jumlah UKM NonBPR/LKM di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	28.980	29.214	30.004	29.995	33.520	33.530
2	UKM formal	187	100	486	512	3.941	4.193
3	UKM non Formal	28.793	29.114	29.518	29.483	29.579	29.337

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2017 dan BPS Kabupaten Tegal

**c. Jumlah BPR/LKM**

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut ini.

**Tabel 2.68.****Jumlah BPR/LKM Non Koperasi di Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah BPR	13	13	13	13	11	11
2	Jumlah LKM Non Koperasi	557	557	557	572	618	207

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 12. Penanaman Modal

## a. Jumlah Investor Berskala Nasional(PMDN/PMA)

Upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal sampai tahun 2015 mencapai 4.658 investor, yaitu terdiri dari 4.656 investor dalam negeri dan 2 investor asing. Jika melihat data pada Tabel di bawah, maka ada peningkatan data jumlah investor PMDN pada Tahun 2014 di bandingkan Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan data Tahun 2014 penanaman modal langsung masyarakat yang ijinnya dikeluarkan BP2T terhitung sebagai jumlah investor PMDN, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya jumlah investor PMDN yang ijinnya dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.69 di bawah ini.

**Tabel 2.69.****Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Jumlah Investor				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	PMDN	545	327	3.046	4.656	4.806
2.	PMA	3	1	1	2	2
3.	Total	548	328	3.047	4658	4.806

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2017

## b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah realisasi proyek PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebanyak 4.806 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp724.380.209.176, dan proyek PMA tahun 2015 sebanyak - proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini.

**Tabel 2.70.****Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2011	545	118.407.881.000	3	86.300.000.000
2012	327	205.418.384.000	1	17.500.000.000
2013	3.046	774.269.500.000	1	40.000.000.000
2014	4.658	642.443.030.153	2	70.000.000.000
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2017

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Pada tahun 2011-2015 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Tegal sebanyak 16 buah, sedangkan jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tegal pada tahun 2011-2015 sebanyak 56 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.71 di bawah ini.

**Tabel 2.71.**

**Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga  
di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	16	16	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	56	56	56	56	56

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2017

### 14. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Statistik. Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2011-2015. Sebagaimana Tabel 2.72 berikut ini.

**Tabel 2.72.****Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2016**

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√		√	
3.	Suseda		√		√		√		√		√		√
4.	KDA	√		√		√		√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio		√		√		√		√		√		√
6.	Input Output		√		√		√		√		√		√
7.	NTP		√			√		√		√		√	
	IHK		√		√		√	√		√		√	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2017

**15. Kebudayaan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Tegal dari tahun 2011-2015 sebanyak 311 buah, gedung kesenian 1 buah dan jumlah museum dan pusat kebudayaan 9 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 di bawah ini.

**Tabel 2.73.****Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	Kebudayaan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Group Kesenian	311	311	311	311	311
2.	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	8	9	9	9	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017

**16. Perpustakaan**

Selama kurun waktu 2010-2015, Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh sekolah pada tahun 2014 meningkat menjadi 840 unit dibandingkan Tahun 2013 yang sebanyak 828 unit. Bertambahnya jumlah perpustakaan sekolah pada Tahun 2013 disebabkan ada kegiatan yang bersumber dari DAK dan APBD untuk pembangunan perpustakaan sekolah. Secara total jumlah perpustakaan mengalami peningkatan, di tahun 2013 menjadi 867 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.74 di bawah ini.

**Tabel 2.74.****Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah(milik	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Sekolah	414	414	539	539	539
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	28	34	34	34	34
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	5	5	6	6	6
3.	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	448	454	580	580	580

Sumber : Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, Tahun 2017

### 17. Kearsipan

#### a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, dari 64 SKPD di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 ada 54 SKPD yang telah menerapkan arsip baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut ini.

**Tabel 2.75.****Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara	52	52	54	54	54
2.	Jumlah SKPD dan Bagian	64	64	64	64	64
3.	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	81,25	81,25	84,37	84,37	84,37

Sumber : Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2016

#### 2.1.4.3 Fokus Layanan Pilihan

##### 1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.315.879 kg. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2012-2015). Sedangkan jumlah produksi perikanan di perairan budidaya pada tahun 2016 sebanyak 1.874.041kg, jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2016 mencapai 20,43 kg/perkapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.76 di bawah ini.

**Tabel 2.76.**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tegal**  
**Pada Tahun 2012 – 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perikanan laut					
	- Produksi (kg)	1.188.027	1.003.155	866.234	796.631	1.315.879
	- Nilai (Rp 000)	7.283.746	6.803.889	6.875.228	7.447.623	9.436.612
2.	Perairan Umum					
	- Produksi (kg)	105.845	155.010	143.675	189.390	247.810
	-Nilai (Rp 000)	770.065	1.314.155	1.263.695	1.786.754	2.920.102
3.	Perikanan Budidaya					
	- Produksi (kg)	215.258	1.349.821	1.255.106	2.059.158	1.874.041
	-Nilai (Rp 000)	4.755.076	21.571.635	21.432.905	36.926.775	40.937.539
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn )	5,60	7,57	16,14	19,46	20,43

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2017

a. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku adalah 0,20% dan berdasar harga konstan adalah 0,26% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.77. Kontribusi ini relatif kecil dan perkembangannya stagnan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.77.**  
**Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2010 - 2014**

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kontribusi Sektor Perikanan :					
	- ADH Berlaku	15.799,93	18.023,48	20.585,61	22.410,19	O/S
	- ADH Konstan	9.799,21	10.224,00	10.982,13	11.172,51	O/S
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	7.936.028,7	8.798.459,34	9.802.454,69	10.983.141,94	22.916.470
	- ADH Konstan	3.627.198,2	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,7
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thdPDRB					
	- ADH Berlaku	0,20	0,20	0,21	0,20	O/S
	- ADH Konstan	0,27	0,26	0,27	0,26	O/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017

## 2. Pariwisata

### a. Kunjungan Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2011-2015 sebanyak 37 obyek. Jumlah kunjungan ke-37 obyek wisata tersebut sebanyak 416.081 orang pada tahun 2015. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2011-2013). Hal ini disebabkan makin banyaknya obyek wisata baru di luar Kabupaten Tegal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 di bawah ini.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	0/S	0/S
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	527.516	499.252	416.243	0/S	0/S
	a. Wisatawan Manca Negara	151	159	162	0/S	0/S
	b. Wisatawan Nusantara	527.365	499.193	416.081	0/S	0/S
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata(orang)	14.263	15.714	11.245	0/S	0/S

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2017

### b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Penghitungan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian merupakan hal yang sulit dilakukan, karena sifat pariwisata yang multi-sektor; dimana dalam kepariwisataan tercakup sektor angkutan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor pertanian (jika merupakan wisata agro), sektor industri pengolahan (terutama souvenir), serta sektor keuangan. Meskipun demikian, sebagai sektor yang termasuk dalam sektor jasa, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengukur kontribusi sektor jasa dalam PDRB.

Pada tahun 2014, kontribusi sektor jasa berdasar harga berlaku adalah 5,99% dan berdasar harga konstan adalah 6,07% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.79. Dari kontribusi tersebut, sebagian besar kontribusinya disumbangkan oleh jasa pemerintahan umum. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan idealnya adalah mengurangi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, kecuali untuk pengadaan infrastruktur dan penerapan regulasi. Ketika ekonomi tumbuh dengan normal, intervensi pemerintah sedapat mungkin dikurangi karena akan menjadikan pasar menjadi tidak sempurna. Karena itu, tugas yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tegal adalah untuk menjadikan jasa pemerintahan umum memiliki daya ungkit yang optimal.

**Tabel 2.79.**  
**Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2010 -2014**

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kontribusi Sektor Jasa-Jasa					
	-ADH Berlaku	483.065,00	531.500,68	589.228,88	657.748,53	0/S
	-ADH Konstan	221.670,29	231.973,22	245.076,15	257.115,28	0/S
2.	Jumlah PDRB					
	-ADH Berlaku	7.936.028,74	8.798.459,34	9.802.454,69	10.989.141,94	22.916.470
	-ADH Konstan	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71
	Persentase Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB					
3.	-ADH Berlaku	6,09	6,04	6,01	5,99	0/S
	-ADH Konstan	6,11	6,10	6,13	6,07	0/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014)

### 3. Pertanian

#### a.Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2015 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2015. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh sebagaimana Tabel 2.80 berikut ini.

**Tabel 2.80.**  
**Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyuluh PNS :					
	a. Pertanian	93	89	88	88	88
	b. Perikanan	6	6	6	6	6
	c. Kehutanan	20	15	13	15	15
2.	Penyuluh THL – TBPP	83	82	81	81	81
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	44	44	44	44	132
	b. Perikanan	12	11	15	15	11
	c. Kehutanan	30	30	30	30	30
	Jumlah	288	277	277	279	363

Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Tahun 2015

#### b. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil.



Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha.Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha. Secara lengkap data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut ini.

**Tabel 2.81.**

**Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Padi</b>					
	Luas Tanam (ha)	59.778	59.691	64.713	64.819	76.761
	Luas Panen (ha)	59.666	61.575	60.618	62.628	65.499
	Produksi (ton)	354.538	354.538	325.928	382.161	394.023
	Produktivitas (ton/ha)	5,94	5,76	5,38	6,10	6,02
2.	<b>Jagung</b>					
	Luas Tanam (ha)	15.015	16.038	17.650	0/S	12.799
	Luas Panen (ha)	15.029	15.384	15.423	16.141	15.699
	Produksi (ton)	114.344	114.344	100.731	121.994	118.288
	Produktivitas (ton/ha)	7,61	7,43	6,53	7,55	7,53
3.	<b>Kedelai</b>					
	Luas Tanam (ha)	267	43	35	92	68
	Luas Panen (ha)	253	43	31	90	60
	Produksi (ton)	408	59	49	166	108
	Produktivitas (ton/ha)	1,61	1,35	1,58	1,86	1,81
4.	<b>Ketela Pohon</b>					
	Luas Tanam (ha)	617	572	480	387	292
	Luas Panen (ha)	563	564	501	501	287
	Produksi (ton)	10.769	9.975	9.131	9.122	6.710
	Produktivitas (ton/ha)	19,13	17,68	18,24	18,22	23,35
5.	<b>Ketela Rambat</b>					
	Luas Tanam (ha)	206	177	177	83	50
	Luas Panen (ha)	185	168	168	95	55
	Produksi (ton)	2.044	1.744	1.744	933	637
	Produktivitas (ton/ha)	11,05	10,40	10,40	10,51	11,56
6.	<b>Kacang Tanah</b>					
	Luas Tanam (ha)	350	290	191	199	126
	Luas Panen (ha)	308	290	187	197	135
	Produksi (ton)	1.017	564	354	494	363
	Produktivitas (ton/ha)	3,30	1,94	1,89	2,51	2,69
7.	<b>Kacang Hijau</b>					
	Luas Tanam (ha)	67	33	159	55	11
	Luas Panen (ha)	65	8	142	58	14
	Produksi (ton)	70	7	167	60	16
	Produktivitas (ton/ha)	1,08	0,96	1,17	1,04	1,20
	<b>Sayuran dan Buah Semusim</b>					
1.	<b>Bawang Merah</b>					

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Luas Tanam (ha)	1.696	2.548	2.272	1.783	1.926
	Luas Panen (ha)	1.801	2.060	2.518	2.091	1.884
	Produksi (ton)	16.683	243.412	284.775	212.204	19.828
	Produktivitas (ton/ha)	9,26	11,82	11,31	10,15	10,52
2.	<b>Cabe</b>					
	Luas Tanam (ha)	474	539	484	303	327
	Luas Panen (ha)	600	536	543	353	328
	Produksi (ton)	4.699	4.628	3.994	3.130	3.581
	Produktivitas (ton/ha)	7,83	8,63	7,35	8,87	10,92
3.	<b>Kentang</b>					
	Luas Tanam (ha)	494	485	406	418	459
	Luas Panen (ha)	440	418	481	348	548
	Produksi (ton)	5.791	4.256	4.723	3.761	11.866
	Produktivitas (ton/ha)	13,16	10,18	9,83	10,81	21,65
4.	<b>Kubis</b>					
	Luas Tanam (ha)	901	1.214	1.280	1.179	1.162
	Luas Panen (ha)	929	1.190	1.280	1.276	1.202
	Produksi (ton)	13.278	17.545	17.445	21.313	22.619
	Produktivitas (ton/ha)	14,29	14,74	13,63	16,70	18,82
5.	<b>Semangka</b>					
	Luas Tanam (ha)	82	130	111	109	123
	Luas Panen (ha)	84	127	114	109	123
	Produksi (ton)	1.160	2.134	1.405	1.389	1.689
	Produktivitas (ton/ha)	13,81	16,80	12,32	12,74	13,73
	<b>Tanaman Hias</b>					
1.	<b>Melati</b>					
	Luas Tanam (ha)	45	2	13	1	-
	Luas Panen (ha)	330	371	338	337	341
	Produksi (ton)	1.011	9.542	8.505	5.807	4.796
	Produktivitas (ton/ha)	3,07	25,70	25,17	17,23	14,07
	<b>Perkebunan Rakyat</b>					
1.	<b>Kelapa Dalam</b>					
	Luas Tanam (ha)	4.676	4.575	4.286	4.186	3.665
	Luas Panen (ha)	2.472	2.399	2.383	2.283	2.123
	Produksi (ton)	2.462	1.774	2.257	2.155	1.887
	Produktivitas (ton/ha)	1,00	0,74	0,95	0,94	0,89
2.	<b>Cengkeh</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.123	1.065	1.220	1.282	1.325
	Luas Panen (ha)	779	690	662	768	765
	Produksi (ton)	206	103	122	85	140
	Produktivitas (ton/ha)	0,27	0,15	0,18	0,11	0,18
3.	<b>Teh</b>					
	Luas Tanam (ha)	158	158	171	163	163
	Luas Panen (ha)	121	121	122	121	129
	Produksi (ton)	60	36	24	35	35
	Produktivitas (ton/ha)	0,50	0,30	0,20	0,29	0,27
4.	<b>Tebu</b>					
	Luas Tanam (ha)	5.455	5.130	5.458	3.548	3.265
	Luas Panen (ha)	5.431	5.130	5.458	3.548	3.265
	Produksi (ton)	24.413	19.713	18.997	15.872	14.299
	Produktivitas (ton/ha)	4,50	3,84	3,48	4,47	4,38

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2017

c. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,33% dan berdasar harga konstan mencapai 14,86% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.83. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah dari pada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel 2.82 di bawah ini.

**Tabel 2.82.**

**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal  
Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	1.223.219,79	1.336.175,79	1.464.711,78	3.411.484,14	3.869.869,62
	- ADH Konstan	601.982,18	616.463,04	628.957,21	2.647.364,02	2.831.399,07
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	8.798.459,34	9.802.454,69	10.989.141,94	22.916.470	25.577.284,21
	- ADH Konstan	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71	18.958.363,83
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	13,90	13,63	13,33	14,89	15,13
	- ADH Konstan	15,83	15,41	14,86	13,97	14,93

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

d. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2016 jumlah produksi daging mencapai 9.675.621kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 4.69 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015, di mana produksi daging mencapai 6.809.218kg dan konsumsi daging 4.61 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 3.776 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.203.264kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun menurun dibanding tahun 2012 sampai 2013. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.83 di bawah ini.

**Tabel 2.83.**  
**Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2012- 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	3.501.325	4.277.163	6.256.165	6.809.218	9.675.621
	Konsumsi (kg/kapita/th)	3,96	4,04	4,73	4,61	4,69
2.	Telur					
	Produksi (kg)	4.929.109	10.426.944	10.573.686	10.861.860	10.203.264
	Konsumsi (kg/kapita/th)	3,06	3,12	4,15	4,71	4,80
3.	Susu					
	Produksi (kg)	714.950	623.002	533.563	633.323	713.192
	Konsumsi (kg/kapita/th)	0,47	0,47	0,38	0,42	0,43

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun 2017

e. Persentase Hutan dan Lahan Kritis dalam hutan yang Direhabilitasi

Luas kawasan hutan di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 23.881ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 seluas 20.788ha, mengalami peningkatan. Sedangkan luas lahan kritis tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yaitu 2.033 sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.84 di bawah ini.

**Tabel 2.84.**  
**Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam hutan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Hutan (Ha)	21.074	21.074	20.788	20.788	23.881
2.	Luas Lahan Kritis dalam hutan (Ha)	2.328	1.222	1.541	1.541	2.033
	Presentase Lahan Kritis dalam hutan	11,04	5,80	7,42	7,42	8,51

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Tegal, 2016

f. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 mencapai 6,49% dari 23.739,80 ha. Persentase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun 2011-2012 di mana pada tahun-tahun tersebut kerusakan kawasan hutan pada tahun 2011 mencapai 21,87% dari 21.072,20 ha dan 11,04% dari 21.074,20 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.82 di atas.

g. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2014 berdasar harga berlaku adalah sebesar 0,56%, dan berdasar harga konstan adalah 0,58% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.83. Sektor kehutanan relatif memberikan kontribusi yang relatif kecil pada perekonomian wilayah, dan bukan merupakan sektor basis di Kabupaten

Tegal. Fokus pengembangan sektor kehutanan ini idealnya adalah menetapkan bagian kawasan hutan sebagai kawasan lindung, sedangkan kawasan hutan di luar kawasan lindung dapat dimanfaatkan dengan mengacu pada keseimbangan ekosistem sebagai pertimbangan utamanya, demi mencapai keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sebagaimana Tabel 2.85 di bawah ini.

**Tabel 2.85.**  
**Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2010 - 2014**

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kontribusi Sektor Kehutanan:					
	- ADHBerlaku	42.744,93	49.846,35	54.374,27	61.869,62	0/S
	- ADHKonstan	22.247,46	23.634,02	24.353,92	24.553,99	0/S
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADHBerlaku	7.936.028,74	8.798.459,34	9.802.454,69	10.989.141,94	22.916.470
	- ADHKonstan	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71
3.	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB					
	- ADHBerlaku	0,53	0,56	0,55	0,56	0/S
	- ADHKonstan	0,61	0,62	0,60	0,58	0/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017

#### 4. Energi dan Sumberdaya Mineral

##### a. Energi

Beberapa potensi energi di Kabupaten Tegal yang dapat dimanfaatkan antara lain energi panas bumi (*geothermal*), energi Mikrohidro, energi Biogas, energi matahari (surya) dan energi bahan bakar nabati (limbah organik)

##### b. Sumber Daya Mineral Pertambangan

Kondisi pengelolaan sumberdaya mineral di Kabupaten Tegal masih dilakukan dengan pertambangan rakyat. Pengelolaan bahan galian di Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalan potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Luas penambangan tanpa izin di Kabupaten Tegal pada tahun 2011 mencapai 33,33 ha, dari luasan ini yang berhasil ditertibkan seluas 12,68 ha (38,03%). Sedangkan pada tahun 2012, luas penambangan tanpa izin mencapai 20,75 ha. Dari luasan tersebut telah dilakukan penertiban seluas 16,75 ha (80,73 %). Langkah penanganan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan dan mendorong kepada para pengusaha yang belum berijin untuk mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan. Sebagaimana Tabel 2.86 di bawah ini.

**Tabel 2.86****Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha)	12,68	16,75	16,75	16,75	0/S
2.	Total luas penambangan tanpa izin (ha)	33,33	20,75	20,75	20,75	0/S
3.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	38,03	80,73	80,73	80,73	0/S

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten tegal Tahun 2017

c. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 2,32% dan berdasar harga konstan adalah sebesar 2,64%, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.85. Secara umum, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pengembangan sektor ini cenderung akan merusak lingkungan hidup. Selain itu, proses yang hanya ekstraktif akan memberikan nilai tambah yang relatif kecil pada perekonomian. Kabupaten Tegal seharusnya tidak memprioritaskan pengembangan sektor pertambangan dan penggalian untuk menggenjot ekonomi wilayah. Sebagaimana Tabel 2.87 berikut ini.

**Tabel 2.87.**

**Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010- 2014**

No.	Uraian	dalam Jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>1.</b>	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian :					
	- ADH Berlaku	177.827,13	201.359,84	226.223,47	254.874,25	0/S
	- ADH Konstan	93.260,34	98.166,72	105.739,77	111.908,12	0/S
<b>2.</b>	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	7.936.028,74	8.798.459,34	9.802.454,69	10.989.141,94	22.916.470
	- ADH Konstan	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71
<b>3.</b>	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	2,24	2,29	2,31	2,32	0/S
	- ADH Konstan	2,57	2,58	2,64	2,64	0/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

d. Kegeologian

Kondisi wilayah Kabupaten Tegal yang terdiri dari pegunungan, dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk dataran rendah Kabupaten Tegal sepanjang Pantura Pulau Jawa, sedangkan dataran tinggi berada di bagian Selatan Kabupaten Tegal yang didominasi oleh pegunungan yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya. Potensi bencana yang

timbul akibat morfologi wilayah antara lain banjir didaerah pantura dan tanah longsor terutama untuk kawasan dataran tinggi. Beberapa wilayah di Kabupaten Tegal yang rawan bencana geologi terdapat di wilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan yaitu rawan terhadap bencana alam gunung api akibat aktivitas Gunung Slamet yang ada di wilayah kecamatan Bojong dan Bumijawa. Namun demikian, penanganan kejadian bencana telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena dampak untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan bencana alam telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun instansi di Kabupaten Tegal.

e. Sumberdaya Air Tanah

Sumber daya air tanah di Kabupaten Tegal sebagian besar berasal dari sumber mata air yang sebagian besar berasal dari sumber air diwilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032, Luas keseluruhan mata air yang ada di Kabupaten Tegal mencapai 315 ha yang tersebar di 35 sumber mata air

5. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 mencapai Rp111.280.610,00. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai Rp157.883.010.000,00 dari tahun sebelumnya 2009 sebesar Rp298.699.190.000,00. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di KabupatenTegal selama kurun waktu 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.88 di bawah.

**Tabel 2.88.**  
**Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di KabupatenTegalTahun 2011- 2015**

No.	Uraian	(Dalam Ribuan)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai Ekspor	157.883.010	216.165.150	111.280.610	147.007.019	153.188.157.270
2.	Nilai Impor	21.231.264	21.235.936	21.239.567	20.782.118	64.630.930.460
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	136.651.746	194.929.214	90.041.043	126.224.901	88.557.226.810

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2017

b. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2014 kontribusi sektor perdaganganterhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 31,27% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 29,13%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan dengan tren yang stabil meningkat, maka sektor perdagangan selainnya menjadi sektor utama yang dikembangkan. Ditopang

dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut ini.

**Tabel 2.89.**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)**  
**terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2010 – 2014**

No.	Uraian	Dalam jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) :					
	- ADH Berlaku	2.469.905,87	2.742.309,16	3.044.992,49	3.434.444,14	0/S
	- ADH Konstan	1.033.102,87	1.099.551,16	1.159.536,11	1.233.378,29	0/S
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	7.936.028,74	8.798.459,34	9.802.454,69	10.983.141,94	22.916.470
	- ADH Konstan	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) thd PDRB					
	- ADH berlaku	31,12	31,16	31,06	31,27	0/S
	- ADH Konstan	28,48	28,92	28,97	29,13	0/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2017

## 7. Perindustrian

### a. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Tegal mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tegal, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Tegal meningkat, yaitu dari 29.168 industri pada Tahun 2012 menjadi 29.246 industri pada Tahun 2013. Ada peningkatan yang terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2012 berjumlah sebanyak 29.021 industri, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 29.110 industri.

Namun demikian ada penurunan jumlah industri menengah, dimana pada Tahun 2012 sebanyak 138 industri, maka pada Tahun 2013 menurun menjadi 127 industri. Berkurangnya sebanyak 11 industri menengah pada jenis industri pengolahan. Apabila dilihat dari Tabel pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industri kecil dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 106 industri kecil. Pada industri menengah mengalami fluktuasi jumlah industri dengan pertumbuhan sebanyak 6 industri, sedangkan industri besar naik sebanyak 2 industri. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.90 dan Tabel 2.91 di bawah ini.



**Tabel 2.90.**  
**Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2016**

No	Tahun	Jenis Industri												Jumlah		
		Pengo lahan		ILME		Kimia & Kertas		Tekstil & Aneka			Agro					
		IM	IK	IM	IK	IM	IK	IB	IM	IK	IB	IM	IK	IB	IM	IK
1	2011	180	0	21	2.911	7	4.803	2	1	11.688	7	11	9.539	9	220	28.941
2	2012	99	0	21	2.911	7	4.803	2	1	11.748	7	10	9.559	9	138	29.021
3	2013	88	0	21	2.929	7	4.803	2	1	11.819	7	10	9.559	9	127	29.110
4	2014	-	-	21	2.948	8	4.832	3	1	11.837	5	18	9.577	8	48	29.194
5	2015			21	2.955	8	4.832	5	1	11.842	5	18	9.937	10	48	29.566
6	2016			21	2.171	8	396	5	1	1605	5	18	6130	10	48	10.290

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2015

Ket : IB. Industri Besar  
IM. Industri Sedang  
IK. Industri Kecil

**Tabel 2.91.**  
**Total Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Industri Besar	9	9	8	10	10
2	Industri Menengah	138	127	48	48	48
3	Industri Kecil	29.021	29.110	29.194	29.566	10.290
Jumlah total industri		29.170	29.168	29.246	29.624	10.348

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2017

**b. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**

Sektor industri di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri makanan, tekstil dan mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya pabrik teh yang berskala nasional, serta industri kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan serta tempe dan tahu. Industri tekstil didorong dengan adanya usaha konfeksi yang relatif maju dan sudah dapat menembus pasar daerah lain.

Sementara, industri mesin merupakan industri yang sudah ada sejak lama; sesuai dengan julukan Kabupaten Tegal sebagai Jepang-nya Indonesia. Industri mesin ini didukung dengan adanya UPT LIK Takaru di Kecamatan Kramat yang merupakan sumber difusi inovasi bagi pengembangan usaha produksi mesin. Sektor perindustrian di Kabupaten Tegal berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 28,85% dan berdasarkan harga konstan mencapai 29,85%. Sebagaimana Tabel 2.92 dibawah ini.

**Tabel 2.92.**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2010- 2014**

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kontribusi Sektor Perindustrian :					
	- ADH Berlaku	2.258.449,68	2.520.861,05	2.852.306,07	3.168.992,01	0/S
	- ADH Konstan	1.075.035,66	1.130.961,65	1.190.720,97	1.263.833,50	0/S
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	7.936.028,74	8.798.459,34	9.802.454,69	10.983.141,94	22.916.470
	- ADH Konstan	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	4.233.513,40	18.955.755,71
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	28,46	28,65	29,09	28,85	0/S
	- ADH Konstan	29,64	29,74	29,75	29,85	0/S

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017

### 8. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Transmigrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi bedol desa. Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Tegal. Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.93 di bawah ini :

**Tabel 2.93.**  
**Jumlah Transmigran Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Tahun					2016
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Transmigran Umum	41	63	42	13	23	29
2	Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0	0
3	Transmigran bedol Desa	0	0	0	0	0	0
4	Animo Transmigran	21	19	31	58	15	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yang dijajaki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai darah tujuan transmigrasi, yaitu: Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kurubaya.

### 2.1.4.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2011-2015. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.94 di bawah ini.

**Tabel 2.94.**  
**Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		√		√		√		√		√
2.	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		√		√	√			√		√
3.	Dokumen Renstra SKPD yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		√		√	√			√		√
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√	
5.	Dokumen Renja SKPD yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		√		√	√		√		√	

Sumber: Bappedadan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 2. Keuangan

##### a. Administrasi Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tegal masih berupaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal belum terlalu baik.

##### b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Kabupaten Tegal dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD

secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pendataan aset, melaluisertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset; serta penyelesaiankasus/sengketa.

### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

#### a. Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal

Penataan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui diklat aparatur. Pelaksanaan diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2011-2015 adalah sebagaimana Tabel 2.95 di bawah ini.

**Tabel 2.95.**  
**Jumlah Peserta Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

No.	Diklat	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Teknis	63	45	9	223	324
2.	Fungsional	21	15	9	28	50
3.	Kepemimpinan	40	40	54	24	32

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2017

### 4. Penelitian dan Pengembangan

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 5. Fungsi Lainnya

#### a. Pengawasan

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Tegal telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.96 di bawah ini.

**Tabel 2.96.**  
**Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Penegakan Perda</b>					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	153	459	528	637	293
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	107	390	451	510	192
	c. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	69,93	84,97	85,41	80,06	65,53

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
2.	<b>Penegakan K3</b>					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	222	338	294	204	597
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	133	254	233	180	571
	c. Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%)	59,91	75,15	79,25	88,23	95,64

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2017

### 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.1.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Komposisi Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indeks PPP. Sebagaimana Tabel 2.97 dibawah ini.

**Tabel 2.97.**

#### **Persentase Rumah Tangga Kabupaten Tegal Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Tahun 2011 - 2014**

Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)	2011	2012	2013	2014
1. 60.000-79.999	-	-	-	0/S
2. 80.000-99.999	-	-	-	
3. 100.000-149.999	1,62	1,47	1,63	
4. 150.000-199.999	6,00	8,25	4,92	
5. 200.000-299.999	27,82	23,41	27,29	
6. ≥300.000	64,56	66,88	66,16	

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pola pengeluaran rumah tangga Kabupaten Tegal per kapita per bulan menarik untuk dianalisa. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2013 sebagian besar rumah tangga berada pada tingkat pengeluaran per kapita per bulan ≥Rp300.000,00 yaitu sebesar 66,16% kemudian disusul golongan pengeluaran Rp200.000,00- Rp299.999,00 yaitu sebesar 27,29%. Dari Tabel diatas dapat dilihat tidak ada rumah tangga pada dua golongan

pengeluaran terkecil. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik. Selain itu juga dapat dilihat adanya pergeseran tingkat pengeluaran dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli penduduk.

Apabila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita per bulan setiap rumah tangga di Kabupaten Tegal terjadi pergeseran pola pengeluaran. Pengeluaran makanan menunjukkan adanya penurunan sebaliknya pengeluaran untuk nonmakanan cenderung mengalami peningkatan. Struktur perekonomian dengan pola pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga di Kabupaten Tegal sudah menuju ke pola masyarakat yang lebih modern dengan ciri pengeluaran untuk non makanan cenderung lebih besar daripada pengeluaran untuk makanan. Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita per bulan Kabupaten Tegal cenderung lebih besar untuk makanan yaitu 56,98% dan sisanya 43,02% pengeluaran untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tegal masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagaimana Tabel 2.98 di bawah ini.

**Tabel 2.98.**  
**Persentase Jenis Pengeluaran Per Kapita per Bulan di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011- 2014**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014
1. Makanan	59,33	56,98	56,91	0/S
2. Non Makanan	40,67	43,02	43,09	0/S

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Hasil-hasil yang telah dicapai pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tegal, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan petaninya diketahui melalui Nilai Tular Petani (NTP). NTP merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang jasa lain yang dibeli petani. Dari tabel dibawah dapat dilihat Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan dari 167.18 pada tahun 2014 menjadi 202,84 pada tahun 2015, artinya harga di tingkat produsen atas hasil produksi petani untuk sektor pertanian mengalami kenaikan 17,24%. Indeks harga yang dibayar petani juga mengalami kenaikan dari 134.15 pada tahun 2014 menjadi 139,78 pada tahun 2015, artinya harga eceran barang dan jasa yang dibeli petani untuk memenuhi konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 4,03%. Secara umum Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan dari 124.62 pada tahun 2014 menjadi 145,11 pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.99 di bawah

**Tabel 2.99.**  
**Nilai Indeks Variabel NTP Gabungan Tahun 2012-2015**  
**Kabupaten Tegal**

VARIABEL		2012	2013	2014	2015
1	Indeks Harga yang Diterima Petani	170,79	184,65	167,18	202,84
2	Indeks Harga yang Dibayar Petani	152,08	171,33	134,15	139,78
2.1	Konsumsi Rumah Tangga	158,37	178,50	137,19	142,82
2.2	Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	130,91	147,37	127,51	132,7
3	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>112,30</b>	<b>107,78</b>	<b>124,62</b>	<b>145,11</b>

Sumber : Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2017

c. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio panjang jalan Kabupaten Tegal per jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.100 dibawah ini.

**Tabel 2.100.**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan (km)	886,82	886,82	886,82	886,82	970,64
2.	Jumlah Kendaraan (unit)	134.614	134.581	134.516	0/S	283.481
3.	Rasio	65,87	65,89	65,92	0/S	0/S

Sumber: BPS Kabupaten Tegal , 2017

d. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratiomaka* semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya

beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.101 di bawah ini.

**Tabel 2.101.**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk Produktif	908.975	933.282	974.966	938.298	929.207
2.	Penduduk Non Produktif	482.335	507.101	440.043	481.834	495.683
3.	RasioKetergantungan	53.06	54.33	45,13	51,35	0/S

Sumber BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017








## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPd KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2019.

### 2.2.1 FOKUS URUSAN WAJIB

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 7 program untuk mencapai 56 indikator kinerja. Urusan Pendidikan kesemuanya dilaksanakan oleh Disdikpora. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2016.

**Tabel 2.101.**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2016 Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
1	APK PAUD/TK (4-6 th)	80	67	33,70	48,63	Disdikpora	
2	APK PAUD/KB (0-4 th)	75	65	26,86	41,32	Disdikpora	
3	APM PAUD TK	66,02	60,02	59,64	99,37	Disdikpora	
4	Persentase PAUD terakreditasi	30	14	33,15	236,79	Disdikpora	
<b>2</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>						
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A	113	111	105,90	95,41	Disdikpora	
2	APM SD/SDLB/MI/Paket A	99	97,93	92,36	94,31	Disdikpora	
3	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99	96,28	117,28	121,81	Disdikpora	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
4	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93,49	90,74	97,80	107,78	Disdikpora	★
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,13	0,19	0,12	136,84	Disdikpora	★
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,50	0,58	0,06	189,65	Disdikpora	★
7	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99,99	99,99	99,99	100,00	Disdikpora	★
8	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,99	99,99	99,98	99,99	Disdikpora	★
9	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	22,71	21,36	70,74	331,18	Disdikpora	★
10	Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	23,74	22,84	54,17	237,17	Disdikpora	★
11	Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	93,54	90,79	80,00	88,12	Disdikpora	➡
12	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	85,13	82,63	75,00	90,77	Disdikpora	➡
13	Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	33,82	32,32	77,00	238,24	Disdikpora	★
14	Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	50	47	80,00	170,21	Disdikpora	★
15	Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	56	41	45,00	109,76	Disdikpora	★
16	Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	27	5	88,00	1.760,00	Disdikpora	★
17	Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	24	5	80,00	1.600,00	Disdikpora	★
18	Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	56	40,8	42,00	102,94	Disdikpora	★
19	Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	45	25	25,00	100,00	Disdikpora	★
20	Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	21,2	12,6	25,00	198,41	Disdikpora	★
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>						
1	APK SMA/SMALB/MA/Paket C	64,85	61,85	80,01	129,36	Disdikpora	★
2	APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,04	56,04	62,55	111,62	Disdikpora	★
3	Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/Paket C	0,40	0,46	0,50	91,30	Disdikpora	★
4	Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/Paket C	99,99	99,99	99,98	99,99	Disdikpora	★
5	Nilai rata-rata UN SMA/SMALB/MA/Paket C	39,49	37,84	58,27	153,99	Disdikpora	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
6	Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SPM	88,28	85,69	100,00	116,70	Disdikpora	★
7	Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SPM	32,5	31	25,00	80,65	Disdikpora	➡
8	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C memiliki sanitasi layak	22,5	15	22,00	146,67	Disdikpora	★
9	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C melaksanakan Kurikulum 2013	30	15	25,00	166,67	Disdikpora	★
<b>4</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>						
1	Angka Kelulusan Paket A	99,99	97	99,99	103,08	Disdikpora	★
2	Angka Kelulusan Paket B	99,99	99	99,98	100,99	Disdikpora	★
3	Angka Kelulusan Paket C	99,99	99,99	99,98	99,99	Disdikpora	★
4	Persentase LKP kinerja A dan B	10	4	0,00	0,00	Disdikpora	★
5	Persentase Buta Aksara > 15 tahun	2,50	4,00	6,75	168,75	Disdikpora	★
6	Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100	100	100,00	100,00	Disdikpora	★
<b>5</b>	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>						
1	Angka kelulusan SDLB	99,99	99,99	100,00	100,01	Disdikpora	★
2	Angka kelulusan SMPLB	99,99	99,99	100,00	100,01	Disdikpora	★
3	Angka kelulusan SMALB	99,99	99,99	100,00	100,01	Disdikpora	★
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>						
1	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV	35	34,5	36,00	104,35	Disdikpora	★
2	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV	85	79	89,85	113,73	Disdikpora	★
3	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV	100	100	100,00	100,00	Disdikpora	★
4	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkualifikasi S1/DIV	100	100	100,00	100,00	Disdikpora	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
5	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	26	19	26,87	141,42	Disdikpora	★
6	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	84,5	83	91,00	109,64	Disdikpora	★
7	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	81,5	80	90,00	112,50	Disdikpora	★
8	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik	89,7	86,7	88,00	101,50	Disdikpora	★
7	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>						
1	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	12	6	49,00	816,67	Disdikpora	★
2	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	25,5	12,9	9,00	69,77	Disdikpora	➡
3	Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi	13,8	6,9	11,00	159,42	Disdikpora	★
4	Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	79,5	76,5	82,00	107,19	Disdikpora	★
5	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	76	73	75,00	102,74	Disdikpora	★
6	Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik	70,5	67,5	70,00	103,70	Disdikpora	★

Sumber: Disdikpora, 2016. ★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah

Capaian kinerja program PAUD rata-rata masih di bawah target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target kinerja Program PAUD yang ada, Indikator PAUD yang terakreditasi telah mencapai target kinerja di tahun 2016, yaitu 33,15% dari target 9%. Kriteria indikator ini *Sangat Tinggi* (tercapai 236,79%). Sementara indikator-indikator lain seperti APK PAUD/TK (4-6 tahun) status kinerjanya masih *Sedang* (tercapai 68,90%), yaitu terealisasi 67% dari target 80%. Hal ini disebabkan oleh data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai. Untuk mengurai hal tersebut dibutuhkan data dasar penduduk usia yang valid setiap tahunnya; pengadaan sarana dan

prasarana PAUD serta dukungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung langkah Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk APK SD/SDLB/MI/Paket A realisasi kinerja di tahun 2016 sebesar 105,90% dari target 111%. Kriteria kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 95,41%). APM SD/SDLB/MI/Paket A juga telah mencapai target kinerja yang diharapkan, yaitu 92,36% dari target 97,93%. Kriteria indikator ini juga *Sangat Tinggi* (tercapai 94,31%). Sementara APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B telah terealisasi masing-masing 117,28% dan 97,80% dari target masing-masing-masing 96,28% dan 90,74%. Kedua indikator ini capaian kinerjanya *Sangat Tinggi* (masing-masing tercapai 121,81% dan 107,78%).

Sementara itu Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM dan Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM dapat direalisasikan masing-masing dengan kriteria *Tinggi* (masing-masing tercapai 88,12% dan 90,77%). Kondisi ini disebabkan oleh sarana dan prasarana sekolah terutama gedung sekolah sangat mempengaruhi layanan pendidikan. Sekolah-sekolah juga perlu mendapat prioritas untuk direhabilitasi sebanyak 745 ruang atau sekitar 22,62% dari sekolah yang ada. Jumlah guru di Kabupaten Tegal juga masih mengalami kekurangan serta masih banyak SMP yang belum memiliki laboratorium komputer dan laboratorium bahasa dan belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan SMP juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan namun berkualitas.

APK dan APM Program Pendidikan Menengah telah di atas target capaian, namun capaian kinerja Angka Putus Sekolah dapat direalisasikan 0,50% dari target 0,46%. Status kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 91,30%). Sementara nilai rata-rata UN telah mencapai target yang diharapkan, yaitu 58,27% dari target 37,84% atau dengan kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 153,99%). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Menengah adalah belum meratanya jumlah SMA/SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal; perbandingan jumlah siswa SMA:SMK yang belum berimbang sehingga belum memenuhi sebagai Kabupaten Vokasi; rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan menengah berdampak pada angka putus sekolah; belum optimalnya pengembangan *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha dan industri; jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang; kurangnya jumlah sarana dan prasarana dan alat praktek masih belum memenuhi standar minimal pendidikan menengah.

Angka kelulusan Program Pendidikan Non Formal pada jenjang Paket A, B dan C dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2016, yaitu masing-masing tercapai 99,99% untuk Paket A, 99,98% untuk

Paket B dan 99,98% untuk paket C dari target masing-masing 97% untuk Paket A, 99% untuk Paket B, dan 99,99% untuk Paket C. Kriteria kinerja indikator ini *Sangat Tinggi* (masing-masing tercapai 103,08%, 100,99% dan 99,99%). Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal diantaranya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan Non Formal masih kurang; belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal. Untuk meningkatkan kinerja Program Pendidikan Non Formal perlu dikembangkan keberadaan Pendidikan Non Formal pada setiap PKBM di Kecamatan serta penyediaan layanan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal.

Program Pendidikan Luar Biasa pada semua jenjang yaitu SDLB, SMPLB dan SMALBB dengan tingkat kelulusan 100% di atas dari target yang ditetapkan secara relatif tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Sementara untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, capaian kinerja Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1 mendapat kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 104,35%), yaitu terealisasi 36% dari target 34,5%. Pendidik SD Berkualifikasi S1 dapat direalisasikan 89,95% dari target 79%, atau dengan kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 113,73%). Begitu juga untuk pendidik SMP dan SMA yang berkualifikasi S1 telah berpredikat *Sangat Tinggi*, masing-masing terealisasi 100% dari target 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal; belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel; belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal; belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; ketimpangan kualifikasi sumberdaya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, capaian kinerja program ini cukup menggembirakan. Persentase SD yang terakreditasi telah berpredikat *Sangat Tinggi* (tercapai 816,67%), yaitu terealisasi 49% dari target 6%. Sejumlah usaha masih perlu dilakukan, diantaranya pembuatan SOP dalam setiap kegiatan; optimalisasi akses teknologi data pendidikan; peningkatan tata kelola dunia pendidikan yang lebih baik; dan optimalisasi pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

## 2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinkes, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Dinkop, UKM dan Pasar. Urusan Kesehatan terdiri dari 18 program dan 77 indikator. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2016.

**Tabel 2.102**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>						
01	Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	75,86	72,40	95,40	Dinkes	★
02	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	96,67	96,67	Dinkes	★
<b>2</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
01	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	98	96	98,2	102,3	Dinkes	★
02	Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM	100	48,2759	34,48	71,4	Dinkes	➡
03	Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79	1:48,79	1:49,3	100,5	Dinkes	★
04	Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100,00	100,00	Dinkes	★
05	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	72	69	78	113	Dinkes	★
06	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	96,9	90,9	71,14	78,3	Dinkes	➡
07	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	90	88	43,69	49,60	Dinkes	⬇
08	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	75	81,2	108,3	dinkes	★
09	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	48,78049	38,3275	52,9	138,1	Dinkes	★
10	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	7,665505	4,87805	10,45	213,3	Dinkes	★
11	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	45	30	31,03	103,4	Dinkes	★
12	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	70	63,4	90,6	Dinkes	➡
13	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	14	14	100	Dinkes	★
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	48,2759	48,28	100	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
15	Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29	29	29	100	dinkes	★
16	Cakupan pelayanan perijinan	100	100	90	90	dinkes	➡
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	91,3	91,3	dinkes	★
18	Cakupan pelayanan kesehatan khusus	100	100	100	100	dinkes	★
19	Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	60	55,40	92,33	dinkes	★
20	Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	100	60	N/A	N/A	dinkes	N/A
<b>3</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>						
01	Jumlah inspeksi obat dan makanan	2	2	2,00	100,00	Dinkes	★
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>						
01	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1	1	1,00	100,00	Dinkes	★
02	Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	3	1	1,00	100,00	Dinkes	★
03	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	50	25	20,00	80,00	Dinkes	➡
<b>5</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>						
01	Jumlah promosi WKJ	1	1	1,00	100,00	Dinkes	★
02	Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	10	4	4,00	100,00	Dinkes	★
03	Desa Siaga Strata Mandiri	5	2	6,00	300,00	Dinkes	★
04	Cakupan penjangkaran Sisw SD/MI	100	100	97,76	97,76	Dinkes	★
05	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4	4	4	100	Dinkes	★
<b>6</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>						
01	Prevalensi Balita gizi buruk	0,2	0,64	0,16	175,00	Dinkes	★
02	Prevalensi Balita gizi baik	99,8	99,36	98,54	99,17	Dinkes	★
03	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	60	45	100,00	222,2	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	04 Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	25	18	20,00	111,11	Dinkes	★
	05 Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	100	93	100	107,5	Dinkes	★
7	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>						
	01 Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1	1	N/A	N/A	Dinkes	N/A
	02 Jumlah pengembangan lingkungan sehat	8	5	1,00	20,00	Dinkes	↓
8	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>						
	01 Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	100	97	96,35	99,30	Dinkes	★
	02 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	97	100	103,1	Dinkes	★
	03 Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th	2	2	1,99	99,50	Dinkes	★
	04 Angka Penemuan kasus baru TB	110	100	119,9	119,9	Dinkes	★
	05 Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	90	90	92,27	102,5	Dinkes	★
	06 Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	130	102	196	102,15	Dinkes	★
	07 Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	80	75	65	86,7	Dinkes	➡
	08 Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,6	1,54	1,2	77,9	Dinkes	➡
	09 Angka kesakitan DBD	8	12	38,6	31,1	Dinkes	↓
	10 Angka kematian DBD	1	3	2,9	103,4	Dinkes	★
	11 Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	75	62	115	185,5	Dinkes	★
	12 Cakupan penderita Diare yang ditangani	100	100	157,9	157,9	Dinkes	★
	13 Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100,00	100,00	Dinkes	★
9	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>						



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	01 Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1	1	1,00	100,00	Dinkes	★
	02 Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1	1	1,00	100,00	Dinkes	★
<b>10</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>						
	01 Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	66000	66000	66.000,00	100,00	Dinkes	★
<b>11</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>						
	01 Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	29	17	10	58,82	Dinkes	↓
	02 Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	100	58,6207	100,00	170,59	Dinkes	★
	03 Jumlah paket pelatihan Pokjandal Posyandu	1	1	1,00	100,00	Dinkes	★
	04 Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	1	2	2,00	100,00	Dinkes	★
	05 Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	58	30	38,00	126,7	Dinkes	★
<b>12</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>						
	01 Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85000	65000	133.116	204,79	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi	★
	02 Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35000	27000	32.736	121,24	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi	★
<b>13</b>	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>						
	01 Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN	29	29	29,00	100,00	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>14</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>						
	01 Angka Kematian Bayi	7,6	8,4	9,7	86,31	Dinkes	
	02 Angka Kematian Balita	8,3	9,1	11,0	83,04	Dinkes	
	03 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	97	89	40,50	45,51	Dinkes	
	04 Cakupan kunjungan bayi	99	96	103,35	110,66	Dinkes	
	05 Cakupan Pelayanan Anak Balita	89	86	45,00	52,33	Dinkes	
<b>15</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>						
	01 Jumlah Lansia	3752	3572	13,231	370,41	Dinkes	
	02 Cakupan Lansia terlayani kesehatan	12,2	9,3	11,30	121,51	Dinkes	
<b>16</b>	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>						
	01 Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	70	61	87,14	Dinkes	
	02 Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	65	40	30,00	75,00	Dinas Kop UKM dan Pasar	
<b>17</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>						
	01 Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	100	92	100,00	108,70	Dinkes	
	02 Angka Kematian Ibu	93,3	120	100,31	119,63	Dinkes	
	03 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	92	94,53	102,75	Dinkes	
	04 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	97	92	99,02	107,63	Dinkes	
	05 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	97	95	93,7	98,61	Dinkes	
	06 Cakupan Ibu Hamil K4	94	91	90,26	99,19	Dinkes	
<b>18</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan</b>						
	01 Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	100	50	70	140,00	RSUD dr. Soselo	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
02	Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo	100	75	81,25	108,33	RSUD dr. Soeselo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinkes; RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; Dinkop UKM Pasar, 2016

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dan Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terealisasi masing-masing 65% dan 83,55% dari target 75,86% dan 100%. Dengan demikian status kinerja indikator ini masing-masing *Tinggi* (tercapai masing-masing 85,68% dan 83,55%). Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum dalam *e-Catalog* LKPP, berdasarkan usulan puskesmas dan pengelola obat program dengan mempertimbangkan stok obat dan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan indikator ini adalah rak obat, pengukur suhu ruangan, lemari narkotik/psikotropik belum tersedia; ada beberapa sarana yang rusak, diantaranya: alarm, genset dan AC; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan *e-logistic* belum dilaksanakan; penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di *e-catalog* LKPP masih bertahap dan tidak awal tahun 2016; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia di *e-catalog* LKPP; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di *e-catalog* LKPP, tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan); anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan mengalami penurunan, sehingga kekurangan anggaran disediakan oleh puskesmas melalui Anggaran Kapitasi JKN Puskesmas; belum siapnya SDM puskesmas dalam melakukan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; ada obat yang kadaluarsa di Gudang Farmasi akibat menurunnya kasus penyakit di puskesmas, sehingga pemakaian obat lebih rendah dari ketersediaan obat yang direncanakan.

Untuk itu rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah pengadaan dan perbaikan sarana yang belum tersedia dan yang rusak; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan *e-logistic*; mengajukan usulan kepada LKPP dan Kemenkes agar penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di *e-catalog* LKPP di awal tahun, serta untuk obat dan perbekalan kesehatan yang bersifat *fast moving* pihak penyedia/pabrikan lebih dari satu; obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di *e-catalog* LKPP tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan) pengadaannya dilakukan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan petunjuk teknisnya; anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan disentralkan satu pintu; dibentuknya Tim

Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Secara Terpadu di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang lebih baik.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari indikator antara lain Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan masing-masing 97% dan terealisasi masing-masing 95,35% dan 55,40%. Dengan demikian kriteria kinerja ini masing-masing *Sangat Tinggi* (tercapai 98,30%) dan *Sangat Rendah* (tercapai 57,11%).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah ada sebagian masyarakat yang menolak imunisasi karena pemahaman vaksin haram; mobilitas penduduk di beberapa wilayah cukup tinggi; angka kelahiran yang turun berpengaruh pada target sasaran bayi karena penentuan target berdasarkan angka kelahiran riil; umpan balik Laporan imunisasi dari Swasta ke Puskesmas belum rutin dilaksanakan. Untuk itu rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang fatwa halal vaksin dari MUI untuk mengubah paradigma imunisasi di masyarakat; melakukan pendataan sasaran secara riil dan melakukan validasi dan akurasi data cakupan imunisasi rutin setiap bulan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita terdiri dari antara lain indikator Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 14,14 dan 15,24 dari target masing-masing sebanyak 8,40 dan 9,1. Status kinerja indikator ini *Sangat Rendah* (masing-masing tercapai 31,66% dan 32,52%).

Permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah

Rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita adalah peningkatan dan penguatan tatalaksana neonatus di puskesmas; peningkatan kualitas SDM; pengadaan alkes pelayanan kesehatan neonatus baik di RS/Puskesmas; peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan pemberian informasi kesehatan pada ibu hamil/remaja.

Indikator kinerja program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata telah tercapai, yaitu 118.575 jumlah pelayanan rawat jalan RSUD, lebih banyak dari target sebanyak 65.000 kunjungan. Begitu juga untuk pelayanan rawat inap, dari target 27.000 terealisasi sebanyak 29.513 rawat inap. Menetapkan dan menginterpretasikan indikator ini perlu dilakukan dengan






hati-hati. Target kinerja yang ditetapkan meningkat bukan dimaknai untuk memperbanyak orang sakit melainkan menunjukkan gambaran kinerja orang sakit yang dilayani. Meningkatnya jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di RSUD menggambarkan bahwa pasien rawat inap dan rawat jalan telah ditangani.











Program Peningkatan Pelayanan diamanatkan Klasifikasi RS dr. Soeselo menjadi kelas B Pendidikan. Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat 4 instrumen kegiatan, yaitu: pengumpulan informasi persiapan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan (100%), pemenuhan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan, bimbingan dan penyempurnaan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan dan visitasi penilaian RS kelas B pendidikan, sehingga rata-rata kinerjanya sebesar 25% dari target 50%. Sementara indikator Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo terdiri dari 8 layanan, yaitu: klinik perjanjian (100%); klinik akupunktur dan jamu terpadu (100%); IBS&ICU/ICCU/PICU/NICU (50%); laboratorium patologi anatomi (100%); pelayanan kardiologi terpadu (25%); pelayanan geriatri terpadu; pusat rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal terpadu (80%) dan Forum Sahabat RSUD dr. Soeselo sehingga rata-rata capaian kinerjanya adalah 56%, sementara target kinerjanya sebesar 75%.






### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM




Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 13 program dan 22 indikator. Urusan Pekerjaan Umum diampu oleh DPU. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2016.

**Tabel 2.103**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
1	Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	68	64	49,95	78,05	DPU Bina Marga	
2	Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar Bina Marga	70	67	63,58	94,90	DPU Bina Marga	
3	Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	147,7	141,7	34,04	24,02	DPU Bina Marga	
4	Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5	71,5	12,39	17,33	DPU Bina Marga	
5	Jumlah panjang jalan kolektor	194	194	186,00	95,88	DPU Bina Marga	
<b>2</b>	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	45	42	30,00	71,43	DPU Cipta Karya	
2	Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	50	47	N/A	N/A	DPU Cipta Karya	N/A
3	<b>Program Pembangunan turap/talud/bronjong</b>						
1	Panjang talud jalan kabupaten terbangun	20.500	10.000	5.400,00	54,00	DPU	
2	Panjang talud jalan desa terbangun	17.000 m'	11.000	N/A	N/A	DPU	N/A
3	Panjang talud pengairan yang terbangun	650	250	215,00	86,00	DPU	
4	Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	630	200	105,00	52,50	DPU	
4	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>						
1	Panjang jalan direhabilitasi	220	170	183,38	107,87	DPU Bina Marga	
2	Jumlah jembatan direhabilitasi	210	105	36,00	34,29	DPU Bina Marga	
5	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong</b>						
1	Persentase panjang talud direhabilitasi	15	12	5,00	41,67	DPU	
6	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan</b>						
1	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	1	1	1	100	DPU	
7	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>						
1	jumlah inspeksi jalan dan jembatan	300	150	453,00	302,00	DPU BP	
8	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>						
1	panjang irigasi dalam kondisi baik	7500	3750	2.000,00	53,33	DPU Pengairan	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
9	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>						
1	Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	40	25	15,00	60,00	DPU Pengairan	
10	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>						
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan	34,48	32,48	67,02	206,34	DPU	
11	<b>Program pengendalian banjir</b>						
1	Persentase kawasan rawan banjir	4,5	4,8	4,90	102,08	DPU	
12	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>						
1	jumlah pengembangan kota satelit	1	1	1,00	100,00	DPU	
13	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaaan</b>						
1	Cakupan infrastruktur perdesaaan kondisi baik	68	60	45,00	75,00	DPU	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPU, 2016.

Capaian indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten sesuai standar Bina Marga pada Program pembangunan jalan dan jembatan ditargetkan sepanjang 64 Km, pada tahun 2016 dapat direalisasikan sepanjang 49,95 Km. Kriteria capaian kinerja indikator ini *Tinggi* (tercapai 78,05%). Begitu juga jumlah panjang jalan kolektor, dapat terealisasi 186 Km dari target 194 Km pada tahun 2016 atau dengan predikat *Sangat Tinggi* (tercapai 95,88%). Sementara pada Program pembangunan turap/talud/bronjong, panjang talud jalan kabupaten terbangun telah terealisasi sepanjang 5.400 m, dari target 10.000 m, dengan kriteria Rendah (tercapai 54%). Indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum masih memuat indikator-indikator yang menjadi kewenangan desa (jalan, talud) maupun provinsi (sungai, danau). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014,

pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya cenderung minimal, terutama indikator yang memuat nomenklatur desa seperti drainase, dan talud jalan desa.

Pada Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, realisasi pada tahun 2016 mendapat kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 107,87%). Dari target 170 Km jalan direhabilitasi sudah terealisasi 183,83 Km. Namun pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah, pada indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan, target kinerja sebesar 32,48% baru tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,37%, dengan kriteria capaian *Sangat Rendah* (tercapai 10,38%). Masih rendahnya beberapa capaian kinerja indikator Urusan Pekerjaan Umum membutuhkan dukungan semua pihak, baik personalia DPU maupun *stakeholders* terkait untuk dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas.

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 5 program dan 11 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diampu oleh Bapermasdes, DPU dan Dinsosnakertrans pada tahun 2016.

**Tabel 2.104**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perumahan Rakyat**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>						
1	Persentase rumah layak huni	91,34835	90,9635	90,80	99,82	Bapermas des	★
2	Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi	600	608	608,00	100,00	Bapermas des	★
<b>2</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>						
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	82,25	76,25	86,00	112,79	DPU	★
2	Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1	1	1,00	100,00	Bapermas des	★
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>						
1	Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat	15	9	30,00	333,33	DPU	★



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
2	jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan	15	9	30,00	333,33	DPU	★
4	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>						
1	Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,000030	0,000022	0,000023	103,14	DPU Damkar	★
2	Jumlah mobil damkar	7	6	4,00	66,67	DPU Damkar	➡
3	Persentase kasus kebakaran ditangani	100	75	25,64	34,19	DPU Damkar	⬇
4	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,75972	42,7059	N/A	N/A	DPU	
5	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>						
1	Jumlah areal pemakaman	282	282	432,00	153,19	Dinsosnak ertrans	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ⬇ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bapermasdes; DPU; Dinsosnakertrans, 2016.

Mendasari data PPLS Tahun 2011 dari 7 indikator, maka target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal yang menjadi skala prioritas sejumlah 1.331 rumah/unit, sedangkan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan sebanyak 508 unit/rumah dengan masing-masing rumah mendapat Rp.20.000.000,- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 Pemerintah Desa lebih fokus pada program DD dan ADD akhirnya pencairan dana bantuan oleh masing-masing desa pada akhir tahun dan pelaksanaan fisiknya juga akhir tahun. Untuk Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan bantuan RTLH sebanyak 823 rumah/unit tetapi yang melaksanakan Dinas Kimtaru.

Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih mendapat kriteria Sangat Tinggi. RPJMD menargetkan pada tahun 2016 sebesar 76,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 86,00% dengan predikat *Sangat Tinggi* (tercapai 112,79%). Rasio jumlah petugas damkar dibanding jumlah penduduk terealisasi sebesar 0,000023, lebih tinggi dibanding target sebesar 0,00022 sehingga status kinerjanya *Sangat Tinggi* (tercapai 103,14%). Sementara jumlah mobil pemadam kebakaran dari target 6 unit pada tahun 2016 terealisasi 4 unit sehingga capaian kinerjanya *Sedang* (tercapai 66,67%).

Capaian kinerja Jumlah Areal Pemakaman Tahun 2016 belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 disebabkan karena jumlah areal pemakaman yang dikelola oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal sesuai dengan jumlah anggaran dan kegiatan hanya 1 areal pemakaman yaitu Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan adalah salah satu tupoksi Dinsosnakertrans yang harus dilaksanakan dalam pelestarian nilai-nilai perintis kemerdekaan dan kepahlawanan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah program pengelolaan areal pemakaman dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

#### 5. URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan Penataan Ruang terdiri dari 2 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Penataan Ruang diampu oleh Bappeda. Berikut adalah indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penataan Ruang pada tahun 2016.

**Tabel 2.105**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
1	Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	18	10	18,00	180	Bappeda	★
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1	Jumlah penindakan pelanggaran tata ruang	10	3	11	366,66	Bappeda	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda, 2016.

Pada Program Perencanaan Tata Ruang, indikator jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang telah terealisasi dalam bentuk kajian konsultan yang dapat ditingkatkan menjadi Perda. Hingga tahun 2016 telah dilaksanakan studi dan Rancangan RDTR 3 kecamatan, sehingga secara kumulatif sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan kajian terhadap 18 RDTR, sehingga capaian kinerjanya *Sangat Tinggi* (teralisasi 180%). Pada tahun 2017 akan dilaksanakan Review RTRW terlebih dahulu sehingga penyusunan dan penetapan Perda dilakukan setelah Review RTRW. Untuk indikator jumlah penindakan pelanggaran tata ruang juga 0, karena tidak adanya data pelanggaran tata ruang. Pihak yang berwenang melakukan penindakan adalah PPNS dan Satpol PP sehingga diperlukan koordinasi dengan PPNS terkait penindakan pelanggaran Tata Ruang.




## 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 9 program dan 9 indikator kinerja. Urusan Perencanaan Pembangunan diampu oleh Bappeda dan BPBD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2016.

**Tabel 2.106**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perencanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>						
1	Jumlah sistem informasi daerah aktif	3	3	3	100	Bappeda	★
<b>2</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>						
1	Jumlah kerjasama pembangunan yang dimanfaatkan	5	5	7,00	140,00	Bappeda	★
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>						
1	Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti	4	4	4	100	Bappeda	★
<b>4</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>						
1	Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	18	12	16,00	133,33	Bappeda	★
<b>5</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>						
1	Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana	15	12	12,00	100,00	Bappeda	★
<b>6</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	11	2	2,00	100,00	Bappeda	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
7	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>						
1	Jumlah klaster yang difasilitasi	30	15	12,00	80,00	Bappeda	
8	<b>Program perencanaan sosial budaya</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	5	5	6,00	120,00	Bappeda	
9	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2	2	2,00	100,00	BPBD	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda, BPBD, 2016.

Indikator jumlah sistem informasi daerah aktif teralisasi 3 sistem informasi daerah aktif dari target kinerja 3 sistem informasi daerah aktif, atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%). Sistem informasi daerah aktif meliputi SIPD (Sistem Informasi Profil/Pembangunan Daerah), SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Simas (Sistem Informasi Masyarakat Miskin). Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sistem informasi daerah aktif adalah kurangnya SDM, komunikasi dan ketidaksepehaman dalam berjejaring dengan SKPD terkait.

Untuk indikator jumlah kerjasama pembangunan yang memanfaatkan tercapai 7 kerjasama dari target 5 kerjasama dengan demikian indikator ini berpredikat *Sangat Tinggi* (tercapai 140%). Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan dengan IPB, BPPT, Kemendikbud, UPS, UGM, Unsoed dan Universitas Guna Dharma. Pada indikator jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti belum ada. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro (dalam lingkup Kabupaten) dan belum ada kebijakan satu sektor (lingkup kecamatan). Sedangkan indikator cakupan Pelayanan SPAM di Kota Kecamatan telah tercapai 16 Kecamatan dari target 12 kecamatan atau dengan predikat *Sangat Tinggi* (tercapai 133,33%). Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator ini adalah beberapa kecamatan memiliki kontur yang relatif susah untuk penyediaan SPAM dan belum disertai adanya saluran SPAM di setiap kecamatan.

Jumlah Aparatur Perencana Kabupaten yang memiliki kompetensi perencana adalah 12 orang, telah mencapai target yaitu 12 orang dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%). Permasalahan yang dihadapi adalah minat yang rendah terhadap jabatan fungsional termasuk fungsional perencana. Untuk itu rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan arahan dan dorongan dari pimpinan kepada karyawan/wati agar mengikuti diklat fungsional dimaksud.

Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu ada 2, yaitu RKPD dan RKPD Perubahan. Untuk mewujudkan indikator ini realtif tidak ditemui hambatan. Indikator jumlah klaster yang difasilitasi adalah 6 klaster, sementara target indikator ini sebanyak 15 klaster. Pelaksanaan indikator ini melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP). Permasalahan yang dihadapi adalah keseriusan semua pihak dalam upaya mempertahankan klaster dan meningkatkan status sentra menjadi klaster.


Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan sebanyak 6 dokumen terdiri dari RAD MDG's, RAD PUS, SPKD, RAD PPK (RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), Masterplan TIK, dan Kajian Pengembangan Situs Semedo. Jumlah ini di atas target sebanyak 5 dokumen, sehingga capaian kinerjanya *Sangat Tinggi* (tercapai 120%). Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Sementara untuk indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana telah tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen. Dokumen tersebut adalah pemetaan wilayah rawan bencana dan kajian pemetaan pasca bencana banjir dan longsor. Secara umum tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

## 7. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan diampu oleh Dishubkominfo dan terdiri dari 4 program dengan 3 indikator. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2016.

**Tabel 2.107**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	75	74,00	98,67	Dishubkominfo	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
2	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	75	74,00	98,67	Dishubkominfo	★
3	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>						
1	Persentase AKDP berijin	100	85	80,00	94,12	Dishubkominfo	★
2	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	67	58	103,29	178,08	Dishubkominfo	★
4	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	75	74,00	98,67	Dishubkominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dishubkominfo, 2016.

Dari laporan yang disampaikan Dishubkominfo, target kinerja pada semua indikator masing-masing telah mencapai hampir 100% (diatas 90%). Indikator persentase sarana perhubungan berfungsi baik dari target kinerja sebesar 75% terealisasi 74% dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 98,67%). Dengan demikian menurut Dishubkominfo, masih t sarana perhubungan yang ada dalam kondisi relatif baik. Begitu juga persentase AKDP berizin dan persentase kendaraan umum yang diuji KIR, dari target kinerja masing-masing 85% dan 58% telah terealisasi masing-masing sebesar 80% dan 55% masing-masing berpredikat *Sangat Tinggi* (masing-masing tercapai 94,12% dan 94,83%). Menurut data Dishubkominfo, hanya sedikit AKDP yang belum memiliki izin dan terdapat beberapa kendaraan umum yang ada belum diuji KIR. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dipastikan tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan target kinerja usan Perhubungan di Dishubkominfo.

#### 8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan hidup terdiri dari 8 program dan 14 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh DPU, BLH dan Distanbunhut. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2016.

**Tabel 2.108**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>						
1	Persentase TPA sesuai standar	34,63636	18,1818	41,70	229,35	DPU Taru	★
2	Persentase TPS sesuai standar	82,81	79,68	35,00	43,93	DPU Taru	↓
3	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01459	0,01429	0,41	2.895,73	DPU Taru	★
4	Persentase sampah yang terangkut	72,25	69,25	41,38	59,75	DPU Taru	↓
5	Jumlah Bank Sampah	56	41	86,00	209,75	BLH	★
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>						
1	Persentase UKL-UPL yang dipantau	70	55	60,00	109,09	BLH	★
<b>3</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>						
1	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30	30	40,00	133,33	BLH	★
<b>4</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>						
1	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	0,5	7,68	0,00	0,00	Distanbunhut	↓
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	<b>Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>						
1	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1	1	1,00	100,00	BLH	★
2	Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1	1	1,00	100,00	BLH	★
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>						
1	Persentase kawasan tercemar polutan udara	0,75	0,9	1,10	77,77	BLH	➡
1	Persentase kawasan tercemar polutan air	3,75	3,95	3,95	100,00	BLH	★
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</b>						
1	Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DKPP	★
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>						
1	Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	5,7	19,86	19,56	98,49	DPU	★
2	Jumlah RTP	1	1	3	300,00	BLH	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPU; BLH; Distanbunhut; 2016

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar realisasi kinerjanya yaitu 41,70% berbanding 18,18% untuk persentase TPA sesuai standar. Dengan demikian indikator kinerja ini statusnya capaiannya *Sangat Tinggi* (tercapai 229,35%). Sementara untuk indikator TPS sesuai standar realisasinya baru 35%



dibanding target sebesar 79,68%, atau dengan status kinerja *Sangat Rendah* (tercapai 43,93%). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan TPS dan sarana penunjang lainnya yang terbatas. Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut juga baru, yaitu 41,38% dibanding target sebesar 69,25%. Hal ini antara lain di samping karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2016 sebanyak 41 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 81 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2016 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Persentase UKL-UPL yang dipantau, target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 55%, sedangkan realisasinya sebesar 60%. Kondisi ini tentu menggembirakan bagi pelaksanaan indikator. Meski demikian masih perlu dilakukan penguatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya perusahaan yang harus dipantau, sementara aparat yang ada jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk periode 1 tahun perlu dilakukan strategi agar cakupan pelayanan pemantauan UKL-UPL dapat sesuai target. Ke depan perlu peningkatan anggaran maupun personil sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, indikator kinerja Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH, telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 40 perusahaan lebih banyak dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 perusahaan. Sementara pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH, target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebanyak 1 paket. Target ini telah tercukupi dengan adanya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya alam dan LH di Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Jumlah sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup untuk tahun 2016 telah terpenuhi melalui pameran lingkungan hidup, maupun sosialisasi.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, untuk indikator kinerja Persentase kawasan tercemar polutan udara pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 0,9% dengan realisasi 1,10%, dengan status kinerja *Tinggi* (tercapai 77,77%). Target ini membutuhkan upaya keras karena kompleksitas permasalahan yang ada mengingat pencemaran ini akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Upaya yang telah dilakukan baru sebatas fasilitasi relokasi unit usaha yang menimbulkan pencemaran udara ke area yang menjauh dari permukiman warga, namun demikian ke depan perlu ditingkatkan fasilitasi alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pencemaran udara dapat diminimalisir.

Untuk indikator Persentase Kawasan tercemar polutan air tahun 2016 ditargetkan sebesar 3,95%, dengan realisasi 3,95%. Target ini membutuhkan upaya keras dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena mayoritas terjadinya pencemaran air adalah akibat aktivitas industri kecil seperti industri tahu, tempe, dan batik. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun pembangunan biodigester. Akan tetapi semenjak tahun 2015, fasilitasi ini tidak dapat dilanjutkan akibat terganjal aturan hibah sehingga upaya penanganan pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas usaha kecil tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan diharapkan ada upaya swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi pencemaran di lingkungan masing-masing sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan Data “Dokumen Penyusunan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015” diketahui bahwa Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) maupun RTP (Ruang Terbuka Publik) Di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut, Luas Kawasan Perkotaan seluas 31.205,99 Ha; total persentase RTH Publik dibanding Luas wilayah perkotaan sebesar 6,17% dan total persentase potensi RTH Publik sebesar 19,56%. Mendasari data tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa capaian/realisasi tahun 2016 Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan adalah sebesar 6,17%. Jadi merujuk pada target RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 sebesar 5,7% maka capaian persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan Kabupaten Tegal pada Tahun 2016 telah terpenuhi yaitu mencapai 6,17%. Hal ini juga berlaku bagi target capaian untuk persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan pada tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,5% telah tercapai karena realisasi capaian total persentase RTH publik dibanding luas wilayah Perkotaan di Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,17%.

Hal ini juga berlaku untuk RTP (Ruang Terbuka Publik), karena dari target RPJMD tahun 2019 maupun target tahun 2016 untuk jumlah RTP adalah 1. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk kawasan perkotaan Slawi sebagai

ibukota Kabupaten telah memiliki setidaknya 1 RTP yaitu Trasa. Di samping itu masih terdapat AAS dan RTH depan Rumdin Bupati Tegal sehingga totalnya sebanyak 3 RTP. Capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dicapai karena untuk masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten Tegal masih memiliki RTH yang umumnya difungsikan sebagai Ruang Terbuka Publik. Sebagian besar RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Tegal berupa lapangan. RTH di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tegal telah ditata menjadi lebih representatif, diantaranya RTH Kecamatan Dukuhwaru dan Kecamatan Margasari. Program Penataan RTH dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator kerja namun tidak setiap tahun dilaksanakan. Namun untuk pemeliharaan rutin (Khusus dikota Slawi) diintervensi melalui Kegiatan Pemeliharaan RTH.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja adalah tidak diakomodasinya usulan kegiatan dalam pembahasan dengan legislatif, terutama untuk pembangunan RTH pada kecamatan yang masih relatif tertinggal dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pagerbarang. Pembangunan atau penataan RTH di kedua kecamatan tersebut diarahkan agar memberikan *multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian maupun pembangunan untuk dapat menumbuhkan ekonomi kreatif maupun sebagai wadah masyarakat dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi.

Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat tercapai adalah sebagai berikut: perlu adanya dukungan data mengenai RTH maupun RTP yang valid dan *up to date* melalui Kegiatan Penyusunan Data Kondisi dan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Tegal, sebagai dasar yang kuat maupun *blueprint* (cetak biru) bagi perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan RTH di Kabupaten Tegal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan; dukungan anggaran yang cukup untuk penyediaan, penataan dan pemeliharaan RTH maupun RTP yang representatif untuk masyarakat Kabupaten Tegal; *capacity building* dan diseminasi peraturan maupun regulasi bagi personel dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan RTH maupun RTP di Kabupaten Tegal, khususnya di Seksi Pertamanan Bidang Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan DPU Kabupaten Tegal sebagai *leading* untuk RTH dan RTP di Kabupaten Tegal.

## 9. URUSAN PERTANAHAN

Indikator kinerja pada Urusan Pertanahan sebanyak 2 buah, dengan 2 program dan diampu oleh Bagian Pemerintahan Setda. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2016.

**Tabel 2.109**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>						
1	Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	60	30	41,00	136,67	Setda (Bag. Pem)	★
<b>2</b>	<b>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						
1	Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	60	30	24,00	80,00	Setda (Bag. Pem)	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Setda, 2016.

Dari 2 indikator kinerja Urusan Pertanahan, yaitu jumlah sertifikasi tanah pemerintah dan penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 ditetapkan target 30 sertifikat, dapat direalisasikan 41 sertifikat dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 136,67%). Sementara target penyediaan tanah tahun 2016 adalah 30 bidang, namun baru terealisasi sebanyak 24 bidang sehingga status kinerjanya Tinggi (tercapai 80%). Sifat data bersifat kumulatif, sehingga capaian tahun 2016 juga memperhitungkan capaian tahun sebelumnya. Secara umum, untuk salah satu indikator menemui kendala untuk diwujudkan yaitu indikator penyediaan tanah untuk instansi. Penyediaan tanah instansi terkait dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk melakukan penyediaan tanah. Apabila instansi dalam tahun berjalan tidak membutuhkan penyediaan tanah, maka indikator ini dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi.

#### 10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 4 indikator dan diampul oleh Disdukcapil. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2.110

## Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
1	Persentase penduduk memiliki KTP	100	90	84,21	93,57	Disdukcapi	★
2	Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	100	90	78,52	87,24	Disdukcapi	➡
3	Persentase penduduk memiliki akta kematian	30	10	N/A	N/A	Disdukcapi	N/A
4	Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100	90	94,00	104,44	Disdukcapi	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdukcapi, 2016.






Indikator persentase penduduk memiliki KTP teralisasi 80% dari target 90%, dengan demikian status kinerjanya *Tinggi* (tercapai 88,89%). Begitu juga indikator persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga terealisasi 76% dari target 90% dengan status kinerja juga *Tinggi* (tercapai 84,44%). Namun, persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 94%, ini sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%, atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 104,44%).






Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal. Untuk itu, selain sosialisasi mengenai pentingnya data kependudukan, perlu juga diinisiasi kemudahan-kemudahan dan insentif agar masyarakat dapat termotivasi mencatatkan administrasi kependudukannya.

## 11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 program dan 38 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh BPPKB dan Bapermasdes. Berikut disajikan tabel capaian, indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.










**Tabel 2.111**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016	
1	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>							
	1	Pencapaian Kota Layak Anak	Kab Tegal KLA	KLA Nindya	0	0	BPPKB	0
	2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	2	2	1,00	50,00	BPPKB	
	3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	90	60	87,00	145,00	BPPKB	
	4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	100,00	BPPKB	
2	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>							
	1	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	54	54	30,00	55,56	BPPKB	
	2	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	47	40	60,00	150,00	BPPKB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
3	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50	50	18,00	36,00	BPPKB	
4	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50	60,00	120,00	BPPKB	
5	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50	30,00	60,00	BPPKB	
6	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100	100	N/A	N/A	BPPKB	N/A
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100,00	100,00	BPPKB	
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100	100	100,00	100,00	BPPKB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
9	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	75	60	55,00	91,67	BPPKB	★
10	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75	60	55,00	91,67	BPPKB	★
11	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	25	25	140,00	560,00	BPPKB	★
12	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	50	50	70,00	140,00	BPPKB	★
13	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	67	50	7,03	14,05	BPPKB	↓
14	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	25	25	70,00	280,00	BPPKB	★
15	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	4	3	8,00	266,67	BPPKB	★
16	Jumlah Forum anak yang aktif	5	4	5,00	125,00	BPPKB	★
17	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	0	0	BPPKB	0
18	Jumlah desa binaan PKK	33	33	33,00	100,00	Bapermasdes	★



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	19	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	60	60	40,00	66,67	Bapermasdes	
	20	Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18	18	18,00	100,00	Bapermasdes	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>							
	1	IPG	65,72	62,72	86,76	138,33	BPPKB	
	2	IDG	70,16	60,16	51,16	85,04	BPPKB	
	3	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	57,54	48,54	42,54	87,64	BPPKB	
	4	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	15	10	20,00	200,00	BPPKB	
	5	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	41,17	32,17	26,17	81,35	BPPKB	
	6	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100,00	100,00	BPPKB	
	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga	100	100	100,00	100,00	BPPKB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS						
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100,00	100,00	BPPKB	★
9	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	75	100	133,33	BPPKB	★
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	80	80	100	117,64	BPPKB	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	dan anak						
11	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100,00	BPPKB	★
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	65	80,00	123,08	BPPKB	★
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100,00	100,00	BPPKB	★
4	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	40	40	41	102,50	Bappeda	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BPPKB, Bappeda, 2016.

Indikator pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2016 belum dapat direalisasikan. Kota Layak Anak diukur dari 31 indikator layak anak. Kabupaten Tegal telah mengirimkan status 31 indikator layak anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari rilis Kota Layak Anak yang disampaikan kementerian, Kabupaten Tegal tidak terdapat dalam daftar Kota Layak Anak. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan indikator-indikator Kota Layak Anak yang tersebar di sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, catatan sipil, perhubungan hingga bencana. Sehubungan dengan hal tersebut akan diinisiasi penyusunan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 sehingga pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih sinergis lagi.

Jumlah pelaksanaan KLA di kecamatan yang terealisasi sebanyak 8 kecamatan dari target 3 kecamatan, atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 266,67%). Kecamatan yang telah diinisiasi layak anak ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Layak Anak dan inisiasi Desa Layak Anak antara lain Kecamatan Adiwerna, Pangkah, Slawi dan Lebaksiu. Sementara jumlah forum anak yang aktif antara lain Forum Anak Kabupaten Tegal dan Forum Anak Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Sementara desa yang telah diinisiasi layak anak antara lain Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna, Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah dan Desa Yomani Kecamatan Lebaksiu.

Untuk indikator kinerja jumlah pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terealisasi 59 pengaduan dari target 60 pengaduan. Membaca indikator ini perlu cermat, bahwa tujuan indikator bukan memperbanyak atau merencanakan kasus yang lebih banyak, namun memperbanyak kasus yang dilaporkan. Saat ini KDRT seperti fenomena gunung es yang banyak tidak dilaporkan. Pelaporan KDRT menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menurunkan KDRT itu sendiri.

Secara umum, kendala dalam pelaksanaan PPT adalah belum optimalnya pemahaman Tim PPT terhadap tugas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; belum tercukupinya sarana mobilitas pendampingan korban; belum tersedia sarana dan prasarana yang nyaman bagi korban kekerasan; belum terdapat kelengkapan peralatan tes DNA; belum membudayanya pemahaman masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), belum terbentuk PPT Kecamatan; belum tersedia shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan; belum terdapat fasilitas trauma center di RS dan belum optimalnya peran rohaniawan pendamping korban karena korban lebih banyak didampingi psikolog.









Untuk indikator jumlah SKPD melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terealisasi sebanyak 30 SKPD dari target 54 SKPD. Capaian kinerja indikator ini statusnya adalah *Rendah* (tercapai 55,56%). Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang dari 30% target yang direncanakan dapat tercapai 20%. Hal ini karena

sebagian peserta musrenbang adalah kades/lurah dan aparatnya yang sebagian besar laki-laki. Untuk itu rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan mengundang komponen masyarakat dari unsur perempuan pada Musrenbang yang akan datang.

## 12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari 9 program dan 17 indikator kinerja dan diampu oleh BPPKB dan Dinsosnakertrans. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Tabel 2.112**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>						
1	Peserta KB aktif	287.800	248.613	210.584	84,70	BPPKB	
2	Persentase DO	10,13	14,75	17,57	120,59	BPPKB	
3	Persentase Unmeet Need	13,77	14,07	13,37	96,30	BPPKB	
<b>2</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>						
1	Jumlah sosialisasi KRR	300	250	300,00	120,00	BPPKB	
<b>3</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>						
1	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	65	59	57,00	97	BPPKB	
<b>4</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>						
1	Rasio Akseptor KB	97,1	83,88	71,85	85,65	BPPKB	
2	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	87	84,3	80,75	95,79	BPPKB	
3	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100	100	100,00	100,00	BPPKB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
5	<b>Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</b>						
1	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	80	65	75	115,38	BPPKB	★
2	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1	1	1,00	100,00	BPPKB	★
6	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>						
1	Jumlah Pusat Konseling KRR	1	1	48	4.800,00	BPPKB	★
7	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>						
1	Jumlah pengidap Narkoba	372	351	25,00	192,87	Dinsosnakertrans	★
2	Jumlah pengidap PMS	476	452	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
3	Jumlah Pengidap HIV/AIDS	189	172	102,00	140,69	Dinsosnakertrans	★
8	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1,00	100,00	BPPKB	★
9	<b>Program penyiapan tenaga pendamping</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	<b>kelompok bina keluarga</b>						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1,00	100,00	BPPKB	★
<b>10</b>	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</b>						
1	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	92	54	70	130	BPPKB	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BPPKB; Dinsosnakertrans, 2016.

Jumlah peserta KB aktif terealisasi sebanyak 208.491 sementara targetnya sebanyak 248.613, atau dengan status capaian kinerja Tinggi (83,86%). Sementara persentase DO (Peserta KB yang berhenti) telah mengalami kenaikan yaitu dari semula 14,75 menjadi 15,18 atau dengan status *Sangat Tinggi* (tercapai 97,08%). Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk Ber-KB yang masih tinggi. Selain itu jumlah tempat pelayanan kontrasepsi tersedia relatif banyak, 55 tempat dari target sebanyak 57 tempat. Tempat pelayanan kontrasepsi tersebar di puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit dan klinik bidan praktik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB antara lain ketersediaan Penyuluh KB (PKB) yang terbatas. Dari jumlah yang terbatas itu hampir setiap tahun terdapat PKB yang pensiun dan tidak segera mendapat tambahan PKB baru. Keberadaan PKB dibantu dengan keberadaan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Kader PPKBD di desa. Indikator cakupan PPKBD dan Sub PPKBD aktif telah terealisasi sebesar 60%, dari target sebesar 65%. Begitu juga rasio kader KB pada PPKBD dan Sub PPKBD telah terpenuhi, yaitu 1 kader untuk 1 PPKBD dan Sub PPKBD.

Untuk indikator jumlah BKB-Posyandu-PAUD terintegrasi terealisasi 36 BKB, dari target tahun 2016 sebanyak 54 BKB dengan status capaian *Sedang* (tercapai 66,67%). Saat ini di setiap kecamatan telah terdapat minimal 1 BKB yang telah terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Permasalahan yang dihadapi adalah hubungan kelembagaan di desa yang seringkali kurang harmonis. Beberapa desa cenderung mengalokasikan anggaran untuk PAUD atau Posyandu saja, masih kurang memperhatikan anggaran untuk BKB.

### 13. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial diampu oleh Dinsosnakertrans. Urusan Sosial terdiri dari 7 program dan 22 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2016.

**Tabel 2.113**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>						
1	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100,00	100,00	Dinsosnakertrans	★
2	Persentase PMKS ditangani	30	27	62,00	370,37	Dinsosnakertrans	★
3	Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	350	200	250,00	125,00	Dinsosnakertrans	★
4	Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	8,2	5,3	32,13	606,22	Dinsosnakertrans	★
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						
1	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30	27	1,95	7,22	Dinsosnakertrans	↓
<b>3</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>						
1	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450	300	384	128	Dinsosnakertrans	★
2	Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	16	9,2	11,73	127,5	Dinsosnakertrans	★
<b>4</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>						
1	Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	350	200	213	106,50	Dinsosnakertrans	★



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
2	Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	7,2	4,3	2,46	57,20	Dinsosna kertrans	↓
5	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>						
1	Jumlah panti asuhan/panti jompo	24	22	20,00	90,90	Dinsosna kertrans	→
2	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	24	22	20,00	90,90	Dinsosna kertrans	→
6	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>						
1	Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	70	40	44	110	Dinsosna kertrans	★
2	Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	12,2	9,3	1,54	16,55	Dinsosna kertrans	↓
3	Jumlah pengidap narkoba yang direhabilitasi	50	35	25,00	71,43	Dinsosna kertrans	→
4	Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	14,5	11,2	47,17	421,15	Dinsosna kertrans	★
5	Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	170	100	0,00	0,00	Dinsosna kertrans	0
6	Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	7,2	4,3	0,00	0,00	Dinsosna kertrans	0
7	Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	50	25	25,00	100,00	Dinsosna kertrans	★
8	Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	8,2	4,8	5,63	117,29	Dinsosna kertrans	★
9	Jumlah eks WTS yang diberdayakan	50	30	58	193,33	Dinsosna kertrans	★
10	Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,8	6,3	68,24	1.083,17	Dinsosna kertrans	★
7	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						
1	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	300	225	3.121	1.387,11	Dinsosna kertrans	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

Capaian kinerja Persentase korban bencana yang ditangani ditargetkan sebesar 100% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014–2019. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara BPBD PMI dan unsur terkait serta kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi terjadinya bencana, adanya jalur evakuasi yang jelas dan sistem peringatan dini dalam masyarakat.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang ditangani ditargetkan sebesar 27% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan karena adanya penanganan PMKS kerjasama antara pusat, daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Tegal diantaranya pelatihan-pelatihan tata boga, keluarga rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan tata rias bagi WRSE, pelatihan Bordir, pelatihan menjahit, keluarga rawan sosial ekonomi mengikuti pelatihan teknis HP dan stir mobil, serta kelompok PMKS mendapat bantuan KUBE APBN Kemensos.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 27% hanya tercapai 2,66%. Hal ini dikarenakan jumlah PMKS yang direhabilitasi terbatas hanya pada PMKS yang dikirim ke balai-balai besar sosial dan kebanyakan setelah dijaring untuk dikirim ternyata dari pihak keluarga berkeberatan. Capaian kinerja Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 9,2% terealisasi sebesar 24%. Hal ini disebabkan karena jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial lebih sedikit dari jumlah ketelantaran anak tahun 2016.

Capaian kinerja Persentase penyandang cacat (Difabel) yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 4,3% terealisasi sebesar 19,54%. Capaian kinerja Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina ditargetkan sebanyak 22 panti telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam RPKMD Tahun 2014-2019. Karena panti asuhan/panti jompo yang dibina hanya 20 panti. Hal ini disebabkan karena Panti Asuhan Putra Harapan Slawi yang semula dijadikan Panti Asuhan milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Suko Mulyo Putra Harapan Slawi.

Capaian kinerja Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi sebesar ditargetkan sebesar 9,3% terealisasi sebesar 442,22%. Sementara capaian kinerja Persentase Eks WTS yang diberdayakan ditargetkan sebesar 6,3 %, terealisasi sebesar 8% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menangani eks WTS membuahkan hasil cukup positif.

#### 14. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja diampu oleh Dinsosnakertrans, terdiri dari 6 program dan 18 indikator. Berikut indikator, terget dan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2016.

**Tabel 2.114**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Tenaga Kerja**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>						
	1 Penempatan AKAD	13.000	12.000	15.800,00	131,66	Dinsosnakertrans	★
	2 Penempatan AKAN	8300	7500	786,00	10,48	Dinsosnakertrans	↓
	3 Penempatan AKL	300000	175000	4.979	2,84	Dinsosnakertrans	↓
	4 Jumlah instruktur BLK	40	33	27,00	81,81	Dinsosnakertrans	➡
	5 Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	58	45	150,00	333,33	Dinsosnakertrans	★
	6 Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	65	49	32,00	65,30	Dinsosnakertrans	↓
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>						
	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	4,16	9,24	22,11	Dinsosnakertrans	★
	2 Tingkat partisipasi angkatan kerja	88,02	74,3	79,62	107,160	Dinsosnakertrans	★
	3 Tingkat Kesempatan Kerja	96,15	93,95	93,96	100,01	Dinsosnakertrans	★
	4 Jumlah LPKS	60	50	51,00	102,00	Dinsosnakertrans	★
	5 Jumlah Bursa Kerja Khusus	52	48	53,00	110,41	Dinsosnakertrans	★
	6 Jumlah PPTKIS	18	12	8,00	66,66	Dinsosnakertrans	➡
	7 Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	65	40	150,00	375,00	Dinsosnakertrans	★
	8 Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai	10	4	3,00	75,00	Dinsosnakertrans	➡
<b>3</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>						
	1 Persentase UMR: KHL	100	100	100	100	Dinsosnakertrans	★
	2 Jumlah Sengketa Industrial	8	14	14,00	100	Dinsosnakertrans	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
3	Jumlah sengketa industrial ditangani	8	14	14,00	100	Dinsosnakertrans	★
4	Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan	300	240	150,00	62,5	Dinsosnakertrans	↓
5	Jumlah pengawas tenaga kerja	5	4	3,00	75,00	Dinsosnakertrans	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

Capaian kinerja Penempatan AKAD telah mencapai target yang diinginkan, yaitu dari target 12.000 orang dapat direalisasikan sebanyak 13.000 orang dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 108,33%). Hal ini dapat direalisasikan karena kerjasama yang baik antara Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Kabupaten Tegal dengan Dinsosnakertrans. Sementara Penempatan AKAN dapat direalisasikan sebanyak 415 orang dari target sebanyak 7.500 orang. Kondisi ini disebabkan oleh penempatan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) yang terdata di Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal hanya yang bekerja di darat yang penyalurannya melalui PPTKIS. Adapun jumlah tenaga kerja yang menjadi TKI pelaut sebenarnya mencapai jumlah ribuan akan tetapi tidak terdata dikarenakan dari pihak perusahaan tidak melaporkan hasil perekrutannya. Sedangkan penempatan AKL dari target 175.000 orang dapat dilaporkan sebanyak 69 orang. Hal ini jumlah investasi di Kabupaten Tegal terbatas dan banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah perekrutan karyawan baru.

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) adalah sebesar 9,8% dari targetnya 4,16%. TPT masih tinggi dikarenakan perusahaan besar di Kabupaten Tegal masih terbatas. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja berturut turut sebesar 62% dan 57,19% dari target masing-masing 74,3% dan 93,95%.

Capaian kinerja Persentase UMR:KHL Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil survei sesuai dengan Pergub Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Survei KHL dan Pentahapan Pencapaian KHL yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-:Rp. 1.150.000,- Capaian kinerja Sengketa Industrial yang ditangani Tahun 2016 telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan jumlah pengaduan perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan Pekerja yang telah masuk dan ditangani oleh Dinsosnakertrans sebanyak 17 kasus.

## 15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 5 indikator dan 2 program. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diampu oleh Dinkop, UKM, Pasar. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**Tabel 2.115**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDP Tahun 2016 Urusan dan Usaha Kecil Menengah**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>						
	1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	4	4	4,00	100,00	Dinkop, UKM, Pasar
2	Jumlah Wirausahawan Baru	35	20	10,00	50	Dinkop, UKM, Pasar	↓
2	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>						
	1	Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.830 UMKM	1.815 UMKM	180 UMKM	9,97	Dinkop, UKM, Pasar
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>						
	1	Jumlah koperasi aktif	425	325	309,00	95,07	Dinkop, UKM, Pasar
2	Jumlah BPR dan LKM aktif	25	580	11 BPR dan 1 LKM	2,06	Dinkop, UKM, Pasar	↓

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinkop, UKM, Pasar, 2016.

Jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target yang diharapkan yaitu dari target semula 4 kali terealisasi 4 kali juga. Sementara itu, jumlah wirausahawan baru yang direncanakan sebanyak 20 UKM terealisasi sebanyak 25 UKM, dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 125%). Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, jumlah UMKM mengakses kredit perbankan tidak dapat disajikan karena Dinkop UKM Pasar belum pernah melakukan pendataan ke bank-bank yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu ke depan Dinkop UKM Pasar perlu lebih proaktif

melakukan pendataan pada bank-bank yang ada, tidak hanya menunggu laporan dari bank yang memang selama ini tidak pernah dilaporkan oleh bank.

Indikator jumlah koperasi aktif pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dari target 325 koperasi dapat direalisasikan sebanyak 307 koperasi yang aktif ditandai dengan aktivitas dan pelaksanaan RAT masing-masing koperasi. Status indikator kinerja ini Sangat Tinggi (tercapai 94,46%). Meskipun demikian untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif oleh Dinkop, UKM, Pasar untuk mendorong kinerja koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tegal. Koperasi-koperasi yang tidak aktif ini karena tidak memiliki daya saing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Pembinaan oleh Dinkop, UKM, Pasar perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi-koperasi yang tidak aktif ini. Untuk jumlah BPR dan LKM aktif telah melebihi target yang diharapkan yaitu target 2016 adalah sebesar 580, terealisasi sebesar 585 pada tahun yang sama, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100,86%).

#### 16. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 program dengan 9 indikator. KPM dan BP2T adalah SKPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal.

**Tabel 2.116**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016	
1	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>							
	1	Jumlah investor PMA	4	2	6,00	300,00	KPM	
	2	Jumlah investor PMDN	3070	3055	2.076,00	67,95	KPM	
	3	Jumlah nilai investasi PMA	48 miliar	43 miliar	592.056.717.000	1.376,88	KPM	
	4	Jumlah nilai investasi PMDN	825.500.000 ribu	765.769.500 ribu	251.452.151	32,84	KPM	
5	Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	5000	3670	2.495,00	67,98	KPM		
2	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>							
1	Jumlah ijin usaha	6200	5900	5.263,00	89,20	BP2T		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	dikeluarkan						
3	<b>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>						
1	Jumlah aparatur yang kompeten	27	24	24,00	100,00	KPM	★
2	Jumlah sistem informasi investasi	1	1	1,00	100,00	KPM	★
4	<b>Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan</b>						
1	Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1	1	1,00	100,00	BP2T	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: KPM; BP2T, 2016.

Capaian Kinerja Tahun 2016 pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi berupa Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan diprediksi tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 yaitu 5.900 Izin Usaha sedangkan pencapaian Target Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal telah mencapai 5.263 Izin Usaha dengan status capaian Tinggi (tercapai 89,20%).

Capaian Kinerja Tahun 2016 pada Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan berupa Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Perizinan telah tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 yaitu 1 Kali Kegiatan Per Tahun. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal telah melaksanakan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah penyelenggaraan pameran investasi; penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk tata cara pengaduan; penelitian kepuasan masyarakat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Capaian kinerja outcome program urusan ini antara lain Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 6 PMA dari target 2 PMA, sehingga kriteria indikator ini *Sangat Tinggi* (tercapai 300%). Nilai investasi PMA yang diperoleh juga di atas target, yaitu sebesar Rp. 592 miliar dari target sebanyak Rp. 43 miliar dan memperoleh predikat *Sangat Tinggi* (tercapai 1.376,88%).

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah Belum bergabungnya instansi penanaman modal dan PTSP sehingga pelaporan, pengawasan serta promosi belum dapat dikordinasikan dalam satu atap;

masih banyaknya calo yang mengurus izin sehingga berimbas pada membengkaknya biaya dan waktu; belum adanya sistem informasi dan SDM yang mumpuni sehingga Informasi yang diperoleh masyarakat harus melalui kantor BP2T, belum dapat diakses melalui *website* atau *SMS Gateway*.

Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan penggabungan KPML dan BP2T agar terwujud PTSP yang benar-benar pelayanan satu pintu; BKD agar mengalokasikan SDM yang berkualitas, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta membuat aplikasi sistem informasi agar masyarakat dapat mengakses informasi perizinan dengan mudah.

## 17. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 11 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan diampu oleh Disparbud. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2016.

**Tabel 2.117**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>						
1	Jumlah pertunjukan seni	3	3	25,00	833,33	Disparbud	★
2	Jumlah pameran seni	1	1	6,00	600,00	Disparbud	★
3	Jumlah misi/muhibah kesenian	1	1	16,00	100,00	Disparbud	★
4	Jumlah sarana pertunjukan seni	19	10	19,00	190,00	Disparbud	★
5	Jumlah pelaku seni yang dibina	3110	3110	2.110,00	67,85	Disparbud	↓
6	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	397	343	293,00	85,42	Disparbud	↓
7	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	4	4	5,00	125,00	Disparbud	★
8	Jumlah maestro seni	3	3	3,00	300,00	Disparbud	★
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>						
1	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	3	4,00	133,33	Disparbud	★
2	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1	1,00	100,00	Disparbud	★
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>						
1	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	2	4,00	200,00	Disparbud	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparbud, 2016.



Capaian kinerja Urusan Kebudayaan menunjukkan variasi. Indikator kinerja yang status kinerjanya *Sangat Tinggi* diantaranya jumlah pertunjukan seni sebanyak 7 kali, dari target sebanyak 3 kali. Begitu juga BCB dan situs budaya yang dibangun sebanyak 4, sementara target kinerja hanya 3. Meski demikian jumlah pelaku seni yang dibina dan jumlah kelompok kesenian yang dibina realisasinya masih Sangat Rendah. Dari target 3.110 pelaku seni dibina, teralisasi hanya 150 saja. Sementara jumlah kelompok kesenian yang dibina, terealisasi 5 dari target 343 kelompok kesenian yang dibina.

Untuk itu diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan umum urusan kebudayaan adalah (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

#### 18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga diampu oleh Disdikpora. Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 program dan 10 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 2.118**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016	
1	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>							
	1	Jumlah pelatihan pemuda	9	6	8,00	133,33	Disdikpora	★
	2	Jumlah pemuda yang dilatih	450	270	662,00	245,19	Disdikpora	★
	3	Jumlah pemuda pelopor	252	180	117,00	65,00	Disdikpora	↓
2	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>							
	1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1	1	1,00	100,00	Disdikpora	★
3	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>							

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Jumlah kompetisi olahraga amatir	28	19	24	126,31	Disdikpora	★
2	Jumlah kompetisi olahraga profesional	18	9	1,00	11,11	Disdikpora	↓
3	Jumlah atlet dibina	215	200	65,00	32,50	Disdikpora	↓
4	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	181	92	12,00	13,04	Disdikpora	↓
2	Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	816	804	107,00	13,31	Disdikpora	↓

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdikpora, 2016.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program Jumlah pemuda yang dilatih dari target 270 orang dapat direalisasikan sebanyak 662 orang, dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 245,19%). Sementara jumlah pemuda pelopor dan jumlah organisasi pemuda yang dibina dapat direalisasikan sebanyak 117 orang dari target 180 orang untuk pemuda pelopor dan 8 organisasi pemuda dari 24 target organisasi pemuda yang dibina. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemuda pelopor dalam pembangunan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan motivasi serta pembinaan kepada pemuda di Kabupaten Tegal.

Sementara untuk jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target capaian, yaitu 1 kali pelatihan dari target kinerja sebanyak 1 kali pelatihan juga. Meski demikian kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kewirausahaan sedikit menghambat pelaksanaan program untuk lebih optimal lagi.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga untuk indikator jumlah atlet yang dibina baru sebanyak 65 atlet, sementara targetnya sebanyak 200 atlet. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih kurang; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga stagnan; belum optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di tahun 2016 juga masih berpredikat *Sangat Rendah*. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik ditarget sebanyak 804 unit namun baru teralisasi 107 unit. Perlu dilakukan fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga masyarakat sehingga olahraga dapat menjadi kegiatan positif yang berkembang di masyarakat.

#### 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh BPBD dan Kesbangpolinmas. Urusan ini terdiri dari 7 program dan 34 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2016.

**Tabel 2.119**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
	1 Rasio Linmas per 10.000 penduduk	0,00138	1:59,40	1:110	8.542,71	Kesbangpolinmas	★
2	Rasio Linmas terlatih	5	2	1,00	50,00	Kesbangpolinmas	↓
2	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>						
	1 Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	60	24	24,00	100	Kesbangpolinmas	★
3	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
	1 Jumlah dialog umat beragama	1	1	1,00	100,00	Kesbangpolinmas	★
2	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	1	1	100	Kesbangpolinmas	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
4	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
1	Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1	1	1,00	100,00	Kesbangpolinmas	★
2	Jumlah kerjasama umat beragama	1	1	1,00	100,00	Kesbangpolinmas	★
5	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>						
1	Cakupan siskamling dengan jumlah desa	75	60	55,00	91,67	Kesbangpolinmas	★
6	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>						
1	Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	100	75	78	104	Kesbangpolinmas	★
2	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	70	62,06	0	0	Kesbangpolinmas	0
3	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	70	62,88	0	0	Kesbangpolinmas	0
4	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	70	42,77	0	0	Kesbangpolinmas	0
5	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	70	57,88	0	0	Kesbangpolinmas	0
6	Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	90	90	0	0	Kesbangpolinmas	0
7	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>						
1	Jumlah kegiatan mitigasi bencana	1	1	1,00	100,00	BPBD	★
2	Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8	8	5,00	62,50	BPBD	↓

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Kesbangpolinmas; BPBD, 2016.

Indikator rasio Linmas per 10.000 penduduk pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat telah tercapai melebihi target. Dari target 1:59,40 per 10.000 penduduk, dapat direalisasikan sebanyak 1:110 per 10.000 penduduk, dengan status capaian Sangat Tinggi (tercapai 8.542,71%). Untuk indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) terealisasi 8 laporan dari target 24 laporan. Hal ini karena pelaporan dilakukan setiap triwulan, sehingga dalam satu tahun hanya terdapat 4 laporan, sehingga dalam 2 tahun terakhir periode RPJMD dapat direalisasikan sebanyak 8 laporan.

Indikator-indikator yang berhubungan dialog dan kerjasama umat beragama telah tercapai sesuai target, dari target masing-masing 1 dialog dan kerjasama dapat direalisasikan sebanyak 1 dialog atau mendapat kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 100%). Keberadaan lembaga-lembaga seperti FKUB, Polres, Kodim, BPPKB, Kemenag, dan Bag. Kesra Setda rutin melakukan pertemuan untuk mewujudkan budaya rukun dan toleran di masyarakat. Terkait keberadaan ormas, dihadapi kendala pendataan karena tidak semua ormas mendaftarkan apabila terjadi pergantian kepengurusan. Sementara untuk indikator-indikator terkait hak pilih tidak ada realisasinya karena pada tahun 2016 tidak diselenggarakan Pilpres, Pileg, Pilkada.








Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana dan jumlah kegiatan tanggap darurat bencana pada Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam telah dilakukan dengan baik. Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana direncanakan sebanyak 1 mitigasi, dan dapat direalisasikan sebanyak 1 mitigasi. Sementara pada indikator jumlah kegiatan tanggap darurat bencana belum memenuhi target kinerja yang sebanyak 8 kegiatan, yaitu pada tahun 2016 realisasi untuk indikator jumlah kegiatan tanggap darurat bencana sebanyak 5 kegiatan.









## 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN














Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdiri dari 15 program, 30 indikator dan diampu oleh Set DPRD, Setda, DPPKAD, Inspektorat, Dishubkominfo, dan BKD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tabel 2.120


**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian**




No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>						
	1 Jumlah Perda ditetapkan	8	8	6,00	75,00	Set DPRD	
	2 Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda	1	1	2,00	50,00	Set DPRD	
	3 Jumlah Perda inisiatif DPRD	1	2	3,00	150,00	Set DPRD	
<b>2</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>						
	1 Jumlah koordinasi kepala daerah dengan Muspida/SKPD	60	60	5,00	8,33	Setda (Bag. Pem)	
<b>3</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
	1 Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	4	4	4,00	100,00	Setda (Bag. Org)	
	2 Jumlah Standar Satuan Harga	1	1	1,00	100,00	Setda (Bag. Org)	
	3 Jumlah peraturan tentang APBD	4	4	6,00	150,00	DPPKAD	
		1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbup penjabaran perubahan APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
				APBD, perbup penatausahaan pelaksanaan APBD			
4	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	2 (1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD)	2 (1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD)	1,00 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server)	50,00	DPPKAD	
4	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>						
1	Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	2	2	5,00	250,00	Setda (Bag. Pem)	
5	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>						
1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144 obrik	120 obrik	92 obrik	76,67%	Inspektora t	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	95%	89%	37,06%	41,64%	Inspektora t	
3	Opini WTP BPK	WTP	WTP	WDP	N/A	N/A	N/A
6	<b>Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>						
1	Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	35	23	47,00	204,35	Inspektora t	
2	Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	400	3	12,00	400,00	Inspektora t	
7	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>						
1	Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	6	5	5,00	100,00	Inspektora t	
8	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>						
1	Jumlah SIM	15	11	48,00	436,36	Dishubko minfo	
9	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
	<b>Daerah</b>						
	1 Jumlah kerjasama antar daerah	10	10	8,00	80,00	Setda (Bag. Pem)	
<b>10</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
	1 Jumlah raperda	10	10	15,00	150,00	Setda (Bag. Hukum)	
<b>11</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>						
	1 Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	200	40	32,00	80,00	BKD	
		200 (Diklatpi m II = 11, III = 36, IV = 153)	40 (Diklatpi m II = 0, III = 8, IV = 32)	32 (Diklatpim II = 6, III = 5, IV = 21)			
<b>12</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>						
	1 Jumlah Peserta Diklat Teknis	70	55	324,00	589,09	BKD	
	2 Jumlah Peserta Diklat Fungsional	40	25	50,00	200,00	BKD	
	3 Persentase jabatan struktural yang terisi	94	94	93,00	98,94	BKD	
	4 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	100	100	100,00	100,00	BKD	
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
	1 Jumlah CPNS	2000	1100	0	0,00	BKD	
	2 Jumlah PNS Tugas Belajar	24	24	13,00	54,17	BKD	
	3 Jumlah kasus kepegawaian	40	48	52,00	91,67	BKD	
	4 Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	20	22	34,00	45,45	BKD	
	5 Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	6	6	1,00	16,67	BKD	
	6 Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)	43	12	34,00	283,33	BKD	
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>						



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Persentase layanan publik sesuai SPM	100	85	63,00	74,12	Setda (Bag. Org)	
	1. Bidang Kesehatan			85,00			
	2. Bidang Sosial			31,00			
	3. Bidang Lingkungan Hidup			62,00			
	4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri			50,00			
	5. Bidang Perumahan			36,00			
	6. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			74,00			
	7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			79,00			
	8. Bidang Pendidikan			93,00			
	9. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			43,00			
	10. Bidang Ketenagakerjaan			49,00			
	11. Bidang Komunikasi dan Informatika			62,00			
	12. Bidang Ketahanan Pangan			81,00			
	13. Bidang Kesenian			67,00			
	14. Bidang Perhubungan			49,00			
	15. Bidang Penanaman Modal			86,00			

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Set DPRD; Setda; DPPKAD; Inspektorat; Dishubkominfo; dan BKD, 2016.

Jumlah Perda ditetapkan sebanyak 6 Perda dari target 8 Perda pada tahun 2016, dengan demikian status kinerja indikator ini Sedang (tercapai 75%). Untuk Perda inisiatif DPRD direncanakan 1 Perda dan telah disusun 3 Raperda sebagai bahan penyusunan Raperda, yaitu 1) Kompetensi Jabatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, 2) Tanggungjawab Sosial Perusahaan, 3) Badan Layanan Umum Daerah. Sementara indikator yang status kinerja Sangat Rendah (tercapai 50%) adalah rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda dari target yang direncanakan selama 1 bulan, realisasi di lapangan selama 2 bulan. Hal ini disebabkan oleh padatnya kegiatan DPRD sehingga waktu pembahasan Perda relatif kurang.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu jumlah koordinasi kepada daerah dengan Muspida/SKPD. Dari target sebanyak 60 kali, realisasi pada tahun 2016 sebanyak 5 kali. Hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan

tentang pemberian uang representatif bagi Forkompinda yang semula dianggarkan melalui APBD namun juga dianggarkan melalui APBN sehingga APBD tidak direalisasikan karena terjadi duplikasi anggaran. Sementara untuk indikator rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah dan jumlah satuan standar harga telah sesuai dengan target kinerja, yaitu masing-masing 4 bulan dan 1 standar satuan harga. Hal ini karena perencanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan time schedule yang ditetapkan.

Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan sebanyak 5 pedoman pada tahun 2016, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 2 pedoman. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. Sementara untuk indikator jumlah Raperda yang direncanakan 10 raperda telah direalisasikan sebanyak 13 Raperda dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 130%). Dalam penyusunan Raperda tidak ditemukan kendala yang berarti. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Raperda adalah pembahasan dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait Raperda, *public hearing* untuk menampung aspirasi *stakeholders* dan penyampaian Raperda menjadi Prolegda di DPRD. Kendala seringkali dijumpai dalam penyusunan Prolegda karena menyesuaikan dengan dinamika kerja DPRD.

Jumlah Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan 4 peraturan dan direalisasikan sebanyak 6 peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD 2015 dari penatausahaan, penetapan, pergeseran, perubahan sampai pertanggungjawaban APBD selama tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015.

Sesuai dengan RPJMD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 terkait dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang memiliki target Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 sejumlah 120 (seratus duapuluh) obyek pemeriksaan, akan tetapi dengan pertimbangan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka realisasi jumlah tersebut berkurang menjadi 92 (Sembilan puluh dua) obyek pemeriksaan. Target Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 768 tahun 2015 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2016, dan pemenuhan target untuk obyek pemeriksaan Tahun 2016 mencapai 100 %.

Untuk kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, yang di dalamnya terdapat kegiatan Reviu RKA, Pengendalian Kepegawaian, Penanganan kasus maupun khusus memiliki target capaian 66 obyek pemeriksaan, dan telah teralisasi 79 kasus/khusus atau 119,70%, akan tetapi belum masuk dalam Capaian Kinerja program (output) RKPD, untuk itu kami usulkan melalui evaluasi RPJM tahun 2014-2019.

Sedangkan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2016 ditargetkan 89%, realisasi capaian sampai dengan 31 Desember 2016 hanya 37,06%. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 43% dan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP) Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mencapai 67,30%. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam TLHP antara lain, banyaknya temuan masalah keuangan baik dari Pihak Penyedia Barang/Jasa (rekanan) maupun dari entitas yang pengembalian tidak dilakukan sekaligus, belum dipahaminya mekanisme pengembalian dan yang paling utama adalah rendahnya komitmen kepala SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga berpengaruh pada TLHP serta belum diterapkannya sanksi bagi kepala SKPD yang tidak menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan.

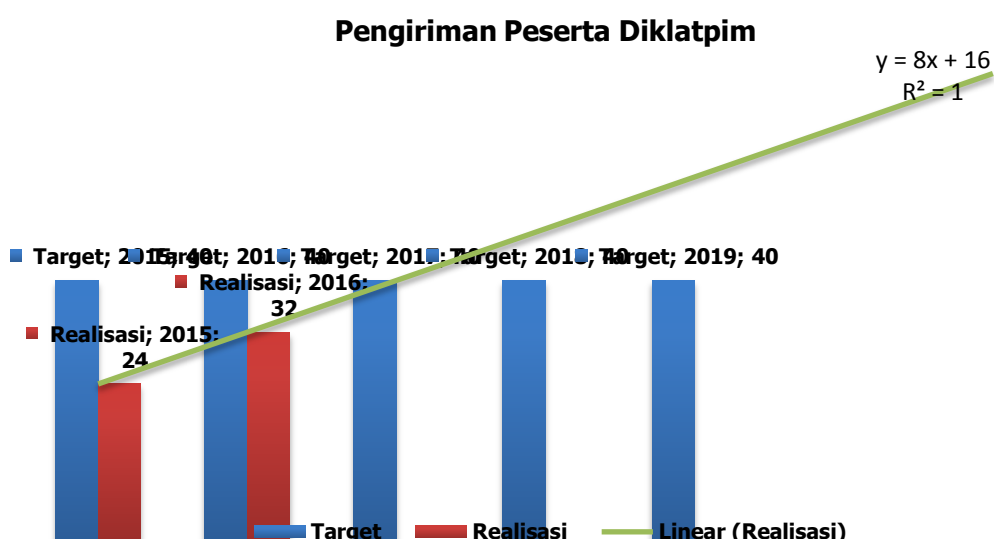
Untuk menyelesaikan semua tindak lanjut dari hasil pengawasan, APIP Inspektorat Kabupaten Tegal telah melakukan kegiatan monitoring tindak lanjut yang dilakukan dengan mendatangi entitas (obyek pemeriksaan), membuat umpan balik (feedback) berupa surat Bupati Tegal perihal Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (yang didalamnya memuat peringkat/prosentase kinerja penyelesaian tindak lanjut masing-masing SKPD), mengundang entitas (obyek pemeriksaan), membuka peluang untuk konsultasi dan koordinasi terkait permasalahan/kesulitan yang dihadapi entitas dalam penyelesaian tindak lanjut. Upaya Inspektorat dalam mendorong capaian tindak lanjut perlu dukungan dan respon penuh oleh entitas, tanpa komitmen masing-masing SKPD dalam pemenuhan tindak lanjut target tindak lanjut pengawasan tidak akan terpenuhi.

Terkait dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap indikator kinerja Kabupaten Tegal belum dapat menyajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 karena LKPD dilaksanakan setelah tahun anggaran berakhir, target opini BPK tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian namun dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang berdampak pada perubahan kepemilikan aset serta masih banyaknya TLHP terkait dana BOS yang belum terselesaikan opini BPK dievaluasi sama dengan opini BPK pada tahun 2015 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pengecualian pada aset dan dana BOS.

Kompetensi bidang pengawasan ditargetkan 23 orang dan terealisasi sebanyak 47 orang, sedangkan untuk jumlah aparatur pemeriksa yang mengikuti pelatihan target sebanyak 3 kali dan realisasi pelaksanaan sebanyak 12 kali dalam bentuk Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Untuk jumlah kebijakan target RPJM dan Renstra 5 (lima) yaitu, Peraturan Bupati tentang Standar Audit, Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Piagam audit, Peraturan Bupati tentang Kode Etik APIP dan Peraturan Bupati tentang GERDU MAWASDIRI, dengan bertambahnya jumlah kebijakan/pedoman pengawasan, Inspektorat berupaya menata diri agar menjadi APIP yang memiliki kompetensi. Program Pendidikan Kedinasan

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan ditargetkan untuk mengirimkan 40 orang peserta Diklatpim dengan perincian : Diklatpim II = 0 orang; Diklatpim III = 8 orang; Diklatpim IV = 32 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Penjurangan Struktural dengan realisasi pengiriman peserta Diklatpim II sebanyak 6 orang, peserta Diklatpim III sebanyak 5 orang dan peserta Diklatpim IV sebanyak 21 orang dengan capaian kinerja sebesar

80% dari target yang telah ditetapkan. Diklatpim II direncanakan untuk tidak mengirimkan peserta pada tahun 2016, namun demikian pada tahun 2015 terdapat 6 pejabat eselon II yang belum mengikuti Diklatpim II. Sehubungan dengan hal tersebut, maka alokasi dana untuk pengiriman peserta Diklatpim III dan IV dialihkan untuk pengiriman peserta Diklatpim II. Adanya perubahan prioritas tersebut, menyebabkan target pengiriman peserta Diklatpim III dan IV tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengirimkan 1 orang peserta Diklatpim IV dibutuhkan dana Rp. 28.500.000,-. Sedangkan untuk melaksanakan pengiriman peserta Diklatpim III dibutuhkan dana Rp. 32.500.000,-. Dengan demikian, agar target pengiriman peserta dapat dipenuhi sejumlah 40 peserta Diklatpim III dan IV serta mengakomodir 6 peserta Diklatpim II, dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.439.000.000,- (belum memperhitungkan BOP sebesar 5% dari total anggaran), namun ketersediaan dana hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Adapun Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai, adalah dengan mengusulkan penambahan pagu anggaran kegiatan serta memberikan perkiraan kebutuhan dana untuk menyelesaikan sisa pejabat yang belum mengikuti Diklatpim.



Gambar 2.6. Pengiriman Peserta Diklatpim Tahun 2015-2019

Sumber : BKD Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah Peserta Diklat Teknis ditargetkan untuk mengirimkan 55 orang peserta Diklat Teknis. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi peserta Diklat Teknis sebanyak 324 orang dengan capaian kinerja sebesar 589% dari target yang telah ditetapkan dengan perincian sebagai berikut : Pengiriman Diklat Teknis sebanyak 115 orang, Penyelenggaraan Diklat Revolusi Mental sebanyak 129 orang, Penyelenggaraan Diklat AKD sebanyak 80 orang. Capaian target sebesar 589% disebabkan karena pada saat penyusunan indikator kinerja RPJMD Tahun 2014-2019 tidak mengakomodir peserta diklat teknis yang berasal

dari luar pegawai BKD, ketersediaan anggaran di BKD untuk mengakomodir pelaksanaan diklat teknis yang melibatkan PNS seluruh Kabupaten Tegal sangat minim (belum diterapkan kebijakan diklat satu pintu), serta data PNS yang mengikuti diklat teknis dengan anggaran diklat yang berasal dari masing-masing SKPD sangat sulit didapatkan. Dengan demikian, indikator kinerja yang diusulkan hanya peserta diklat teknis yang berasal dari BKD. Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah perlunya kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu agar mempermudah bagi BKD selaku SKPD pemegang tupoksi kediklatan dalam melaksanakan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan hasil AKD serta mengakselerasi penerapan “diklat satu pintu”, mengusulkan revisi tupoksi kediklatan ke Bagian Organisasi serta memberikan “pencerahan” kepada SKPD yang bertugas mengalokasikan pagu anggaran.

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah Peserta Diklat Fungsional ditargetkan untuk mengirimkan 25 orang peserta Diklat. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah dengan realisasi jumlah peserta Diklat Fungsional sebanyak 50 orang dengan capaian kinerja sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian dari indikator kinerja ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, BKD masih terkendala dengan belum terwujudnya kebijakan Diklat Satu Pintu. Padahal diklat fungsional sangat dibutuhkan bagi para Pejabat Fungsional Tertentu dalam proses kepangkatannya. Namun demikian, dana diklat yang diserahkan ke masing-masing SKPD yang *notabene* tidak memiliki tupoksi kediklatan, berakibat SKPD kurang *aware* dalam mengakomodir jenis diklat yang dibutuhkan oleh JFT, dan cenderung menghambur-hamburkan dana diklat. Hal ini terlihat dari kurang selektifnya SKPD dalam memilih penawaran diklat dari pihak penyelenggara diklat. Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah perlunya kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu agar mempermudah bagi BKD selaku SKPD pemegang tupoksi kediklatan dalam melaksanakan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan hasil AKD serta mengakselerasi penerapan “diklat satu pintu”, mengusulkan revisi tupoksi kediklatan ke Bagian Organisasi serta memberikan “pencerahan” kepada SKPD yang bertugas mengalokasikan pagu anggaran.

Pada tahun 2016, indikator kinerja presentase jabatan struktural yang terisi ditargetkan sebesar 94%. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Kegiatan Pangangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural dengan realisasi sebesar 93% jabatan struktural yang terisi, dengan capaian kinerja sebesar 99% dari target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah bahwa pelaksanaan pengisian jabatan lowong maupun rotasi merupakan kewenangan mutlak dari Bupati, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan BKD sering mengalami kesulitan dalam pengalokasian pagu anggaran. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan penambahan pagu anggaran pada perubahan anggaran.

Pada tahun 2016, indikator kinerja presentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan ditargetkan sebesar 100%. Realisasi dari kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD dengan realisasi sebesar 0% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan, dengan capaian kinerja sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan. Target tidak tercapai mengingat adanya moratorium pengadaan CPNS sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Adanya surat tersebut mengakibatkan tidak adanya tambahan formasi CPNS dari pelamar umum pada tahun 2015 dan berakibat tidak dilaksanakannya kegiatan Diklat Prajabatan pada tahun 2016. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah bahwa indikator kinerja ini terkait dengan keberhasilan indikator jumlah CPNS pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah CPNS ditargetkan sebesar 1.100 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS dan Kegiatan Penyusunan Formasi PNSD dengan realisasi sejumlah 0 CPNS, dengan capaian kinerja sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian dari indikator kinerja sebesar 0% karena adanya surat Menpan & RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dengan baik. Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 merupakan kendala utama dalam pencapaian indikator kinerja ini mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan pengurangan pagu anggaran 2016 pada perubahan anggaran, dengan mengurangi dana pelaksanaan seleksi, mengingat pada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Pertanian dan Pendidikan, kabupaten/kota dilibatkan dalam proses penetapan NIP. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah dengan menindaklanjuti instruksi dari Menpan & RB agar pemerintah kabupaten/kota melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja menggunakan aplikasi *e-formasi* serta perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai.

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah PNS Tugas Belajar ditargetkan sejumlah 24 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan realisasi sejumlah 13 PNS Tugas Belajar, dengan capaian kinerja sebesar 54% dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang timbul dalam pencapaian target ini adalah menurunnya minat peserta tugas belajar, beralih ke ijin belajar. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah mengajukan penambahan pagu anggaran bagi dokter yang ingin melanjutkan ke spesialis melalui program PPDS dengan biaya pendidikan sepenuhnya bersumber dari APBD, memperketat proses ijin belajar, guna meningkatkan kualitas, serta mengarahkan jurusan yang akan diambil, disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan formasi.

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah kasus kepegawaian ditargetkan sejumlah 48 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pengadaan Alat Presensi Pegawai dan Pengelolaan Presensi Pegawai dengan realisasi sejumlah 52 kasus kepegawaian yang ditangani oleh BKD, dengan capaian kinerja sebesar 83% dari target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja ini capaian realisasinya kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus kepegawaian. Dengan demikian, target kinerja ini merupakan target negatif, dimana realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan merupakan prestasi. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, bahwa kewenangan atas pembinaan PNS berada pada atasan langsung PNS tersebut. Jika pembinaan terhadap PNS yang melakukan tindakan indisipliner berhasil dilaksanakan di tingkat SKPD, kasus kepegawaiannya tidak dibahas pada tingkat yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini BKD tidak perlu menangani, hanya mendapatkan tembusan atas hasil pembinaan PNS yang bersangkutan. Dengan demikian, SKPD turut andil dalam kesuksesan pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap pegawai. Selain itu, masih diperlukan upaya ekstra terutama penambahan frekuensi sidak guna mengurangi tingkat indisipliner PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah penambahan pagu anggaran kegiatan Pembinaan disiplin pegawai yang akan dialokasikan untuk penambahan frekuensi pelaksanaan sidak. Pengajuan kegiatan penyusunan peraturan bupati mengenai Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

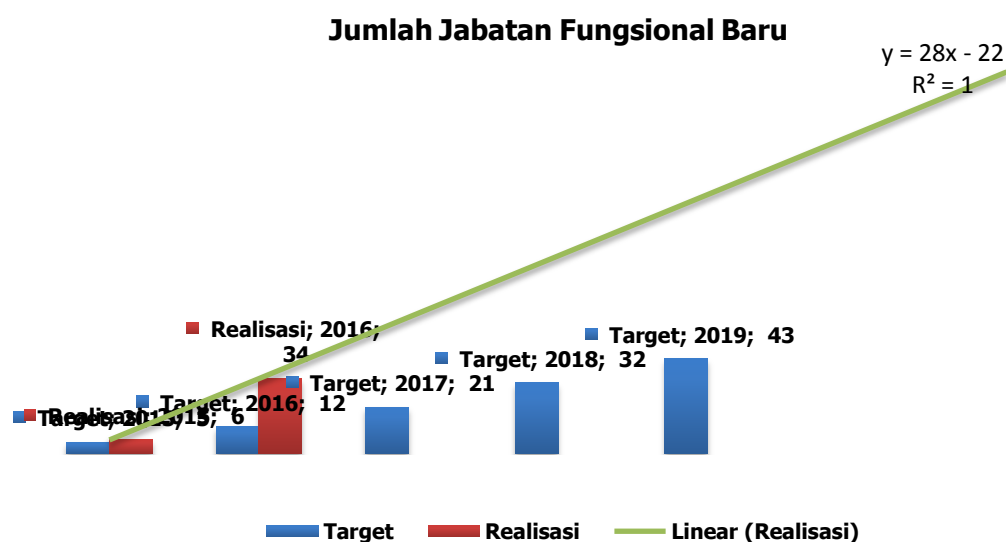
Republik Indonesia Nomor 4450). Sedangkan Penerapan Presensi elektronik sesuai dengan Perbup nomor 12 tahun 2016 mulai bulan Januari 2017.

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin ditargetkan sejumlah 22 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pembinaan Disiplin Pegawai serta Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS Yang Terkena Sakit Menahun dengan realisasi sejumlah 34 PNS yang mendapat hukuman disiplin, dengan capaian kinerja sebesar 63% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target sesuai dengan yang telah ditetapkan salah satu penyebabnya adalah peningkatan dalam hal ketegasan dalam pemberian hukuman disiplin, hal ini terkait dengan trend meningkatnya jumlah kasus kepegawaian yang masuk ke BKD. Bahwa kasus kepegawaian yang dibahas di BKD merupakan kasus kepegawaian dalam tingkatan yang berat dan tidak dapat diselesaikan di internal SKPD yang bersangkutan. Target kinerja ini juga merupakan target menurun, sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan dengan menurunnya realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan pemberian hukuman disiplin berdampak pada alokasi pelaksanaan sidang kasus oleh Baperjakat yang jumlahnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah penambahan pagu anggaran bagi kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang akan dialokasikan untuk penambahan frekuensi sidang. Perlu adanya perubahan metode pelaksanaan sidang. Mengingat pelaksanaan sidang yang sudah berjalan saat ini, hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu sehingga pelaksanaannya sudah bisa diprediksi oleh para pegawai. Penambahan frekuensi sidang sangat diperlukan untuk memberikan efek kejutan, selain sidang yang rutin dilaksanakan pada momen-momen tertentu.

Pada tahun 2016, indikator jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya ditargetkan sejumlah 6 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Eselon II dengan realisasi sejumlah 1 pejabat struktural yang dinilai kompetensinya, dengan capaian kinerja sebesar 17%. Namun demikian, pada saat penyusunan target, indikator kinerja ini menggunakan output Kegiatan Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP) yang bertujuan untuk membentuk talent pool di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Setelah melalui evaluasi, output kegiatan ini dinilai sudah tidak efektif, selain itu pemberlakuan UU ASN yang mensyaratkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dilakukan menggunakan Seleksi Terbuka, yang berakibat output dari kegiatan Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP) sudah tidak layak lagi digunakan sebagai indikator kinerja Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya. Oleh karena itu dalam



penyusunan APBD Tahun 2016, kegiatan Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP) dihapus dan diganti dengan kegiatan Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal. Dengan demikian, output indikator kinerja Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya menggunakan jumlah peserta Seleksi Terbuka, yang pada tahap seleksinya (TAHAP 4) terdapat tahapan Penilaian Kompetensi oleh *Assesment Center*. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah minimnya anggaran yang tersedia karena terikat dengan pagu indikatif program, dan fokus pembangunan pemerintah daerah masih kepada pembangunan fisik yang lebih jelas terlihat secara nyata oleh masyarakat. Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah melalui inisiasi pembentukan talent pool, pola karier PNS, dan uji kompetensi bagi seluruh pejabat struktural sebagaimana dinyatakan dalam UU ASN.



Gambar 2.7 Jumlah Jabatan Fungsional Baru Tahun 2015-2019

Sumber : BKD Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pada tahun 2016, indikator Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan) ditargetkan sejumlah 12 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan Kegiatan Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dan Kegiatan Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS dengan realisasi sejumlah 34 jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan), dengan capaian kinerja sebesar 208% dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja adalah tuntutan dari PNS pengampu JFT terkait kesetaraan tambahan penghasilan, dan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terkait dengan diklat penjenjangan yang wajib diikuti oleh pengampu JFT. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat PNS menjadi pejabat fungsional adalah menginisiasi pengaturan tambahan penghasilan bagi JFT dan mengakomodir diklat penjenjangan bagi pengampu JFT.

## 21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Urusan Ketahanan Pangan diampu oleh KKP, terdiri dari 1 program dan 12 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2016.

**Tabel 2.121**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Ketahanan Pangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan</b>						
1	Jumlah sistem informasi pasar (buah)	1	1	1,00	100,00	KKP	★
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal)	2000	2000	2.049,00	102,45	KKP	★
3	Penguatan cadangan pangan (ton)	150,4	150,1	215,87	143,82	KKP	★
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	71	41	42,31	103,20	KKP	★
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	75	66	97,67	147,98	KKP	★
6	Skor pola pangan harapan (%)	95,4	91,7	72,10	78,63	KKP	➡
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90	84	84,50	100,59	KKP	★
8	Penanganan daerah rawan pangan (kejadian)	23	20	15,00	75,00	KKP	➡
9	Peraturan daerah /Perbup terkait ketahanan pangan (buah)	1	1	1,00	100,00	KKP	★
10	Jumlah LDPM (lembaga)	7	6	7,00	116,67	KKP	★
11	Jumlah lumbung (lembaga)	39	24	17,00	70,83	KKP	➡
12	Jumlah sarana prasarana pengolahan (unit)	20	15	16,00	106,66	KKP	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: KKP, 2016

Ketersediaan energi dan protein perkapita telah di atas target, yaitu 2.049 kkal dibanding target hanya 2.000 kkal, sehingga mendapat status *Sangat Tinggi* (tercapai 102,45%). Hal ini dapat tercapai karena kondisi geografis Kabupaten Tegal yang memungkinkan pembudidayaan buah dan komoditi peternakan. Sumbangan komoditi buah pisang misalnya, terdapat 18,83 kkal, daging sapi sebesar 181 kkal, minyak goreng kopra sebanyak 14,54 kkal dan telur ayam ras sebanyak 10 kkal. Pencapaian indikator kinerja

ketersediaan energi dan protein berhubungan langsung dengan peningkatan produksi komoditas pertanian dalam arti luas. Untuk itu perlu koordinasi dan kerjasama antara dinas teknis yang membina peningkatan produksi pertanian dengan KKP sebagai instansi pembina ketahanan pangan.

Indikator penguatan cadangan pangan juga telah di atas target, yaitu 215,87 poin dibanding target sebesar 150,1 poin dengan status capaian juga *Sangat Tinggi* (tercapai 143,82%). Hal ini dapat diwujudkan karena koordinasi yang intensif dengan banyak pihak, diantaranya Distanbunhut. Distanbunhut mengembangkan varietas padi andalan yaitu Pajale dan Sri yang hasilnya baik dan menguatkan cadangan pangan Kabupaten Tegal. Capaian kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh indikator stabilitas harga dan pasokan pangan, dari target 66 terealisasi 97,67. Hal ini didukung oleh konsisi pasar yang stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan.

Sementara sejumlah indikator lain masih yang hasilnya memuaskan, diantaranya skor Pola Pangan Harapan yang terealisasi 72,10% dibanding target sebesar 91,7% dengan status capaian *Tinggi* (tercapai 78,63%). Kondisi ini terjadi karena masih sedikit masyarakat yang melakukan diversifikasi pangan, dengan mengonsumsi makanan nonberas dan nonterigu. Namun, pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah mencapai hasil yang memuaskan yaitu dari target 84% terealisasi terealisasi sebesar 85%.

## 22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Bapermasdes dengan 5 program dan 23 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016.

**Tabel 2.122**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pemberdaya Masyarakat desa**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	617	533	562,00	105,44	Bapermasdes	★
2	Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1	1	1,00	100,00	Bapermasdes	★
<b>2</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1	1	1,00	100,00	Bapermasdes	★
2	Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1	1	1,00	100,00	Bapermasdes	★
3	Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1	1	1,00	100,00	Bapermasdes	★
4	Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	7	7	7,00	100,00	Bapermasdes	★
3	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>						
1	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	281	281	281,00	100,00	Bapermasdes	★
2	Jumlah UPK	13	13	13,00	100,00	Bapermasdes	★
3	Jumlah juara lomba desa	3	3	3,00	100,00	Bapermasdes	★
4	Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal	2	2	2,00	100,00	Bapermasdes	★
5	Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2	2	2,00	100,00	Bapermasdes	★
6	Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA)	2	2	2,00	100,00	Bapermasdes	★
7	Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4	4	4,00	100,00	Bapermasdes	★
8	Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI	4	4	4,00	100,00	Bapermasdes	★
9	Jumlah kader P3MD terlatih	54	54	738,00	1.366,67	Bapermasdes	★
10	Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281	281	281,00	100,00	Bapermasdes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
11	Jumlah BKM	116	116	116,00	100,00	Bapermasdes	★
12	Jumlah BPD	281	281	281,00	100,00	Bapermasdes	★
13	Jumlah pencaanangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1	1	1,00	100,00	Bapermasdes	★
14	Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	281	281	281,00	100,00	Bapermasdes	★
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>						
1	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2	2	19,00	950,00	Bapermasdes	★
2	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281	281	281,00	100,00	Bapermasdes	★
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan</b>						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	40	40	41,00	102,50	Bapermasdes	★

Sumber: Bapermasdes, 2016. ★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat sejumlah target kinerja, diantaranya Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif dari target sebanyak 533 lembaga dapat direalisasikan sebanyak 562 lembaga, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 105,44%). Sementara indikator jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pedesaan ditargetkan 1 kali pada tahun 2016 terealisasi 1 kali dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%), yaitu pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kendala dalam fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pada Pameran hari Jadi Kabupaten Tegal adalah transaksi yang terjadi tidak bersifat langsung (harus pesan terlebih dahulu) sehingga tidak dapat dikawal dampak dari fasilitasi yang dilakukan. Untuk indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP) yang difasilitasi, dari target 7 telah terealisasi secara sempurna yaitu 7 pada tahun 2016 dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%).

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa menetapkan target 1 kali pencanangan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan terealisasi 1 kali pada tahun 2016. Sementara indikator paket pelatihan keterampilan TTG terealisasi 1 dari target kinerja 1 kali. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada tahun 2016 yang diikuti oleh 120 peserta dengan capaian sangat tinggi, permasalahan yang dihadapi relatif tidak berarti karena kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Bapermades. Kegiatan TMMD Manunggal Sengkuyung Tahun 2016 dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat dan Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi. Di Desa Kepunduhan pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengerasan dan peningkatan jalan dilingkungan desa, rehab RTLH dan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS), sedangkan di Desa Jatimulya berupa pengerasan jalan desa berupa makadam. Permasalahan yang dihadapi relatif tidak berarti mengingat kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Bapermades bersama-sama dengan kodim 0712/Tegal dan Kepala Desa yang ditempati, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini adalah bahwa Kepala Desa beserta warganya untuk dapat memelihara baik jalan maupun pekerjaan lain yang dilaksanakan, sehingga umur bangunan akan lebih lama bisa didayagunakan. Untuk kegiatan Karya Bhakti TNI dilaksanakan di empat Perdesaan antara lain Desa Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng, Desa Kabukan Kecamatan Tarub, Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu dan Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa sedangkan Karya Bhakti Perkotaan di Desa Dukuhsalam dan Kelurahan Slawi Weta Kecamatan Slawi.

Indikator jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sebanyak 281 desa, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja target ini antara lain sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kecamatan dan desa. Sementara indikator kinerja jumlah juara lomba desa sebanyak 3 desa telah tercapai pada tahun 2016. Namun pemenang lomba desa tingkat kabupaten ini belum memperoleh prestasi di tingkat provinsi. Hal ini disebabkan oleh salah satu penilaian utama lomba desa tingkat provinsi adalah ketersediaan data dasar keluarga di desa. Penyediaan data dasar keluarga ini membutuhkan dana yang cukup besar, sementara belum ada fasilitasi yang dilakukan Bapermasdes untuk mewujudkan data dasar keluarga ini. Sementara itu indikator jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 281 pada tahun 2016.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa dilaksanakan sebanyak 1 kali dari target sebanyak 2 kali. Pelatihan dilakukan pada dengan menghadirkan perangkat desa. Sementara indikator kinerja penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang terfasilitasi telah terlaksana sesuai target, yaitu kades dan perangkat desa di 281 desa yang dianggarkan melalui ADD. Namun masih ada kendala dalam pengalokasian penghasilan tetap bagi kades yang berstatus penjabat dan berasal dari unsur PNS. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014, penjabat kades dari PNS dapat memperoleh penghasilan tetap. Namun menurut UU ASN, ASN tidak diperkenankan menerima duplikasi gaji.

### 23. URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik diampu oleh Bappeda, terdiri dari 1 program dan 1 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Statistik.

**Tabel 2.123**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Statistik**

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
23	STATISTIK							
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah							
		Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	30	6	7,00	116,67	Bappeda	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda, 2016.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri dari 1 indikator, yaitu jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan. Capaian kinerjanya sebanyak 7 dokumen telah melebihi target kinerja sebanyak 6 dokumen atau dengan status capaian kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 116,67%). Dokumen data statistik yang dipublikasikan berupa KDA, NTP, IPM, PDRB, IHK, Profil Kecamatan, dan SIPD. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja ini adalah kurangnya ketepatan data dalam kompilasi sehingga rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kordinasi yang intens dengan SKPD lain sehingga data yang diperoleh lebih tepat, komplit dan *up to date*.

### 24. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan diampu oleh Perpustakaan. Indikator kinerja Urusan Kearsipan sebanyak 3, sementara programnya sebanyak 3 pula. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 2.124**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kearsipan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>						
1	Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik	54	54	54,00	100,00	Perpusarda	★
<b>2</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>						
1	Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik	54	54	54,00	100,00	Perpusarda	★
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>						
1	Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip	54	30	5,00	16,66	Perpusarda	↓

★ Sangat Tinggi    ➡ Tinggi, Sedang    ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Perpusarda, 2016.

Jumlah SKPD yang memiliki ruang arsip baik pada tahun 2016 sudah mencapai target yaitu 54 SKPD sehingga status kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 100%). Begitu juga sarana kearsipan yang berfungsi baik, hanya dapat dicapai oleh 5 SKPD dari 54 SKPD. Jumlah SKPD yang sudah melakukan digitalisasi arsip Dinas Dukcapil, Dinas Arpus, BKD, BPKAD, Sekretariat DPRD. Kendala yang dihadapi kurangnya SDM dari dinas kearsipan dan perpustakaan untuk melakukan pembinaan kepada SKPD dan SDM dari SKPD yang bersangkutan belum mempunyai keahlian dalam melakukan digitalisasi arsip. Kondisi ini menunjukkan bila sistem kearsipan yang baik belum menjadi arus utama dalam pengelolaan arsip pemerintah daerah. Keberadaan Depo Arsip sesungguhnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip dengan lebih baik lagi. Pengelolaan arsip digital perlu menjadi perhatian khusus karena di era TIK saat ini, digitalisasi informasi termasuk di dalamnya arsip menjadi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.



## 25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Program dalam Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat sebanyak 3 program dengan 5 indikator. Urusan Komunikasi dan Informasi diampu oleh Dishubkominfo. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi.

**Tabel 2.125**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Komunikasi dan Informasi**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
	1   Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3	3	26,00	866,67	Dishubkominfo	★
2	Jumlah sistem informasi/ <i>website</i> instansi	54	52	48,00	92,31	Dishubkominfo	★
2	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>						
	1   Jumlah pelatihan bidang TIK	1	1	5	500	Dishubkominfo	★
3	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>						
	1   Jumlah kerjasama dengan media massa	6	6	6,00	100,00	Dishubkominfo	★
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi</b>						
	1   Jumlah data base aktif	28	28	48,00	232,14	Dishubkominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dishubkominfo, 2016.

Jumlah layanan pemerintah secara elektronik terealisasi 4 layanan dari target sebanyak 3 layanan, dengan demikian status kinerjanya *Sangat Tinggi* (tercapai 133,33%). Layanan tersebut antara lain SPSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik), Sistem Keuangan Daerah, e-SIMPEG (Sistem Kepegawaian) dan e-SSH (Standar Satuan Harga) yang dapat diakses oleh masyarakat. Sementara jumlah SIM dan web yang ada pada tahun 2016 telah terealisasi dibanding target yang telah ditetapkan, yaitu 63 dibanding 52 SIM dan web, dengan status kinerja juga *Sangat Tinggi* (tercapai 121,15%). SIM yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain SIMDA, SIMPEG (SIM Pegawai),

SIMPUS (SIM Puskesmas), SIMPERPUSARDA (SIM Perpustakaan Daerah), SIMWAS (SIM Pengawasan/Inspektorat), SIM Gaji (DPPKAD), SISMIOP (Obyek Pajak), SIRUP (SIM Rencana Umum Pengadaan), LPSE, E-PROCUREMENT (Aplikasi LPSE/pengadaan barang/jasa/SPSE), SIM Aangkutan, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum-Bag. Hukum Setda), SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan-Disdukcapil), SIM Rumkit (SIM Rumah Sakit), SIMPATDA (SIM Pendapatan Daerah-DPPKAD), SIM BMD (SIM Barang Milik Daerah-DPPKAD), e-SIMPEG (BKD), e-HUDIS (Hukuman Disiplin-BKD), e-KGB (Kenaikan Gaji Berkala-BKD), e-PUPNS (e-Pendataan Ulang PNS-BKD) SIPPD (Bappeda), SISMONTEPRA (Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran-Bappeda), 18 SIAK di Kecamatan.

Sementara web yang dikelola Dishubkominfo antara lain tegalkab.go.id, dishubkominfo.go.id, Webmail, Facebook, Youtube, Twiteer, Forum Diskusi, dan web keuangan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK di Kabupaten Tegal adalah ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM yang masih rendah serta budaya TIK yang belum terbangun dengan baik. Ke depan, diharapkan pembangunan TIK dapat lebih berkembang di Kabupaten tegal, untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan kepada publik.

## 26. PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 9 indikator. Urusan Perpustakaan diampu oleh Perpusarda. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 2.126**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>						
1	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1,00	100,00	Perpusarda	★
2	Jumlah perpustakaan desa	41	26	34,00	130,77	Perpusarda	★
3	Jumlah perpustakaan instansi	54	54	16,00	29,62	Perpusarda	↓
4	Jumlah perpustakaan keliling	2	2	2,00	100,00	Perpusarda	★
5	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	16	10	8,00	80,00	Perpusarda	➡

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
6	Jumlah perpustakaan silang terpadu	6	3	18,00	600	Perpusarda	★
7	Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	40000	35000	42.186	120,53	Perpusarda	★
8	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	21600	17280	26.646,00	154,20	Perpusarda	★
9	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	13200	5280	8.890,00	168,37	Perpusarda	★

Sumber: Perpusarda, 2016. ★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Dari 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator kinerja telah terealisasi dengan baik dan berstatus *Sangat Tinggi*. Indikator jumlah perpustakaan desa terealisasi di 34 desa dari target hanya di 26 desa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya baca telah tumbuh hingga ke desa-desa. Begitu juga jumlah perpustakaan silang terpadu terealisasi 16 dari target 3 perpustakaan. Perpustakaan silang adalah layanan peminjaman buku antarperpustakaan secara periodik. Sementara untuk jumlah perpustakaan instansi dan perpustakaan rumah ibadah belum tercapai sesuai target. Dari 54 target perpustakaan instansi, telah terealisasi sebanyak 16 perpustakaan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuka kesempatan kepada SKPD untuk mengajukan silang layan terpadu karena Dinas Kerasipan dan Perpustakaan tersedia koleksi untuk layanan silang terpadu dengan SKPD.











Sedangkan perpustakaan rumah ibadah baru terealisasi 7 perpustakaan dari target 10 perpustakaan. Jumlah kunjungan perpustakaan daerah juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari target 17.280 kunjungan terealisasi 24.071 kunjungan. Kunjungan perpustakaan keliling juga menunjukkan capain yang baik, sebanyak 8.890 kunjungan dari 5.280 target kunjungan yang ditetapkan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah koleksi buku perpustakaan yang juga meningkat. Dari target 35.000 koleksi, saat ini Perpustakaan Soekarno-Hatta Kabupaten Tegal telah memiliki koleksi sebanyak 40.986 buah.

## 2.2.2 FOKUS URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian diampu oleh Distanbunhut dan DKPP. Urusan Pertanian terdiri dari 10 program dan 33 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2016.

**Tabel 2.127**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pertanian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>						
1	Jumlah sistem insentif pertanian	10	7	2,00	28,57	Distanbunhut	
2	jumlah petani yang terlatih pertahun	50	50	444,00	888,00	Distanbunhut	
3	Nilai Tukar Petani	112	109	132,00	121,10	Distanbunhut	
<b>2</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>						
1	Jumlah pasar induk pertanian	1	1	0,00	0	Distanbunhut	0
2	Jumlah promosi produk pertanian	4	4	3,00	75,00	Distanbunhut	
3	Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis	90	90	70,00	77,78	Distanbunhut	
4	Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20	20	80,00	400,00	Distanbunhut	
5	Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2	2	2,00	100,00	Distanbunhut	
<b>3</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>						
1	Jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	3	3	3,00	100,00	Distanbunhut	
2	Jumlah penyuluhan TTG	4	4	19,00	475	Distanbunhut	
3	Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	5	3	6	200	Distanbunhut	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	356.538	356.538	394.023	110,51	Distanbunhut	★
2	Jumlah produksi jagung (ton)	115.344	115.344	111.980	97,08	Distanbunhut	★
3	Jumlah Jumlah produksi kedelai (ton)	63	63	108	171,43	Distanbunhut	★
4	Jumlah produksi bawang merah (ton)	25.341	25.341	19.828	78,24	Distanbunhut	➡
5	Jumlah produksi kentang (ton)	4.456	4.456	11.866	266,29	Distanbunhut	★
6	Jumlah produksi cabe (ton)	4.828	4.828	5.003	103,62	Distanbunhut	★
7	Jumlah produksi kelapa (ton)	1.780	1.780	1.887	106,01	Distanbunhut	★
8	Jumlah produksi cengkeh (Ton)	106	106	140	132,08	Distanbunhut	★
9	Jumlah produksi Teh (Ton)	46	46	35	76,09	Distanbunhut	➡
10	Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	23.625	23.625	14.299	60,52	Distanbunhut	⬇
11	Jumlah produksi melati (ton)	9.486	9.486	4.796	50,56	Distanbunhut	⬇
5	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>						
1	Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	58	28	11,00	39,28	Distanbunhut	⬇
2	Jumlah Penyuluh Swadaya	187	120	146,00	121,67	Distanbunhut	★
6	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>						
1	Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,14	1,15	1,14	99,13	DKPP	★
7	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>						
1	Jumlah produksi daging (kg)	5808587	5793587	9.675.621	167,00	DKPP	★
2	Jumlah produksi susu (liter)	719950	716950	713.192	99,47	DKPP	★
3	Jumlah produksi telur (kg)	4954109	4939109	10.203.264	206,58	DKPP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
8	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>						
1	Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	5,20	4,80	4,69	97,71	DKPP	★
2	Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	4,705	5,056	4,80	94,86	DKPP	★
3	Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	0,410	0,47	0,43	91,49	DKPP	★
9	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>						
1	Jumlah penerapan TTG peternakan	3	1	1,00	100,00	DKPP	★
10	<b>Program Pengembangan Peternakan</b>						
1	Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	28	22	57,00	259,09	DKPP	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Distanbunhut; DKPP, 2016.

Capaian kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan Nilai Tukar Petani selama tahun 2016 (NTP= 132) berada di atas target Renstra senilai (NTP= 109). Hal ini berarti kemampuan/daya beli petani pada periode tahun 2016 lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar. Selama tahun 2016 produksi padi dapat mencapai target produksi baik sesuai target Renstra maupun target Nasional melalui gerakan upaya khusus pajale (Upsus Pajale). Peningkatan produksi padi dan peningkatan harganya memicu peningkatan penghasilan petani. Selain itu petani di sektor produk hortikultura (bawang merah dan cabe) juga menikmati dari hasil peningkatan harga komoditi tersebut.

Indikator jumlah insentif pertanian pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani belum memenuhi target. Dari rencana 7 jenis insentif baru terelisasi 2 insentif pertanian pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan petani belum terbiasa dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan target produksi dan mutu produk pertanian.

Indikator Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan antara lain Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian, dari target 20 unit dapat direalisasikan sebanyak 80 unit dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 400%). Namun demikian pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan masih dalam bentuk segar sehingga belum terdapat nilai tambah yang signifikan dinikmati petani. Jumlah petani

yang bekerjasama dengan pelaku agribisnis sebagian besar masih banyak yang memasarkan produknya langsung ke pengepul lokal, selain itu kualitas mutu dan kontinuitas produk belum bisa memenuhi permintaan para pelaku usaha agribisnis. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya fasilitasi kemitraan antara petani dengan pelaku agribisnis untuk mengurangi peran tengkulak.

Indikator jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan telah sesuai target yang ditetapkan, yaitu 3 untuk pemanfaatan litbang TTG pertanian dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai Sangat Tinggi (tercapai 100%).Capaian kinerja Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dapat dilihat dari hasil pemanfaatan litbang pertanian pada beberapa kegiatan diantaranya (1) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, berupa demplot budidaya tanaman cabe untuk pengendalian OPT terutama penyakit cabe (antraknosa/pathek). (2) Kegiatan Pengembangan Model usaha tani berbasis hamparan tersier padi, berupa demplot budidaya padi sistem jajar legowo dengan aplikasi probiotik (PGPR). (3) Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/perkebunan berupa identifikasi, verifikasi dan sertifikasi tanaman buah unggulan Kab. Tegal yaitu duku Kesuben dan durian Jatinegara yang dilakukan oleh Balai Penelitian Sertifikasi Benih (BPSB Surakarta). Namun capaian kinerja kegiatan tersebut masih pada tahap verifikasi data jenis dan morfologi tanaman duku dan durian yang ada. Sementara Rumah Pintar Petani (RPP) terealisasi dari target 3 RPP dapat direalisasikan 1 RPP yaitu RPP yang berada di Lebaksiu.

Untuk indikator Jumlah Produksi Padi dari target 356.538 ton (GKG), dapat direalisasikan sebanyak 324.843. Status kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 91,11%). Komoditi hortikultura dan perkebunan seperti jagung maupun cengkeh juga berstatus *Sangat Tinggi*. Jagung ditarget sebanyak 115.344 ton dapat direalisasikan sebanyak 111.980 ton. Begitu juga cengkeh dari target 1.780 ton dapat direalisasikan sebanyak 1.887 ton. Meski demikian faktor iklim dan gangguan OPT perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada produksi (hortikultura) dan produktivitas (perkebunan). Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan luas tanam, fasilitasi sarana produksi hortikultura dan peremajaan tanaman perkebunan.

Sementara untuk jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi hanya 8 penyuluh dari target 28 penyuluh. Sementara jumlah penyuluh swadaya direncanakan 120 orang terealisasi 146 orang dengan status *Sangat Tinggi* (tercapai 121,67%). Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi untuk menjadi penyuluh berertifikat yang belum terpenuhi. Untuk penyuluh swadaya, kendala yang dihadapi adalah rendahnya minat pemuda tani untuk menjadi petani dan menjadi penyuluh swadaya. Kaderisasi merupakan persoalan yang dihadapi Gapoktan di Kabupaten Tegal.

Indikator jumlah produksi daging (kg) dapat direalisasikan sebesar 7.723.620 kg dibanding target sebesar 5.793.587 kg atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 133,31%). Begitu juga indikator jumlah produksi susu (liter) dan produksi telur (kg) telah berstatus Sangat Tinggi, masing-masing 378.674 liter dan 8.625.828 kg sementara target yang ditetapkan sebesar 719.950 liter dan 4.954.109 liter.

## 2. URUSAN KEHUTANAN

Urusan Kehutanan terdiri dari 4 program dan 5 indikator kinerja. Urusan Kehutanan diampu oleh Distanbunhut. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kehutanan.

**Tabel 2.128**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kehutanan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>						
1	Jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK	4	2	2,00	100,00	Distanbunhut	★
2	Kegiatan Optimalisasi PSDH	1	1	1,00	100,00	Distanbunhut	★
<b>2</b>	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>						
1	Persentase lahan kritis direhabilitasi	8,6	8,3	7,82	94,21	Distanbunhut	★
<b>3</b>	<b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>						
1	Jumlah pengawasan industri hasil hutan	20	20	20,00	100,00	Distanbunhut	★
<b>4</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>						
1	Pendampingan kelompok usaha hutan rakyat terlaksana pertahun	14	14	14,00	100,00	Distanbunhut	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Distanbunhut, 2016.

Indikator-indikator pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan telah terealisasi sesuai target kinerja. Indikator jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SLVK telah terealisasi sesuai target yaitu 2 unit. Begitu juga untuk indikator persentase lahan kritis direhabilitasi pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sudah terealisasi sebesar 7,82% dari target 8,3% dengan status kinerja



*Sangat Tinggi* (tercapai 94,21%). Program rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan dapat menghidupkan kembali lahan-lahan kritis atau yang kurang produktif. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dalam merehabilitasi lahan-lahan kritis adalah sebesar 739 ha (7,82%) dari total lahan kritis 9.455 ha (8,3%) Terjaganya kelestarian sumber daya alam sangat mendukung keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan dalam rangka menjaga ketahanan pangan untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional dan khususnya masyarakat Kabupaten Tegal.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK bidang Kehutanan) tahun 2016 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang terbagi dalam fokus kegiatan:

- a. DAK bidang kehutanan (*vegetative*) dengan melaksanakan penanaman tanaman atau penghijauan pada lahan-lahan kritis milik rakyat melalui kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pengkayaan dan Pembuatan Hutan Rakyat Bambu.
- b. DAK Bidang Kehutanan (*Civil Teknis*) berupa Pembuatan bangunan sipil teknis rehabilitasi lahan berupa dam penahan sebanyak 5 unit dan gully plug sebanyak 10 unit yang dialokasikan di Kec. Jatinegara dan Kec. Pangkah.
- c. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) alokasi dana TP BPDAS Prov. Jawa Tengah berupa bansos kepada 11 kelompok tani untuk pengadaan/pembuatan bibit tanaman kayu-kayuan. Lokasi kegiatan tersebut di Kecamatan Bumijawa dan Kec. Bojong. Selain itu, BPDAS Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana bansos Pengembangan Perhutanan Masyarakat Berbasis Konservasi bagi 5 kelompok tani untuk pengadaan/pembuatan bibit tanaman kayu-kayuan, MPTS, tanaman obat dan ternak kambing. Lokasi kegiatan tersebut di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari dan Jatinegara.

Indikator-indikator pada Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dan Program Perencanaan Pengembangan Hutan telah terealisasi sesuai rencana. Indikator jumlah pengawasan industri hasil hutan terealisasi 20 unit dari target kinerja 20 unit. Sementara indikator pendampingan kelompok usaha hutan rakyat terlaksana per tahun sebanyak 14 unit juga sudah sesuai dengan target sebanyak 14 unit/tahun.

### 3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diampu oleh Disperindag dan DPU, terdiri dari 3 program dan 3 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016.

Tabel 2.129

## Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>						
1	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	0,6	0,04	0,00	0,00	Disperindag	0
<b>2</b>	<b>Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</b>						
1	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	0,4	0,04	0,00	0,00	Dispaerindag	0
<b>3</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>						
1	Rasio elektrifikasi	90,94	89,55	91,21	101,85	DPU Bid. Taru	N/A

Sumber: Disperindag, 2016.




Dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan penyelenggaraan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi untuk menertibkan usaha pertambangan dan pengawasan/pengendalian usaha pertambangan. Dengan demikian, meskipun Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Pelaksanaan APBD dengan program dan kegiatan yang diarahkan pada Pembangunan jaringan listrik perdesaan, Pengadaan lampu penerangan jalan umum, Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum untuk Masyarakat, serta Rehabilitasi dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal.

#### 4. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata diampu oleh Disparbud. Terdapat 3 program dengan 6 indikator kinerja Urusan Pariwisata. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2016.

**Tabel 2.130**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>						
1	Jumlah kunjungan Wisman	289	217	1.721,00	793,08	Disparbud	★
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>						
1	Jumlah promosi pariwisata	4	1	24,00	2.400,00	Disparbud	★
2	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	426.081	420.081	904.108	215,22	Disparbud	★
4	Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1	1	2,00	200,00	Disparbud	★
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>						
2	Jumlah kampung wisata	4	4	6,00	150,00	Disparbud	★
3	Jumlah promosi wisata melalui media massa	3	2	5,00	250,00	Disparbud	★

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparbud, 2016.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah memenuhi target, yaitu 1.409 orang dibanding target sebanyak 217 orang, dengan status capaian *Sangat Tinggi* (tercapai 649,31%). Hal ini mengindikasikan bila pariwisata di Kabupaten Tegal cukup dikenal wisatawan mancanegara. Selain itu capaian yang menggembirakan adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari target sebanyak 593.366 orang, terealisasi 767.674 orang, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 129,38%). Hal ini juga menunjukkan sektor pariwisata masih berpotensi untuk dikembangkan. Pada indikator jumlah kampung wisata juga telah melebihi target yang diberikan pada tahun 2016, yaitu terealisasi 6 buah dari target 4 buah pada tahun 2016 ini, juga dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 150%).

## 5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebanyak 14 dengan 8 program. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh DKPP. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 2.131**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>						
1	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.683.746	9.436.612	122,81	DKPP	★
3	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.414.155	40.937.539	2.894	DKPP	★
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan</b>						
1	Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk	2	2	2,00	100,00	DKPP	★
1	Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya kelautan terlaksana	2	2	2,00	100,00	DKPP	★
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>						
1	Jumlah pemberdayaan masyarakat	2	2	4,00	200,00	DKPP	★
<b>4</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>						
1	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162,510	158.010	1.874.041	1.186	DKPP	★
<b>5</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>						
1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905	1.004.655	1.315.879	130,98	DKPP	★
<b>6</b>	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	1	Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi	93	84	86,00	102,38	DKPP	★
2	2	Jumlah penyuluhan perikanan	18	10	19,00	190,00	DKPP	★
7	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>							
1	1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1006.905	1.004.655	1.315.879	130,98	DKPP	★
2	2	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.683.746	9.436.582	122,81	DKPP	★
3	3	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	158.010	1.874.041	1.187	DKPP	★
4	4	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.414.155	40.937.539	2.894	DKPP	★
8	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>							
1	1	Penanaman mangrove (Ha)	121	115	46,59	66,96	DKPP	➡

Sumber: DKPP, 2016. ★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp) sudah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 9.436.612 dibanding target sebesar 7.683.746, dengan status capaian *Sangat Tinggi* (tercapai 122,81%). Begitu juga indikator nilai produksi perikanan darat (ribu Rp) tercapai jauh di atas target, yaitu 40.937.539 dibanding target 1.414.155 dengan status capaian *Sangat Tinggi* (tercapai 2.894%). Sementara indikator jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk pada tahun 2016 telah sesuai target yang diharapkan pula, yaitu 2 kelompok dari target 2 kelompok.







Pada Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, indikator kinerja persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi sebanyak 86%. Saat ini jumlah penyuluh PNS sebanyak 6 orang, dibantu Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 13 orang. Untuk indikator nilai produksi perikanan laut (kg) sudah tercapai. Dari target 7.683.746 kg sudah tercapai 12.356.714. Sementara untuk nilai produksi perikanan darat (kg) telah tercapai di atas target yaitu 40.937.539 dibanding target 1.414.155.

Untuk Program Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan air tawar dengan indikator penanaman mangrove, tahun 2016 tidak dilaksanakan karena beberapa hal, antara lain tidak mempunyai lahan sendiri untuk menanamnya dan mangrove lebih cocok ditanam di tanah lumpur, sedangkan pantai kebanyakan pasir sehingga tidak bisa ditanami mangrove.

## 6. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan terdiri dari 16 indikator kinerja dan 4 program. Urusan perdagangan diampu oleh Disperindag dan Dinkop, UKM, Pasar. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perdagangan padat tahun 2016.

**Tabel 2.132**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>						
1	Jumlah lembaga perlindungan konsumen	5	5	3,00	60,00	Disperindag	
2	Persentase pengaduan konsumen ditangani	90	60	80,00	133,33	Disperindag	
3	Persentase alat ukur yang ditera	85	70	60,00	86,00	Disperindag	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>						
1	Nilai ekspor non migas (Rp)	121.280.610	115.280.610	79.401.093.531,00	68.876,36	Disperindag	
2	Volume ekspor non migas (ton)	21000	17.500	1.074.243,00	6.138,53	Disperindag	
3	Ekspor bersih perdagangan (Rp)	101.000.000	97.000.000	10.000,00	0,01	Disperindag	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Jumlah pasar lelang daerah	1	1	1,00	100,00	Disparindag	★
2	Jumlah sistem informasi perdagangan	1	1	1,00	100,00	Disparindag	★
3	Jumlah pasar tradisional yang representatif	10 Pasar	4	4	100	Dinas Kop UKM & Pasar	★
4	Jumlah retribusi pasar	26 pasar	26	26	100	Dinas Kop UKM & Pasar	★
5	Jumlah alat kebersihan pasar	5 unit	5	26	520	Dinas Kop UKM & Pasar	★
4	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>						
1	Jumlah kelompok pedagang kaki lima	55	40	26,00	65,00	Disperindag	↓
2	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	14	8	8,00	100,00	Disperindag	★
3	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	6.560	5.960	1.357,00	22,77	Disperindag	↓
4	Jumlah kawasan PKL dan asongan	30	15	24,00	160,00	Disperindag	★
5	Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	20	10	8,00	80,00	Disperindag	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperindag; Dinkop, UKM, Pasar, 2016.

Pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan capaian kinerja jumlah lembaga perlindungan konsumen terdapat 3 lembaga, dari target sebanyak 5 lembaga. Lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Tegal antara lain BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), YAPEKNAS (Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional), LAPPEK (Lembaga Perlindungan Konsumen) dan LSM Merah Putih. Untuk indikator persentase alat ukur yang ditera sebanyak 70%, tercapai sesuai target sebesar 70%. Capaian kinerja yang menggembirakan ini dapat terwujud karena pemerintah semakin fokus menangani masalah perlindungan konsumen antara lain melalui pembentukan BPSK di Kabupaten Tegal. Disperindag juga aktif melakukan sosialisasi UU perlindungan konsumen di masyarakat maupun pelaku usaha serta mengenalkan BPSK kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena konsumen yang ada di masyarakat kita belum sepenuhnya cerdas sehingga mereka belum mengerti hak-hak mereka sebagai konsumen begitupun para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.

Hal-hal yang masih perlu dilakukan diantaranya lebih mengintensifkan lagi sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lebih mengenalkan BPSK di Kabupaten Tegal; lebih mengintensifkan pelaksanaan tera yang ada di wilayah Kabupaten Tegal selain menera pemilik UTTP di pasar, peneraan juga dilakukan pada alat ukur/kilometer pelanggan PDAM. Usaha lain yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pasar tertib ukur tingkat nasional yang diajukan adalah pasar Trayeman dan memperoleh penghargaan tingkat nasional. Hal ini karena kesadaran pemilik UTTP untuk menera alat UTTPnya masih rendah. Selain itu Kabupaten Tegal belum mempunyai UPTD meteorologi. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan di masa yang akan datang adalah mengajukan pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Tegal menjadi pasar tertib ukur. Selain itu ke depan perlu diinisiasi wilayah Kabupaten Tegal menjadi daerah tertib ukur dan membentuk UPTD Meteorologi.

Capaian kinerja outcome program urusan ini antara lain Volume Ekspor Non Migas dari target 17.500 ton dapat direalisasikan sebanyak 1.074.243,00. Kriteria kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 6.138,53%). Indikator lainnya adalah Jumlah Kelompok PKL dibina, dari target 8 kelompok dapat direalisasikan 8 kelompok. Status capaian kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 100%).

Sementara program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dilakukan kegiatan pembinaan PKL dan asongan telah dilaksanakan adapun yang dibina adalah PKL dan asongan yang berada di Jalan Letjen Suprpto. Capaian kinerja program ini terhitung menggembirakan. Dari target 8 kelompok PKL yang dibina, pada tahun 2016 telah 8 kelompok PKL yang dapat dibina, atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.



## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Disperindag dengan 4 program dan 5 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2016.

**Tabel 2.133**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2016 Urusan Perindustrian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
<b>1</b>	<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>						
1	Jumlah pembinaan IKM	45	30	30,00	100,00	Disperindag	★
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>						
1	Jumlah kerjasama IKM	16	10	11,00	110,00	Disparindag	★
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>						
1	Jumlah produk SNI	12	5	5,00	100,00	Disparindag	★
<b>4</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>						
1	Jumlah klaster industri aktif	17	9	9,00	100,00	Disparindag	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperindag, 2016.

Dari target 30 IKM, jumlah IKM yang dibina pada tahun 2016 telah sesuai target, yaitu 30 IKM, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Untuk Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk pembinaan IKM. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan bantuan hibah baik berupa uang maupun barang disyaratkan kelompok harus memiliki badan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka Disperindag memotivasi IKM untuk membuat badan hukum secara mandiri.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri juga telah mencapai target, yaitu dari target 5 produk SNI telah tercapai 5 produk SNI pula. Meskipun demikian, upaya mendorong pengrajin agar mendaftarkan produknya dan ber-SNI perlu terus didorong. Hal ini terjadi karena prosedur persyaratan untuk memperoleh SNI sangat ketat. Sektor industri kecil kapasitasnya masih lemah dan sistem mutu belum berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk. Disperindag telah melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka

peningkatan kualitas produk baik melalui sosialisasi maupun lewat uji laboratorium. Sebagai rencana tindak lanjutnya adalah fasilitasi sertifikat SNI wajib bagi industri kecil dari pemerintah

Pada Program Penataan Struktur Industri permasalahan yang dihadapi secara umum klaster industri berjalan aktif namun tidak maksimal dan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh terhadap harga bahan baku. Pembinaan dalam bentuk peningkatan akses pasar dan fasilitasi uji laboratorium serta pembinaan lainnya telah dilakukan sehingga target 9 klaster industri telah tercapai pada tahun 2016. Klaster industri yang ada di Kabupaten Tegal antara lain klaster industri komponen kapal, *shutelcock*, komponen otomotif, batik, makanan ringan, tahu dan kerupuk mie.

## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi diampu oleh Dinsosnakertrans. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016.

**Tabel 2.133**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2016Urusan Transmigrasi**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	Persentase Capaian Kinerja 2016	SKPD	Status Kinerja 2016
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						
1	Jumlah kerjasama transmigrasi	1	1	1,00	100,00	Dinsosnakertrans	★
2	Jumlah transmigran	67	52	23,00	44,23	Dinsosnakertrans	↓

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

Capaian kinerja outcome program indikator ini antara lain Jumlah Kerjasama Transmigrasi, dari target 1 kerjasama dapat direalisasikan 1 kerjasama. Dengan demikian status capaian kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 100%). Target Jumlah Transmigran sebanyak 52 jiwa dapat terealisasi 23 jiwa yang diberangkatkan ke lokasi tujuan. Belum terpenuhinya target dikarenakan kuota transmigran ditentukan oleh pusat yang bergantung dengan ketersediaan anggaran dan juga kesiapan daerah tujuan yang terlalu jauh dari jangkauan yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah dengan ditiadakannya bantuan sosial maka para transmigran tidak mendapatkan modal untuk membuka lahan di daerah tujuan. Sering terjadi transmigran pulang ke daerah asal dikarenakan Pemerintah Daerah tujuan tidak menepati poin-poin dalam KSAD. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah peningkatan anggaran untuk sharing pendanaan dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

### **2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2018 ditelaah merujuk pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 dan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

#### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas psikologis seseorang disebut hidup layak. Apabila seseorang berada dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan, dimungkinkan kondisi kehidupannya masih belum layak. Di Kabupaten Tegal tren angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Meskipun demikian tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal. Prioritas itu Kemiskinan di Kabupaten Tegal disebabkan kurangnya pendapatan untuk menutup kebutuhan hidup sesuai garis kemiskinan. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin atau mengganti pendapatan penduduk miskin dengan bantuan sosial.

#### **2. Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja usia 15–64 tahun yang menganggur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja yang tersedia dapat pula menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal. Angka pengangguran di Kabupaten Tegal masih terhitung tinggi. Pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan, yaitu kondisi angkatan usia kerja yang tidak memiliki pendapatan. Kebijakan untuk

menciptakan lapangan kerja diperlukan untuk menurunkan angka pengangguran, yang pada akhirnya akan berkontribusi juga menurunkan angka kemiskinan.

### **3. Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal.

### **4. Pelayanan Kesehatan Dasar**

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui dukungan dana dan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu permasalahan kesehatan yang menonjol adalah permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah.

### **5. Pelayanan Dasar Pendidikan**

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representatif sehingga menjadi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di sektor pendidikan perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberpihakan pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidikan nonformal dan informal. Program-program ini didesain untuk menjamin setiap anak usia sekolah dan penduduk Kabupaten Tegal memperoleh layanan pendidikan di sekolah baik formal dan nonformal. Dengan demikian diharapkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni pendidikan akan meningkat.

## **6. Infratraktur Jalan**

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi, dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal yang masih perlu peningkatan lebih dikarenakan keterbatasan sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia untuk bisa melakukan pemeliharaan berkala yang tidak sebanding dengan panjangnya infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal. Masih rendahnya beberapa capaian kinerja indikator Urusan Pekerjaan Umum membutuhkan dukungan semua pihak, baik personalia DPU maupun *stakeholders* terkait untuk dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas.

## **7. Pengelolaan Kepegawaian**

Kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen antara lain: pemetaan kompetensi pegawai, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai, seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dan tersusunnya data profil pegawai secara baik serta penerapan sistem *reward and punishment*. Untuk itu penataan sistem manajemen sumberdaya manusia perlu menjadi perhatian dengan baik. Penataan kepegawaian dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang kompeten juga merupakan sumber daya utama bagi pewujudan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal.

## **8. Penanganan Kerawanan Sosial dan pemberdayaan Pemuda**

Semakin meningkatnya kuantitas permasalahan sosial di masyarakat menjadi perhatian masyarakat luas di Kabupaten Tegal dan memunculkan kekhawatiran akan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Adanya prostitusi terselubung dan liar di lingkungan masyarakat akibat penutupan lokalisasi, dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Persoalan sosial tersebut ditambah dengan makin meningkatnya kerentanan pemuda dan remaja terhadap kasus narkoba, minuman keras dan juga pergaulan bebas yang menyebabkan munculnya kasus kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya gerombolan anak Punk yang semakin banyak di beberapa titik wilayah di Kabupaten Tegal, khususnya di jalur transportasi utama, yang membawa pengaruh terhadap remaja yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Tegal, khususnya mereka yang putus sekolah, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, belum optimalnya peran lembaga kepemudaan dalam menciptakan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersifat positif khususnya di kecamatan atau desa menjadi persoalan tentang perepektif atau pandangan masyarakat tentang lemahnya peran pemuda dalam pembangunan di daerah. Kondisi tersebut memunculkan isu kerawanan sosial di masyarakat dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Tegal tahun 2018.

## **9. Kualitas lingkungan pemukiman**

Pembangunan pemukiman erat kaitannya dengan kualitas hunian atau rumah beserta lingkungannya. Kondisi rumah yang tidak layak huni dari segi bangunan maupun kelengkapan fasilitas dasarnya seperti sanitasi air bersih dan jamban sangat mempengaruhi kualitas pemukiman di suatu wilayah. Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembenahan dan penataan pemukiman agar menjadi layak huni melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses sanitasi air bersih bagi masyarakat maupun pembangunan fasilitas jamban keluarga.

Namun demikian upaya tersebut sampai saat ini masih belum tuntas. Masih terdapat kondisi rumah yang tidak layak huni dengan keterbatasan fasilitas sanitasi air bersih dan juga jamban keluarga dan juga perumahan kumuh khususnya di desa-desa. Kondisi tersebut memunculkan pandangan masyarakat terhadap kualitas lingkungan pemukiman yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Dengan demikian isu mengenai kualitas lingkungan pemukiman masih menjadi permasalahan pembangunan tahun 2018 yang layak mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Selain itu permasalahan persampahan dan limbah perlu mendapat perhatian karena mengurangi kualitas hidup masyarakat di permukiman.

## **10. Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja**

Perekonomian Kabupaten Tegal secara umum ditopang oleh tiga sektor besar yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail didominasi oleh pelaku UMKM dalam skala kecil dan menengah dan juga industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan dan kuliner. Keberadaan para pelaku UMKM tersebut tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal dan diantaranya terpusat pada sentra-sentra kerajinan, seperti kerajinan batik, kerajinan kulit dan produk kuliner seperti tahu atau makan ringan berbahan baku lokal. Kondisi saat ini muncul perspektif dari masyarakat mengenai lemahnya akses permodalan bagi UMKM, terbatasnya kesempatan untuk promosi dan akses pemasaran bagi produk-produk UMKM lokal dan juga kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Terkait dengan hal tersebut di sisi lain banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan bekerja di sektor-sektor informal. Kondisi tersebut memunculkan isu perlunya pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi para pekerja usia produktif.

## **11. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal**

Pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya ungkit yang sangat kuat terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Industri pariwisata yang kuat, maju dan berkembang sangat berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Banyak daerah yang perekonomiannya berkembang pesat karena didukung oleh perkembangan pariwisata di daerahnya. Saat ini semakin banyak bermunculan destinasi pariwisata baru di daerah-daerah di sekitar Kabupaten Tegal. Semakin mudahnya akses transportasi untuk menjangkau daerah-daerah tersebut, antara lain adanya jalan Tol, semakin meningkatkan persaingan dalam menarik wisatawan untuk

berkunjung ke obyek wisata. Di sisi lain kecenderungan wisatawan baik lokal maupun luar daerah ataupun mancanegara untuk berwisata tidak lagi terbatas menikmati obyek wisata yang sudah ada, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam berwisata. Dengan demikian diversifikasi obyek wisata semakin dibutuhkan dan disisi lain pengembangan fasilitas-fasilitas terhadap obyek wisata yang ada juga diperlukan.

Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang pariwisata tidak hanya dengan daerah-daerah sekitarnya tapi juga di daerah-daerah lain maka daya saing pariwisata di Kabupaten Tegal harus semakin ditingkatkan, tidak hanya dengan membenahi obyek-obyek wisata yang sudah ada dan populer seperti Guci, Purwahamba atau Cacaban, tetapi juga dengan mengembangkan potensi destinasi-destinasi pariwisata baru yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Tegal. Saat ini muncul adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Tegal belum serius dalam membenahi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal dan juga kurang memberi perhatian terhadap pengembangan potensi obyek-obyek wisata yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa. Kondisi ini memunculkan adanya isu mengenai peningkatan daya saing pariwisata di Kabupaten Tegal dan pengembangan destinasi wisata lokal sebagai alternative tujuan wisata baru di Kabupaten Tegal.

## **12. Penguatan sarana prasarana pertanian dan ketahanan pangan**

Pertanian sangat lekat dengan karakteristik geografis maupun demografis Kabupaten Tegal sehingga tidak salah jika Kabupaten Tegal disebut sebagai wilayah agraris. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB dan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tegal. Pertanian yang dominan di Kabupaten Tegal adalah pertanian tanaman pangan di mana produknya berupa bahan makanan pokok seperti padi, jagung dan tanaman hortikultura seperti sayur mayur dan buah-buahan. Seiring perjalanan waktu terjadi pergeseran karakteristik perekonomian di Kabupaten Tegal di mana sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor ekonomi terbesar di Kabupaten Tegal dan digantikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun demikian sektor pertanian saat ini tetap merupakan sektor ekonomi yang dominan di wilayah Kabupaten Tegal.

Petani di Kabupaten Tegal sebagian besar didominasi oleh petani penggarap. Sedangkan sebagian besar produk pertanian berupa produk primer yang tidak diolah dan langsung dipasarkan. Rendahnya kesejahteraan petani penggarap dan tidak stabilnya harga produk pertanian mengurangi daya tarik sektor pertanian bagi sebagian masyarakat Kabupaten Tegal khususnya generasi muda. Saat ini banyak pemuda yang enggan, tidak mau jadi petani sementara disisi lain usia para petani yang ada sudah semakin bertambah. Ditambah lagi kurangnya sarana pendukung pertanian seperti jalan usaha tani, ketersediaan pupuk dan obat-obatan yang tidak stabil dan kurangnya alat pertanian modern seperti traktor semakin menambah keterpurukan sektor pertanian di Kabupaten Tegal. Selain itu irigasi merupakan prasarana pertanian yang perlu selalu disiapkan pemerintah dalam kondisi baik. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan berupa penguatan sarana prasarana pertanian dan ketahanan pangan yang harus dapat diantisipasi untuk mempertahankan atau meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Tegal di tahun 2018.

### **13. Peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional**

Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Tegal. Perdagangan di Kabupaten Tegal berupa perdagangan retail tradisional yang banyak terpusat di beberapa fasilitas perdagangan berupa pasar tradisional maupun perdagangan retail terbuka yang tersebar di beberapa area perdagangan terbuka atau Pedagang Kaki Lima (PKL). Perdagangan tradisional baik pedagang pasar maupun PKL banyak menjual produk-produk lokal seperti produk pertanian, pangan dan bahan pokok lainnya. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang melakukan aktivitas perdagangan maka kebutuhan akan sarana prasarana perdagangan tradisional semakin meningkat pula.

Sarana prasarana perdagangan berupa pasar tradisional saat ini telah tersedia dan tersebar hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal. Demikian halnya dengan titik-titik keramaian area PKL semakin tumbuh dan berkembang khususnya di area perkotaan. Namun demikian perspektif yang ada di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal saat ini kondisi sarana prasarana perdagangan yang ada tidak mampu lagi memberikan tempat yang layak untuk melakukan aktivitas perdagangan baik bagi pedagang maupun bagi pembeli. Kondisi pasar tradisional yang kumuh dan semrawut menjadi salah satu alasan yang kuat untuk munculnya pandangan tersebut. Di sisi lain persebaran PKL di titik-titik keramaian perkotaan di Kabupaten Tegal belum mendapatkan penataan yang memadai sehingga berpotensi menambah kesemrawutan kota. Dengan kondisi tersebut peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional untuk dapat diantisipasi pada tahun 2018 sehingga secara bertahap dapat tersedia fasilitas perdagangan yang semakin layak dan nyaman baik bagi pedagang pasar tradisional dan PKL di Kabupaten Tegal maupun pembelinya.

### **14. Mitigasi bencana**

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Pada wilayah dataran tinggi yang mencakup beberapa kecamatan banyak muncul potensi terjadinya bencana antara lain bencana tanah longsor dan tanah bergerak. Kejadian bencana tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh aktifitas alam, seperti tingginya curah hujan, yang terkadang tidak dapat diprediksi kejadiannya. Namun demikian potensi terjadinya bencana berupa tanah longsor juga dapat ditimbulkan oleh aktifitas manusia, dalam hal ini yaitu aktifitas pertambangan galian C yang tidak terkendali. Meningkatnya aktifitas pertambangan galian C di wilayah Selatan Kabupaten Tegal selain berpotensi merusak lingkungan juga berpotensi menimbulkan terjadi bencana tanah longsor. Potensi bencana lain yang ada di wilayah Kabupaten Tegal adalah bencana banjir di beberapa wilayah lingkungan yang terjadi pada musim hujan. Terjadinya banjir disebabkan karena meluapnya aliran sungai di beberapa wilayah pemukiman akibat terjadinya pendangkalan atau penyempitan aliran sungai. Kondisi tersebut disebabkan karena dampak dari pembangunan pemukiman yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah yang padat penduduknya. Banyak penduduk yang membangun tempat tinggal di atas aliran sungai sehingga menutupi sungai tersebut. Disisi lain pendangkalan atau penyempitan aliran sungai dapat juga disebabkan oleh faktor alam berupa adanya endapan tanah atau sedimentasi sungai khususnya di sekitar muara sungai yang



banyak berada di wilayah utara Kabupaten Tegal menyebabkan terjadinya banjir di wilayah utara Kabupaten Tegal pada masa musim hujan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah korban bencana baik tanah longsor maupun banjir sebagian besar adalah masyarakat kecil dengan kondisi perekonomian yang terbatas sehingga semakin menambah berat beban hidup bagi para korban bencana. Dua hal tersebut perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana serta penanganan dampak sosial bagi korban bencana.

#### **15. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan di wilayah**

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di wilayah kecamatan salah satunya perlu didukung sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi gedung kantor yang memadai beserta fasilitas penunjang lainnya seperti perlengkapan kantor, peralatan kantor maupun kondisi lingkungan perkantoran yang baik. Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberi perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan di kecamatan melalui pembangunan gedung-gedung kantor yang baru untuk beberapa kecamatan ataupun melalui rehab gedung. Namun demikian kondisi saat ini masih terdapat sarana prasarana pemerintahan di kecamatan yang mendesak untuk mendapat perhatian guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah kecamatan. Kondisi tersebut mencakup lokasi gedung kantor pemerintahan maupun kondisi gedung kantor pemerintahan. Dampak dari kondisi tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat terhadap proses pelayanan pemerintahan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

### **2.4 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018**

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

#### **2. Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Hal lain adalah masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.

### **3. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan**

Beberapa permasalahan dan potensi terkait permukiman dan lingkungan perumahan antara lain masih banyaknya lingkungan pemukiman yang kurang sehat; masih banyaknya pemukiman yang tidak layak huni dan kumuh; perlu perhatian terhadap sanitasi dan drainase di lingkungan pemukiman; dan kurangnya area hijau sebagai resapan air di lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan.

### **4. Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah**

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya infrastruktur yang mendukung pertanian dan perdagangan. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan jaringan jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Hal lain yang menjadi isu sarana prasarana infrastruktur wilayah adalah masih terdapat kesenjangan kelengkapan sarana prasarana dan kondisi infrastruktur jalan khususnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

### **5. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Isu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain belum optimalnya penyediaan air bersih khususnya di wilayah pedesaan; belum optimalnya pengelolaan sampah dan masih belum tertanggulangi secara optimal pencemaran lingkungan karena limbah B3. Isu lain terkait lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai dan kerusakan *mangrove*

### **6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Tegal diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Tegal menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pada era persaingan global. Keragaman potensi masyarakat Kabupaten Tegal perlu diarahkan menjadi suatu potensi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Potensi masyarakat terutama yang mengandung muatan budaya atau kearifan lokal perlu lebih didayagunakan. Potensi ini perlu dilengkapi dengan kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI menjadi perangsang sekaligus pelindung terhadap kejahatan pencurian/perampasan terhadap karya intelektual, budaya atau kearifan lokal.

## 7. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah khususnya di lingkup pantai utara Jawa dengan kondisi topografi yang heterogen memiliki karakteristik budaya lokal yang unik dan potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata. Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

## 8. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tegal maka sektor pertanian menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian serta pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Disamping itu perlu diupayakan ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani.

## 9. Reformasi Birokrasi

Beberapa permasalahan dan potensi terkait reformasi birokrasi adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; Pengelolaan dan penataan aset daerah khususnya aset tetap belum mendapat opini wajar dari BPK; dan belum adanya koordinasi dan kesamaan pandang dalam permasalahan dan penanganan aset daerah khususnya aset tetap. Untuk mewujudkan penataan keuangan dan aset dibutuhkan sumber daya manusia pegawai yang kompeten, yang dipenuhi melalui program-program peningkatan kapasitas pegawai.

## 10. Pengembangan Industri

Kabupaten Tegal tidak memiliki kawasan industri khusus dengan semua mekanisme pendukungnya. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Tegal seharusnya memiliki minimal satu kawasan industri. Jalur pantura dan rel KA sudah tersedia dan seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kawasan sepanjang jalur pantura juga masih banyak yang belum dimanfaatkan. Adanya kawasan industri akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian; meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan tentu saja dengan tetap meminimalkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan aspek sosial.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

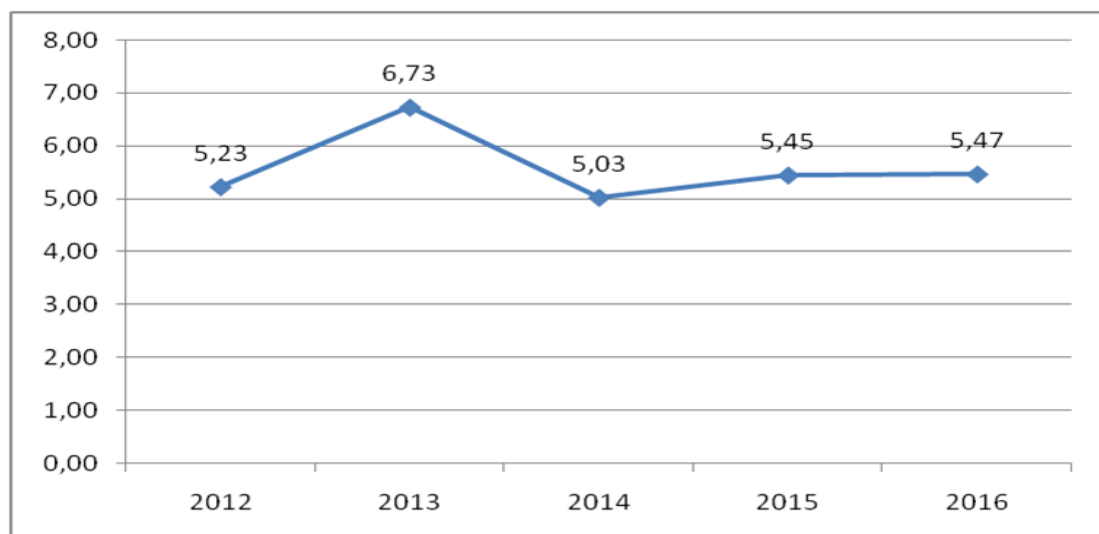
**3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kondisi ekonomi Kabupaten Tegal saat ini masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang secara umum juga masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Kondisi perekonomian nasional tahun 2016 yang cukup melambat dan diperkirakan berlanjut sampai dengan tahun 2017 dapat mempengaruhi kondisi ekonomi lokal Kabupaten Tegal.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2018 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar  $5,85 \pm 0,25 \%$  maka kebijakan ekonomi tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggarannya yang membaik dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi ekonomi Kabupaten Tegal dapat ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam arah kebijakan tahun 2016 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tegal ditetapkan sebesar  $5,82\% \pm 0,25\%$ , namun realisasinya adalah 5,47%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 LPE Kabupaten Tegal mencapai 5,45%, maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Namun demikian angka LPE Kabupaten Tegal tahun 2016 masih lebih tinggi dibandingkan LPE nasional (4,79%) dan LPE Provinsi Jawa Tengah (5,44 %). Secara umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal relatif mengalami peningkatan dengan besaran antara 5,23% - 5,47% sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal 2012-2016

*\*Data proyeksi/sangat sementara berdasar metode BPS*

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 27.727.792 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2016 mencapai Rp 21.265.717,23 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian. Berdasarkan Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2015, sektor industri dan sektor perdagangan merupakan dua kontributor terbesar dalam perekonomian wilayah, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga. Di sisi lain, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dimana banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang bekerja pada sektor ini. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	3.186.423,80	3.468.079,63	3.411.486,14	3.869.869,62	4.114.690,91
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	732.660,42	794.613,80	1.025.944,03	1.138.617,76	1.253.014,46
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5.703.933,79	6.554.374,66	7.453.897,72	8.496.555,92	9.269.703,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13.634,29	14.272,17	14.773,50	15.516,37	16.334,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	9.212,93	9.004,16	9.484,63	9.922,55	10.137,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.464.548,79	1.557.777,79	1.774.421,40	1.935.916,03	2.101.862,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.160.619,53	3.423.526,04	3.682.696,94	3.999.444,07	4.276.012,12
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	464.335,17	512.243,17	598.708,65	673.981,93	743.551,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	786.095,88	844.799,13	949.107,57	1.069.660,33	1.179.647,19
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	521.047,92	553.765,22	600.478,85	645.062,14	708.874,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	459.825,89	489.698,89	534.264,72	593.103,79	646.373,64
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	315.344,41	331.638,13	370.106,44	409.786,78	452.379,95
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	68.609,68	80.845,19	89.163,90	103.454,47	114.790,86
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	467.582,15	497.798,49	534.057,68	583.200,27	618.446,11

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	867.566,41	1.032.184,00	1.171.260,42	1.288.282,96	1.420.096,19
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	149.174,81	162.101,67	186.174,35	198.743,34	215.363,43
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	386.144,28	438.870,06	510.444,00	546.165,87	586.514,11
<b>Total</b>		<b>18.756.760,13</b>	<b>20.765.592,21</b>	<b>22.916.470,94</b>	<b>25.577.284,21</b>	<b>27.727.792</b>

**Tabel 3.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2.835.913,46	2.878.663,32	2.647.364,02	2.831.399,07	2.953.344,86
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	691.859,63	733.207,60	782.937,77	794.797,71	848.474,09
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.863.890,30	5.478.580,85	5.994.165,58	6.314.825,65	6.802.682,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13.293,41	14.264,96	14.664,27	14.623,63	14.677,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8.978,50	8.918,24	9.066,72	9.294,84	9.413,22
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.359.733,28	1.418.500,50	1.483.094,95	1.564.698,24	1.648.467,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.032.317,47	3.167.242,71	3.333.113,77	3.468.214,13	3.648.221,49
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	462.832,73	505.815,32	552.825,09	600.269,73	645.314,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	774.271,92	791.786,17	846.713,92	907.506,46	983.764,89
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	534.810,64	583.970,08	665.456,39	692.670,72	745.335,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	389.531,55	397.941,26	407.637,25	442.095,37	473.875,08
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	308.104,99	320.938,30	340.514,94	340.514,94	393.993,84
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	63.758,08	71.113,47	76.073,96	76.873,96	91.048,23
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	404.498,75	412.744,48	413.494,01	415.894,01	450.068,43
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	666.065,98	725.443,05	795.930,56	795.930,56	931.281,14
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	129.523,47	136.904,74	149.536,60	148.536,60	166.751,02
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	372.865,60	407.570,03	443.165,91	443.165,91	477.002,67
<b>Total</b>		<b>16.912.249,74</b>	<b>18.053.605,08</b>	<b>18.955.755,71</b>	<b>18.958.363,83</b>	<b>21.265.717,23</b>

**Tabel 3.3**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2012-2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	16,99	16,70	14,89	15,13	14,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,91	3,83	4,48	4,45	4,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	30,41	31,56	32,53	33,22	33,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,81	7,50	7,74	7,57	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,85	16,49	16,07	15,64	15,42
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2,48	2,47	2,61	2,64	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,19	4,07	4,14	4,18	4,25
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,78	2,67	2,62	2,52	2,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,45	2,36	2,33	2,32	2,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,68	1,60	1,62	1,60	1,63
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,37	0,39	0,39	0,40	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,49	2,40	2,33	2,28	2,23
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,63	4,97	5,11	5,04	5,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,80	0,78	0,81	0,78	0,78
R, S, T, U	Jasainya/ <i>Other Services Activities</i>	2,06	2,11	2,23	2,14	2,12
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data yang tersedia maka tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai 16,4 juta rupiah. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2012-2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,26	2,45	2,40	2,72	2,88
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,52	0,56	0,72	0,80	0,88
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,05	4,63	5,25	5,96	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1,04	1,10	1,25	1,36	1,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,24	2,42	2,59	2,81	2,99
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,33	0,36	0,42	0,47	0,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,56	0,60	0,67	0,75	0,83
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,37	0,39	0,42	0,45	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,33	0,35	0,38	0,42	0,45
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,22	0,23	0,26	0,29	0,32
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social</i>	0,33	0,35	0,38	0,41	0,43
O	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,62	0,73	0,82	0,90	0,99
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15
Q	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,27	0,31	0,36	0,38	0,41
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>12,28</b>	<b>13,31</b>	<b>14,68</b>	<b>16,14</b>	<b>17,95</b>

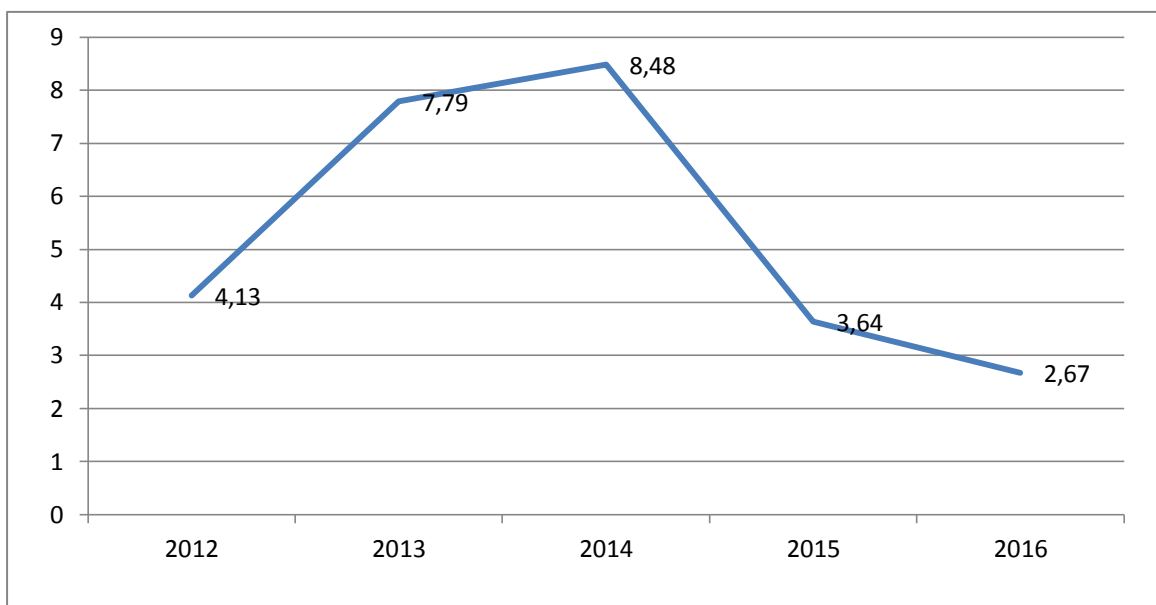
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Inflasi

Dari sisi inflasi, dalam arah kebijakan tahun 2016 laju inflasi ditetapkan sebesar 5,75% - 6,25%. Namun realisasinya adalah sebesar 2,67%. Laju Inflasi Kabupaten Tegal di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan laju inflasi di tahun 2015 yang mencapai 3,64%. Kenaikan inflasi sepanjang tahun 2016 yang paling tinggi, hampir selalu terjadi pada kelompok kesehatan. Diikuti oleh kelompok makanan jadi, kelompok sandang dan kelompok perumahan. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang selama tahun kalender 2016 mencapai inflasi 4,37 persen; disusul kelompok kesehatan 3,48 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 2,77 persen; kelompok sandang 2,71 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 2,42 persen; kelompok bahan makanan sebesar 1,78 persen; dan terakhir kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,30 persen.



Kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok minuman tidak beralkohol yang mengalami inflasi sebesar 6,95 persen; dan sub kelompok makanan jadi yang mengalami inflasi sebesar 3,97 persen. Sub kelompok lain yang mengalami kenaikan indeks cukup tinggi antara lain sub kelompok bumbu-bumbuan yang mencapai 18,51 persen; sub kelompok lemak dan minyak yang mengalami kenaikan indeks sebesar 12,05 persen; sub kelompok ikan segar yang mencapai 9,17 persen; dan juga sub kelompok daging dan hasil-hasilnya yang mencapai 8,00 persen. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya yang turun sebesar 4,77 persen; sub kelompok transportasi turun sebesar 1,14 persen dan sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya yang turun sebesar 3,54 persen.



Gambar 3.2. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016  
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2016

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

#### a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2018 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2018 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2018 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)
  - a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan komponen pajak daerah lainnya serta retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
  - b. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
  - c. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
  - d. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  - e. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - f. Meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara menyeluruh.
2. Kebijakan umum Dana Perimbangan
  - a. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan aparatur lainnya.
  - b. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
  - c. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
  - a. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana sertifikasi bagi tenaga pendidik.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.
  - d. Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan pada rata-rata pertumbuhannya dalam Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Tegal 2018**

No	Uraian	APBD 2017 (Rp)	ALOKASI 2018 (Rp)	KENAIKAN (%)
	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2.409.082.000.000</b>	<b>2.729.167.015.510</b>	<b>13,29</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.371.396.344.000</b>	<b>2.617.859.176.099</b>	<b>10,39</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>322,128,369,000</b>	<b>365.841.538.099</b>	<b>13,57</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78,049,750,000	89.249.750.000	14,35
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22,150,580,000	19.130.580.000	(13,63)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12,272,519,000	14.272.519.000	16,30
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	209,655,520,000	243.188.689.099	15,99
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,629,059,948,000</b>	<b>1.676.450.711.000</b>	<b>2,91</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	43,113,186,000	34.782.774.000	(19,32)
2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	9.396.991.000	100
2.3	Dana Alokasi Umum	1,225,226,650,000	1.212.102.111.000	(1,07)
2.4	Dana Alokasi Khusus	360,720,112,000	420.168.835.000	16,48
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>420,208,027,000</b>	<b>575.566.927.000</b>	<b>36,97</b>
3.1	Pendapatan Hibah	14,700,000,000	6.000.000.000	(59,18)
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	150,402,328,000	151.902.328.000	1,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	21,079,400,000	44.791.500.000	112,49
3.5	Dana Desa dari Pem pusat	234,026,299,000	234.026.299.000	-
3.6	Penerimaan Dana BOS	-	138.846.800.000	100,00
<b>II</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37,685,656,000</b>	<b>111.307.839.411</b>	<b>195,36</b>
II.1	SiLPA	35,606,341,000	98.467.298.311	176,54
II.2	Pencairan Dana Cadangan	2,079,315,000	12.840.541.100	517,54
II.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2017

e. Asumsi yang digunakan terhadap proyeksi penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2018 merupakan asumsi maksimal dari potensi yang kemungkinan dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk perhitungan Dana Desa masih mendasarkan pada asumsi penetapan APBD tahun 2017 dikarenakan belum adanya informasi lebih lanjut mengenai nominal yang dapat diterima pada saat penyusunan RKPD.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.

2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa dialokasikan dengan memperhatikan perhitungan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan partai politik dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan umum untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap SKPD melalui pemberian honorarium PNS dan non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah melalui pembelian barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

3. Belanja Modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pada Belanja Bantuan Keuangan khususnya yang ditujukan untuk desa asumsi yang digunakan adalah adanya penambahan alokasi untuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk mendukung visi misi kepala daerah berupa pemberian bantuan keuangan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar Rp120.409.105.000,00 dan PDPM sebesar Rp21.075.000.000,00. Bantuan kepada Desa tersebut ditambah alokasi bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar yang diasumsikan Rp6.452.932.800,00.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2018 adalah :

1. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Pencairan Dana Cadangan adalah dalam rangka mendanai kegiatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tegal.
3. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2018 adalah :

1. Pembayaran pokok utang yaitu digunakan untuk pelunasan pokok utang pemerintah Kabupaten Tegal yang telah jatuh tempo.
2. Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemberian pinjaman kepada pihak lain ataupun pemberian pinjaman secara bergulir kepada masyarakat yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah maka asumsi pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2018 adalah dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6**  
**Perhitungan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat**  
**Serta Prioritas Utama Tahun 2018**

NO	URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018	KENAIKAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
<b>1.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,461,307,722,000</b>	<b>1.462.668.672.600</b>	<b>(0,09)</b>
1.1	Belanja Pegawai	1,056,645,266,000	1.053.984.431.464	(0,25)
1.2	Belanja Bunga	0	0	-
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10,029,933,000	10.029.933.000	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	388,632,523,000	390.654.308.136	(0,52)
1.8	Belanja Tidak Terduga	6,000,000,000	8.000.000.000	33,33
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>22,441,000,000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>(68,81)</b>
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,441,000,000	7.000.000.000	(43,73)
2.2	Cadangan Pilkada Bupati	10,000,000,000	-	(100)
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2017

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7 sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai**  
**Pembangunan Daerah**

No	Uraian	APBD Murni Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2,409,082,000,000</b>	<b>2.729.167.015.510</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2,371,396,344,000</b>	<b>2.617.859.176.099</b>
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	322,128,369,000	365.841.538.099
1.2.2	Dana Perimbangan	1,629,059,948,000	1.676.450.711.000
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	420,208,027,000	575.566.927.000
<b>1.2</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>37,685,656,000</b>	<b>111.307.839.411</b>
1.2.1	SILPA	35,606,341,000	98.467.298.311
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	2,079,315,000	12.840.541.100
1.2.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		
<b>2</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1,056,645,266,000</b>	<b>1.053.984.431.464</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama</b>	<b>427,103,456,000</b>	<b>415.684.241.136</b>
3.1	Belanja Tidak Langsung	404,662,456,000	408.684.241.136
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	22,441,000,000	7.000.000.000
	<b>Kapasitas Riil Keuangan Daerah</b>	<b>925,333,278,000</b>	<b>1.259.498.342.910</b>

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2017

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2018 sebesar Rp.1.259.498.342.910,00, selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Langsung dalam RKPD tahun 2018 adalah sebesar Rp1.174.037.525.414,00 sebagai Prioritas II dan Belanja Hibah sebesar Rp.64.828.817.495,00 serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.20.632.000.000,00.

**Tabel 3.8**  
**Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018**

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2018 (Rp)
<b>1</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II</b>	<b>1.174.037.525.415</b>
1.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi KDH	1.174.037.525.415
<b>2</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III</b>	<b>85.460.817.495</b>
2.1	Belanja Hibah	64.828.817.495
2.2	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000
	<b>Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)</b>	<b>1.259.498.342.910</b>

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2017

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka selanjutnya dapat disusun rencana alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dalam Tabel 3.9 di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah**  
**dalam RKPD Tahun 2018**

NO	URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,371,396,344,000</b>	<b>2.617.859.176.099</b>	<b>246.462.832.099</b>	<b>10,39</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>322,128,369,000</b>	<b>365.841.538.099</b>	<b>43.713.169.099</b>	<b>13,57</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78,049,750,000	89.249.750.000	11.200.000.000	14,35
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,150,580,000	19.130.580.000	(3.020.000.000)	(13,63)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,272,519,000	14.272.519.000	2.000.000.000	16,30
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	209,655,520,000	243.188.689.099	33.533.169.099	15,99
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,629,059,948,000</b>	<b>1.676.450.711.000</b>	<b>47.390.763.000</b>	<b>2,93</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43,113,186,000	34.782.774.000	(8.330.412.000)	(19,32)
1.2.2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		9.396.991.000	9.396.991.000	
1.2.3	Dana Alokasi Umum *	1,225,226,650,000	1.212.102.111.000	(13.124.539.000)	(1,07)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	360,720,112,000	420.168.835.000	59.448.723.000	16,48
	- DAK Fisik	62,988,000,000	127.909.400.000	64.921.400.000	103,07
	- DAK Non Fisik	297,732,112,000	292.259.435.000	(5.472.677.000)	(1,84)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>420,208,027,000</b>	<b>575.566.927.000</b>	<b>155.358.900.000</b>	<b>36,97</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,700,000,000	6.000.000.000	(8.700.000.000)	(59,18)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	150,402,328,000	151.902.328.000	1.500.000.000	1,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	21,079,400,000	44.791.500.000	23.712.100.000	112,49
1.3.6	Dana Desa dari Pem pusat	234,026,299,000	234.026.299.000	-	-
	Penerimaan Dana BOS		138.846.800.000	138.846.800.000	100,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2,386,641,000,000</b>	<b>2.722.167.015.509</b>	<b>335.526.015.509</b>	<b>14,06</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,508,368,337,000</b>	<b>1.548.129.490.095</b>	<b>39.761.153.095</b>	<b>2,64</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1,056,645,266,000	1.053.984.431.464	(2.660.834.536)	(0,25)
			-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	29,814,615,000	64.828.817.495	35.014.202.495	117,44
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,246,000,000	20.632.000.000	3.386.000.000	19,63
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10,029,933,000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	388,632,523,000	390.654.308.136	2.021.785.136	0,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6,000,000,000	8.000.000.000	2.000.000.000	33,33
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>878,272,663,000</b>	<b>1.174.037.525.414</b>	<b>295.764.862.414</b>	<b>33,68</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57,564,229,000	194.260.236.855	136.696.007.855	237,47
2	Dinas Kesehatan	137,323,030,000	153.085.823.000	15.762.793.000	11,48
3	RSUD Dr Soeselo	147,056,278,000	143.902.949.300	(3.153.328.700)	(2,14)
4	RSUD Suradadi	33,216,040,000	62.000.000.000	28.783.960.000	86,66
5	Dinas Pekerjaan Umum	245,708,754,000	249.994.830.102	4.286.076.102	1,74
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	54,975,191,000	76.874.476.657	21.899.285.657	39,83
7	Kantor Kesbangpolinmas	1,326,040,000	1.819.000.000	492.960.000	37,18
8	Satpol Pamong Praja	4,909,117,000	9.212.255.500	4.303.138.500	87,66
9	Dinas Sosial	3,864,886,000	4.930.000.000	1.065.114.000	27,56



NO	URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6,225,700,000	6.667.940.000	442.240.000	7,10
11	Dinas Lingkungan Hidup	12,455,000,000	21.240.000.000	8.785.000.000	70,53
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5,404,868,000	5.345.192.000	(59.676.000)	(1,10)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,778,160,000	7.252.100.000	1.473.940.000	25,51
14	Dinas Perhubungan	6,170,340,000	14.066.500.000	7.896.160.000	127,97
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,242,720,000	4.163.704.000	920.984.000	28,40
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,378,820,000	2.825.135.000	446.315.000	18,76
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,356,672,000	2.406.840.000	1.050.168.000	77,41
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	6,279,688,000	5.778.300.000	(501.388.000)	(7,98)
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7,726,260,000	14.053.510.000	6.327.250.000	81,89
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10,753,955,000	25.334.899.000	14.580.944.000	135,59
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,728,980,000	20.946.910.000	16.217.930.000	342,95
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4,456,175,000	11.048.360.000	6.592.185.000	147,93
23	Sekretariat Daerah	17,896,460,000	23.542.040.000	5.645.580.000	31,55
24	Sekretariat DPRD	19,413,975,000	21.025.000.000	1.611.025.000	8,30
25	Kecamatan Adiwerna	949,500,000	729.500.000	(220.000.000)	(23,17)
26	Kecamatan Balapulang	712,960,000	748.000.000	35.040.000	4,91
27	Kecamatan Bojong	706,000,000	773.000.000	67.000.000	9,49
28	Kecamatan Bumijawa	803,700,000	829.750.000	26.050.000	3,24
29	Kecamatan Dukuhturi	608,164,000	577.000.000	(31.164.000)	(5,12)
30	Kecamatan Dukuhwaru	549,500,000	443.250.000	(106.250.000)	(19,34)
31	Kecamatan Jatinegara	711,000,000	557.750.000	(153.250.000)	(21,55)
32	Kecamatan Kedungbanteng	556,400,000	650.250.000	93.850.000	16,87
33	Kecamatan Kramat + Kelurahan	1,293,000,000	1.909.480.000	616.480.000	47,68
34	Kecamatan Lebaksiu	577,200,000	491.500.000	(85.700.000)	(14,85)
35	Kecamatan Margasari	507,635,000	2.515.633.000	2.007.998.000	395,56
36	Kecamatan Pagerbarang	580,000,000	567.250.000	(12.750.000)	(2,20)
37	Kecamatan Pangkah	696,000,000	577.000.000	(119.000.000)	(17,10)
38	Kecamatan Slawi + Kelurahan	5,333,690,000	5.280.000.000	(53.690.000)	(1,01)
39	Kecamatan Suradadi	543,000,000	4.743.321.000	4.200.321.000	773,54
40	Kecamatan Talang	723,000,000	681.000.000	(42.000.000)	(5,81)
41	Kecamatan Tarub	837,300,000	657.000.000	(180.300.000)	(21,53)
42	Kecamatan Warurejo	745,000,000	584.000.000	(161.000.000)	(21,61)
43	BPBD	2,073,506,000	2.375.000.000	301.494.000	14,54
44	Inspektorat	2,764,040,000	3.674.800.000	910.760.000	32,95

NO	URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
45	Bappeda dan Litbang	6,507,820,000	7.623.500.000	1.115.680.000	17,14
46	BPKAD	38,754,360,000	40.552.500.000	1.798.140.000	4,64
47	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3,607,000,000	5.408.040.000	1.801.040.000	49,93
48	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	6,921,550,000	9.313.000.000	2.391.450.000	34,55
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15,244,656,000)</b>	<b>(104.307.839.411)</b>	<b>(89.063.183.411)</b>	<b>584,23</b>
				-	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15,244,656,000</b>	<b>104.307.839.411</b>	<b>89.063.183.411</b>	<b>584,23</b>
				-	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37,685,656,000</b>	<b>111.307.839.411</b>	<b>73.622.183.411</b>	<b>195,36</b>
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	35,606,341,000	98.467.298.311	62.860.957.311	176,54
3.1.	Penerimaan Kembali Dana Cadangan Pilkada	2,079,315,000	12.840.541.100	10.761.226.100	517,54
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-		-	
				-	
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22,441,000,000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>(15.441.000.000)</b>	<b>(68,81)</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000	7.000.000.000	(5.441.000.000)	(43,73)
3.2.3	Cadangan Pilkada Bupati	12,441,000,000	-	(10.000.000.000)	(100)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2017

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top-down* dan *bottom-up*.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Visi dan misi daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 sebagai pembangunan daerah tahap ketiga, yaitu tahap ***Dinamisasi Sistem Inovasi***. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlangsung. Secara singkat penjelasan atas visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Tegal periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

#### 4.1 Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 adalah:

**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya,  
Religius dan Sejahtera**

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Arti dari Visi tersebut adalah :

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| Mandiri   | : | Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.                             |
| Unggul    | : | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul  |
| Berbudaya | : | Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang agung atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa        |
| Religius  | : | Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan |

baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sejahtera : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai alat bantu (*tools*) agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sesuai dengan RPJMD kabupaten Tegal tahun 2014-2019 maka **Sistem Inovasi Daerah** adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.

Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya system inovasi di daerah.

- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara *ad hoc* atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara *ex officio* dan menjalankan fungsi *leading sector*. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan payung (*umbrella board*) yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.

Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Riset (litbang) yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara *scientific*. Dalam pelaksanaannya riset tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil riset yang telah ada dan atau dilakukan lembaga riset di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori riset adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorpsi dan difusi (*menyerap dan mengembangkan*) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik (*best practice*) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

- d. Membangun budaya inovasi

Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (*industry*) nasional dan daerah

Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global

Aspek global (*regional, nasional, internasional*) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

g. Pengembangan wilayah tertinggal

Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generic sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu (*tools*) agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain telecenter dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

Kedudukan 8 (delapan) agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai payung kebijakan (*umbrella policy*). Dalam struktur (*hierarkhi*) perencanaan strategis, yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam payung kebijakan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Agenda-agenda payung kebijakan ini disebar dan tersebar dalam hierarkhi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Payung-payung kebijakan perlu disusun dan diberi kedudukan secara eksplisit dalam RPJMD untuk memberi tema pembangunan yang tersistem dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai. Tujuan, sasaran dan arah kebijakan berdasarkan pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

**a. Misi I adalah Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.**

**Tujuan :**

1. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal.
2. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat

3. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan
6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
7. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
8. Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).

**Arah kebijakan :**

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
2. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
3. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
4. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
5. Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
6. Menerapkan promosi jabatan terbuka.
7. Seleksi CPNS bersih dan transparan.
8. Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
10. Melakukan kaji ulang SOTK.
11. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
12. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
13. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
14. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
15. Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memilikisikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
16. Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
17. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN
18. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat
19. Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
20. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
21. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
22. Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;

23. Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
24. Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
25. Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
26. Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
27. Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik
28. Melakukan pelaporan keuangan dan asset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
29. Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
30. Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
31. Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
32. Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
33. Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
34. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
35. Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
36. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
37. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
38. Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
39. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
40. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
41. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
42. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau
43. Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja
44. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
45. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi
46. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
47. Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal
48. Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
49. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
50. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.



51. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau
52. Menyediakan biaya pendampingan nonmedis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
53. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
54. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
55. Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan
56. Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas
57. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
58. Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
59. Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
60. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
61. Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
62. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
63. Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
64. Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
65. Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
66. Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
67. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
68. Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
69. Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
70. Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
71. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
72. Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
73. Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
74. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana
75. Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
76. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan
77. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah

78. Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial
79. Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah

**b. Misi II (Kedua) adalah Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan dengan Arah Kebijakan**

**Tujuan :**

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
5. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)
2. Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan
3. Meningkatnya infrastruktur pertanian
4. Revitalisasi kelembagaan pertanian
5. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6. Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya
7. Meningkatnya keterlibatan jejaring *pareduluran* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal
8. Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)
9. Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani
10. Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya
11. Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan
12. Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional
13. Meningkatnya daya saing perdagangan
14. Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa
15. Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif
16. Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan
17. Meningkatnyakolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah
18. Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata
19. Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan
20. Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)

21. Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah
22. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)
23. Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)
24. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
25. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
26. Terarahnya pengembangan wilayah
27. Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang
28. Mewujudkan ruang yang manusiawi
29. Mewujudkan ruang yang berkelanjutan
30. Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*)

**Arah kebijakan :**

1. Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)
2. Kerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
3. Mempromosikan hasil produk pertanian
4. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda
5. Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian
6. Mempromosikan hasil produk pertanian
7. Membangun pasar pertanian
8. Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian
9. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah.
10. Menguatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian
11. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
12. Merekrut penyuluh pertanian swadaya (NonPNS)
13. Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
14. Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
15. Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
16. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
17. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembagaterkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
18. Mengidentifikasi kearifan lokal
19. Menguatkan pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian

20. Melakukan kontak secara kontinyu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.
21. Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)
22. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
23. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
24. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
25. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
26. Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain)
27. Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
28. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
29. Kerjasama dengan Kementerian /Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
30. Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.
31. Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
32. Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
33. Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.
34. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah
35. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
36. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
37. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
38. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
39. Mempermudah pengurusan SIUP/TDP
40. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan
41. Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
42. Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional
43. Membangun kerjasama informasi harga
44. Pelatihan TIK
45. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
46. Menyusun dokumen kajian penataan PKL
47. Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern
48. Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan
49. Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
50. Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)
51. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen

52. Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
53. Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.
54. Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.
55. Menyusun *roadmap* pengembangan industri unggulan lokal
56. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
57. Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
58. Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
59. Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
60. Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern
61. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
62. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)
63. Kerjasama denganKementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan
64. Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)
65. Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan
66. Mengembangkan lembaga pendukung kluster produk unggulan lokal (FEDEP)
67. Memberikan insentif bagi pengembangan kluster ekonomi unggul lokal
68. Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan kluster
69. Mengkaji sistem insentif yang optimal
70. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
71. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
72. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
73. Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal
74. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
75. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
76. Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
77. Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.
78. Menetapkan daftar wilayah tertinggal
79. Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
80. Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal

81. Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal
82. Menetapkan daftar kota satelit
83. Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)
84. Memperkuat jaringan TIK pada wilayah tertinggal
85. Memperkuat SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada
86. Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal
87. Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal
88. Menyusun Rencana Tata Ruang
89. Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar
90. Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
91. Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
92. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
93. Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan
94. Memperluas dan menambah jumlah taman kota
95. Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
96. Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
97. Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
98. Mengontrol industri penambangan
99. Mengontrol industri B3
100. Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten
101. Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
102. Membangun komunikasi *Government to Government* antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
103. Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.

**c. Misi III (Ketiga) adalah Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan Arah Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan**

**Tujuan :**

1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama
2. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama

**Sasaran :**

1. Memperkuatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.
2. Memperkuatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan
3. Memperkuatnya pembangunan kehidupan beragama

**Arah Kebijakan :**

1. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)

2. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
3. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
4. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
5. Pembuatan film bertema rukun dan toleran
6. Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.
7. Memperkuat kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
8. Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
9. Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
10. Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
11. Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
12. Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
13. Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
14. Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama
15. Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
16. Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
17. Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
18. Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.

**d. Misi IV (keempat) adalah Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional dengan Arah Kebijakan.**

**Tujuan :**

1. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya
2. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat

**Sasaran :**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal
2. Terpromosikannya seni budaya lokal
3. Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan
4. Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya
5. Meningkatkan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi
6. Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
7. Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat
8. Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional

**Arah Kebijakan :**

1. Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
2. Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal

3. Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
4. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
5. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
6. Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
7. Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional
8. Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
9. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
10. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
11. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
12. Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
13. Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
14. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
15. Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
16. Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
17. Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
18. Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
19. Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
20. Mengembangkan kawasan situs purbakala Samedo
21. Melestarikan seni budaya karawitan
22. Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
23. Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
24. Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya
25. Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat
26. Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
27. Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
28. Memberi bantuan keuangan kepada kelompok kesenian untuk melakukan pentas
29. Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
30. Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
31. Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)
32. Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital
33. Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
34. Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.
35. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah
36. Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
37. Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
38. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.
39. Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
40. Memperkuat kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah



41. Memperkuat kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
42. Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
43. Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
44. Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
45. Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

**e. Misi V (kelima) adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dengan Arah Kebijakan.**

**Tujuan :**

1. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa
2. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa

**Sasaran :**

1. Berdayanya Kelembagaan Desa
2. Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antar wilayah
3. Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa

**Arah kebijakan :**

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa
2. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
3. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
4. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
5. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
6. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
7. Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
8. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
9. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
10. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
11. Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
12. Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan
13. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
14. Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
15. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
16. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
17. Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

**Visi**

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera**

***“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”***

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 <b>Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi</b>	Tujuan a <b>Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal</b>	1) Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa	a) Meningkatkan keahlian aparatur b) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola). c) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum d) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja e) Menerapkan <i>merit system</i> dalam birokrasi. f) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.	(1) Memprioritaskan pemenuhan diklat teknis dan fungsional. (2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja. (3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD. (4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD). (5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>(6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>(7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.</p> <p>(8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.</p> <p>(9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>(10) Seleksi CPNS bersih dan transparan.</p> <p>(11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).</p> <p>(12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>dialokasikan.</p> <p>(13) Melakukan kaji ulang SOTK.</p> <p>(14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>(15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>(16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p>
		2) Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	<p>a) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.</p> <p>b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.</p>	<p>(1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.</p> <p>(2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.</p> <p>(3) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN</p>
		3) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan	a) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang e-	(1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		sistem <i>e-government</i>	government. b) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik. c) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.	mudah diakses masyarakat. (2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); (4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda); (5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik ( <i>e-library</i> ); (6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati ( <i>dashboard</i> ) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS; (7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik; (8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik; (9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>secara Elektronik;</p> <p>(10)Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;</p> <p>(11)Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.</p> <p>(12)Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.</p>
		4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	<p>(a) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.</p> <p>(b) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.</p>	<p>(1) Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p> <p>(2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>(3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.</p>
	Tujuan b <b>Memenuhi</b>	1) Meningkatkan	a) Meningkatkan	(1) Memenuhi aparat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.</b>	kualitas layanan administrasi kependudukan	kapasitas aparatur pelayanan Adminduk. b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk. d) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah.	pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan. (2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik. (3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk. (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat. (5) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN. (6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil. (7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
		2) Meningkatkan kualitas layanan	a) Meningkatkan kapasitas tenaga	(1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pendidikan	<p>pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>b) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata.</p> <p>c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata.</p>	<p>untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.</p> <p>(2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.</p> <p>(4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.</p> <p>(5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.</p> <p>(6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan</p>



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang diizinkan bagi anak untuk bekerja.</p> <p>(7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.</p> <p>(8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi</p> <p>(9) Menuntaskan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(10) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal</p>
		<p>3) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan</p>	<p>a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan</p> <p>b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.</p> <p>c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan</p>	<p>(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.</p> <p>(2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang berkualitas dan merata.	<p>kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.</p> <p>(4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau</p> <p>(5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>(6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>(7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan</p> <p>(9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas</p> <p>(10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara</p>
		4) Meningkatnya	a) Meningkatkan derajat	(1) Menjamin kelompok

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)</p>	<p>hidup kelompok rentan</p> <p>b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat</p> <p>c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi</p>	<p>rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.</p> <p>(2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan <i>trafficking</i>.</p> <p>(3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.</p> <p>(4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.</p> <p>(7) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.</p> <p>(8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(10) Menyelenggarakan dan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>g) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p>	<p>memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> <p>(11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>(17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanganan bencana</p> <p>(19) Meningkatkan kegiatan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> <p>(20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah</p> <p>(21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>(22) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah</p>
<p>Misi 2</p> <p><b>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian</b></p>	<p>Tujuan a</p> <p><b>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian</b></p>	<p>1) Meningkatkan produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan )</p>	<p>a) Memperluas akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas</p> <p>b) Membuka pasar hasil produk pertanian, khususnya pertanian organik</p>	<p>(1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)</p> <p>(2) Bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				lembaga pendidikan (3) Mempromosikan hasil produk pertanian (4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda
		2) Meningkatkan fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan	a) Membangun jejaring agribisnis b) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.	(1) Mengidentifikasi <i>origin-destination</i> produk pertanian (2) Mempromosikan hasil produk pertanian (3) Membangun pasar pertanian (4) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian
		3) Meningkatkan infrastruktur pertanian	Membangun infrastruktur pertanian.	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah
		4) Revitalisasi kelembagaan pertanian	Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh	1) Menkuatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan 3) Merekrut penyuluh swadaya (Non PNS) 4) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
		5) Meningkatkan penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	a) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan b) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	(1) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
		6) Meningkatkan kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya	a) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan b) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian c) Memfasilita	(1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan. (2) Mengidentifikasi kearifan lokal (3) Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>si masyarakat agar melakukan litbang mandiri</p> <p>d) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian.</p>	
		7) Meningkatkan keterlibatan jejaring <i>pareduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal	Usaha ekspansif dan jemput bola untuk lebih melibatkan jejaring <i>pareduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR.	Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring <i>pareduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR.
		8) Meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya ( <i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)	Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya	<p>(1) Membuat <i>website</i> khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)</p> <p>(2) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi.</p> <p>(3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				(4) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (5) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
		9) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan petani	Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani	Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain).
		10) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian	a) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman) b) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian. c) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan d) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan	(1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian (2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda. (3) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian. (5) Mensinergikan industri pengolahan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>n hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani</p>	<p>hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.</p> <p>(6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.</p> <p>(7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.</p>
	<p>Tujuan b <b>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan</b></p>	<p>1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan</p>	<p>a) Revitalisasi Pasar Tradisional b) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru</p>	<p>(1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah</p> <p>(2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat</p> <p>(3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>(4) Menjadikan pasar tradisional sebagai</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>penggerak roda perekonomian daerah</p> <p>(5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern</p> <p>(6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP</p> <p>(7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan</p> <p>(8) Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan</p>
		2) Meningkatkan jejaring perdagangan pasar tradisional	<p>a) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional</p> <p>b) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen</p>	<p>(1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional</p> <p>(2) Membangun kerjasama informasi harga</p> <p>(3) Pelatihan TIK</p> <p>(4) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada</p>
		3) Meningkatkan daya saing perdagangan	<p>a) Menata PKL yang tidak teratur</p> <p>b) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern</p>	<p>(1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL</p> <p>(2) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan</p> <p>(3) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>c) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat</p> <p>d) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha</p>	<p>(4) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan</p> <p>(5) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)</p>
		4) Meningkatkan jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa	<p>a) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen</p> <p>b) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa</p> <p>c) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen</p> <p>d) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah</p>	<p>(1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen</p> <p>(2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.</p> <p>(3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.</p> <p>(4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.</p>
	Tujuan c <b>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi</b>	1) Meningkatkan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi	<p>a) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan</p> <p>b) Mempermudah akses</p>	<p>(1) Menyusun roadmap pengembangan industri lokal unggulan</p> <p>(2) Bekerjasama dengan Litbang Kementerian/Le</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan</b>	kreatif	pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan	<p>mbaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)</p> <p>(4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal</p> <p>(5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)</p> <p>(6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan <i>display</i> pasar modern</p>
		2) Meningkatkan kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan	Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan	<p>(1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)</p> <p>(2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				yang lebih atas)
		3) Meningkatkan kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah	a) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal. b) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu ( <i>bonded zone</i> )	(1) Membuka kerjasama antara pusat difusi inovasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga pendidikan (2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu ( <i>bonded zone</i> )
		4) Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata	Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata	(1) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) (2) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan (3) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster
		5) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Mengkaji sistem insentif yang optimal

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6) Meningkatkan pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)	Mengembangkan <i>telecenter</i> lintas sektor secara terpadu	(1) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi (2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (3) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (4) Mengembangkan <i>telecenter</i> pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal
		7) Meningkatkan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah	a) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam) b) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah	(1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. (2) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal. (3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.
	Tujuan d	1) Meningkatkan	a) Membangu	(1) Menetapkan



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal</b>	nya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	n dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan b) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah	daftar wilayah tertinggal (2) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal (3) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal
		2) Menguatkan kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)	Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit	(1) Menetapkan daftar kota satelit (2) Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)
		3) Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.	(1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal (2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Menguatkan kapasitas para <i>stakeholder</i> pembangunan di wilayah tertinggal	(1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal (2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal
	Tujuan e <b>Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan</b>	1) Terarahnya pengembangan wilayah	a) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL) b) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang c) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat	(1) Menyusun Rencana Tata Ruang (2) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar
		2) Menguatkan penegakan hukum aturan tata ruang	a) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang. b) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang.	(1) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang. (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang. (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3) Mewujudkan ruang yang manusiawi	a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat b) Membuka pusat pengaduan masyarakat	(1) Meningkatkan persentase ruang terbuka terhadap luasan (2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota (3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat (4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas (5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
		4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	a) Mencegah kerusakan lingkungan hidup b) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi	(1) Mengontrol industri penambangan (2) Mengontrol industri B3 (3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten (4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
		5) Mewujudkan rintisan program kota kembar ( <i>sister city</i> )	Membangun kerjasama dalam pembangunan kota ( <i>urban development</i> ) dengan Pemerintah Daerah ( <i>Local Government</i> )	(1) Membangun komunikasi <i>Government to Government</i> antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa	unggulan (2) Membangun kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan
Misi 3 <b>Mewujudkan kehidupan <i>pareduluran</i> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama</b>	Tujuan a <b>Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama</b>	1. Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif	a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang rukun dan toleran b) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan	(1) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (3) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga (4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>cetak, dan media elektronik</p> <p>(5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p> <p>(6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan</p>
		<p>2. Menguatny a dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamad an kepercayaan</p>	<p>Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput</p>	<p>(1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organi sasi keagamaan secara representatif dan proporsional.</p> <p>(2) Menyelenggara kan dialog <i>roadshow</i> ke semua kelompok (sekte) umat beragama.</p> <p>(3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .</p> <p>(4) Mempublikasi kan media bertema kerukunan umat beragama.</p> <p>(5) Menyelenggara kan <i>desk</i> penyelesaian</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.</p> <p>(6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.</p> <p>(7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.</p> <p>(8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama</p>
	Tujuan b <b>Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama</b>	1. Menguatkan pembangunan kehidupan beragama	<p>a) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p>	<p>(1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.</p> <p>(2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>(3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> <p>(4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p>
Misi 4 <b>Mengembangkan seni budaya dan</b>	Tujuan a <b>Melindungi dan memanfaatkan</b>	1) Meningkatkan kesadaran masyarakat	a) Mengenalkan seni budaya masyarakat	(1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pengetahuan tradisional	an seni budaya	t tentang seni budaya lokal	t b) Menginter nalisasi seni budaya masyarakat	masyarakat (2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal (3) Mensosialisasi kan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah (4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian (5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat (6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
		2) Terpromosikannya seni budaya lokal.	Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif	(1) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi nasional (2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional (3) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di luar daerah (4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, (5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				nasional (6) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional (7) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia (8) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro (9) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
		3) Meningkatkan peran seni budaya dalam pembangunan	Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata	(1) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal (2) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal (3) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar (4) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah. (5) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik (6) Mengembangkan kawasan situs purbakala Semedo (7) Melestarikan seni budaya karawitan
		4) Meningkatkan perolehan	a) Memfasilitasi perolehan	(1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		HKI di bidang seni budaya	HKI di bidang seni budaya b) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI	bagi seni budaya (2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal (3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya (4) Mengundang pentas seni budaya lokal yang telah memiliki HKI dalam kegiatan seremoni pemerintah.
		5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi	a) Memfasilitasi paket pariwisata dengan menu seni dan budaya b) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat	(1) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat (2) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian (3) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya (4) Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan Kesenian (5) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal (6) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				ekonomi. (7) Melakukan pencitraan public ( <i>branding</i> ) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot).
	Tujuan b <b>Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat</b>	1) Meningkatkan pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat	a) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat b) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat	(1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik (2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif. (3) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat. (4) Melakukan pendataan secara digital
		2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat	a) Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat	(1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah (2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa (3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan (4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional & internasional.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional	a) Membangun Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ)	(1) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional (2) Memperkuat kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah (3) Memperkuat kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional (4) Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani) (5) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku (6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat (7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS
Misi V <b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat</b>	Tujuan a <b>Meningkatkan fungsi kelembagaan desa</b>	) Berdayanya Kelembagaan Desa	a) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga	(1) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa (2) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kemasyarakan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK))	desa (3) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa (4) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa (5) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup (6) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
	Tujuan b <b>Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa</b>	1) Menurunkan kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah	a) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal b) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan	(1) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (2) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa (3) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan (4) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
		2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat desa	a) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa b) Menjamin kebutuhan kelompok rentan	(1) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan (2) Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa	<p>(3) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan</p> <p>(4) Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan</p> <p>(5) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa</p> <p>(6) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa</p> <p>(7) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu</p>

## **4.2 Prioritas Pembangunan Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dengan telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai dasar penjabaran dan kajian arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 maka kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tahun 2018 mempunyai prioritas dan sararan sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

### **A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang merupakan rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:

1. Pendidikan
  - a. Pendidikan Vokasi
  - b. Pendidikan kualitas guru
2. Kesehatan
  - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
  - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman
  - a. Penyediaan perumahan layak
  - b. Air bersih dan sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
  - a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
  - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
  - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
  - d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
  - e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan Energi
  - a. EBT dan konservasi energi
  - b. Pemenuhan kebutuhan energi
6. Ketahanan Pangan
  - a. Peningkatan produksi pangan
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
  - a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
  - b. Pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
  - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah
  - a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
  - b. Pembangunan perdesaan
  - c. Reforma agraria
  - d. Pencegahan dan penanggulangan bencana
  - e. Percepatan pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
  - a. Penguatan pertahanan
  - b. Stabilitas politik dan keamanan
  - c. Kepastian hukum
  - d. Reformasi birokrasi



## **B. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah daerah tahun 2018**

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensiunggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upayapengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

## **C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2018**

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 disusun dengan:

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019, sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional.
2. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah 2018 yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.
3. Memperhatikan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2016 serta rencana target capaian tahun 2018.
4. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi tahun 2018 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :
    - a) Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2018 yang direncanakan tumbuh **5,85 ± 0,25%** dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah dan penyerapan anggarannya yang membaik.
    - b) Mengupayakan percepatan penurunan tingkat kemiskinan penduduk pada kisaran **8,75 %** di tahun 2018 melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, afirmasi pembangunan wilayah tertinggal dengan dukungan program percepatan (*quick wins*), dan penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
    - c) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi **3,96 - 4,06%** di tahun 2018 dengan memperluas kesempatan kerja.
    - d) Menekan laju inflasi pada kisaran **5,75 ± 0,5%**.
    - e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi **63,72 - 64,15** di tahun 2018 melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat.
  6. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2016-2030.
  7. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur utamanya jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, dan jaringan air bersih serta fasilitas perdagangan sebagai satu kesatuan sistem guna mendukung penguatan perekonomian rakyat.
  8. Mendukung implementasi program 100-0-100 yaitu 100% ketersediaan akses sanitasi, 0% kawasan kumuh dan 100% ketersediaan akses air minum.
  9. Memperhatikan daya dukung dan upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk antisipasi dampak perubahan iklim dan bencana;
  10. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
  11. Memperkuat keterkaitan pembangunan antar sektor dan antar wilayah secara terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Tegal;

12. Menciptakan situasi kehidupan masyarakat yang kondusif dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018;
13. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
14. Menerapkan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 diarahkan untuk **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar dan akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan didukung fasilitas infrastruktur publik yang mantap.”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2018 ditujukan untuk :

**1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal**, yang difokuskan pada :

- a. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
- b. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
- c. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
- d. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- e. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
- f. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
- g. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.
- h. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
- i. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.
- j. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
- k. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
- l. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara.
- m. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *trafficking*.
- n. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
- o. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

- p. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
  - q. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.
- 2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang difokuskan pada :**
- a. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
  - b. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
  - c. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
  - d. Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.
  - e. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
  - f. Menerapkan promosi jabatan terbuka.
  - g. Melakukan pemetaan kebutuhan pegawai di tiap tiap SKPD dan BLUD serta melakukan pengadaan pegawai (CPNS dan Tenaga BLUD) melalui seleksi yang bersih dan transparan.
  - h. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
  - i. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
  - j. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, dengan fokus pada:**
- a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
  - b. Peningkatan fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan, melalui pembangunan pasar pertanian (sub terminal agribisnis) dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.
  - c. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.
  - d. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.
  - e. Peningkatan keterlibatan jejaring paseduluran dan Corporate Social Responsibility (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal melalui kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring paseduluran dan perusahaan pemberi CSR.

- f. Peningkatan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya.
  - g. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
- 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan, dengan fokus pada :**
- a. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing.
  - b. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga;
  - c. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.
- 5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan dengan fokus pada :**
- a. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local.
  - b. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna.
  - c. Melakukan perintisan pembentukan kawasan industri terpadu.
  - d. Penguatan klaster industri, pertanian, dan pariwisata, melalui pengembangan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) dan pemberian insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan.
  - e. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
- 6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, dengan fokus pada :**
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi.
  - b. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah, melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada.

- c. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah.
- 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan, dengan fokus pada :**
- a. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja.
  - b. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.
- 8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama, yang difokuskan pada :**
- a. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll).
  - b. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll).
  - c. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga.
  - d. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik.
  - e. Pembuatan film bertema rukun dan toleran
- 9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa, yang difokuskan pada :**
- a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa.
  - b. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa.
  - c. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa.
  - d. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa.
  - e. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
  - f. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
- 10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa, yang difokuskan pada :**
- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
  - b. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa.
  - c. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan.
  - d. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan.
  - e. Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan.
  - f. Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan.
  - g. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan.
  - h. Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan.
  - i. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal

dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2018 di Kabupaten Tegal.

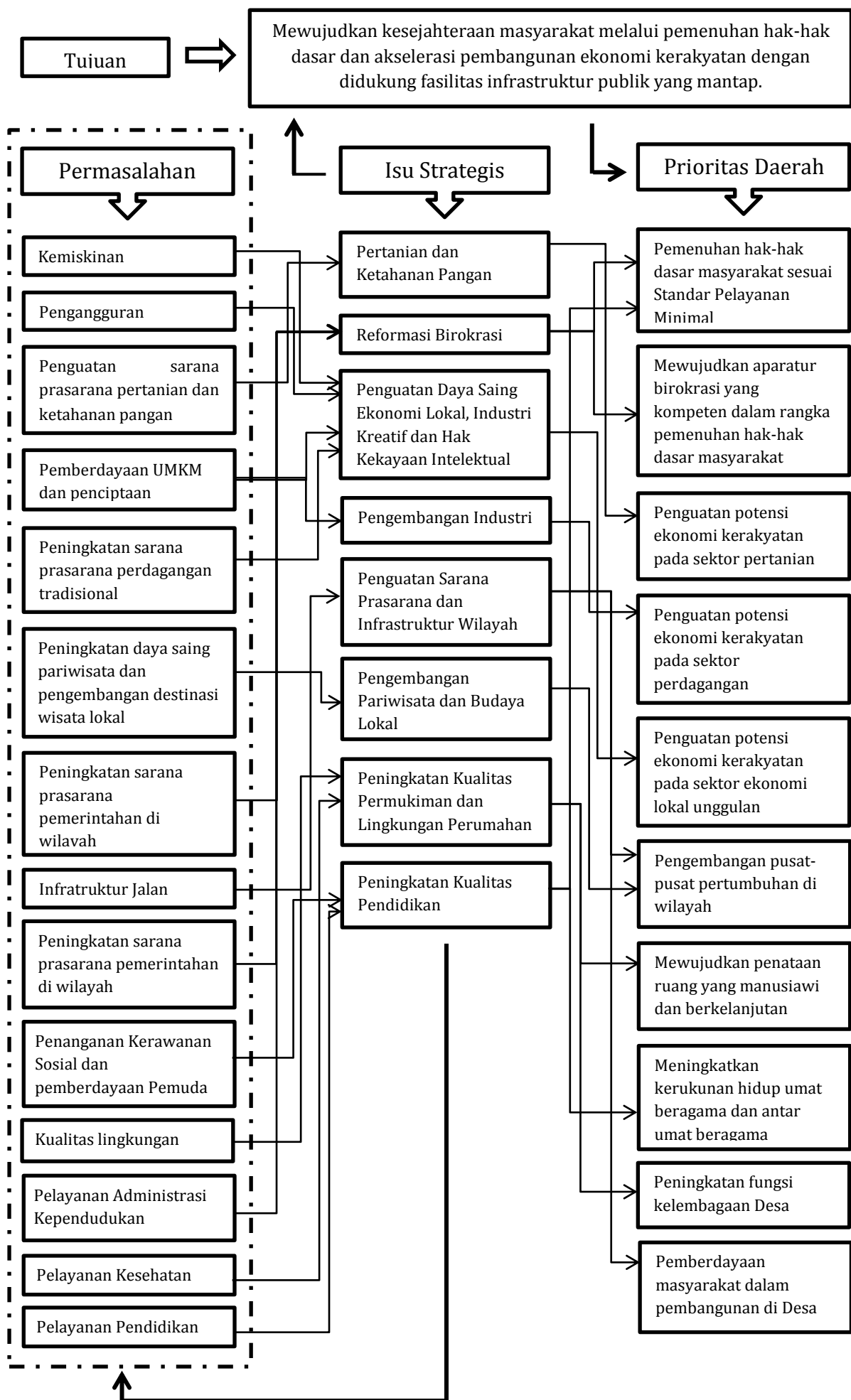
Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 4.2, gambar 4.1 sampai dengan 4.3 Berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional**

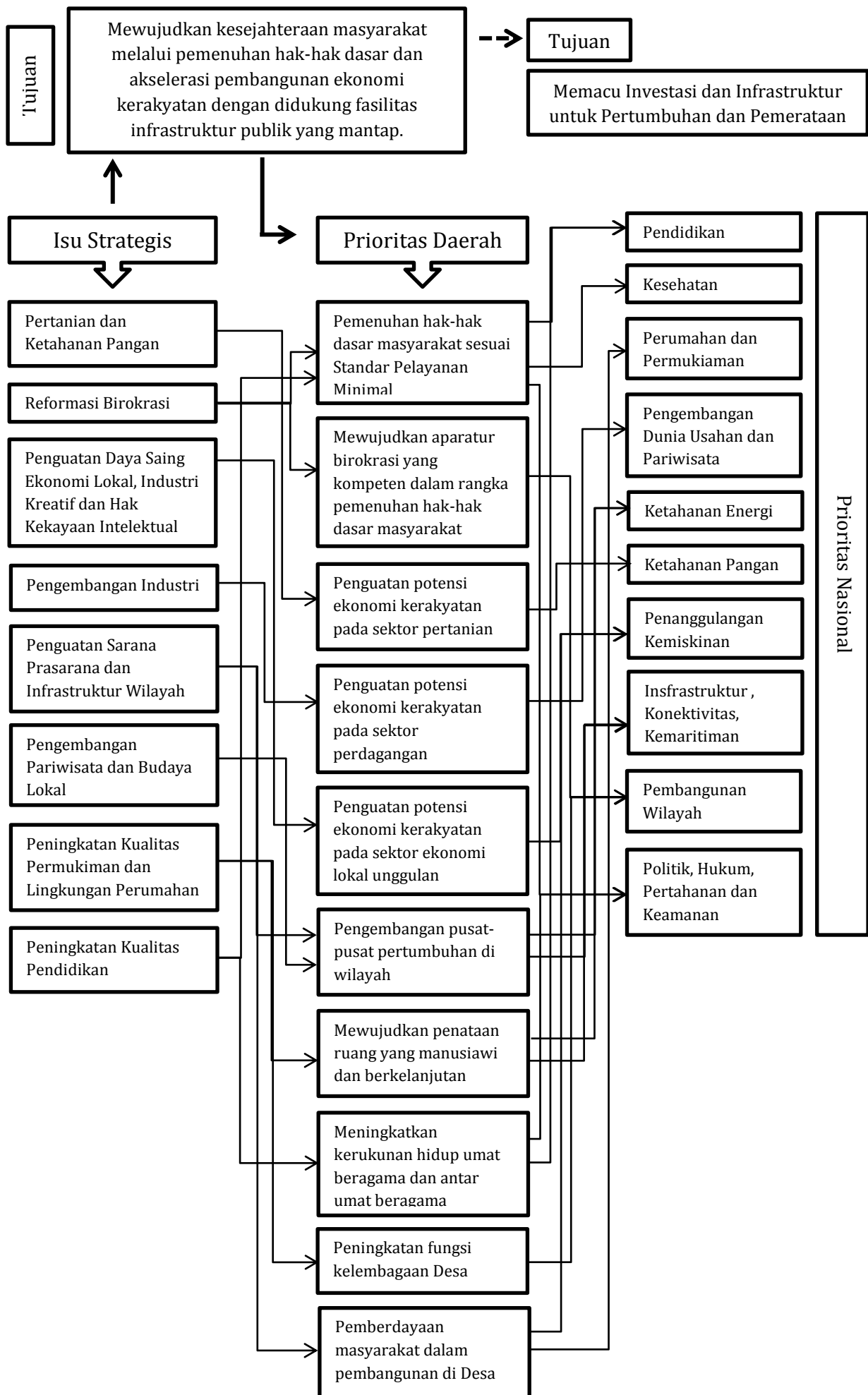
No	Isu strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1.	-Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	Pendidikan
2.	-Reformasi Birokrasi	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	Kesehatan
3.	-Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	Perumahan dan Permukiman
4.	-Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah - Pengembangan Industri	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan 5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	Ketahanan Energi
6.	Pertanian dan Ketahanan	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada	4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang	Ketahanan Pangan

No	Isu strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
	Pangan	sektor pertanian	didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	
7.	-Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal -Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian 9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa, 10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	Penanggulangan Kemiskinan
8.	Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
9.	Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	3. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	Pembangunan wilayah
10.	- Peningkatan Kualitas Pendidikan	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

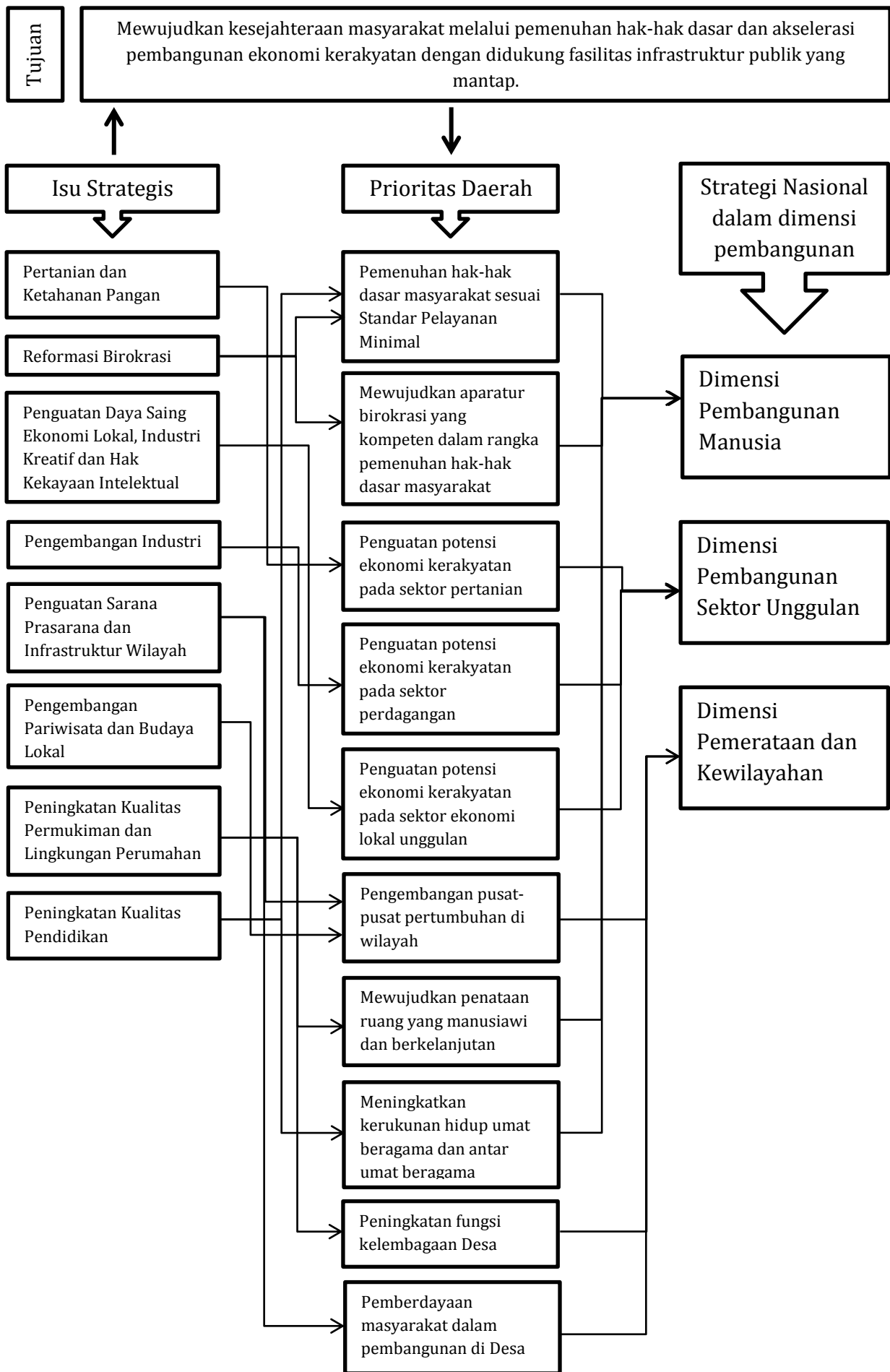




**Gambar 4.1**  
**Keterkaitan Isu Startegis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018**



**Gambar 4.2**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018**



**Gambar 4.3**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2018**

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis dapat dilihat dalam Tabel 4.3 Berikut ini.

**Tabel 4.3.**  
**Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2018**

<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Pelayanan Dasar Pendidikan	1. Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 3. Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1. <b>Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal</b> , yang difokuskan pada : a. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN. b. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil. c. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk. d. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. e. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon	a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. b. Program Pendidikan Anak Usia Dini; c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; d. Program Pendidikan Menengah; e. Program Pendidikan Non Formal; f. Program Pendidikan Luar Biasa; g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; j. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Disdukcapil  Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikes Dikes Dikes

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		<p>peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.</p> <p>f. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.</p> <p>g. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.</p> <p>h. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.</p> <p>i. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.</p> <p>j. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>k. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>l. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara.</p>	<p>n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p> <p>o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;</p> <p>p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;</p> <p>q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;</p> <p>s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;</p> <p>t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.</p> <p>u. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;</p>	<p>Dinkes</p> <p>Dinkes</p> <p>RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi</p> <p>Dinkes</p> <p>Dinkes</p> <p>Dinkes</p> <p>Dinkes</p> <p>DP3AP2KB</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		<p>m. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan <i>trafficking</i>.</p> <p>n. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.</p> <p>o. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>p. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>q. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.</p>	<p>v. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;</p> <p>w. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;</p> <p>x. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</p> <p>y. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;</p> <p>z. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;</p> <p>aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;</p> <p>bb. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;</p> <p>cc. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;</p> <p>dd. Program</p>	<p>DP3AP2KB</p> <p>DP3AP2KB</p> <p>Dinkes, Dinas Sosial</p> <p>DP3AP2KB</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; ee. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	BPBD
1. Pengelolaan Kepegawaian	1. Reformasi Birokrasi	<b>2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,</b> yang difokuskan pada : a. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional. b. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja. c. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD. d. Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah	a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa. e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan	Set. DPRD  Sekretariat Daerah  BPKAD, BP2D  BPKAD, Dispermasdes  Sekretariat Daerah  Inspektorat  Inspektorat

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		<p>Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>f. Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>g. Melakukan pemetaan kebutuhan pegawai di tiap tiap SKPD dan BLUD serta melakukan pengadaan pegawai (CPNS dan Tenaga BLUD) melalui seleksi yang bersih dan transparan.</p> <p>h. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>i. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>j. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p>	<p>Sistem dan Prosedur pengawasan</p> <p>h Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;</p> <p>i Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah</p> <p>j Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>k Program Pendidikan Kedinasan;</p> <p>l Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>m Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;</p> <p>n Program Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>Sekretariat Daerah</p>
<p>1. Kemiskinan</p> <p>2. Pengangguran</p>	<p>1. Pertanian dan Ketahanan</p>	<p><b>3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, dengan fokus pada:</b></p>	<p>PERTANIAN</p> <p>a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>	<p>Distan &amp; KP</p>



<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
3. Penguatan sarana prasarana pertanian dan ketahanan pangan	Pangan	<p>a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.</p> <p>b. Peningkatan fasilitasi perdagangan pertanian dan perikanan, melalui pembangunan pasar pertanian (sub terminal agribisnis) dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.</p> <p>c. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.</p> <p>d. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok</p>	<p>Pertanian/ Perkebunan.</p> <p>b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;</p> <p>c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;</p> <p>g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;</p> <p>h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;</p> <p>i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;</p> <p>j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;</p> <p>k. Program Pengembangan Peternakan</p> <p>l. Program Pemanfaatan</p>	<p>Distan &amp; KP</p> <p>Distan &amp; KP</p> <p>Distan &amp; KP</p> <p>Distan &amp; KP</p> <p>Distan &amp; KP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>Distan &amp; KP</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		<p>Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.</p> <p>e. Peningkatan keterlibatan jejaring paseduluran dan Corporate Social Responsibility (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal melalui kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring paseduluran dan perusahaan pemberi CSR.</p> <p>f. Peningkatan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya.</p> <p>g. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.</p>	<p>Potensi Sumber Daya Hutan;</p> <p>m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;</p> <p>n. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.</p> <p>o. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;</p> <p>p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;</p> <p>q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;</p> <p>r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;</p> <p>s. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</p> <p>t. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;</p> <p>u. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.</p>	<p>Distan &amp; KP</p> <p>Distan &amp; KP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p>
1. Kemiskinan	1. Penguatan Daya	<b>4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor</b>	<p>PERDAGANGAN.</p> <p>a. Program Perlindungan</p>	Disdag, Kop & UKM

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
2. Pengangguran 3. Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja 4. Peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional	Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan Industri	<b>perdagangan, dengan fokus pada :</b> a. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing. b. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga; c. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.	Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Disdag, Kop & UKM  Disdag, Kop & UKM
1. Kemiskinan 2. Pengangguran 3. Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja 4. Peningkatan daya saing	1. Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah 2. Penguatan Daya	<b>5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan dengan fokus pada :</b> a. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan	PRODUK UNGGULAN LAIN a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga	Disperinaker  Disperinaker  Disperinaker

<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
<p>pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal</p> <p>5. Peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional</p> <p>6. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan di wilayah</p>	<p>Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>3. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal</p> <p>4. Pengembangan Industri</p>	<p><i>roadmap</i> pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local.</p> <p>b. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna.</p> <p>c. Melakukan perintisan pembentukan kawasan industri terpadu.</p> <p>d. Penguatan klaster industri, pertanian, dan pariwisata, melalui pengembangan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) dan pemberian insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan.</p> <p>e. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandardisasi dan bersertifikat) serta</p>	<p>Ketenagakerjaan.</p> <p>d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;</p> <p>e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;</p> <p>f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;</p> <p>g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;</p> <p>h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;</p> <p>i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;</p> <p>j. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.</p> <p>k. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.</p> <p>l. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;</p> <p>m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi</p>	<p>Disdag, Kop. &amp; UKM</p> <p>Disdag, Kop. &amp; UKM</p> <p>Disdag, Kop. &amp; UKM</p> <p>DPM &amp; PTSP</p> <p>DPM &amp; PTSP</p> <p>DPM &amp; PTSP</p> <p>DPM &amp; PTSP</p> <p>Disperinaker</p> <p>Disdag, Kop. &amp; UKM</p> <p>Disperinaker</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		<p>penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.</p>	<p>Industri.  n. Program Penataan Struktur Industri.  o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;  p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.  q. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;  r. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi  s. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;  u. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.</p>	<p>Disperinaker   Diskominfo   Diskominfo   Diskominfo   Diskominfo   Disparpora   Disparpora   Disparpora</p>
<p>1. Infratraktur Jalan  2. Kualitas lingkungan pemukiman  3. Peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional  4. Peningkatan sarana prasarana</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan  2. Penguatan Sarana Prasarana dan</p>	<p><b>6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, dengan fokus pada :</b>  a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)</p>	<p>a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;  b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;  c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;  d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;</p>	<p>DPU   Dinas Perkimtaru   DPU   DPU</p>

<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
pemerintahan di wilayah	Infrastruktur Wilayah	<p>melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi.</p> <p>b. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah, melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah.</p>	<p>e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;</p> <p>f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.</p> <p>g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;</p> <p>h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;</p>	<p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p>

<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
1. Infratraktur Jalan 2. Kualitas lingkungan pemukiman 3. Peningkatan sarana prasarana perdagangan tradisional 4. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan di wilayah	1. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan 2. Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	<b>7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan, dengan fokus pada :</b> a. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja. b. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah; c. Program Pengendalian Banjir; d. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; f. Program Pengembangan Perumahan; g. Program Lingkungan Sehat Perumahan; h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;  <b>TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengembangan Data/Informasi; d. Program Kerjasama	DPU  DPU, Bappeda & Litbang  DPU  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang, Dinas Perkimtaru Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Pembangunan; e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; j. Program Perencanaan Sosial Budaya; k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; o. Program Peningkatan dan	Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  Bappeda & Litbang  BPBD  Dishub  Dishub  Dishub  Dishub



Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			<p>Pengamanan Lalu Lintas.</p> <p>p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;</p> <p>q. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;</p> <p>r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;</p> <p>s. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>t. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;</p> <p>u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;</p> <p>v. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.</p> <p>w. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);</p> <p>x. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</p> <p>y. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p>	<p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH, DKPP</p> <p>DLH</p> <p>Dinas Perkimtaru</p> <p>Dinas Perkimtaru</p>

<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>OPD Penanggung jawab</b>
1. Penanganan Kerawanan Sosial dan pemberdayaan Pemuda	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan	<p><b>8.Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama</b>, yang difokuskan pada :</p> <p>a. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll).</p> <p>b. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll).</p> <p>c. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga.</p> <p>d. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik.</p> <p>e. Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p>	<p>a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;</p> <p>b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</p> <p>c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;</p> <p>d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;</p> <p>e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;</p> <p>h. Program Pendidikan Politik Masyarakat;</p> <p>i. Hibah</p>	<p>Disparpora</p> <p>Disparpora</p> <p>Kesbangpolinmas Satpol PP, Kesbangpolinmas</p> <p>Kesbangpolinmas</p> <p>Kesbangpolinmas</p> <p>Kesbangpolinmas</p> <p>Satpol PP</p> <p>Kesbangpolinmas</p> <p>Sekretriari Daerah</p>
1. Pengelolaan kepegawaian	1. Reformasi birokrasi	<p><b>9.Peningkatan fungsi kelembagaan Desa</b>, yang difokuskan pada :</p>	<p>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA</p> <p>a. Program Peningkatan</p>	<p>Dispermasdes</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
		a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa. b. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa. c. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa. d. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa. e. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup f. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa	Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dispermasdes  Dispermasdes  Dispermasdes  Dinas Arpus
1. Kemiskinan 2. Pengangguran 3. Penanganan Kerawanan Sosial dan pemberdayaan Pemuda 4. Kualitas lingkungan pemukiman 5. Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja 6. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan di	1. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan 2. Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah 3. Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri	<b>10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa,</b> yang difokuskan pada : a. Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. b. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa. c. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan. d. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan. e. Melakukan pembangunan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dispermasdes  Dispermasdes  Dispermasdes  Dinas Arpus

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
wilayah	Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	infrastruktur pelayanan dasar perdesaan. f. Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan. g. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan. h. Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan. i. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa		

Sementara itu keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 beserta dengan Kinerja Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 4.4 Berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Keterkaitan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018**

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal, yang difokuskan pada : r. Mengoptimalkan pelayanan di	a) Persentase penduduk memiliki: - KTP - Kartu Keluarga - Akta Kematian - Akta Kelahiran (0-18 tahun) b) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	100 100 30 100 75	a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. b. Program Pendidikan Anak Usia Dini; c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; d. Program Pendidikan Menengah;	Disdukcapil Dikbud Dikbud Dikbud

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Rumah PATEN.	c) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	71	e. Program Pendidikan Non Formal;	Dikbud
s. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.	d) APK SD/SDLB/MI/Paket A	112	f. Program Pendidikan Luar Biasa;	Dikbud
t. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.	e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98,28	g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	Dikbud
u. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.	f) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	63,85	h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	Dinkes
v. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.	g) APM PAUD TK	64,02	i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinkes
w. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.	h) APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,93	j. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
x. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.	i) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	92,56	n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
y. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.	j) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	60,04	o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	Dinkes
z. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.	k) AT SD ke SMP sederajat	99,81	p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	Dinkes
aa. Menyediakan biaya pendampingan	l) AT SMP ke SMA sederajat	78,00	q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	m) AMH	92,64	r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	Dinkes
	n) Angka lulusan SD/MI	99,99	s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	Dinkes
	o) Angka Lulusan SMP/ MTs	99,99	t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Dinkes
	p) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,99	u. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;	Dinkes
	q) Angka Harapan Hidup	69,58		
	r) Jumlah kematian ibu	34		
	s) AKB	7,90		
	t) AKABA	8,6		
	u) Persentase Puskesmas Terakreditasi	86,66		
	v) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	86,21		
	w) Persentase PPK BLUD Puskesmas	100		
	x) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	Kelas B		
	y) ISO RSUD dr. Soeselo	40%		
	z) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	Paripurna		
	aa) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	6,5		
	bb) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	13		
	cc) Persentase lansia terlantar yang dibina	11,5		
	dd) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang	13,8		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p>non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>bb. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>cc. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara.</p> <p>dd. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan <i>trafficking</i>.</p> <p>ee. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.</p> <p>ff. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>gg. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi soial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>hh. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.</p>	<p>menjadi korban kekerasan direhabilitasi</p> <p>ee) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi</p> <p>ff) Persentase PMKS ditangani</p> <p>gg) Persentase eks WTS yang diberdayakan</p> <p>hh) Indeks Pembangunan Gender</p> <p>ii) Indeks Pemberdayaan Gender</p> <p>jj) Persentase korban bencana alam ditangani</p>	<p>7</p> <p>29</p> <p>8,6</p> <p>64,72</p> <p>70,16</p> <p>100</p>	<p>v. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;</p> <p>w. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;</p> <p>x. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</p> <p>y. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;</p> <p>z. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;</p> <p>aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;</p> <p>bb. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;</p> <p>cc. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;</p> <p>dd. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>ee. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.</p>	<p>Dinkes, DP3AP2KB</p> <p>Dinkes, DP3AP2KB</p> <p>Dinkes</p> <p>Dinkes, Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p> <p>BPBD</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p><b>2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat</b>, yang difokuskan pada :</p> <p>a. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.</p> <p>b. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.</p> <p>c. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.</p> <p>d. Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>f. Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>g. Melakukan pemetaan kebutuhan pegawai di tiap tiap SKPD dan BLUD serta melakukan pengadaan</p>	a) Jumlah kasus KKN	0	a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	Sekretaris
	b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	136	b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	Dewan Sekertaris Daerah
	c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	93	c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	BPKAD
	d) Jumlah kasus kepegawaian	43	d. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Dispermasdes
	e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	21	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	Inspektorat
	f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	99,6	f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	Inspektorat
	g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya ( <i>skill, knowledge, attituted</i> )*	30	g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Inspektorat
	h) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	40	h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	Diskominfo
	i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	80,05	i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Sekertaris Daerah
	j) Jumlah SIM	13	j. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	Sekertaris Daerah
	k) Persentase SIM yang berfungsi	100	k. Program Pendidikan Kedinasan;	BKD
	l) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	WTP	l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD
			m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	BKD
			n. Program Peningkatan Pelayanan	BKD

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p>pegawai (CPNS dan Tenaga BLUD) melalui seleksi yang bersih dan transparan.</p> <p>h. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>i. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>j. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p>			Publik	
<p><b>3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, dengan fokus pada:</b></p> <p>a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.</p> <p>b. Peningkatan fasilitasi perdagangan pertanian dan perikanan, melalui pembangunan pasar pertanian (sub terminal agribisnis) dan menghidupkan fasilitas</p>	<p>PERTANIAN</p> <p>a) Jumlah kelompok petani organik</p> <p>b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) Yang didelegasikan (2) Yang bersertifikat</p> <p>c) Jumlah produsen pertanian organik</p> <p>d) Jumlah luas lahan pertanian organik</p> <p>e) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian</p> <p>f) Jumlah STA</p> <p>g) Jumlah pasar induk</p> <p>h) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan)</p> <p>i) Jumlah pasar hewan</p> <p>j) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan</p> <p>k) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan</p> <p>l) Panjang saluran irigasi utama yang</p>	<p>1</p> <p>9 ha</p> <p>2 jenis</p> <p>9</p> <p>9 ha</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>11 km</p> <p>14 km</p> <p>5.500 m</p>	<p>PERTANIAN</p> <p>a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.</p> <p>b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;</p> <p>c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;</p> <p>f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;</p> <p>g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;</p> <p>h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;</p> <p>i. Program Peningkatan Pemasaran</p>	<p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DISTANKP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p>



Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p>perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.</p> <p>c. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.</p> <p>d. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.</p> <p>e. Peningkatan keterlibatan jejaring paseduluran dan Corporate Social Responsibility (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal melalui kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring paseduluran dan perusahaan pemberi CSR.</p> <p>f. Peningkatan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya.</p> <p>g. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada</p>	<p>ditingkatkan</p> <p>m) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia</p> <p>n) Jumlah embung lapangan berfungsi baik</p> <p>o) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak:</p> <p>(1) Madya</p> <p>(2) Utama</p> <p>p) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi</p> <p>q) Jumlah penyuluh swadaya</p> <p>r) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.</p> <p>s) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>t) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan</p> <p>u) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian</p> <p>v) Jumlah demplot</p> <p>w) Jumlah rekayasa TTG</p> <p>x) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian</p> <p>y) Jumlah klaster pertanian</p> <p>z) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian</p> <p>aa) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian</p> <p>bb) Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani</p> <p>cc) Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian</p>	<p>14.784 ha</p> <p>40</p> <p>505</p> <p>400</p> <p>48</p> <p>165</p> <p>16</p> <p>1</p> <p>100 % dari perda</p> <p>0,05</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>304</p>	<p>Hasil Produksi Peternakan;</p> <p>j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;</p> <p>k. Program Pengembangan Peternakan</p> <p>l. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;</p> <p>m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;</p> <p>n. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.</p> <p>o. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;</p> <p>p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;</p> <p>q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;</p> <p>r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;</p> <p>s. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</p> <p>t. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;</p> <p>u. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.</p>	<p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p> <p>DKPP</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.				
<b>4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan, dengan fokus pada :</b> a. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing. b. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga; c. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.	<b>PERDAGANGAN</b> a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru c) Persentase kenaikan retribusi pasar d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara e) Jumlah sistem informasi pasar ( <i>telecenter</i> dsb) f) Jumlah pasar yang berjejaring g) Jumlah dokumen kajian penataan PKL h) Kawasan yang tertata PKL-nya i) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern j) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku k) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan l) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha m) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan n) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen o) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat p) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani	9  500 3 45 km  5  9 3 17 1  Sesuai  84 42 5 4 425 95	<b>PERDANGAN.</b> a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	DisdagkopUK M DisdagkopUK M DisdagkopUK M

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<b>5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan dengan fokus pada :</b> a. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local. b. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna. c. Melakukan perintisan pembentukan kawasan industri terpadu. d. Penguatan klaster industri, pertanian, dan pariwisata, melalui pengembangan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) dan pemberian insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan. e. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah	<b>PRODUK UNGGULAN LAIN</b>		<b>PRODUK UNGGULAN LAIN</b>	
	a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan	1	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	Disperinaker
	b) Jumlah pelaku industri kreatif	100	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	Disperinaker
	c) Jumlah jenis industri kreatif	3	c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Disperinaker
	d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda	5	d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	DisdagkopUKM
	e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	160	e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	DisdagkopUKM
	f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	40	f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	DisdagkopUKM
	g) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi	2	g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	DPMPTSP
	h) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian (pertanian)	4 TTG	h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	DPMPTSP
	i) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan	4	i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	DPMPTSP
	j) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu ( <i>boned zone</i> )	1 lokasi siap	j. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	DPMPTSP
	k) Promosi lokasi kawasan industri terpadu ( <i>boned zone</i> ) pada investor *	12	k. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	Disperinaker
	l) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif	14	l. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Disperinaker
	m) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian	6	m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	Disperinaker
	n) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Samedo)	4	n. Program Penataan Struktur Industri.	Disperinaker
	o) Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan	1	o. Program Pengembangan	Diskominfo
	p) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara	1		
q) Jumlah <i>telecenter</i> baru	1			
r) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi	12			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.	s) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	1	Komunikasi, Informasi dan Media Massa; p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. q. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; r. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi s. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; u. Program Pengembangan Kemitraan.	Diskominfo Diskominfo Diskominfo Disparpora Disparpora Disparpora
<b>6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, dengan fokus pada :</b> a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi. b. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah, melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada wilayah tertinggal	<b>KEWILAYAHAN</b> a) Daftar wilayah tertinggal b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki d) Jumlah kota satelit e) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan) f) Jumlah telecenter aktif di wilayah tertinggal g) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal h) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal i) Jumlah kajian RDTR j) Jumlah Perda RDTR	1 5 km 13 1 Sesuai SPM 3 1 1 18 18	<b>KEWILAYAHAN</b> a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong; f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan. g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa	DPU DPU, Diskimtaruna DPU DPU DPU DPU DPU

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p>agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah.</p>	<p>k) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat</p> <p>l) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam</p> <p>m) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun</p> <p>n) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun</p> <p>o) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun</p>	<p>40</p> <p>80</p> <p>4 kali</p> <p>5 kali</p> <p>5</p>	<p>dan Jaringan Pengairan Lainnya;</p>	
<p><b>7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan, dengan fokus pada :</b></p> <p>a. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja.</p> <p>b. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.</p>	<p><b>TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a) Jumlah ruang terbuka publik</p> <p>b) Jumlah taman kota</p> <p>c) Jumlah tempat berkumpul masyarakat</p> <p>d) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah</p> <p>e) Persentase usaha penambangan yang dipantau</p> <p>f) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol</p> <p>g) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)</p> <p>h) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;</p> <p>b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;</p> <p>c. Program Pengendalian Banjir;</p> <p>d. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;</p> <p>e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;</p> <p>f. Program Pengembangan Perumahan;</p> <p>g. Program Lingkungan Sehat Perumahan;</p> <p>h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;</p> <p><b>TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a. Program Perencanaan Tata Ruang;</p>	<p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>Diskimtaru</p> <p>Diskimtaru</p> <p>Diskimtaru</p> <p>BPBD</p> <p>Bappeda</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengembangan Data/Informasi; d. Program Kerjasama Pembangunan; e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; j. Program Perencanaan Sosial Budaya; k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; o. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; q. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; r. Program Perlindungan dan	Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub DLH DLH DLH

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			Konservasi Sumber Daya Alam; s. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam t. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; v. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. w. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); x. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah y. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DLH DLH DLH DKPP Diskimtaru Diskimtaru Diskimtaru
<b>8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama</b> , yang difokuskan pada : a. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll). b. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll). c. Mempromosikan nilai rukun dan	a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama d) Frekuensi dialog antarumat beragama * e) Jumlah kerjasama antarumat beragama * f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan * g) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara	8.000  1.481  1  1 1 1  1:450 1:185 1:337 1:300	a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan; d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; g. Program Pemberdayaan Masyarakat	Disparpora  Disparpora  Satpol PP  Satpol PP  Kesbangpol  Kesbangpol  Kesbangpol

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
<p>toleran di dalam masyarakat dan keluarga.</p> <p>d. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik.</p> <p>e. Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p>	<p>(5) Klenteng</p> <p>(6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)</p>	<p>1:294</p> <p>1:100/7 HPK</p>	<p>Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;</p> <p>h. Program Pendidikan Politik Masyarakat;</p>	Kesbangpol
<p><b>9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa</b>, yang difokuskan pada :</p> <p>a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa.</p> <p>b. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa.</p> <p>c. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa.</p> <p>d. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa.</p> <p>e. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup</p> <p>f. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa</p>	<p><b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA</b></p> <p>a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes</p> <p>b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK</p> <p>c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):</p> <p>(1) Pratama</p> <p>(2) Madya</p> <p>(3) Purna</p> <p>(4) Mandiri</p> <p>d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)</p> <p>e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):</p> <p>(1) Mandiri</p> <p>(2) Berdaya</p> <p>(3) Madani</p> <p>f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK):</p> <p>(1) UPK surplus</p> <p>(2) UPK belum surplus</p> <p>g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng</p>	<p>40</p> <p>175</p> <p>19</p> <p>317</p> <p>848</p> <p>333</p> <p>287</p> <p>23</p> <p>88</p> <p>5</p> <p>13</p> <p>-</p> <p>Harp. 1</p>	<p><b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA</b></p> <p>a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;</p> <p>b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;</p> <p>c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;</p> <p>e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan</p> <p>f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.</p>	<p>Dispermasdes</p> <p>Dispermasdes</p> <p>Dispermasdes</p> <p>Dispermasdes</p> <p>Disarpus</p>



Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih i) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG	181 5.399 20		
<b>10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa,</b> yang difokuskan pada : a. Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. b. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa. c. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan. d. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan. e. Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan. f. Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan. g. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan. h. Menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> a) Tipologi Desa (1) Swadaya (2) Swakarya (3) Swasembada b) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat c) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK) (1) Data terisi 0-50% (2) Data terisi 51-80 (3) Data terisi 81-100% d) Rasio sarana pendidikan di desa (1) PAUD (2) SD/MI (3) MDA e) Rasio Posyandu per Balita f) Rasio Akseptor KB g) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling h) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling i) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu	40 110 131 20 0 42 245 1,8 3 0,9 1:76 92,48 6.640 2 5	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Disarpus

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
i. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa	j) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	80		

Keterangan :

\* semua target bersifat kumulatif 2015-2018

\*\* target diukur tahun berkenan

Guna mendukung tercapainya tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5.**  
**Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2018**

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
<b>1.</b>	<b>Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>386.170.987.855</b>	<b>33,06</b>
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	2.605.000.000	0,22
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	2.520.000.000	0,22
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	168.851.236.855	14,43
4	Program Pendidikan Menengah;	-	-
5	Program Pendidikan Non Formal;	5.200.000.000	0,44
6	Program Pendidikan Luar Biasa;	-	-
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	5.536.000.000	0,47
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	20.390.093.000	1,74
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	72.935.433.000	6,23
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.825.647.000	1,18
12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	29.215.000.000	2,50
13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	53.300.000.000	4,56
14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	330.000.000	0,03
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	615.200.000	0,05
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	100.000.000	0,01
17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	1.595.000.000	0,14
18	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;	116.000.000	0,01
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	884.000.000	0,08
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	175.000.000	0,01
21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	-	-
22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;	12.000.000	0,00
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.125.936.000	0,10

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
	(PMKS) Lainnya;		
24	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	1.092.192.000	0,09
25	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;	385.000.000	0,03
26	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;	560.000.000	0,05
27	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	3.802.250.000	0,32
28	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	1.000.000.000	0,09
<b>2</b>	<b>Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,</b>	<b>35.786.570.000</b>	<b>3,05</b>
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	17.080.000.000	1,46
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	505.000.000	0,04
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	8.204.000.000	0,70
4	Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	127.000.000	0,01
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	2.472.000.000	0,21
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	12.500.000	0,00
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	10.000.000	0,00
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	60.000.000	0,01
9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	95.000.000	0,01
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	1.547.500.000	0,13
11	Program Pendidikan Kedinasan;	1.500.000.000	0,13
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.971.000.000	0,25
14	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.202.570.000	0,10
<b>3</b>	<b>Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian</b>	<b>2.894.468.000</b>	<b>0,25</b>
1	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000	0,02
2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;	-	-
3	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;	-	-
4	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.	-	-
5	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;	-	-
6	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;	-	-

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000	0,10
8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000	0,06
9	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000	0,01
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000	0,02
11	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000	0,01
12	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;	-	-
13	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;	-	-
14	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.	-	-
15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;	-	-
16	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;	270.000.000	0,02
17	Program Pengembangan Budidaya Perikanan;		-
18	Program Pengembangan Perikanan Tangkap;		-
19	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		-
20	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;		-
21	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.		-
<b>4</b>	<b>Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan</b>	<b>15.800.000.000</b>	<b>1,35</b>
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;	1.150.000.000	0,10
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	14.430.000.000	1,23
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	220.000.000	0,02
<b>5</b>	<b>Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan</b>	<b>19.761.175.000</b>	<b>1,69</b>
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	2.231.160.000	0,19
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	295.000.000	0,03
3	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	247.000.000	0,02
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	200.000.000	0,02
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	30.000.000	0,00
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	205.000.000	0,02
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	1.597.920.000	0,14
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	85.000.000	0,01
9	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,	197.075.000	0,02

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
	Sarana dan Prasarana Daerah;		
10	Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	890.000.000	0,08
11	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	570.000.000	0,05
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	280.000.000	0,02
13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	425.000.000	0,04
14	Program Penataan Struktur Industri.	125.000.000	0,01
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	1.589.000.000	0,14
16	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.	-	-
17	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	630.000.000	0,05
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	-	-
19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	480.670.000	0,04
20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	9.288.350.000	0,79
21	Program Pengembangan Kemitraan.	395.000.000	0,03
<b>6</b>	<b>Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah</b>	<b>253.589.306.759</b>	<b>21,67</b>
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102	17,53
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657	0,91
3	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;	1.350.000.000	0,12
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000	1,41
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;	-	-
6	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.	-	-
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000	0,16
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000	1,78
<b>7</b>	<b>Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan</b>	<b>89.794.051.000</b>	<b>7,67</b>
1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000	0,22
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;	-	-
3	Program Pengendalian Banjir;	150.000.000	0,01
4	Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	-	-
5	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000	0,50
6	Program Pengembangan Perumahan;	-	-
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000	0,15
8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000	0,13

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
9	Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000	0,05
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000	0,01
11	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000	0,25
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000	0,03
13	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000	0,07
14	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000	0,07
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000	1,56
16	Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000	0,11
17	Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000	0,01
18	Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000	0,07
19	Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000	0,03
20	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000	0,02
21	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000	0,01
22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;	-	-
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000	0,29
24	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000	0,08
25	Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000	0,05
26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000	0,01
27	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000	0,25
28	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000	0,03
29	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000	0,07
30	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000	0,07
31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000	1,56
32	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000	0,15
33	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000	0,01
34	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	-
35	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000	0,02
36	Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000	0,05
37	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.	-	-
38	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000	0,95
40	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	-	-

No	Prioritas Fokus Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Alokasi Anggaran	% terhadap BL
41	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000	0,79
<b>8</b>	<b>Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama</b>	<b>72.146.863.995</b>	<b>6,17</b>
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	1.145.700.000	0,10
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	12.500.000	0,00
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;	3.872.921.000	0,33
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	1.357.325.500	0,12
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	719.600.000	0,06
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	30.000.000	0,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;	20.000.000	0,00
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat;	260.000.000	0,02
9	Hibah	64.828.817.495	5,54
<b>9</b>	<b>Peningkatan fungsi kelembagaan Desa</b>	<b>7.376.300.000</b>	<b>0,63</b>
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000	0,11
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000	0,02
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000	0,44
4	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000	0,00
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000	0,06
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa</b>	<b>7.376.300.000</b>	<b>0,63</b>
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000	0,11
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000	0,02
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000	0,44
4	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000	0,00
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000	0,06

#### 4.3. Dukungan terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan keterkaitan antara prioritas nasional dan provinsi dengan prioritas kabupaten dan prioritas program dan pagu anggaran prioritas program.



**Tabel 4.6**  
**Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD**  
**Tahun 2018**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
1.	Pendidikan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	2.520.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	168.851.236.855
			Program Pendidikan Non Formal;	5.200.000.000
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	5.536.000.000
2.	Kesehatan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	20.390.093.000
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	72.935.433.000
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.825.647.000
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	29.215.000.000
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	53.300.000.000
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	330.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	615.200.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	100.000.000
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	1.595.000.000
3.	Perumahan dan Permukiman	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	63.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;	1.150.000.000
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	14.430.000.000
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	220.000.000
		5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	2.231.160.000
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	295.000.000
			Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	247.000.000
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	200.000.000
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	30.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	205.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	1.597.920.000
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	85.000.000
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	197.075.000
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	890.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	570.000.000
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	280.000.000
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	425.000.000
			Program Penataan Struktur Industri.	125.000.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	1.589.000.000
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	630.000.000
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	480.670.000
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	9.288.350.000
			Program Pengembangan Kemitraan.	395.000.000
5.	Ketahanan Energi	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan	2.550.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
		manusiawi dan berkelanjutan	Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan	240.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
6.	Ketahanan Pangan	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000
7.	Penanggulangan Kemiskinan	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000
		9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa,	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000
		10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000
			Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000
8.	Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000
			Program Pembangunan	2.982.500.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
9.	Pembangunan wilayah	6. Pengembangan pusat-pusat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102



No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
		pertumbuhan di wilayah		
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	115.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Menengah dan Besar;	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
10.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	17.080.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	505.000.000
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	8.204.000.000
			Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	127.000.000
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	2.472.000.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	12.500.000
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	10.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	60.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	95.000.000
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	1.547.500.000
			Program Pendidikan Kedinasan;	1.500.000.000
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.971.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.202.570.000
		8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	1.145.700.000
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	12.500.000
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;	3.872.921.000
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	1.357.325.500
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	719.600.000
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	30.000.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;	20.000.000
			Program Pendidikan Politik Masyarakat;	260.000.000

**Tabel 4.7**  
**Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2018**

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
1.	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	1.150.000.000

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
	unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	perdagangan	Perdagangan;	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	14.430.000.000
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	220.000.000
		6. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	2.231.160.000
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	295.000.000
			Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	247.000.000
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	200.000.000
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	30.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	205.000.000
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	1.597.920.000
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	85.000.000
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	197.075.000
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	890.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	570.000.000
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	280.000.000
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	425.000.000
			Program Penataan Struktur Industri.	125.000.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	1.589.000.000
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	630.000.000

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	480.670.000
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	9.288.350.000
			Program Pengembangan Kemitraan.	395.000.000
2.	2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan	815.000.000

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Pelayanan Angkutan;	
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
3.	3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	2.520.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9	168.851.236.855

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Tahun;	
			Program Pendidikan Non Formal;	5.200.000.000
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	5.536.000.000
4.	4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	1.500.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan	1.240.000.000

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Tata Ruang;	
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
5.	5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000



No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000
6.	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	17.080.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	505.000.000
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	8.204.000.000
			Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	127.000.000
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	2.472.000.000
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	12.500.000
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	10.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	60.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	95.000.000
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	1.547.500.000
			Program Pendidikan Kedinasan;	1.500.000.000
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.971.000.000

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.202.570.000
		8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	1.145.700.000
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	12.500.000
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;	3.872.921.000
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	1.357.325.500
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	719.600.000
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	30.000.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;	20.000.000
			Program Pendidikan Politik Masyarakat;	260.000.000

RKPD juga didesain untuk mendukung pencapaian implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 beserta dengan dimensi pembangunan nasional dapat dilihat dalam Tabel 4.8 Berikut ini.

**Tabel 4.8**  
**Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan Nasional dengan**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
1.	Dimensi Pembangunan Manusia			
	a. Pendidikan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	2.520.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	168.851.236.855
			Program Pendidikan Menengah;	-
			Program Pendidikan Non Formal;	5.200.000.000
			Program Pendidikan Luar Biasa;	-
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	5.536.000.000
	b. Kesehatan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	20.390.093.000
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	72.935.433.000
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.825.647.000
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	29.215.000.000
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	53.300.000.000
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	330.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	615.200.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	100.000.000
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	1.595.000.000
	c. Perumahan	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	63.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000
	d. Mental/ Karakter	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	2.520.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	168.851.236.855
			Program Pendidikan Non Formal;	5.200.000.000
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	5.536.000.000
		8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	1.145.700.000
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	12.500.000
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;	3.872.921.000
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	1.357.325.500
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	719.600.000
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	30.000.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;	20.000.000
			Program Pendidikan Politik Masyarakat;	260.000.000
2.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan			
	a. Kedaulatan Pangan	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000
	c. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan	Mendasari UU No. 23 Tahun 2014, urusan energi dan ketenagalistrikan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota		
	d. Kemaritiman dan kelautan	Mendasari UU No. 23 Tahun 2014, urusan kemaritiman dan kelautan bukan kewenangan pemerintah kabupaten		
	e. Pariwisata dan industri	7. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	2.231.160.000
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	295.000.000
			Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	247.000.000
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	200.000.000
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	30.000.000
			Program Peningkatan	205.000.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Kualitas Kelembagaan Koperasi;	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	1.597.920.000
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	85.000.000
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	197.075.000
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	890.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	570.000.000
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	280.000.000
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	425.000.000
			Program Penataan Struktur Industri.	125.000.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	1.589.000.000
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	630.000.000
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	480.670.000
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	9.288.350.000
			Program Pengembangan Kemitraan.	395.000.000
3.	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan			
	a. Antar kelompok pendapatan	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;	1.150.000.000
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	14.430.000.000
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	220.000.000
		5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	2.231.160.000
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	295.000.000
			Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	247.000.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	200.000.000
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	30.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	205.000.000
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	1.597.920.000
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	85.000.000
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	197.075.000
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	890.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	570.000.000
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	280.000.000
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	425.000.000
			Program Penataan Struktur Industri.	125.000.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	1.589.000.000
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	630.000.000
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	480.670.000
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	9.288.350.000
			Program Pengembangan Kemitraan.	395.000.000
		3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan	150.000.000



No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	
	b. Antar wilayah desa	9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa,	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000
			Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000
		10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	1.246.500.000
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	220.000.000
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	5.145.580.000
			Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	10.000.000
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	754.220.000
	c. Antar wilayah pinggiran	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	205.089.830.102
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	10.699.476.657
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.350.000.000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	16.550.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1.900.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	20.800.000.000
		7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	2.550.000.000
			Program Pengendalian Banjir;	150.000.000
			Program Pembangunan	5.798.562.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Infrastruktur Perdesaan;	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	63.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000

No	Dimensi Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000

### 3.4. Prioritas Pembangunan Daerah mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Isu-isu pembangunan berwawasan lingkungan telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan keterkaitan isu-isu pembangunan berwawasan lingkungan dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah.

**Tabel 4.9**  
**Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

No	Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
1.	Kedaulatan Pangan	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian	Program Pengembangan Peternakan	202.668.000
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	1.215.000.000
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	696.300.000
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	260.500.000
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	150.000.000
2.	Tata ruang dan alih fungsi lahan	7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	5.798.562.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan;	1.785.000.000
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	63.000.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2.982.500.000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	380.000.000

No	Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	815.000.000
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	825.000.000
			Program Perencanaan Tata Ruang;	1.240.000.000
			Program Pemanfaatan Ruang	125.000.000
			Program Pengembangan Data/Informasi;	876.400.000
			Program Kerjasama Pembangunan;	295.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	290.000.000
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	115.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	3.410.089.000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	905.000.000
			Program Perencanaan Sosial Budaya;	570.000.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	110.000.000
3	Pencemaran, limbah dan sampah	7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	18.256.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	1.722.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	175.000.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;	240.000.000
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	560.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	11.155.000.000
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.200.000.000

### 3.5. Prioritas Pembangunan Daerah mendukung Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Isu-isu reformasi birokrasi telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan keterkaitan isu-isu reformasi birokrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah.

**Tabel 4.10**  
**Keterkaitan antara Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan**  
**Prioritas Program Daerah**

No	Tata Kelola dan Reformasi Biorkrasi	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program Daerah	Pagu Indikatif
1.	Disiplin Pegawai	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	17.080.000.000
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	505.000.000
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	8.204.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127.000.000
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.472.000.000
2.	Pelayanan kepada masyarakat	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	12.500.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	10.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	60.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	95.000.000
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	1.547.500.000
			Program Pendidikan Kedinasan;	1.500.000.000
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.971.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.202.570.000
3	Capaian Kinerja Daerah	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	8.204.000.000

		masyarakat		
			Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	127.000.000
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	2.472.000.000
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	12.500.000
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	10.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	60.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.202.570.000

### 3.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

**Tabel 4.11**  
**Inovasi Kebijakan Pembangunan**

No	Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi	Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Perda Perencanaan	Perda No 4. Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mengatur antara lain: a. alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai besaran realisasi PAD. Dengan alokasi yang terukur, setiap anggota DPRD mengetahui pagu yang dapat dialokasikannya terhadap percepatan pembangunan yang dijaring melalui usulan hasil reses. b. Konsistensi antara RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD. Tidak dimungkinkan terdapat usulan program dan kegiatan baru dalam RAPBD maupun KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
2.	Data kelompok sasaran program	Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menggunakan	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar

	secara tunggal	data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 sebagai basis data kelompok penerima sasaran setiap program pembangunan. Sampai saat ini PBDT 2015 telah menjadi acuan kelompok sasaran penerima manfaat program PDPM, penanggulangan kemiskinan, hingga kepesertaan JKN PBI.	Pelayanan Minimal
2.	Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)	PDPM merupakan implementasi Kebijakan Unggulan Cinta Desa dalam RPJMD. PDPM mengalokasikan anggaran senilai rata-rata Rp. 100 juta/desa/tahun untuk mengintervensi pembangunan sanitasi khususnya jamban sehat. Penerima manfaat PDPM adalah rumah tangga yang terdaftar dalam PBDT 2015. Diharapkan pada tahun 2019 seluruh masyarakat Kabupaten Tegal telah menikmati akses jamban sehat.	7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan
3.	Rencana Aksi Bersama (RAB) Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD)	RAB PKD merupakan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk mengintervensi penduduk miskin yang belum memiliki jamban sehat, anak putus sekolah dan pemberdayaan difabel. Pemkab mengintervensi melalui APBD, Pemdес mengintervensi melalui APBDesa, terutama melalui Dana Desa.	12. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa
3.	Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)	PIK dialokasikan untuk wilayah kecamatan, senilai antara Rp. 2-3 miliar per kecamatan. Alokasi tersebut merupakan perencanaan bergaransi, artinya pagu diberikan kepada wilayah dan masyarakat sendiri yang menentukan peruntukannya melalui Musrenbangcam sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, Musrenbangcam pasti/menjamin realisasi usulan masyarakat melalui Musrenbangcam.	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah
2.	Musrenbang Award	Musrenbang Award diberikan kepada OPD Kecamatan yang menyelenggarakan Musrenbangcam dengan baik, meliputi dinamika forum, kualitas usulan masyarakat yang didanai PIK, inovasi pelaksanaan Musrenbang hingga keterwakilan perempuan dalam forum	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

## **4.7 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.**

### **A. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Tegal dalam upaya mengarahkan sekaligus mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tegal, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tegal menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan serta masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2018
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2018
3. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2018
4. Memberikan arahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Tegal.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal yang lebih baik.

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2016, ada beberapa catatan yang kiranya perlu untuk mendapat perhatian lebih, beberapa catatan tersebut diantaranya :

1. Urusan Pendidikan. Indikator kinerja outcome program dalam Urusan Pendidikan yang tercatat berpredikat sedang hanya APK PAUD (4-6 tahun), yaitu dari target sebesar 67% terealisasi sebesar 46,16%. Selebihnya indikator kinerja outcome program dalam Urusan Pendidikan tercatat berpredikat Tinggi dan Sangat Tinggi. Hal ini disebabkan oleh data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai.
2. Urusan Kesehatan. Indikator kinerja outcome program dalam Urusan Kesehatan yang berpredikat Sangat Rendah diantaranya Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan, dari target 96% terealisasi 44,48%. Begitu juga indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dari target 100% terealisasi 54,20%. Capaian kinerja yang masih Sangat Rendah juga disumbang oleh indikator Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap dari target 17 Puskesmas baru terealisasi 9 puskesmas. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target terutama disebabkan oleh cakupan pelayanan indikator yang cukup luas sementara sumber daya yang dimiliki masih terbatas.
3. Urusan Sosial. Indikator yang termasuk kategori Sangat Rendah diantaranya Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban



tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial, dari target 300 anak baru terealisasi 167 anak. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target terutama disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki belum mampu mencangkup semua cakupan target indikator. Hal ini dikarenakan jumlah anak terlantar yang direhabilitasi terbatas hanya pada anak terlantar yang dikirim ke balai-balai besar sosial dan kebanyakan setelah dijarah untuk dikirim ternyata dari pihak keluarga berkeberatan.

4. Urusan Tenaga Kerja. Indikator Jumlah AKAN dari target 7.500 telah direalisasikan sebanyak 415 orang. Dengan demikian indikator ini masih termasuk kategori Sangat Rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target terutama disebabkan oleh pencapaian target membutuhkan partisipasi banyak pihak/bersifat lintas sektor. Penempatan AKAN belum mencapai target dikarenakan penempatan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) yang terdata di Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal hanya yang bekerja di darat yang penyalurannya melalui PPTKIS. Adapun jumlah tenaga kerja yang menjadi TKI pelaut sebenarnya mencapai jumlah ribuan akan tetapi tidak terdata dikarenakan dari pihak perusahaan tidak melaporkan hasil perekrutannya. Begitu juga indikator Tingkat Kesempatan Kerja, dari target 93,95% direalisasikan 57,19% sehingga termasuk kategori Rendah.
5. Urusan Penanaman Modal Daerah. Indikator Jumlah nilai investasi PMA dari target Rp.765.769.500.000 baru terealisasi Rp. 251.452.151,00 sehingga termasuk kategori Sangat Rendah. Usaha mendorong investasi memang membutuhkan kerja keras, utamanya meyakinkan calon investor bahwa menanamkan investasi di Kabupaten Tegal termasuk sebagai investasi yang menguntungkan. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah belum bergabungnya instansi penanaman modal dan PTSP sehingga pelaporan, pengawasan serta promosi belum dapat dikoordinasikan dalam satu atap; masih banyaknya calo yang mengurus izin sehingga berimbas pada membengkaknya biaya dan waktu; belum adanya sistem informasi dan SDM yang mumpuni sehingga Informasi yang diperoleh masyarakat harus melalui kantor BP2T, belum dapat diakses melalui website atau SMS Gateway.
6. Urusan Kebudayaan. Untuk indikator Jumlah kelompok kesenian yang dibina mendapat kriteria Sedang, dengan realisasi 38 kelompok dari target 70 kelompok. Banyaknya kelompok kesenian yang perlu dibina menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan ini. Untuk itu diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019.
7. Urusan Pemuda dan Olahraga. Indikator jumlah atlet yang dibina, dari target 200 atlet terealisasi 65 atlet sehingga kategorinya Sangat Rendah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih kurang; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga stagnan; belum optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi

masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi. Begitu juga dengan indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dari target 92 unit terealisasi 12 unit. Kategori indikator kinerja ini juga Sangat Rendah. Pembangunan di bidang olahraga membutuhkan partisipasi banyak pihak, sehingga target kinerja pemerintah dapat terealisasi sesuai rencana.

8. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Jumlah Pejabat Struktural yang Dinilai Kompetensinya. Dari target 6 orang baru terealisasi 1 orang sehingga kriteria capaiannya Sangat Rendah. Kondisi ini disebabkan oleh proses uji kompetensi pejabat yang membutuhkan waktu dan mekanisme yang panjang, sehingga belum banyak pejabat yang telah diuji kompetensinya. Penilaian kompetensi pejabat struktural dilakukan melalui Tes PCAP. Namun dengan adanya ketentuan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama/Eselon II maka Tes PCAP tidak lagi relevan. Meskipun demikian pada seleksi terbuka jabatan tinggi pratama/Eselon II tetap terdapat penilaian kompetensi oleh assesment center pada tahap IV seleksi.
9. Urusan Pertanian. Indikator-indikator yang masih membutuhkan perhatian khusus dari Urusan Pertanian antara lain Jumlah Produksi Bawang, dari target 25.341 ton terealisasi 11.728 ton sehingga predikatnya Sangat Rendah. Sementara Jumlah Produksi Cabe baru terealisasi 1.507 ton dari target 4.828 ton, dengan predikat Sangat Rendah. Indikator Jumlah Produksi Cengkeh realisasinya juga masih di bawah target, yaitu 39 ton dari target 106 ton sehingga predikatnya masih Sangat Rendah. Komoditi hasil pertanian belum mencapai target karena faktor iklim dan gangguan OPT sehingga produksi (hortikultura) dan produktivitas (perkebunan) rendah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan luas tanam, fasilitasi sarana produksi hortikultura dan peremajaan tanaman perkebunan.
10. Urusan Perdagangan. Indikator Vokume Ekspor Non Migas (ton) terealisasi 10.742,43 ton dari target 17.500 ton sehingga realisasinya mendapat predikat Rendah. Kondisi ini didorong oleh kondisi ekonomi global yang masih melambat, sehingga volume ekspor yang dilakukan belum memenuhi target.
11. Urusan Transmigrasi. Indikator Urusan Transmigrasi yang membutuhkan perhatian diantaranya Jumlah Transmigran dari target 52 jiwa baru terealisasi 23 jiwa, sehingga capaiannya Sangat Rendah. Belum terpenuhinya target dikarenakan kuota transmigran ditentukan oleh pusat yang bergantung dengan ketersediaan anggaran dan juga kesiapan daerah tujuan yang terlalu jauh dari jangkauan. (sumber Bappeda Kabupaten Tegal).

### C. Prioritas Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat pelaksanaan Reses, hasil audiensi, hasil studi banding dll. Tahun 2017 Yaitu :

1. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah pada sasaran Terarahnya Pengembangan Wilayah :
  - a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - b) Program Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong.
  - c) Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong.
  - d) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Sasaran Menguatnya pembangunan Kehidupan Beragama :
  - a) Pembangunan Tempat Ibadah.
  - b) Pengalokasian dan pendistribusian anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional (bantuan keuangan Madrasah, TPQ, Organisasi keagamaan).
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Berdayanya Kelembagaan Desa.  
Kebijakan Umum : Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup.
  - a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
  - b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
  - c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Menurunnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar wilayah
  - a) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Meningkatkan derajat hidup masyarakat desa
  - a) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas.
  - b) Program pengembangan perumahan Tidak layak.
  - c) Program Pengembangan lingkungan sehat.
  - d) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasikan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2018 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

#### **5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

###### **a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;**

Fokus kegiatan pada Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bantuan Pelatihan Kompetensi Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal, Bantuan pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif, Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD, Bantuan Pembangunan RKB PAUD Nonformal, Bantuan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Nonformal, Bantuan Pengadaan Mebelair PAUD Nonformal, Bantuan Gebyar PAUD Nonformal Tk. Kabupaten. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target APK PAUD/TK (4-6 th) dengan target 75, PK PAUD/KB(0-6 th) dengan target 71, APM PAUD TK dengan target 64,02, Persentase PAUD terakreditasi 24%.

###### **b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;**

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB, pelatihan kurikulum SD, Lomba KreativitasbMinat Bakat Siswa SD/MI, Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam SD/MI (MAPSI), Sosialisasi BSM/PIP SD, Regrouping SD, Managemen Berbasis Sekolah (MBS) SD. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target APK SD/SDLB/MI/Paket A dengan targert 112, APM SD/SDLB/MI/Paket A dengan target 98.93, APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B dengan target 98.28, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dengan target 92.56, Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dengan target 0.15, Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/Mtsdengan target 0.54, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A dengan target 99.99.

###### **c. Program Pendidikan Non Formal;**

Fokus kegiatan pada pengembangan pendidikan kecakapan hidup (PKH), penyelenggaraan ujian nasional semesteran paket A, B dan C, penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B, penyelenggaraan ujian nasional paket C, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket A, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C, fasilitas hari aksara internasional (HAI), fasilitas penguatan manajemen desa vokasi, fasilitas keaksaraan dasar, fasilitas keaksaraan lanjutan, pengembangan PKBM, penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP), kelompok belajar usaha (KBU), fasilitas pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM), sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah, peningkatan sarana prasarana non formal, pendampingan fasilitas hari aksara internasional, bantuan pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesehatan gender dalam pembangunan , bantuan fasilitas rintisan taman bacaan masyarakat (TBM) desa vokasi , bantuan kelompok belajar usaha (KBU) desa vokaksi , bantuan fasilitas penguatan kelembagaan/LKP untuk

akreditasi , bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) , bantuan fasilitas penguatan manajemen desa vokasi, bantuan fasilitas hari aksara internasional (HAI), bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket A, bantuan fasilitas keaksaran dasar , bantuan fasilitas keaksaran lanjutan, pembangunan unit gedung baru (UGD) PAUD terpadu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Angka Kelulusan Paket A 99%, Angka Kelulusan Paket B 99%, Angka Kelulusan Paket 99%, Persentase Buta Aksara > 15 tahun 3%, Persentase Kecamatan memiliki PKBM 100%.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

Fokus kegiatan pada Pengelolaan Kenaikan jabatan dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS), Penilaian Kinerja Guru TK, Penilik, Serah terima jabatan Tenaga Kependidikan, Jambore PNFI, OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD,SMP. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV dengan target 35%, Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV dengan target 80.0%, Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV dengan target 100%, Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkualifikasi S1/DIV dengan target 100%, Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik dengan target 23%, Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik dengan target 84%, Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik dengan target 81%, Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik dengan target 88.7%.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Fokus kegiatan pada manajemen dan monitoring BOS, pendataan aset dinas dikpora, monitoring evaluasi mutu pelayanan pendidikan, penunjang pendataan pendidikan, manajemen pendataan pendidikan, bantuan fasilitas penyelenggaraan UN dan UNPK, bantuan manajemen pendataan pendidikan , bantuan fasilitas penyelenggaraan UN dan UNPK .

## **2. Urusan Kesehatan**

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

Fokus kegiatan pada pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, standarisasi alat medis di puskesmas (pajak rokok, pengadaan peralatan penunjang program imunisasi (pajak rokok), pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi, pengadaan coldchain, pengadaan peralatan kesehatan dalam mendukung UKP dan UKM. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dengan target 96.55%, Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan target 100%.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Fokus kegiatan pada revitalisasi sistem kesehatan, pengadaan peralatan dan perbaikan kesehatan termasuk obat generik esensial, pelayanan kesehatan dasar

di puskesmas rawat inap, peningkatan kapasitas laboratorium, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK, akreditasi puskesmas, klinik sanitasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang kesehatan, stimulasi sarsandas klinik sanitasi, TTU&I dan penyehatan lingkungan, pelaksanaan BLUD di puskesmas-puskesmas, pendampingan pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat), pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan rujukan, percepatan implementasi STBM, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas mendukung program puskesmas gratis, operasional kesehatan.

c. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;

Fokus kegiatan pada revitalisasi sistem kesehatan, Peningkatan & Pengembangan Puskesmas BLUD, Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/PAMSIMAS (Pendampingan), klinik sanitasi, implementasi STBM, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan, Pengembangan SDM Kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dengan target 97.00, Persentase Puskesmas PONEB sesuai SPM dengan target 89.66%, Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000) dengan target 1:48.79, Persentase PPK BLUD Puskesmas dengan target 100%, Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dengan target 71.0, Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat dengan target 94.90, Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat dengan target 90.0, Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan target 80.0.

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Fokus kegiatan pada Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat, Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Pengembangan Desa Siaga, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pembinaan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah promosi WKJ dengan target 1, Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll) dengan target 8, Desa Siaga Strata Mandiri dengan target 4, Cakupan penjangkaran Sisw SD/MI dengan target 100, Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dengan target UKBM.

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

Fokus kegiatan pada pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari keluarga miskin, sosialisasi GAKY, gangguan akibat kurang yodium (GAKY). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Prevalensi Balita gizi buruk dengan target 0.42, Prevalensi Balita gizi baik dengan target 99.58, Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT dengan

target 55, Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI dengan target 28, Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT dengan target 98.

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat ;

Fokus kegiatan pada penyelenggaraan penyehatan lingkungan, sarana prasarana workshop STBM, instalasi pengolahan air limbah medis (IPAL). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat dengan target 1, Jumlah pengembangan lingkungan sehat dengan target 7.

g. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

Fokus kegiatan pada penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik, pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap dengan target 99, Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan target 99, Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th dengan target 2, Angka Penemuan kasus baru TB dengan target 105, Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB dengan target 90, Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS dengan target 120, Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV dengan target 80.

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

Fokus kegiatan pada peningkatan manajemen puskesmas tingkat kabupaten, peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD. Penunjang Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun dengan target 1, Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan dengan target 1.

i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

Fokus kegiatan pada jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA). Jaminan Persalinan (DAK NonFisik). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN dengan target 66,0.

j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin /berkala gedung puskesmas pustu, rehabilitasi gedung UPTD gudang farmasi, rehabilitasi gedung UPTD laboratorium kesehatan, sarana penunjang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD GF sesuai standar, sarana penunjang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas sesuai standar, sarana prasarana penunjang program lansia, pembangunan/rehabilitasi puskesmas, pelatihan / revalidasi pokjanel posyandu, pembangunan pagar keliling dan penataan lingkungan puskesmas pembantu jejeg kecamatan bumijawa. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap dengan target 25, Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap dengan

target 86.21%, Jumlah paket pelatihan Pokjanal Posyandu dengan target 1, Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer dengan target 2, Jumlah ambulance di Fasyankes Primer dengan target 50.

k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;

Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, pengadaan tanah untuk parkir kendaraan dan tempat PKL, pembangunan gedung A rawat inap zona 6 tahap I, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, pembangunan gedung rawat inap 3 dan 4, pembangunan instalasi sanitasi dan IPSRS, pembuatan IPAL RSUD suradadi, pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit. Pembangunan pagar rumah sakit. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target jumlah pelayanan rawat jalan RSUD dengan target 78000, jumlah pelayanan rawat inap RSUD dengan target 32000.

l. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

Fokus kegiatan pada pendampingan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN dengan target 29.

m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

Fokus kegiatan pada monitoring, evaluasi dan pelaporan, audit kematian material perinatal dan SHK, peningkatan pelayanan penyehatan reproduksi remaja, pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR, implementasi MTBS-M dan SDIDTK. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Angka Kematian Bayi 7,9. Angka Kematian Balita 8,6. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani 95. Cakupan Pelayanan Anak Balita 88.

n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

Fokus kegiatan pada pelayanan kesehatan lansia. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah Lansia dengan target 3.724, Cakupan Lansia terlayani kesehatan dengan target 11.5.

o. Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;

Fokus kegiatan pada pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan dengan target 75, Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM dengan target 60 UKM.

p. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Fokus kegiatan pada pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal, Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan anak, pelatihan PONED, Pelatihan APN, Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan dengan target 96.00, Angka kematian Ibu 103.3, Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan target 94, Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang



ditangani dengan target 95, Cakupan Pelayanan Ibu Nifas dengan target 97, Cakupan Ibu Hamil K4 dengan target 93.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;**

Fokus kegiatan pada survei kontur jalan dan jembatan, perencanaan pembangunan jembatan, pembangunan jembatan, monitoring evaluasi dan pelaporan, peningkatan jalan di kecamatan dukuhturi, adiwerna dan tarub, peningkatan jalan di kecamatan kramat, suradadi dan warureja, peningkatan jalan di kec. Bojong dan bumijawa, peningkatan jalan di kec. Slawi, pangkah, kedungbanteng dan jatinegara, peningkatan jalan di kec. Dukuhwaru, lebaksiu, balapulung, pagerbarang dan margasari, pembangunan jalan kabupaten tegal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga 67%. Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar Bina Marga 69%. Jumlah panjang jalan kolektor 194 km.

#### **b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;**

Fokus kegiatan pada pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik 44%. Persentase drainase jalan desa berfungsi baik 49%.

#### **c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;**

Fokus kegiatan pada pembangunan turap/talud/bronjong, pembangunan turap/talud/bronjong pengairan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Panjang talud jalan kabupaten terbangun 17.000 m'. Panjang talud jalan desa terbangun 15.000 m'. Panjang talud pengairan yang terbangun 500 m'. Panjang talud pengairan yang direhabilitasi 455 m'.

#### **d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;**

Fokus kegiatan pada perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, perbaikan jembatan, perbaikan jalan kabupaten tegal, pemeliharaan rutin jalan kabupaten tegal, pemeliharaan rutin jembatan kabupaten tegal, pengadaan aspal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Panjang jalan direhabilitasi 200 km'.

#### **e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;**

Fokus kegiatan pada rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong pengairan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase panjang talud direhabilitasi 14%.

#### **f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan;**

Fokus kegiatan pada sistem informasi jalan dan jembatan yang aktif. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif 1.

#### **g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;**

Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kePUan, rehabilitas/pemeliharaan laboratorium ke PU-an, rehabilitas/pemeliharaan alat-alat berat, pengadaan dan pemasangan patok

damaija, penyusunan data ke-PU-an, pembinaan jasa konstruksi, survey desain kegiatan ke-PU-an. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target jumlah inspeksi jalan dan jembatan 250 ruas.

h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

Fokus kegiatan pada perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, optimilasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, pemeliharaan rutin/berkala jaringan irigasi, penyusunan AKNOP-AKNPI jaringan irigasi, operasional penjaga pintu air, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik dengan target 53.

i. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

Fokus kegiatan pada pembangunan embung, dan bangunan penampungan air lainnya, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air, program pengembangan kinerja, pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan sistem distribusi air minum, pengembangan sistem distribusi air minum, pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik 35 %

j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;

Fokus kegiatan pada presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan 36,8%.

k. Program Pengendalian Banjir;

Fokus kegiatan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target persentase kawasan rawan banjir 4,6 %

l. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

Fokus kegiatan pada perencanaan pengembangan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target jumlah pengembangan kota satelit 1.

m. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

Fokus kegiatan pada penataan lingkungan pemukiman di kecamatan kramat, suradadi, dan warureja, penataan lingkungan pemukiman di kecamatan slawi, pangkah, kedungbanteng dan jatinegara, penataan lingkungan pemukiman di kabupaten tegal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan infrastruktur perdesaan kondisi baik 65.

n. Program Perencanaan Tata Ruang;

Fokus kegiatan pada penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, penyusunan sistem informasi tata ruang, penyusunan review rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang 18.

o. Program Pemanfaatan Ruang.

Fokus kegiatan pada identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target jumlah penindakan pelanggaran tata ruang 8.

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat**

a. Program Pengembangan Perumahan;

Fokus kegiatan pada fasilitas dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase rumah layak huni 91,22%.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

Fokus kegiatan pada penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan keciptakaryaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dengan target 80.5%, Jumlah paket pelatihan BP-SPAM dengan target 1.

c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

Fokus kegiatan pada pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah areal pemakaman dengan target 282.

d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran.

Fokus kegiatan pada pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk dengan target 0.000028, Jumlah mobil damkar dengan target 7 unit, Persentase kasus kebakaran ditangani dengan target 90%, Persentase Luas Permukiman yang Tertata dengan target 42.74%.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;

Fokus kegiatan pada Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Rasio Linmas per 10.000 penduduk dengan target 1:59.38, Rasio Linmas terlatih dengan target 4.00.

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

Fokus kegiatan pada Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan P4GN. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) dengan target 48.

c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Fokus kegiatan pada Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (FKUB), Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah dialog umat beragama dengan target 1, Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama dengan target 1.

d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Fokus kegiatan Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah dialog wawasan kebangsaan dengan target 1, Jumlah kerjasama umat beragama dengan target 1.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

Fokus kegiatan pada Penyuluhan kepada masyarakat, Fasilitasi Bantuan Keuangan partai politik, Fasilitasi dan Sosialisasi Ormas. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas dengan target 100.005, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif dengan target 62.06%, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden dengan target 62,88%, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur dengan target 70.00%, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati dengan target 70.00%, Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades dengan target 90.00.

f. Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Fokus kegiatan pada penyuluhan kepada masyarakat, fasilitas penyelesaian bantuan keuangan parpol, sosialisasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Fokus kegiatan pada Operasional posko kesiapsiagaan penanganan bencana, Operasional penerimaan dan distribusi bantuan ke lokasi bencana, Fasilitasi kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana, Koordinasi dan pelatihan tanggap darurat bencana, Sosialisasi pemulihan ekonomi produktif pasca bencana, Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam bagi aparat pemerintah desa, Sosialisasi kebutuhan pasca bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah kegiatan mitigasi bencana dengan target 1, Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana dengan target 8.

## **6. Urusan Sosial**

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

Fokus kegiatan pada pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendampingan program keluarga harapan, penunjang operasional pelaksanaan beras miskin. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase korban bencana yang ditangani dengan target 100%, Persentase PMKS ditangani dengan target 29%, Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial dengan target 300, Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial dengan target 7.5%.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

Fokus kegiatan pada pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Penyediaan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien tidak mampu/keluarga miskin / Living Cost, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, Verifikasi dan Validasi Data Bast Sosial, Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase PMKS direhabilitasi sosial dengan target 29%..

c. Program pembinaan anak terlantar;

Fokus kegiatan pada pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial dengan target 400, Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial dengan target 13.8%.

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, pengadaan sarana dan prasarana asrama UPTD LBK. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi dengan target 300, Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi dengan target 6,5%.

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;

Fokus kegiatan pada rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah panti asuhan/panti jompo dengan target 26, Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina dengan target 26%.

f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;

Fokus kegiatan pada pendampingan sosial bagi Eks Tuna Susila ( WTS, PGOT, Eks WTS, Narkoba, Odha). Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi dengan target 60, Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi dengan target 11.5%, Jumlah pengidap narkoba yang dengan target 45, Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi dengan target 13.2%, Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi dengan target 140, Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi dengan target 6.5%, Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi dengan target 40.

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Fokus kegiatan pada Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial, pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina dengan target 275.

## **5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **1 Urusan Tenaga Kerja**

#### **a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Fokus kegiatan pada Pelatihan prakerin, Penyusunan BLUD BLK, Pengadaan Website BLK dan Pengelolaan Sistem Online BLK, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan kepada Masyarakat, Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT), Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Latihan BLK, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BLK. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Penempatan AKAD dengan target 12.750, Penempatan AKAN dengan target 8.005, Penempatan AKL dengan target 250.000, Jumlah instruktur BLK dengan target 35, Jumlah pelatihan berbasis masyarakat dengan target 52, Jumlah pelatihan berbasis kompetensi dengan target 63.

#### **b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Fokus kegiatan pada Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja, Penyebarluasan Tenaga Kerja Siap Pakai, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Fasilitasi TKI bermasalah, Pendidikan dan Pelatihan kepada Masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 3.96, Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan target 82.56, Tingkat Kesempatan Kerja dengan target 95.70, Jumlah LPKS dengan target 58, Jumlah Bursa Kerja Khusus dengan target 50, Jumlah PPTKIS dengan target 15, Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS dengan target 60.

#### **c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan, Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Perusahaan, Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di dalam dan di Luar Perusahaan, Workshop dan Pelatihan Sistem Pengupahan di Perusahaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase UMR: KHL dengan target 100%, Jumlah Sengketa Industrial dengan target 10, Jumlah sengketa industrial ditanganidengan target 10, Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan dengan target 300, Jumlah pengawas tenaga kerja dengan target 5.

### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

#### **a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Fokus kegiatan pada Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyelenggaraan Hari Anak dan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Pencapaian Kota Layak Anak dengan target Kab.Tegal KLA, Jumlah kebijakan perlindungan anak dengan target 2, Jumlah pengaduan KDRT ke PPT dengan target 80, Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fokus kegiatan pada Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan, Kebijakan dan program yang responsif gender, Anggaran responsif gender, Pelatihan Standar Taman Penitipan Anak, Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan, Pembuatan Data Pilah Anak. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah SKPD melaksanakan PPRG dengan target 54, Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender dengan target 40, Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah dengan target 50, Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender dengan target 50, Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender dengan target 50, Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel) dengan target 100, Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

Fokus kegiatan pada Penguatan kapasitaas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, Revitalisasi gerakan sayang ibu, Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan, Pelatihan Kepemimpinan bagi Forum Anak, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target IPG dengan target 64.72%, IDG dengan target 70.16%, Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi dengan target 54.54%, Persentase keterwakilan perempuan di DPRD dengan target 10%, Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluargadenga target 38.17, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu dengan target 100, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS dengan target 100.

d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Fokus kegiatan pada Pembinaan Organisasi Perempuan, Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang dengan target 40%.

### **3 Urusan Pangan**

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pada kegiatan penanganan daerah rawan pangan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan desa mandiri pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan, Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat, Penyusunan data dan informasi bidang ketahanan pangan, Koordinasi dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida, Pengembangan Model Usaha Tani Terpadu Berbasis Hamparan Tersier (Padi), Koordinasi pelaksanaan POPT,

Penguatan LDPM. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian target jumlah sistem informasi pasar sejumlah 1 buah, ketersediaan energi dan protein perkapita sebesar 2.000, penguatan cadangan pangan sebesar 150,4, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 71 buah, stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 75, skor pola pangan harapan 95%, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 90, peraturan daerah terkait ketahanan pangan sejumlah buah, jumlah lumbung sejumlah 39 buah, jumlah sarana prasarana pengolahan sejumlah 20 buah.

#### **4 Urusan Pertanahan**

##### **a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pensertifikatan tanah-tanah pemerintah daerah, inventarisasi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai Pemda kab. Tegal. Kegiatan sertifikasi tanah dilaksanakan dalam rangka pencapaian jumlah sertifikasi tanah pemerintah 2018 sejumlah 50 buah.

##### **b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengadaan Tanah, Persiapan penetapan Perda RDTR, Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang, Koordinasi perencanaan tata ruang, Koordinasi bidang pertanahan, Penyertifikatan tanah-tanah pemda. Kegiatan dalam program ini dimaksudkan dalam rangka pencapaian target jumlah penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) 2018 sejumlah 50 buah.

#### **5. Urusan Lingkungan Hidup**

##### **a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Pelatihan bank sampah, Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bank sampah, Pengelolaan sampah Kab. Tegal, Operasional Pengelolaan Tempat Akhir Sampah (TPA). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase TPA sesuai standar sebesar 33,64%, persentase TPS sesuai standar sebesar 82,81%. Persentase sampah yang terangkut sebesar 73,25%, dan tersedianya bank sampah sejumlah 51 bank sampah.

##### **b. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Koordinasi penilaian langit biru, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, Pengkajian dampak lingkungan, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan, Fasilitasi kerigan bareng, Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan



antara lain dalam rangka pencapaian target persentase UKL-UPL yang dipantau sebesar 65%.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengendalian dampak perusakan iklim, peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi dan SDA. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah pengawasan terhadap perusahaan berdokumen lingkungan hidup sejumlah 30 perusahaan.

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Magrove. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 8,5%.

e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, penyusunan laporan status lingkungan hidup Kab. Tegal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup sejumlah 1 paket, jumlah sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup sejumlah 1 paket.

f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Peningkatan Capacity Building pada Laboratorium Lingkungan Hidup, Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, Pembinaan dan pemantauan pencemaran air, udara dan limbah B3, Penetapan daya tampung beban pencemaran air. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target penurunan persentase kawasan tercemar polutan udara menjadi 0,8%, persentase kawasan tercemar polutan air menjadi 3,8%.

g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penataan ruang terbuka hijau, pemeliharaan ruang terbuka hijau, pembangunan ruang terbuka hijau dan monumen, pembangunan trotoar dan drainase. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah dikawasan perkotaan sebesar 5,4%.

## **6 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pечатatan Sipil**

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang adminduk. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase penduduk yang memiliki KTP sebesar 100%, persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga sebesar 98%, persentase penduduk yang memiliki akta kematian sebesar 20%, dan persentase penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 100%.

## **7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

### **a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pelatihan keterampilan teknologi tepat guna (TTG), Fasilitasi Kerjasama Antar Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah paket pelatihan keterampilan TTG sebesar 1 paket dan jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif sebesar 588 buah.

### **b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan, Kegiatan gelar teknologi tepat guna (TTG), Fasilitasi pengembangan perekonomian desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah pelatihan pengelola lembaga ekonomi masyarakat (LEM) sebesar 1 buah, jumlah gelar TTG tingkat nasional sebesar 1 buah, jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan sebesar 1 buah, jumlah kelompok lembaga ekonomi masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi sejumlah 7 buah.

### **c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penunjang operasional program pengembangan kelembagaan PNPM mandiri pedesaan, penancangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong masyarakat, TMMD manunggal sengkuyung, karya bhakti TNI, koordinasi program gerakan cinta desa, fasilitasi dan koordinasi kelembagaan masyarakat (exKab. Tegal PNPM), fasilitasi bantuan keuangan kepada desa, rintisan desa berdikari, koordinasi dana desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sejumlah 281 desa, jumlah UPK sejumlah 13 buah, jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal sejumlah 2 buah, jumlah kegiatan karya bhakti TNI Kab. Tegal 4 buah, jumlah kader P3MD yang terlatih 54 orang, jumlah BPD 281 buah, jumlah desa penerima alokasi gerakan cinta desa 281 desa.

### **d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa, Pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, Bintek penyusunan produk hukum desa, Bintek peningkatan kapasitas lembaga desa, pelatihan P3MD. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa sebesar 2 paket, jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi sebesar 281 buah.

### **e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan.**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 pada keterlibatan perempuan dalam musrenbang desa dengan target 40%.

## **8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

### **a. Program Keluarga Berencana**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pelayanan KIE, Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi, Pembuatan Data Keluarga, Integrasi KB Kesehatan, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Pembentukan Kampung KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 diantaranya Peserta KB yang aktif sejumlah 274.095 orang, Persentase Unmet Need 13,87%.

### **b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 yaitu tercapainya jumlah sosialisasi KRR sejumlah 300 sosialisasi.

### **c. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi, Pengadaan Sarana GenRe Kit. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 yaitu jumlah tempat pelayanan kontrasepsi sejumlah 63 tempat.

d. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

### **e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pendirian dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Pengembangan Kelompok BKR Percontohan. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 tersedianya pusat konseling KRR sejumlah 1 tempat.

f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;

### **g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018, tercapainya jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak sejumlah 1 sosialisasi.

### **h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan, Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak dengan target 1.

### **i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu PAUD. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 tersedianya jumlah BKB-Posyandu-PADU sejumlah 80.

## **9. Urusan Perhubungan**

### **a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Koordinasi dalam pembangunan dan fasilitasi perhubungan, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ), Penyusunan naskah kajian akademis dan draft KAK perda Perhubungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 meningkatnya persentase sarana perhubungan yang berfungsi baik menjadi 77%.

### **b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang baik.

### **c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan, Forum LLAJ, Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal, Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang, Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan Palang Pintu PJJ, Evaluasi Jaringan Trayek angkutan Pedesaan, Pembangunan Gardu Palang Pintu KA, Pembangunan Palang Pintu KA, Pembelian Alat Komunikasi (HT dan RIG), Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan, Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte). Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 meningkatnya persentase AKDP yang berijin menjadi 95%, persentase kendaraan umum yang diuji KIR menjadi 64%.

### **d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan Traffic Light. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 meningkatnya persentase sarana perhubungan yang berfungsi baik menjadi 77%.

## **10. Urusan Komunikasi Dan Informatika**

### **a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bimbingan Tekhnis TIK untuk Aparatur Pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 tersedianya layanan pemerintah secara elektronik sejumlah 3 buah, tersedianya sistem informasi/website instansi sejumlah 54 instansi.

### **b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tahun 2018 kerjasama dengan media massa 6 kerjasama.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi

## **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Sosialisasi dan Sertifikasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM, Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah pelatihan kewirausahaan dengan target 4 kali, Jumlah Wirausahawan Baru dengan target 30 UKM.

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan dengan 1.825 UKM.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, Bintek penyusunan AD/ART koperasi, SOP dan SOM Koperasi, Pelatihan Manajemen Perkoperasian bagi Koperasi baru, Manajemen Akuntansi Koperasi, Sosialisasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi, Uptading Sistem Informasi Koperasi, UKM dan Pasar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah koperasi aktif dengan target 400 koperasi, Jumlah BPR dan LKM aktif dengan target 590 buah.

## **12. Urusan Penanaman Modal**

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan, Penyelenggaraan Bisnis Forum, Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF), Pengelolaan Penanaman Modal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah investor PMA dengan target 3 investor, Jumlah investor PMDN dengan target 3.065 investor. Jumlah nilai investasi PMA dengan target 46 Milyar, Jumlah nilai investasi PMDN sejumlah 795.750.500 ribu, Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN sejumlah 5.670 tenaga kerja.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah ijin usaha dikeluarkan sejumlah 6.100.

c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi, Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah aparatur yang kompeten sejumlah 26, Jumlah sistem informasi investasi sejumlah 1.

d. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Termasuk Tata Cara Pengaduan, Penelitian Kepuasan Masyarakat, Penyusunan Profil Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan papan IMB dan Plat Seng HO, Peningkatan Pembinaan, Penanganan dan Pengaduan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan sejumlah 1 kali per tahun.

### **13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga**

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyelenggaraan kemah bakti pemuda, Penyelenggaraan TUB-BB (Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris), Pemberdayaan pemuda dan pembinaan pelajar, Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI, Kursus Mahir Tingkat Lanjutan (KML) Pramuka, Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah pelatihan pemuda sejumlah 8 pelatihan, Jumlah pemuda yang dilatih dengan target 410, Jumlah pemuda pelopor sejumlah 252, Jumlah organisasi pemuda dibina sejumlah 30 organisasi.

b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

c. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, Pekan seni pelajar, Fasilitasi pelatihan guru/pembina olahraga, Fasilitasi pengembangan potensi siswa, Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren), Pendataan Klub OR dan OKP. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah kompetisi olahraga amatir sejumlah 25 kompetisi, Jumlah kompetisi olahraga profesional sejumlah 15 kompetisi, Jumlah atlet dibina sejumlah 210 atlet.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengadaan Alat Olahraga, Pengadaan Sarpras Kepemudaan, Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sejumlah 158 unit, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik sejumlah 812 unit.

#### **14. Urusan Statistik**

##### **a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan dengan target 36.

#### **15. Urusan Kebudayaan**

##### **a. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Peringatan Hari Jadi), Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pelaksanaan misi kesenian, pelaksanaan Dugderan, Pelatihan Dan Pentas Seni hari-hari penting, Pelaksanaan lomba-lomba seni. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah pertunjukan seni sejumlah 3, Jumlah pameran seni sejumlah 1, Jumlah misi/muhibah kesenian dengan target 1, Jumlah sarana pertunjukan seni sejumlah 19, Jumlah pelaku seni yang dibina dengan target 3.110, Jumlah kelompok kesenian yang dibina sejumlah 370 kelompok, Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya sejumlah 4.

##### **b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, Pengembangan nilai dan geografi sejarah, Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah, Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Lomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya, Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal dan tingkat Provinsi, Sarasehan Cagar Budaya dan Permuseuman, Bimbingan Teknis Juru Pelihara, Dialog Budaya Dan Tradisi, Pemeliharaan makam-makam bersejarah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi sejumlah 3, Jumlah naskah kuno yang dikaji sejumlah 1.

##### **c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan, Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Pembuatan Perda Tentang Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah pentas seni bukan asli Tegal sejumlah 2.

#### **17. Urusan Perpustakaan**

##### **a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pemasaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar, Pengembangan minat dan budaya baca, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah perpustakaan daerah sejumlah 1 perpustakaan, Jumlah perpustakaan desa sejumlah 36 perpustakaan, Jumlah perpustakaan instansi sejumlah 54 perpustakaan, Jumlah perpustakaan keliling sejumlah 2 perpustakaan, Jumlah perpustakaan rumah ibadah sejumlah 14 perpustakaan, Jumlah perpustakaan silang terpadu sejumlah 39.000 perpustakaan, Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah sejumlah 20.160 perpustakaan.

## **18. Urusan Kearsipan**

### **a. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, Bintek pengelolaan kearsipan bagi SKPD, Pembenahan arsip desa. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik sejumlah 54.

### **b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data, Lomba Tertib Arsip Desa. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik sejumlah 54.

### **c. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi.**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip sejumlah 54.

## **5.3 Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Kelautan Dan Perikanan**

#### **a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Sosialisasi Peraturan di Bidang Perikanan dan Kelautan, Operasional Fasilitas Asuransi Nelayan, Pelatihan Mesin Tempel Perahu, Pengadaan Sarana Prasarana Operasional Kelompok Masyarakat Pengawas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk sebanyak 2.

#### **b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Operasional Pembenihan Ikan di BBI Pangkah, Pemeliharaan kesehatan Ikan dan Pencegahan Penyakit, Demplot Budidaya Ikan air tawar, Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar, Perikanan



Budidaya dan Pengolahan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah produksi perikanan darat sebanyak 161.010 Kg.

c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah produksi perikanan laut sebanyak 1.006.155 Kg.

d. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan diseminasi teknologi di bidang perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu penyuluh perikanan yang memiliki kompetensi 90% dan jumlah penyuluhan perikanan sebanyak 15.

e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rp. 8.083.746.000 nilai produksi perikanan laut dan Rp. 1.514.155.000 nilai produksi perikanan darat, jumlah produksi perikanan darat 8.083.746 Kg dan jumlah produksi perikanan laut 1.006.155 Kg.

f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Restocking Ikan di Perairan Umum Kab. Tegal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu penanaman mangrove 119 Ha.

## **2. Urusan Pariwisata**

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pengembangan Produk Wisata, Pengadaan booklet, leaflet, sticker dan kalender meja pariwisata, Pendataan dan monitoring usaha pariwisata, Pembinaan jasa usaha kepariwisataan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu untuk memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara 263 orang.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan, Pemeliharaan kebersihan di Obyek wisata, Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata, Pembuatan taman di pos I O.W. Cacaban, Pembangunan talud dan drainase pos I O.W. Cacaban, Pembangunan Pos Pelayanan di O.W. Cacaban, Penanaman Tanaman Hias di Lingkungan Obyek Wisata Cacaban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah promosi pariwisata 3 kali, dan untuk memenuhi target kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 424.081 orang.

c. Program Pengembangan Kemitraan.

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database, Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata, Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu kampung wisata 4 kampung, dan promosi wisata melalui media massa 4 kali.

### **3. Urusan Pertanian**

#### **a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, Peningkatan kemampuan lembaga petani, Pemantauan produktifitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Penyediaan sarana untuk peningkatan pengetahuan/ ketrampilan masyarakat tani, Peningkatan kapasitas SDM penyuluh swadaya, Pengembangan UPJA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah system insentif pertanian 10, petani yang terlatih 50 orang, dan nilai tukar petani 111.

#### **b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, Peningkatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah pasar induk pertanian 1, promosi produk pertanian 4, sarana prasarana infrastruktur pertanian 20 dan jumlah system informasi potensi pertanian 2.

#### **c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Monitoring, evaluasi, pelaporan, Pengembangan pembenihan/ pembibitan, Penyediaan Sarana Pengendalian OPT, Pengelolaan Sistem Informasi Data Pertanian, Pengadaan sarana dan prasarana TTG. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu litbang TTG yang dimanfaatkan 3, jumlah penyuluhan teknologi tepat guna 4, dan jumlah rumah pintar petani 5 buah.

#### **d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah, Observasi Unggulan Potensi Daerah Pertanian/Perkebunan, Pembinaan gerakan penyusunan RDK/RDKK, Peningkatan infrastruktur pertanian, Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan sentra hortikultura. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah produksi jagung 116.344 ton, produksi bawang merah 26.341 ton, produksi kentang 4.656 ton, produksi cabe 5.028 ton, produksi kelapa 1.780 ton, produksi cengkeh 110 ton, produksi teh 56 ton, produksi tebu/gula 26.750 ton.

#### **e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Operasional pelaksanaan PUAP, Pengembangan penyuluhan pertanian (penyusunan Programa). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu penyuluh yang lulus sertifikasi sebanyak 48 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 165 orang.

#### **f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, Pengawasan Kesmavet. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu intensitas luas serangan OPT sebesar 1,14%.

g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengolahan Hasil Peternakan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan, Sentra Peternakan Rakyat, Operasional Pembinaan dan Pengembangan Peternakan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu produksi daging 5.803.587 kg, produksi susu 718.950 liter, produksi telur 4.949.109 kg.

i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penataan dan Pelayanan IB, Diseminasi Teknologi di Bidang Peternakan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah penerapan TTG peternakan 2.

j. Program Pengembangan Peternakan.

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Satwa di Lingkungan Kabupaten Tegal, Fasilitasi Program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah ternak terpelihara di taman satwa sebanyak 26 ekor.

#### **4. Urusan Perdagangan**

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Sosialisasi Kegiatan Metrologi Legal, Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat, Pembentukan Pasar Tertib Ukur, Operasional Kemetrolgian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah lembaga perlindungan konsumen sebanyak 5 lembaga, pengaduan konsumen yang ditangani 80% dan alat ukur yang ditera 80%.

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

Pelaksanaan program difokuskan pada Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kabupaten Tegal, Penyelenggaraan Pasar Murah, Mobilisasi serta Pembongkaran dan Pemasangan Konstruksi Relokasi Pedagang, Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pasar lelang daerah sejumlah 1 pasar, system informasi perdagangan sebanyak 1 sistem, pasar tradisional yang representative sebanyak 8 pasar, dan jumlah retribusi pasar sejumlah 26 pasar.

c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang kakilima dan Asongan, Pengelolaan TRASA, Pengadaan Papan Larangan / Papan Informasi untuk PKL. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kelompok pedagang kaki lima sebanyak 50 kelompok, kelompok pedagang kaki lima yang dibina sejumlah 12 kelompok, jumlah kawasan PKL dan asongan 25 dan kawasan PKL dan asongan yang dibina 15.

## **5. Urusan Perindustrian**

### **a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri, Pengembangan Desain Kemasan dan Fasilitas Peralatan Kemasan IKM, Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Bahan Bangunan Bagi IKM Kab. Tegal, Pelatihan Teknologi Proses Finishing Industri Meubel bagi IKM Kab. Tegal, Pelatihan Ketrampilan Industri Anyaman Bambu, Pelatihan Desain Kemasan bagi Industri Kecil Mengah Kab. Tegal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah pembinaan IKM sebanyak 40 IKM.

### **b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri Terkat dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Kluster Industri melalui Dekranasda, Pengolahan Limbah Industri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu ijin usaha IKM baru sejumlah 30, dan jumlah kerjasama IKM sebanyak 14 kerjasama.

### **c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong Daya Sang Industri Manufaktur, Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur, Pengembangan Kreatifitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat, Pembinaan Kemampuan Teknologi Batik, Penyusunan Dokumen Sistem Mutu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah produk SNI sebanyak 9 produk.

### **d. Program Penataan Struktur Industri.**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kluster Industri, Penerapan dan Pengembangan GKM (Gugus Kendali Mutu), Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, Pembinaan dan Monitoring Industri Mengah dan Besar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kluster industri yang aktif 14.

## **6. Urusan Ketrasmigrasian**

Program yang akan dilaksanakan adalah pengembangan wilayah transmigrasi dengan fokus pada kegiatan Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM, Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigran. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi target jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 62 kepala keluarga.

### **5.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

#### **1. Urusan Perencanaan**

##### **a. Program Pengembangan Data/Informasi;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan, Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan, Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal, Penyusunan Master Plan TIK Untuk Pembangunan, Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),

Profil Daerah , Penyusunan KLHS RPJMD 2019-2024. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah system informasi daerah yang aktif 3 sistem.

b. Program Kerjasama Pembangunan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pameran inovasi, fasilitasi penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi, pengembangan system inovasi daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu kerjasama pembangunan yang memanfaatkan 5 kerjasama.

c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan infrastruktur, pendampingan pengembangan kawasan wisata semedo, koordinasi program kota tanpa kumuh. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4 kebijakan.

d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, pendampingan sanitas, pendampingan pamsimas, penyusunan masterplan system drainase kawasan pantura. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan pelayanan SPAM dikota kecamatan sebanyak 16.

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public, penyelenggaraan musrenbang RKPD, Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan APBD, Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD, Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS, Fasilitasi penyusunan renja SKPD, Koordinasi perencanaan pembangunan daerah, Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan anggaran ( TEPR ), Penyusunan LKPJ Bupati akhrit tahun. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah dokumen yang ditetapkan tepat waktu sebanyak 2 dokumen.

g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) , Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah klaster yang difasilitasi sebanyak 25.

h. Program Perencanaan Sosial Budaya;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan , Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS), Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, koordinasi penanggulangan GAKY . Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah dokumen perencanaan social budaya yang diimplementasikan sebanyak 5.

## **2. Urusan Keuangan**

### **a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah, Koordinasi pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah (SIMDA), Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD, Pembinaan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah pada SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, Penyusunan perubahan APBD, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sosialisasi dan bintek SIMDA BMD, Pengelolaan website, Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu rata-rata waktu penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah 4 bulan, system informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah 1 sistem.

## **3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

### **a. Program Pendidikan Kedinasan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah peserta diklat kepemimpinan 145 orang.

### **b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD, Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS daerah, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, Analisis Kebutuhan Diklat, Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah, Penerbitan majalah kepegawaian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah peserta diklat teknis 200 orang, Jumlah peserta diklat fungsional 100 orang dan persentase jabatan struktural yang terisi 94%.

### **c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengangkatan dan Penempatan CPNSD, Pelayanan administrasi kenaikan pangkat PNS, Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, Seleksi penerimaan calon ASN, Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, Pengangkatan dan Pengisian JPT Pratama dan Administrasi ASN, Penataan sistem administrasi pensiun PNS, Pembinaan disiplin pegawai, Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas, Penataan sistem administrasi gaji PNS, Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas, Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS, Pengelolaan LHKPN, Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah, Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrasi dan Pelaksana, Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar, Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun, Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian, Penataan jabatan fungsional tertentu, Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian,

Penataan sistem ijin penggunaan gelar, Pembinaan dan pelestarian perkawinan, Penyusunan formasi PNSD, Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS, Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap, Seleksi Terbuka JPT Pratama dan Administrasi, Evaluasi Paska Diklat, Penilaian dan pemberian penghargaan kepada PNS teladan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah CPNS 579 orang, Jumlah PNS tugas belajar 5 orang, jumlah kasus kepegawaian 50 orang, jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin 20 orang, jumlah JPT Pratama, Administrasi dan Pelaksana yang dinilai kompetensinya 30 batch, jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan) 20 orang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor serta peningkatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja OPD.

## **5.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk Belanja Langsung setiap SKPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 serta untuk Belanja Tidak Langsung, Pagu Musrenbang per SKPD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran berikut ini :

## **BAB VI PENUTUP**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019. Dengan Visi **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera** “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” maka RKPD Tahun 2018 telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mendukung tercapainya visi tersebut.

RKPD Tahun 2018 disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, dengan memuat kebijakan umum dan arahan prioritas pembangunan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan capaian kegiatan tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2018 sangat ditentukan oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal.

Untuk mencapai semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut maka kata kunci yang harus dipedomani bersama adalah perlunya perencanaan yang inovatif dan pengendalian yang efektif terhadap semua pelaksanaan program dan kegiatan. Pada akhirnya inisiasi yang telah berjalan dengan mengedepankan slogan **“Satu Komitmen, Perencanaan untuk Penganggaran”** harus dapat dijalankan dengan konsisten.

Slawi, Agustus 2018  
BUPATI TEGAL

**ENTHUS SUSMONO**